

**ANALISIS KEMISKINAN DI KAWASAN PERBATASAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TESIS**

**RISSA NISFURIANTI  
NPM 0706299302**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
DEPOK  
DESEMBER 2008**

**ANALISIS KEMISKINAN DI KAWASAN PERBATASAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TESIS**

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi**

**RISSA NISFURIANTI  
NPM 0706299302**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH  
DEPOK  
DESEMBER 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : RISSA NISFURIANTI  
NPM : 0706299302

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Desember 2008

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas ridho dan karunia Allah SWT, akhirnya selesai juga penulisan laporan hasil penelitian tesis ANALISIS KEMISKINAN DI KAWASAN PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tesis ini tentunya tidak akan selesai jika tidak ada bimbingan, arahan, bantuan dan perhatian dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sahabat, orang – orang dilingkungan tempat penulis bekerja, sahabat, dan lingkungan dimana penulis menempuh pendidikan, terutama bimbingan dari pembimbing tesis, sehingga tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- (1) Bapak Dr. Sonny Harry B.Harmadi, selaku dosen, pembimbing dan penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, motivasi serta senantiasa mengarahkan penulis disela - sela kesibukannya;
- (2) Bapak Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto dan Bapak Dr. Jossy P. Moeis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberi masukan terhadap perbaikan tesis ini;
- (3) Bapak Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional CQ Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas selaku penanggungjawab program beasiswa bagi aparatur perencana di daerah, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program 13 bulan Bappenas di MPKP FE Universitas Indonesia;
- (4) Bapak Bupati Kabupaten Sambas selaku pembina kepegawaian di daerah, atas ijin dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan;
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis sejak tahap awal seleksi mengikuti pendidikan;

- (6) Kepala Bappeda Kabupaten Sambas (Ir. H. Hasanusi, MM), Kabid Sosbud (Drs. Agus Supardan), Kasubbid Pemerintahan dan Kependudukan (Ediyan, SE, MP), seluruh Staf Bidang Sosial Budaya dan staf UNFPA di Kabupaten Sambas atas dukungan "cepat pulangnya".
- (7) Bapak Rektor dan dan segenap civitas akademika Universitas Indonesia, khususnya Pimpinan MPKP, Guru Besar, para dosen, asisten dosen dan seluruh staf pada program MPKP FE UI, yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan selama proses pendidikan bagi penulis berlangsung;
- (8) Persembahkan khusus kepada para motivatorku, M. Amril Jihadi suamiku tercinta yang telah memberikan "restu" dan senantiasa mendukung penulis menyelesaikan pendidikan (maaf tidak bisa menepati janji 13 bulan), buah hati dan bidadari-bidadari kecilku tersayang Ithrar Zahara Khairunnisa dan Fairuz Raihanah, maafkan mama' yang tidak bisa melihat tumbuh kembang kalian dan selalu tidak ada saat kalian memerlukan mama' (I L U all), semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan melindungi keluarga kita;
- (9) Keluarga Besar Ayahanda Rasyidi Muktar dan Ibunda Idrawati Lazim yang telah mengasuh dan menjaga keluarga kecilku dengan sabar dan penuh kasih sayang dalam ketiadaanku disamping mereka;
- (10) Ayahanda Idris Haruna & Ibundaku tersayang Hamirah Djamaluddin atas doa yang tak tiada hentinya agar penulis cepat menyelesaikan pendidikan;
- (11) Adik – adik dan kakak – kakak ku yang selalu mendoakanku;
- (12) Rekan – rekan seangkatan MPKP XVII PS dan Kos Kenari 15 (Thx atas jalinan persaudaraan kalian) serta sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (13) Dan seluruh masyarakat Indonesia yang ikut menanggung hutang atas pembiayaan selama penulis mengikuti pendidikan di MPKP FE UI;

Akhirnya semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Dengan segala keterbatasan yang ada, tak ada gading yang tak retak, tak ada fikiran dan tindakan manusia yang sempurna demikian pula tulisan ini. Oleh karena itu mohon saran dan kritik yang positif untuk perbaikannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, Desember 2008  
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : RISSA NISFURIANTI  
NPM : 0706299302  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

***Analisis Kemiskinan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta,  
Pada Tanggal : 30 Desember 2008

Yang menyatakan ,



( RISSA NISFURIANTI )

## ABSTRAK

Nama : Rissa Nisfurianti  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Analisis Kemiskinan di Kawasan Perbatasan  
Provinsi Kalimantan Barat

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan eksplanatori berfokus pada kemiskinan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder di tiga lokasi penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak-Malaysia) maka permasalahan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komunitas di Kabupaten Sambas dapat diketahui, dimana pada kemiskinan rumah tangga daerah non perbatasan (Kartiasa) lebih miskin sedangkan dari sisi kemiskinan komunitas daerah perbatasan (Sajingan Besar) lebih miskin. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat digunakanlah data sekunder dari berbagai terbitan BPS dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi sebuah model regresi data panel yang diolah menggunakan *software evIEWS 4.1*. PDRB perkapita, angka harapan hidup, inflasi, listrik merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten perbatasan lebih miskin dari pada kabupaten / kota non perbatasan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dan *stakeholder* hendaknya menerapkan pola yang berbeda antara kawasan perbatasan dan non perbatasan dalam rangka penganggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Kata kunci :

Kemiskinan, Perbatasan, Sambas, Kalimantan Barat, Data Panel

## ABSTRACT

**Name** : Rissa Nisfurianti  
**Study Program** : Magister Of Planning and Public Policy  
**Title** : Poverty Analysis in Border Area of West Kalimantan Province

This research utilized descriptive and explanatory analysis focusing at poverty in border area of West Kalimantan Province. In order to have a comprehensive perspective on poverty at community and household level, the study examined primary and secondary data in three fields of study (Sajingan Besar, Kartiasa and Biawak-Malaysia), where household poverty in non border area (Kartiasa) is poorer rather than other. While in terms of community poverty, Sajingan Besar experienced the worst condition. To know the factors influencing poverty in West Kalimantan province used by secondary data from BPS and Local Government of West Kalimantan Province published become a model of panel data regression processed use the software eviews 4.1. PDRB per capita, a spark of life number, inflation, electricity represent the factor influencing poverty in West Kalimantan province where the border area is poorer than non border area. As recommendation from this research result is government and stakeholder should apply the different pattern between border area and non border area in order to reduce comprehensive poverty.

**Key words :**

Poverty, Border Area, Sambas, West Kalimantan, Panel Data



Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al 'ALAQ: 3,4,5).



**Persembahan Khusus**  
**Untuk Kesetiaan dan Pengorbanannya**  
*Amril, Zahra dan Hana*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	vi
<b>ABSTRAK</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	xi
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR TABEL</b>	xiii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xv
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Hipotesis	6
I.4 Tujuan Penelitian	6
I.5 Ruang Lingkup	7
I.6 Manfaat Penelitian	7
I.7 Sistematika Penulisan	8
I.8 Kerangka Berfikir	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1 Pembangunan Ekonomi dan Manusia	10
II.2 Kesejahteraan Masyarakat dan Kemiskinan	12
II.2.1 Teori Kesejahteraan Masyarakat dan Kriteria Keluarga Sejahtera	13
II.2.2 Kriteria Keluarga Sejahtera BKKBN	17
II.2.3 Konsep dan Ukuran Kemiskinan	18
II.2.3.1 Konsep Kemiskinan	19
II.2.3.2 Ukuran Kemiskinan	23
II.2.3.3 Kriteria Rumah Tangga Miskin pada Bantuan Lansung Tunai	25
II.3 Ekonomi Kawasan Perbatasan	26
II.3.1 Pembangunan Kawasan Perbatasan	29
II.3.1.1 <i>Core - Peripheral Approach</i>	29
II.3.1.2 <i>Cross Border Approach</i>	30
II.3.1.3 <i>A Mixed CPA - CBA Model</i>	31

II.4	Penelitian Terdahulu	31
II.4.1	Penelitian Kuspradoto Budi Jati	31
II.4.2	Penelitian Norman Hicks	32
II.4.3	Penelitian Tuan Guntur Hasibuan	32
II.4.4	Penelitian Fahma Sari Fatma	33
II.4.5	Penelitian Adi Apriyan Kuswara	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
III.1	Analisis Deskriptif	35
III.1.1	Populasi dan Sampel	36
III.1.2	Lokasi Penelitian	36
III.1.3	Ukuran Sampel serta Teknik Pengambilan Sampel	36
III.1.4	Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
III.2.	Analisis Eksplanatori	42
III.2.1	Ruang Lingkup, Rancangan Model dan Definisi Variabel	42
III.2.2	Metode Pengumpulan Data dan Tehnik Analisis	44
III.2.3	Pendekatan Model	46
<b>BAB VI</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>	
VI.1	Kabupaten Sambas	50
VI.1.1	Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sambas	50
VI.1.2	Letak dan Luas Wilayah	51
VI.1.3	Kependudukan	53
VI.1.4	Pendidikan	54
VI.1.5	Kesehatan	57
VI.1.6	Kondisi Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja	61
VI.1.7	Kondisi Keuangan dan Perekonomian	64
VI.2	Kecamatan Sajingan Besar	68
VI.2.1	Keadaan Geografis	68
VI.2.2	Kependudukan	69
VI.2.3	Pendidikan	70
VI.2.4	Kesehatan	72
VI.2.5	Sosial dan Ketenagakerjaan	74
VI.2.6	Pendapatan Regional	78
VI.3	Lundu Serawak Malaysia	80
IV.4	Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	82
<b>BAB V</b>	<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN</b>	
V.1	Karakteristik Kemiskinan	90
V.1.1	Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga	90
V.1.2	Karakteristik Kemiskinan Komunitas	108

V.2	Interaksi Antar Wilayah (Indonesia – Malaysia)	117
V.2.1	Interaksi dan Ketergantungan terhadap Negara Malaysia	117
V.2.2	Program Pengembangan dan Pembangunan Paloh – Sajingan	125
V.3	Strategi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas	128
V.3.1	<i>Core - Periphrreral Approach (CPA)</i>	128
V.3.2	<i>Cross Border Approach (CBA)</i>	129
V.3.3	Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Sambas	132
V.4	Fakror – faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat	141
V.4.1	Hasil Regresi Model	145
V.4.2	Analisa	147
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
VI.1	Kesimpulan	150
VI.2	Rekomendasi	151
VI.2	Keterbatasan Penelitian	152
<b>DAFTAR REFERENSI</b>		154
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Hal
3.1 Pengklasifikasian Skor Variabel	39
3.2 Karakteristik Kemiskinan Komunitas	40
3.3 Pengklasifikasian Skor Kriteria	41
4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2006	52
4.2 Penyebaran Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2006	54
4.3 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sambas Tahun 2006	56
4.4 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sambas Tahun 2006	58
4.5 Banyaknya Dokter dan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sambas	60
4.6 Jumlah Pnduduk Dan Penduduk Miskin Per Keeamatan Di Kabupaten Sambas Tahun 2001, 2003 dan 2005	62
4.7 Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pekerjaan Dan Jenis Kelamin	62
4.8 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 – 2006	65
4.9 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kab. Sambas Tahun 2006	67
4.10 Jumlah Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan Pada Perusahaan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Sambas	67
4.11 Luas Wilayah Kecamatan Sajingan Besar	68
4.12 Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Sajingan Besar 2006	69
4.13 Jumlah Penduduk Kec. Sajingan Besar Menurut Tingkat Pendidikan	72
4.14 Penduduk Miskin Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2005	74
4.15 Banyaknya Pelanggan Listrik Pln Menurut Golongan Pelanggan Di PLN Ranting Sajingan Tahun 2006	75
4.16 Mata Peneaharian Penduduk Sajingan Besar Tahun 2006	76
4.17 Luas Panen Serta Produksi Pertanian Dan Perkebunan	77
4.18 Tenaga Kerja Kecamatan Sajingan Besar yang Tercatat Bekerja di Malaysia	78
4.19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku & Harga Konstan 2000 Kee. Sajingan Besar	79
4.20 Perkembangan Pendapatan Regional Dan Angka Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2000 Kecamatan Sajingan Besar	80
4.21 Wilayah Administratif, Luas dan Jumlah Penduduk di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Tahun 2005	83
4.22 Sistem Pusat Pertumbuhan pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak – Sabah	86
4.23 Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Kawasan Perbatasan Indonesia Tahun 2002 – 2006	88
5.1 Interaksi dengan Negara Tetangga	119
5.2 Pengetahuan Responden terhadap Program Pembangunan Paloh Sajingan (PALSA)	125
5.3 Output Hasil Regresi	145
5.4 Pengaruh Perkembangan Variabel dan Signifikansi Statistik terhadap Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	146

## DAFTAR GRAFIK

No. Grafik	Hal	
4.1	Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Sambas Tahun 2006	53
4.2	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kabupaten Sambas Tahun 2006	55
4.3	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sambas Tahun 2006	59
4.4	Persentase Balita Menurut Penolong Proses Kelahiran Pertama dan Terakhir Selama Sebulan Yang Lalu Tahun 2006	61
4.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Sambas Tahun 2000 – 2006	63
4.6	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2006	66
4.7	Persentase Luas Desa terhadap Luas Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2006	69
4.8	Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kec. Sajingan Besar 2006	70
4.9	Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan	70
4.10	Banyaknya Tenaga dan Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Sajingan Besar	73
1.1	Persentase Kemiskinan di Beberapa Kawasan Perbatasan Indonesia 2002–2006	87
5.1	Persentase Kemiskinan Rumah Tangga Per Variabel	91
5.2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Rumah Tangga	92
5.3	Pendidikan Terakhir Kepala Rumah Tangga (KRT)	94
5.4	Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	95
5.5	Kemampuan Berobat ke Puskesmas	96
5.6	Kedatangan Tahunan Pendatang Asing	97
5.7	Kepemilikan MC	98
5.8	Sumber Air Minum	99
5.9	Persentase Anak Putus Sekolah yang Bekerja	100
5.10	Pendapatan Rata – Rata Perbulan	101
5.11	Frekuensi Membeli Pakaian dalam Setahun	102
5.12	Luas Lantai Rumah per Kapita	103
5.13	Jenis Lantai	104
5.14	Jenis Dinding Rumah	104
5.15	Jenis Atap Rumah	105
5.16	Jenis Penerangan Yang Digunakan	106
5.17	Kepemilikan Barang	107
5.18	Kepemilikan Asset	108
5.19	Karakteristik Kemiskinan Komunitas	109
5.20	Jenis Permukaan Jalan	112
5.21	Nilai Total Kemiskinan Komunitas	118
5.22	Produk Malaysia yang sering di Konsumsi	121
5.23	Produk yang biasa di Jual di Malaysia	122
5.24	Ketergantungan terhadap Negara Malaysia	123
5.25	Kendala Memasuki Perbatasan	124
5.26	Penggunaan Mata Uang	124
5.27	PDRB per Kapita Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2006	135

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Hal
1.1 Kerangka Berfikir	9
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sambas Tahun 2007	51
4.2 Skenario Pengembangan Pusat Agribisnis dan Agroindustri di Beberapa Titik Kuat Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat	84
5.1 Posisi Kabupaten Sambas di Internasional	132
5.2 Lokasi Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh di Kabupaten Sambas	133
5.3 Jarak dan Lokasi Perbatasan Kabupaten Sambas	135
5.4 Perspektif Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia di Aruk	136
5.5 Lokasi dan Persektif Pembangunan Industri LNG di Paloh	137
5.6 Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Semparuk	138
5.7 Prasasti dan Posisi Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah	140

## DAFTAR LAMPIRAN

No.
1. Pemberitahuan Penelitian Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2. Permohonan Kemudahan Perjalanan oleh Konsulat Malaysia
3. Permohonon Izin Masuk ke Wilayah Lundu
4. Foto – foto selama penelitian
5. Kuesioner Penelitian
6. Output Kompilasi Data Primer
7. Data yang dipergunakan dalam regresi model

## DAFTAR ISTILAH



AHH	: Angka Harapan Hidup
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BDC	: <i>Border Development Center</i>
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLK	: Balai Latihan Kerja
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
CBA	: <i>Cross Border Approach</i>
CIQS	: <i>Custom, Immigration, Quarantine and Security</i>
CPA	: <i>Core Peripheral Approach</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
GDP	: <i>Gross Domestic Bruto</i>
GBHN	: Garis – Garis Besar Haluan Negara
GLS	: <i>Generalized Least Square</i>
GNP	: <i>Gross National Bruto</i>
HDR	: <i>Human Development Report</i>
HPI	: <i>Human Poverty Index</i>
IHK	: Indeks Harga Konsumen
IKM	: Indeks Kemiskinan Manusia
INA	: Indonesia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Kapet	: Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu
KASABA	: Kalimantan – Sarawak – Sabah
KB	: Keluarga Berencana
KIS	: Kawasan Industri Semparuk
KK	: Kepala Keluarga
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KM	: Kilometer
KRT	: Kepala Rumah Tangga
KTM	: Kota Terpadu Mandiri
KUD	: Koperasi Unit Desa
LMS	: Rata – rata Lama Sekolah
LNG	: <i>Liquid Natural Gas</i>
LNRI	: Lembaran Negara Republik Indonesia
MCK	: Mandi Cuci Kakus
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MYS	: <i>Means Years Scholling</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OLS	: <i>Ordinary Least Square</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah



PALSA	: Paloh – Sajingan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRN	: Produk Domestik Regional Netto
PLB	: Pos Lintas Batas
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
PPLB	: Pos Pemeriksaan Lintas Batas
PSE	: Pendataan Sosial Ekonomi
PUS	: Pasangan Usia Subur
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RM	: Ringgit Malaysia
Rp	: Rupiah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RT	: Rumah Tangga
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Gubernur
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SPSS	: <i>Statistical Product and Service Solution</i>
Susenas	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
SWP	: Satuan Wilayah Pembangunan
TK	: Taman Kanak-kanak
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TV	: Televisi
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UUD	: Undang – Undang Dasar
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perbatasan langsung dengan negara lain paling banyak di dunia baik kawasan perbatasan darat maupun kawasan perbatasan laut. Dengan keberadaannya tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis wilayah darat dan laut di dunia Internasional. Pada umumnya kawasan perbatasan antar negara tersebut merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki arti vital dan strategis dari semua sudut pandang, baik pertahanan keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. Kawasan perbatasan juga dapat dikatakan sebagai titik tumbuh bagi perekonomian regional maupun internasional karena melalui kawasan ini kegiatan perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi dalam sistem pemerintahan yang sentralistis, kebijakan masa lalu pemerintah terhadap kawasan perbatasan hanya menganggap kawasan ini sebagai kawasan belakang yang merupakan kawasan yang rawan penyelundupan, penyusupan, dan kegiatan kriminal lainnya yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan negara, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah saat itu banya melalui pendekatan keamanan (*security belt approach*) dan tidak diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity Approach*). Dengan demikian kawasan ini memiliki karakteristik yang khas yang membedakan kawasan ini dengan kawasan lainnya. Karakteristik kawasan perbatasan dapat dilihat dari segi fisik dan infrastruktur, sosial dan ekonomi, sumberdaya alam serta pertahanan dan keamanan. (Alkadri dan Hamid, 2003)

Dari segi karakteristik fisik dan infrastruktur di kawasan perbatasan Indonesia umumnya memiliki eiri hilang/kaburnya patok batas negara dimana kawasan perbatasan darat merupakan daerah pedalaman yang terisolir dan terbelakang dengan kondisi alam yang sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan buruknya infrastruktur jalan (perhubungan dan transportasi), telekomunikasi, informasi, listrik dan air bersih serta prasarana dasar pendidikan dan kesehatan. Selain itu hutan disepanjang kawasan perbatasan umumnya adalah hutan alam

yang dikategorikan sebagai kawasan konservasi / hutan lindung. Sedangkan perbatasan laut berada di pulau – pulau kecil terluar dan sebagian tidak berpenghuni dan tidak adanya aktivitas membuat beberapa pulau terluar Indonesia hampir tenggelam akibat proses alami maupun perbuatan manusia. Akibat keterisoliran wilayah membuat kondisi sosial ekonomi kawasan perbatasan umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama dari segi pendidikan, penyebaran penduduk yang tidak merata bahkan diperbatasan laut khususnya di pulau-pulau terluar banyak yang tak berpenghuni. Arus keluar masuk tenaga kerja dan penduduk ke dan dari kawasan perbatasan antar negara cukup tinggi. (Hamid,dkk. 2001)

Penduduk perbatasan umumnya memiliki hubungan keluarga dengan penduduk di kawasan perbatasan negara tetangga. Akan tetapi memiliki tingkat kesenjangan pendapatan, akses dan layanan prasarana dan sarana dasar yang cukup tinggi (khususnya perbatasan Malaysia). Hal ini menyebabkan aktivitas perdagangan ilegal dan penyelundupan di kawasan perbatasan cukup tinggi dimana nilai tambah produk terutama yang berasal dari sumberdaya alam masih sangat kecil. Mata pencaharian penduduk di kawasan perbatasan sebagian besar adalah petani, pekebun, dan nelayan. Sistem perdagangan antar penduduk yang bersifat tradisional karena belum memadainya infrastruktur perekonomian seperti bank maupun pasar mengakibatkan rendahnya aktivitas dan efektivitas ekonomi masyarakat. Dengan pendapatan yang rendah sehingga sebagian besar dari pendapatan itu hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Alokasi dana pembangunan kawasan perbatasan yang dirasakan masyarakat hingga kini juga masih kecil dan investasi di kawasan ini juga rendah. (Gafur, 2006)

Karakteristik sumberdaya alam kawasan perbatasan umumnya adalah kawasan yang kaya akan potensi sumberdaya alam, seperti pertambangan, kehutanan, pertanian/perkebunan, perikanan, keindahan alam dan keanekaragaman hayati, akan tetapi pemanfaatan relatif kurang terkendali, terutama eksploitasi hutan dan kawasan lindung di beberapa wilayah dilakukan secara ilegal. Pengelolaan sumberdaya alam juga belum baik sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan. (Hamid,dkk. 2001).

Sedangkan karakteristik pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan diantaranya terdapat kegiatan penyelundupan barang dan manusia serta rentan terhadap persoalan yang terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia. Selain itu rendahnya supremasi hukum akibat sangat kecilnya tenaga penegak hukum terutama polisi perbatasan membuat penduduk di kawasan ini lebih sering mempergunakan hukum adat dibandingkan hukum positif. Informasi dan komunikasi dari negara tetangga juga lebih dominan dikawasan ini, sehingga tak heran jika masyarakat lebih mengenal negara tetangga di banding negaranya sendiri. (Hamid,dkk. 2001).

Seiring dengan perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia dengan melihat kenyataan ketimpangan yang sangat besar antara kawasan perbatasan Indonesia (Kalimantan khususnya) dengan negara tetangga (Malaysia) terjadi perubahan paradigma tentang kawasan perbatasan dari yang hanya sebagai halaman belakang menjadi beranda depan negara. Hal tersebut tercermin dalam GBHN 1999 – 2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) yang telah mengamanatkan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan menganut prinsip desentralisasi dan otonomi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) tahun 2004 - 2009 juga telah menekankan pengembangan wilayah perbatasan melalui beberapa strategi yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis dalam berhubungan dengan negara tetangga.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2006 juga telah mengamanatkan pengembangan wilayah perbatasan yang umumnya merupakan daerah tertinggal yang perlu mendapat prioritas pembangunan. Arah kebijakan dalam tahun 2006 sesuai RKP tersebut antara lain mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah perbatasan yang strategis dan cepat tumbuh, meningkatkan keberpihakan

pemerintah untuk mengembangkan wilayah perbatasan menjadi kawasan yang cepat tumbuh dan mensejajarkan diri dengan daerah lain, kebijakan pembangunan yang *outward looking*, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga serta orientasi pembangunan menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan berwawasan lingkungan.

Era globalisasi dimana hubungan antar negara semakin transparan dan tingkat persaingan ekonomi yang sangat kompetitif akibat perdagangan bebas dapat membawa dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat perbatasan Kabupaten Sambas. Dampak positifnya adalah kebutuhan barang dan jasa di daerah mudah terpenuhi karena tanpa hambatan bea masuk, peluang pasar terbuka bagi produk daerah, investasi akan masuk ke daerah, dan tenaga kerja dapat terserap sehingga produktivitas meningkat dan pengangguran dapat berkurang. Sedangkan negatif globalisasi bagi masyarakat perbatasan adalah jika daerah ini belum siap menghadapi pasar bebas maka masyarakat setempat hanya akan menjadi penonton di daerah sendiri tanpa merasakan dampak pembangunan yang dihasilkan.

Dengan demikian permasalahan kemiskinan merupakan problem pembangunan yang sangat rumit karena saling berkaitan dengan berbagai faktor lain yang sangat mempengaruhinya seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, akses /kepemilikan sumberdaya, penghasilan, dan lainnya, yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga membentuk apa yang sering dikenal sebagai "Lingkaran Setan Kemiskinan" (*Vicious Circle of Poverty*). Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, dan ideologi.

Berdasarkan gambaran – gambaran diatas diasumsikan kondisi kawasan perbatasan di Kalimantan Barat yang masih tertinggal dan terbelakang pembangunannya dari kawasan non perbatasan dengan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dan segala macam permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapinya merupakan hal yang mendasari peneliti untuk mengangkat tema

kemiskinan di kawasan perbatasan dalam penelitian ini dengan judul Analisis Kemiskinan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

## **I.2 RUMUSAN MASALAH**

Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Perlu terobosan / strategi yang menyentuh akar permasalahan agar kemiskinan dapat teratasi. Berbagai program/kegiatan telah dilakukan dalam rangka mengurangi penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Pengembangan dan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Pemberdayaan Fakir Miskin, dan lainnya.

Walaupun telah banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan akan tetapi kenyataannya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas sebagai salah satu kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat masih relatif tinggi. Pada tahun 2002 penduduk miskin di Kabupaten Sambas sebesar 13,66% dan meningkat menjadi 16,77% di tahun 2006. Di sisi lain kajian tentang kemiskinan di kawasan perbatasan juga masih sangat kurang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji kemiskinan di kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komunitas di kawasan perbatasan, bukan perbatasan Kabupaten Sambas dan di Malaysia?
2. Seberapa besar interaksi kawasan perbatasan dan bukan perbatasan Kabupaten Sambas terhadap daerah tetangga (Biawak – Malaysia)?
3. Strategi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas dalam penanggulangan kemiskinan diwilayahnya? serta
4. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat, termasuk daerah perbatasan?

### **I.3 HIPOTESIS**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. Terjadi perbedaan karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komunitas akibat perbedaan kondisi geografis dan prasarana – sarana dimasing-masing kawasan.
2. Interaksi kawasan perbatasan akan lebih besar terhadap daerah tetangga dibandingkan kawasan yang bukan perbatasan.
3. Pembentukan pusat – pusat pertumbuhan baru merupakan salah satu strategi pemerintah Kabupaten Sambas sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sambas.
4. Tingkat perekonomian yang tereermin dari pendapatan perkapita dan inflasi, tingkat pendidikan dan kesehatan, serta kondisi geografis dan tehnologi diduga merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat dan perbatasannya.

### **I.4 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik kemiskinan rumah tangga dan kemiskinan komunitas di kawasan perbatasan dan kawasan bukan perbatasan Kabupaten Sambas.
2. Mengetahui seberapa besar interaksi kedua kawasan di Kabupaten Sambas terhadap negara tetangga.
3. Mengetahui strategi yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sambas dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat dan daerah perbatasannya.

## **I.5 RUANG LINGKUP**

Untuk membatasi cakupan permasalahan agar tidak menyimpang dari tujuan yang dicapai, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi kemiskinan mengacu pada beberapa ukuran indikator kemiskinan dari BPS pada Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE05) dengan menggunakan variabel mata pencaharian, pendapatan, tingkat pendidikan dan putus sekolah, pelayanan kesehatan, kepemilikan aset dan barang, kondisi rumah, sumber penerangan rumah, sumber air minum, dan kepemilikan wc sebagai indikatornya.
2. Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai dan survei sejumlah rumah tangga di kecamatan Sajingan Besar, desa Kartiasa dan di kampung Biawak (Lundu Serawak, Malaysia) untuk mendapatkan data – data primer tentang kemiskinan di lokasi penelitian, potensi yang dimiliki serta seberapa besar ketergantungan penduduk kawasan perbatasan terhadap negara tetangga (Malaysia).
3. Data sekunder seperti Data Susenas, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, PDRB, Profil Desa, Potensi Desa dan data – data terkait menggunakan data tahun 2002 hingga 2006 sesuai dengan ketersediaan data dari BPS, Bappeda, Badan Pengembangan Paloh Sajingan, dan Dinas / Unit kerja lain yang terkait.

## **I.6 MANFAAT PENELITIAN**

Dengan mengetahui kondisi, karakteristik, permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kemiskinan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas, maka :

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka mengambil kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kab. Sambas agar visi Kabupaten Sambas 2006 – 2010 untuk mensejahterakan masyarakatnya tereapai sebagai esensi dari kehidupan bernegara.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberi masukan bermanfaat untuk kerjasama pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.



## **I.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas, maka penulis akan menyusun penelitian ini dalam 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN** : berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA** : mencakup Tinjauan Teori Pertumbuhan Ekonomi, Konsep Kesejahteraan dan Kemiskinan termasuk ukuran Kemiskinan, serta Ekonomi Kawasan Perbatasan
- BAB III METODE PENELITIAN** : memberikan gambaran tentang metodologi yang digunakan dan analisa deskriptif dari berbagai data yang diperoleh di lapangan maupun data kuantitatif dari berbagai sumber bacaan.
- BAB IV GAMBARAN UMUM** : meliputi Gambaran umum tentang wilayah Kabupaten Sambas, Kecamatan Sajingan Besar (kecamatan Perbatasan), Desa Kartiasa sebagai daerah bukan perbatasan serta sekilas tentang wilayah Malaysia.
- BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : berisikan hasil – hasil penelitian yang ditemukan dilapangan dan dianalisa dengan menggunakan metodologi yang dianggap tepat sebagaimana dibahas pada bab III
- BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI** : mencakup kesimpulan dan rekomendasi kebijakan sesuai hasil analisa dan pembahasan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan beberapa teori maupun konsep yang dianggap berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### II.1 Pembangunan Ekonomi dan Manusia

Pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomii awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto (GNP = *Gross National Product*) maupun Produk Domestik Bruto (GDP = *Gross Domestic Bruto*) tahunan pada tingkat tertentu untuk lebih tinggi. Selain GNP/GDP ukuran lain untuk mengukur kemajuan pembangunan adalah tingkat pendapatan per kapita (*income per capita*) atau GNP per kapita. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkatan dan laju pertumbuhan GNP per kapita riil (pertumbuhan GNP per kapita dalam satuan moneter dikurangi dengan tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur sejauhmana kemakmuran ekonomis dari suatu bangsa secara keseluruhan, yaitu seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia bagi rata – rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Dengan demikian pembangunan dalam konteks tradisional (tahun 1970-an) banya dipandang sebagai fenomena ekonomi dimana tinggi rendahnya kemajuan pembangunan hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP baik secara keseluruhan maupun per kapita yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi alain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil –hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata (*trickle down effect*). (Todaro, 2004).

Seiring dengan perkembangan zaman ukuran pembangunan juga mengalami perluasan arti. Hal ini berdasarkan pengalaman dunia ketiga (negara berkembang) yang berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi sesuai target mereka tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Bank Dunia melalui *World Development Report* pada tahun 1991 menyatakan dengan tegas bahwa tantangan pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan terutama negara – negara yang paling miskin kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual dan pelestarian ragam kehidupan budaya (World Bank, 1991).

Pembangunan yang pada awalnya hanya dilihat hanya sebagai fenomena ekonomi pada akhirnya juga ukur dengan indikator – indikator sosial non ekonomis sehingga menjadi sebuah konsep pembangunan yang menyeluruh. Indikator – indikator sosial seperti pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal penting sebagai tujuan pembangunan mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal utama untuk mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Analisis atas investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia (*human capital*). Pendidikan dan kesejahteraan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan akan tetapi pendekatan manusia berfokus kepada kemampuan tidak langsung untuk mendapatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan (Todaro, 2004).

Bahkan tak hanya pendidikan dan kesehatan yang berperan penting dalam pembangunan. *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990, menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmupengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Diantara berbagai pilihan tersebut yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan politik, jaminan atas hak asasi, dan harga diri. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatakan kemampuan manusia, seperti meningkatkan

pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya -untuk bersenang-senang, untuk melakukan kegiatan produktif, atau untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, sosial dan politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan berbagai aspek tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada HDR 1990 ini disusun dari pendapatan nasional (sebagai pendekatan dari standar hidup) dan dua indikator sosial, yaitu angka harapan hidup (ukuran dari lamanya hidup) dan angka melek huruf usia dewasa (ukuran dari pengetahuan). Sedangkan pada tahun 2004 dalam membuat Laporan Pembangunan Manusia Indonesia BPS-Bappenas-UNDP menggunakan indikator MYS (*Mean Years Schooling*) sebagai pengganti *enrollment* karena dapat menunjukkan indikator dampak yang lebih baik daripada *enrollment* yang biasa dianggap sebagai indikator proses. Oleh karenanya MYS cenderung untuk lebih stabil daripada angka *enrollment* yang cenderung berfluktuasi. pembangunan ekonomi mencakup hal yang lebih luas dari sekedar peningkatan produksi yaitu perubahan pada komposisi produksi, perubahan pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Venus, 2006).

## II.2. Kesejahteraan Masyarakat dan Kemiskinan

Konsep pembangunan yang menyeluruh tak bisa dilepaskan dari konsep kesejahteraan masyarakat dimana kesejahteraan itu sendiri akan selalu berhadapan dengan kemiskinan. Menurut Tambunan (2001), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan, mulai dari produktivitas tenaga kerja, tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air bersih, dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, budaya atau

tradisi, politik, bencana alam, dan peperangan. Sebagian besar dari faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Sebagai contoh inflasi, tingkat inflasi yang rendah memiliki distribusi pendapatan yang cenderung lebih merata karena daya beli masyarakat akan sama terhadap suatu barang dan jasa. Diperkuat dengan penelitian Eastrely dan Fisher (2001), Komer dan Romer (1998), Beherman, Birdsall, dan Szekely (2001), serta Lundbergh dan Squire (2003) menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi makro akan berdampak negatif terhadap kemiskinan, dimana inflasi akan meningkatkan kemiskinan. (Jati, 2006).

Penelitian lain mengenai pengaruh sosialdemografis terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dilakukan oleh Balisacan,dkk (2002). Dengan menggunakan variabel-variabel lama pendidikan, tingkat melek huruf (sebagai proksi untuk kemampuan baca tulis huruf latin), jalan (mewakili akses ke pasar), minyak, gas, dan sumber daya mineral (mewakili kekayaan alam), insentif (nilai tukar), listrik (proksi untuk teknologi), dan akses kepada lembaga keuangan, mencoba meneliti pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (20 persen penduduk berpendapatan rendah). Studi dilakukan terhadap data lintas seksi 285 kecamatan di 26 propinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tingkat pendidikan, insentif, dan akses kepada teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat miskin, sedangkan variabel-variabel kemampuan baca tulis, akses kepada lembaga keuangan, jalan, dan kekayaan sumber daya alam tidak berpengaruh terhadap masyarakat miskin secara signifikan. Meskipun kemampuan baca tulis, akses kepada lembaga keuangan, jalan, dan kekayaan alam, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. (Jati, 2006).

### **II.2.1 Tinjauan Teori Kesejahteraan Masyarakat dan Kriteria Keluarga Sejahtera**

Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*

*fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Amartya Sen dalam bukunya *Rationality and Freedom* (dalam Masjkuri, 2006). Sen mengemukakan pentingnya pengembangan potensi manusia. Bagi Sen, ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang melekat dalam diri manusia, dan memperbanyak opsi yang terbuka untuk mereka, ketimbang berusaha memproduksi lebih banyak barang atau memahami bagaimana cara untuk memaksimalkan kepuasan. Konsekuensinya, dia sangat kritis terhadap ekonomi kesejahteraan tradisional yang menganggap bahwa perdagangan bebas dapat memaksimalkan kesejahteraan individu yang rasional. Sen menolak asumsi rasionalitas manusia dan juga menolak pareto optimal sebagai kriteria bagi kesejahteraan ekonomi. Inti asumsi rasionalitas adalah keyakinan bahwa individu adalah orang yang memaksimalkan kepuasan secara rasional.

Menurut Sen bagian penting dari kesejahteraan manusia adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai orang dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut. Hal ini berarti bahwa ketika konsumen membeli barang tapi tidak punya pilihan, kesejahteraan konsumen dapat ditingkatkan dengan memberi lebih banyak pilihan, bahkan jika konsumen pada akhirnya tidak mendapatkan lebih banyak barang. Sen menerapkan pendekatan kemampuan pada bidang pengembangan ekonomi. Usaha ini dimulai dengan membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi.

Dengan demikian menurut Sen pertumbuhan berarti memproduksi lebih banyak barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang ini; sedangkan perkembangan meliputi "pengembangan kemampuan manusia". Pertumbuhan ekonomi menaikkan pendapatan per kapita. Perkembangan ekonomi meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Ini berarti membuat orang menjadi bagian dari komunitas dan memungkinkan mereka muncul di publik tanpa merasa malu karena mereka akan dianggap sebagai individu yang berguna.

Masih menurut Sen (Masjkuri, 2006) pertumbuhan dan perkembangan sering berjalan bersama. Tetapi seperti yang diilustrasikan oleh pengalaman negara-negara seperti China, Sri Lanka, dan Costa Rica, kebijakan publik yang tepat dapat meningkatkan kemampuan dan peluang meskipun angka pertumbuhan ekonominya rendah. Ketika negara sedang berkembang harus memutuskan apakah harus memfokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi ataukah pengembangan kemampuan, Sen berpendapat negara seharusnya memfokuskan pada tujuan yang nyata, yaitu pengembangan potensi manusia. Lagi pula, kesuksesan perkembangan ekonomi seharusnya dinilai berdasarkan meningkatnya tingkat warga yang bebas buta huruf dan harapan hidup ketimbang berdasarkan pertumbuhan dalam produksi atau tingkat pendapatan.

Sedangkan Nicholson (1992) dalam Masjkuri (2006) mengemukakan prinsipnya mengenai kesejahteraan sosial; yaitu keadaan kesejahteraan sosial maksimum tercapai bila tidak ada seorangpun yang dirugikan. Sementara itu Bornstein dalam Swasono (2004), mengajukan "*performance criteria*" untuk *social welfare* dengan batasan-batasan yang meliputi ; *output, growth, efficiency, stability, security, inequality, dan freedom*, yang harus dikaitkan dengan suatu *social preference*. Demikian juga dikatakan oleh Etzioni A (1999) bahwa *privacy is a societal licence*, yang artinya *privacy* orang-perorangan adalah suatu *mandated privacy* dari masyarakat, dalam arti *privacy* terikat oleh kaidah sosial. Dengan demikian kedudukan individu adalah sebagai makhluk sosial yang harus ditonjolkan dalam ilmu ekonomi utamanya dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan menuju kesejahteraan masyarakat.

Konsep lain mengenai kesejahteraan (*welfare*) merujuk pada Segal dan Brzuzy (1998) dalam Suud (2006) yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Sedangkan menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa :

.... suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: pertama, setinggi apa masalah – masalah sosial dikendalikan,



kedua, seluas apa kebutuhan – kebutuhan dipenuhi dan terakhir setinggi apa kesempatan – kesempatan untuk maju tersedia. Ketiga unsur ini berlaku bagi individu – individu, keluarga – keluarga komunitas – komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Suharto (2006) merangkum berbagai pendapat ahli mengenai kesejahteraan sosial, dimana dikemukakan bahwa pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna, yaitu kondisi sejahtera (*well-being*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; pelayanan sosial; tunjangan sosial dan proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dalam Suharto (2006) pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan berupa kondisi sejahtera dan pelayanan sosial. Dan tunjangan sosial. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

## II.2.2 Kriteria Keluarga Sejahtera BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggolongkan kesejahteraan keluarga menjadi 5 (lima) golongan; yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II dan keluarga sejahtera tahap III dan Keluarga Sejahtera tahap III plus. Secara spesifik kriteria keluarga pra sejahtera maupun yang sejahtera masing – masing golongan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Keluarga Pra – Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan minimal yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, dimana keluarga tersebut **tidak dapat memenuhi minimal** satu ketentuan pada 6 kriteria keluarga sejahtera tahap I.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I terdiri dari 6 (enam) kriteria yaitu anggota keluarga melaksanakan ibadah agama, pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah / pergi / bekerja / sekolah, bagian lantai yang terluas bukan dari tanah, anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin her KB dibawa ke sarana kesehatan.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II meliputi 9 (sembilan) kriteria diantaranya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur paling kurang sekali seminggu lauk daging / ikan / telur, setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru, luas lantai paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni, tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas, ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap, anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bisa baca tulis latin, anak umur 7 – 15 th. Bersekolah, Pasangan Usia Subur (PUS) dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi
4. Dan kriteria Keluarga Sejahtera Tahap III meliputi keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, sebagian penghasilan keluarga ditabung, keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi, keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal, keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan, keluarga

memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio, anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.

5. Serta keluarga sejahtera tahap III plus dengan kriteria keluarga secara teratur memberikan sumbangan, ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi masyarakat

### II.2.3 Konsep dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang ada sepanjang zaman. Seiring perjalanan waktu definisinya pun semakin berkembang mengikuti standar kualitas hidup manusia yang semakin membaik. Banyaknya definisi tentang kemiskinan dikarenakan kemiskinan meliputi semua aspek kehidupan manusia secara internal maupun eksternal dari seorang individu miskin.

Dalam publikasinya dengan judul *Understanding Poverty*, World Bank (2005) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki banyak wajah dan pengertian. Dari semua wajah itu, World Bank menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana orang ingin lepas darinya (World Bank, 2005). Dalam publikasi yang lain, yaitu *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari kehidupan yang layak. Miskin adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang, dan kurang pendidikan. Menurut definisi ini, orang" menjadi miskin bukan karena kelemahan mereka, namun karena hal itu terjadi di luar kendali mereka. Biasanya, karena kebijakan yang buruk dari institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhatikan suara mereka (World Bank, 2001).

Selanjutnya dalam *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*, World Bank mendefinisikan masyarakat miskin sebagai mereka yang hidup dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya di bawah garis tertentu, seperti di bawah \$1 atau \$2 per hari, atau di bawah level yang ditetapkan negara masing-masing (World Bank, 2004).

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk dalam kategori miskin. Namun menurut World Bank, setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan dan pendidikan;

2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan pada institusi negara dan masyarakat;
3. Rentan terkena guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan untuk menanggulangnya.

### II.2.3.1 Konsep Kemiskinan

Secara sederhana kemiskinan dapat dibedakan dari sudut pandang pengukuran dan penyebab. Dari segi pengukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Sedangkan dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural.

- **Kemiskinan Relatif.** Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Dikatakan subjektif karena seringkali standar kehidupan di satu komunitas/negara berbeda dengan komunitas/negara lain. Dengan kata lain kemiskinan relatif terjadi bila kesejahteraan berada di bawah rata-rata populasi yang secara umum biasanya dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu 40% dari total populasi sebagai golongan termiskin, 40% golongan menengah dan 20% golongan kaya. Kemiskinan relatif biasanya difokuskan pada distribusi pendapatan dan sering kali digunakan untuk membantu menentukan program sasaran yang ditujukan untuk membantu penduduk miskin (BPS, 2005).

Kemiskinan relatif juga disebut sebagai kesenjangan atau ketimpangan yang diukur dengan menggunakan Indeks Gini. Indeks gini memiliki angka 0 (nol) yang berarti pemerataan sempurna dan hingga 1 (satu) atau ketidakmerataan sempurna. Jadi semakin kecil Indeks Gini ketimpangan juga semakin kecil. Arsyad (2004), mengkalsifikasikan indeks gini yang bernilai antara 0,50 – 0,70 sebagai ketidakmerataan tinggi, 0,36 – 0,49 sebagai pemerataan sedang dan 0,20 – 0,35 sebagai ketidakmerataan rendah. Dengan menggunakan kriteria ini, maka dapat dipastikan bahwa akan selalu ada penduduk miskin dalam suatu wilayah. namun begitu dengan adanya

asumsi pendapatan rata-rata masyarakat yang terus meningkat maka, garis kemiskinan juga terus meningkat. Disini pengukuran garis kemiskinan tidak menjadi fokus, karena lebih berorientasi pada upaya untuk memperkecil disparitas pendapatan antara mereka yang berada di bawah (miskin) dan mereka yang makmur (*better-off*). Meskipun demikian, sebenarnya ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Beberapa orang mengeluhkan bahwa mereka merasa terkueil dan rendah diri di dalam pergaulan dengan orang yang "tidak miskin", meskipun secara absolut, sebenarnya orang tersebut tidak termasuk ke dalam kategori miskin (Harmadi, 2007).

- **Kemiskinan Absolut.** Jika status kesejahteraan seseorang yang secara materi berada di bawah suatu batas minimal tertentu (ketidakmampuan untuk meneukupi kebutuhan pokok minimum) dikenal sebagai kemiskinan absolut. Batas minimal / kebutuhan pokok minimum tersebut dinyatakan sebagai **garis kemiskinan**, yang dihitung berdasarkan nilai uang dari semua barang dan jasa (kecuali barang publik) sebagai standar hidup minimal. Garis kemiskinan berguna untuk mengklasifikasikan individu atau rumah tangga miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan absolut juga sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau memperkirakan dampak dari suatu proyek/program terhadap kemiskinan (World Bank, 2007).

Ukuran kemiskinan yang dipergunakan oleh Bank Dunia terbagi menjadi PPP 1 dan 2 dollar AS per hari. Nilai tukar PPP (*purchasing power parity*) menunjukkan jumlah satuan mata uang suatu negara yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sama di negara itu, yang nilainya sama dengan nilai 1 (satu) dollar AS yang dibelanjakan di Amerika Serikat. Garis kemiskinan PPP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan tingkat inflasi relatif, dengan menggunakan data indeks harga konsumen (IHK).

Sedangkan BPS menggunakan garis kemiskinan dengan ukuran makanan (2100 kalori/hari/orang) dan non makanan atau setara dengan 1,56 dollar PPP. Dengan demikian kemiskinan absolut dapat dikatakan mencerminkan

suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seseorang untuk hidup secara layak. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu dalam bentuk jumlah maupun nilai pendapatan (uang). Namun pengukurannya juga dapat mengacu pada jumlah konsumsi kalori, dimana kriteria pengukuran seperti ini dikenal sebagai pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar.

Pendekatan biologis yang diajukan Rowntree mendefinisikan seseorang atau suatu keluarga termasuk ke dalam kategori 'kemiskinan primer' jika jumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk dapat memelihara 'efisiensi fisik' guna mempertahankan keberlangsungan hidup (*survival*)-nya secara normal. Pendekatan biologis ini menjadi karakteristik berbagai studi yang menekankan kemiskinan pada masalah kelaparan. Oleh karena itu, definisi kemiskinan umumnya diukur dengan pendapatan minimum. Tentunya tidak semua pihak setuju dengan pendekatan ini. Alasan pertama ialah bahwa kebutuhan nutrisi setiap orang tidak sama, misalnya tergantung pada iklim dan cuaca maupun pola hidup dan kebiasaan aktifitas. Selain itu, kandungan nutrisi setiap komoditas pangan tidak sama, bahkan di beberapa wilayah ditemukan kesulitan untuk memperoleh bahan pangan. Beberapa pihak berargumen bahwa seharusnya kemiskinan tidak hanya diukur dari pendekatan biologis saja, tetapi juga ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) non-pangan. Konsep ini mencakup kebutuhan perumahan (papan), dan pakaian yang memadai, serta kemampuan akses terhadap berbagai pelayanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, transportasi umum, fasilitas kesehatan, dan pendidikan (Harmadi, 2007).

Tokoh yang mengusung kemiskinan relatif dan absolut adalah Adam Smith dan Charles Valentine yang memandang manusia sebagai makhluk rasional, dimana kemiskinan terjadi akibat berbagai distorsi pasar (diskriminasi, ketimpang pendapatan, dan sebagainya) (Moeis, 2008)

- **Kemiskinan Struktural, Kultural dan Alamiah.** Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan (kemiskinan dari generasi ke generasi akibat struktur yang eksploitatif dan tidak adil (tukar menukar komoditas, pembayaran jasa pekerja, pungutan yang memberatkan rakyat kecil, dan sebagainya). Kemiskinan ini ditelaah dari anggapan bahwa sistem yang ada di masyarakat mengalami kesalahan atau kegagalan. Secara sederhana hal itu diartikan sebagai adanya suatu kondisi dimana suatu lapisan masyarakat menjadi miskin sementara lapisan masyarakat lainnya berada pada tingkat yang jauh lebih baik. Sistem sosial ekonomi yang berlaku memungkinkan terkonsentrasinya kekuasaan dan sumberdaya pada pihak tertentu yang berakibat terhambatnya peluang pihak lain untuk ikut mengakses. Contoh kondisi ini misalnya terlihat dari adanya ketimpangan atau kesenjangan antara desa dan kota, antar lapisan masyarakat, antar jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tokoh yang mendukung perspektif ini adalah Karl Marx dan Dos Santos. (Moeis, 2008)

Kemiskinan kultural muncul karena tuntutan tradisi / adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta pesta adat lainnya. termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke masa depan jadi dapat dikatakan penyebab kemiskinan kultural adalah faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan (BPS, 2007).

Menurut Azhari (1999 : 32) Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena perkembangan tingkat teknologi yang sangat rendah. Termasuk didalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah- tengah sumber daya alam yang tetap.

Pendekatan ini dapat dilihat dari sisi individu dan lingkungan fisiknya sebagai objek pengamatan yang menimbulkan masalah kemiskinan. Menurut pendekatan ini kemiskinan dapat terjadi karena adanya kesalahan atau kegagalan dari sisi individu dan dari lingkungan fisik dimana individu

miskin itu berada. Dari sisi individu, kemiskinan dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya sifat malas, rendahnya keterampilan yang dimiliki, kurangnya kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, dan rendahnya kemampuan untuk mengatasi masalah yang muncul disekitarnya.

Kemiskinan alamiah dari sisi individu secara sederhana dapat terjadi karena faktor-faktor biologis, psikologis dan kelemahan sosialisasi yang dimiliki oleh seorang individu miskin. Semua ketidakmampuan itu selanjutnya membuat seseorang akan sulit untuk melakukan usaha atau bekerja guna memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk perbaikan didalam kondisi hidupnya.

Sedangkan pendekatan kemiskinan alamiah yang melihat dari sisi lingkungan fisik beranggapan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh lingkungan fisik (alam) yang tidak mendukung. Beberapa contoh dari kondisi itu diantaranya: tanah yang tidak subur serta topografi wilayah yang tidak menguntungkan, kepadatan penduduk yang melebihi daya dukung lingkungan alamnya, serta adanya kelangkaan sumberdaya. Pandang seperti ini dapat dikategorikan pada perspektif konservatif dalam memandang kemiskinan. Tokoh dari perspektif ini adalah Oscar Lewis dan Boeke (Moeis, 2008).

### II.2.3.2 Ukuran Kemiskinan

Ada banyak ukuran kemiskinan yang biasanya digunakan diantaranya Indeks Foster-Greer-Thorbecke (*Headcount Index*, *Poverty Gap Index* dan *Poverty Severity Index*) Indeks Sen (*Sen Index*) serta Indeks Sen-Shorrocks-Thon (*SST Index*). Indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT) terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a Indeks Angka Kemiskinan (*poverty headcount index*, P0). Indeks ini adalah angka jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan. Terkadang indeks ini juga disebut sebagai angka insiden kemiskinan (*poverty incidence*) yang merupakan ukuran kemiskinan yang paling populer. Keuntungan yang besar dari *headcount index* adalah mudah dihitung dan dipahami. Namun ukuran ini tidak dapat membedakan diantara sub-kelompok penduduk miskin dan tidak menunjukkan jangkauan tingkat



kemiskinan. Ukuran ini tak berubah meskipun seorang penduduk miskin menjadi lebih miskin atau menjadi lebih sejahtera, selama orang tersebut berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kemiskinan, indeks ini penting dengan dilengkapi dua ukuran kemiskinan lainnya dari Indeks FGT. (World Bank : 2006 : 31).

- b Indeks kesenjangan kemiskinan (*poverty gap index*, P1) merupakan rata-rata gap antara standar hidup orang miskin dan garis kemiskinan yang dihitung terhadap seluruh penduduk, yang dinyatakan dalam rasio terhadap garis kemiskinan. Pada dasarnya indeks ini dapat menunjukkan arti/nilai menggunakan informasi survei untuk mempelajari karakteristik penduduk miskin. Cara pengentasan kemiskinan yang mahal adalah dengan melakukan transfer pada seluruh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tanpa target sasaran. Indeks ini memberikan nilai rasio dari biaya pengentasan kemiskinan berdasarkan transfer dengan target sasaran sempurna dibandingkan dengan yang berdasarkan transfer yang sepenuhnya tanpa target sasaran. Sehingga semakin kecil nilai indeks ini maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program (BPS : 2002 : 71).
- c Indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P2). Ukuran kemiskinan ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk yang sangat miskin dengan mengkuadratkan jarak garis kemiskinan. Angka tersebut kemudian dihitung dengan mengkuadratkan penurunan relatif konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan dan nilai tersebut dirata-ratakan dengan seluruh penduduk, sambil memberikan nilai nol (0) bagi penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Ketika bantuan dialihkan dari orang miskin ke orang lain yang lebih miskin, angka ini akan menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan (The World Bank : 2006 : 31).

Sedangkan indeks (*Sen Index*) merupakan indeks yang menggabungkan faktor – faktor jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan distribusi kemiskinan dalam kelompok penduduk yang dikemukakan oleh Amartya Sen

pada tahun 1976. Menurut Deaton dalam terbitan BPS, indeks ini mempunyai kelebihan dengan mempertimbangkan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin. Meskipun demikian indeks tersebut hampir tidak pernah digunakan di luar literatur akademik dikarenakan ada yang lebih sederhana dari indeks ini dan juga karena indeks Sen ini tidak dapat digunakan untuk menguraikan (mendekomposisi) kemiskinan dalam bentuk kontribusi dari sub kelompok – sub kelompok yang berbeda (BPS, 2002 : 74)

Kelemahan indeks Sen seperti yang diungkapkan diatas di modifikasi oleh beberapa ahli lain, sehingga diperoleh indeks Sen - - Shorrocks – Thon (SST) yang dapat membantu memberikan gambaran tentang sumber perubahan dalam kemiskinan antar waktu. Ukuran ini memungkinkan untuk mendekomposisi kemiskinan menjadi tiga aspek: apakah penduduk miskin bertambah?, apakah penduduk miskin semakin miskin? Dan apakah ada ketimpangan yang lebih tinggi diantara penduduk miskin? (BPS, 2007).

### **II.2.3.3. Kriteria Rumah Tangga Miskin pada Bantuan Langsung Tunai**

Kriteria Rumah tangga miskin yang digunakan dalam Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05) yang digunakan oleh BPS pada tahun 2005 – 2008 untuk menentukan rumahtangga miskin penerima bantuan langsung tunai. Adapun variabel tersebut adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis Lantai Bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis Dinding(Atap) tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik/genset
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan/air gunung.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli 1 -2 stel pakaian dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik/ Nakes
12. Sumber penghasilan KRT adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, Nelayan, Buruh bangunan, Buruh perkebunan, atau pekerjaan dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000
13. Pendidikan teringgi KRT : tidak sekolah/Tidak tamat SD/ SD
14. Tidak memiliki tabungan / Barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 seperti : sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.  
(BPS: 2007)

### II.3 Ekonomi Kawasan Perbatasan

Secara umum ekonomi kawasan perbatasan dapat disederhanakan sebagai subjek yang mempelajari organisasi spasial dan hukum – hukum pembangunan ekonomi pada daerah perbatasan. Sebagai cabang baru dari ekonomi regional, ekonomi perbatasan menggabungkan antara ekonomi geografi dan ilmu ekonomi untuk mempelajari proses pembangunan dikawasan perbatasan yang terdiri dari paling tidak dua daerah dengan sistem politik dan kebijakan ekonomi yang berbeda.

Terdapat beberapa alasan mengapa studi tentang ekonomi perbatasan menjadi relatif penting, yaitu antara lain : *Pertama* suatu kenyataan bahwa kebanyakan perbatasan terletak jauh dari pusat aktifitas ekonomi sehingga timbul kecenderungan menjadi kawasan tertinggal. *Kedua*, adanya hambatan administrasi dalam lalu lintas barang dan orang sehingga kawasan perbatasan yang pada dasarnya homogen menjadi heterogen. *Ketiga*, berkaitan dengan *trend* globalisasi saat ini yang mendorong perekonomian menjadi tanpa batas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ekonomi daerah perbatasan penelitiannya harus fokus pada tiga aspek yaitu perekonomian yang berdiri sendiri sebagai suatu daerah

perbatasan, interaksi dan kerjasama antar daerah ekonomi perbatasan serta ekonomi perbatasan yang menyeluruh (Guo, 1996 : 36 – 38).

Meskipun dasar teori dan metodologi merupakan faktor penting dalam menganalisa ekonomi perbatasan, tetapi interpretasi harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan lingkungan struktur sosial dan politik. Terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam menganalisa ekonomi perbatasan (Guo, 1996 : 38 – 44) yaitu :

- Asumsi bahwa kawasan perbatasan heterogen dan arus barang dan orang tidak
- mudah, sehingga ekonomi perbatasan harus bisa mengidentifikasi pembagian secara ruang faktor produksi (seperti modal, tenaga kerja, SDA, teknologi dan sebagainya), adanya kemungkinan *cross border trade* dan kerjasama ekonomi serta hubungan ekonomi antara daerah perbatasan dengan daerah pusat (wilayah administrasi yang lebih tinggi tempat daerah perbatasan bernaung) mereka masing - masing
- Pembuat kebijakan tidak harus mengubah struktur politik dan ekonomi kawasan perbatasan, melainkan berupaya untuk membuat alokasi yang rasional dari faktor produksi, memaksimalkan output perekonomian dan mempelajari pembentukan kerjasama antar perbatasan dan integrasi ekonomi, sehingga kawasan berubah dari *political region* menjadi *economic region*
- Strategi kebijakan dalam mengembangkan kawasan perbatasan harus memperhatikan *overall* dan *local perspective* karena setiap sisi kawasan punya kelebihan masing-masing, sehingga perlu dipadukan antara preferensi nasional dan karakteristik kawasan perbatasan, antara kawasan perbatasan dan sub region-nya, dan antara sub region lain dibawah *political region*.

Menurut Guo, ada beberapa dasar teori yang harus diperhatikan dalam menganalisa ekonomi perbatasan, yaitu :

a. Teori Pusat – Pinggiran (*Core periphery theory*)

Teori ini menganggap bahwa pada suatu perbatasan akan terdapat dua daerah yaitu daerah pinggiran yang berbasis sumber daya alam (*primer*) dan daerah pusat yang merupakan penghasil barang dan jasa modern

(*sekunder/tersier*). Daerah pinggiran mempunyai keunggulan komparatif sumber daya alam terhadap daerah pusat, sedangkan pusat pertumbuhan (*core*) punya keunggulan komparatif dalam ekonomi dan teknologi dibanding daerah pinggiran. Dengan demikian apabila wilayah *core* dikembangkan, maka wilayah *periphery* juga akan turut berkembang sehingga dalam jangka panjang *Core – Periphery* akan habis. Hal tersebut akan terjadi karena adanya perluasan pasar, penemuan sumber baru, perbaikan sarana transportasi dan kebijakan daerah yang sesuai. Namun apabila jarak *Core – Periphery* terlalu jauh, maka dampak dari pengembangan *Core* terhadap *Periphery* tidak ada.

D.W. Hughes dan D.W Holland dalam Suratman (2004) menunjukkan bahwa daerah pinggiran akan mendapat pengaruh positif dari *spread effect* dan pengaruh negative dari *backwash effect*. *Spread effect* tersebut meliputi investasi, inovasi dan pertumbuhan dari daerah pusat ke daerah pinggiran. Sedangkan *backwash effect* adalah pengaruh yang tidak kondusif dari wilayah pusat ke wilayah pinggiran.

b. Skala Ekonomi Spasial (*Economics of spatial scale*)

Sejumlah fakta menunjukkan, bahwa dengan dibukanya perbatasan ekonomi diantara beberapa Negara (khususnya negara kecil) akan menciptakan peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya skala ekonomi. Proses ini terjadi melalui adanya peningkatan produktivitas akibat tingginya pemanfaatan sumber daya alam, penelitian, pembangunan, jaringan komunikasi, fasilitas, transportasi dan manfaat lainnya. Secara teoritis, memproduksi dalam skala daerah yang lebih besar akan meningkatkan produktivitas karena adanya aglomerasi ekonomi (dapat diperoleh *ekstra return* dengan memanfaatkan kerjasama). Terbukanya perbatasan dapat berimplikasi pada berubahnya konsep ekonomi perbatasan menjadi “ekonomi tanpa batas”.

Hasil studi Cecchini dalam Suratman (2004) menunjukkan bahwa GDP Negara – Negara Eropa meningkat sebesar 4% akibat dibukanya perbatasan. Peningkatan tersebut terdiri dari 1,5% dari *free trade* dalam jasa keuangan,

0,5% dari pemindahan kontrol pintu masuk dan 2% dari meningkatnya kompetisi, skala ekonomi dan bertambahnya penawaran.

Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan menggunakan konsep skala ekonomi spasial adalah wilayah perbatasan harus relatif maju, dan tak ada keunggulan komparatif yang memang dimiliki wilayah tetangga, sehingga manfaat yang diperoleh lebih besar ketimbang kerugiannya .

### II.3.1 Pembangunan Kawasan Perbatasan (Guo, 1996 : 116 – 121)

Rencana pembangunan kawasan perbatasan yang berhasil merupakan sebuah fungsi dinamis dari pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan akan tercapai dalam daerah – daerah perbatasan oleh berbagai pendekatan-pendekatan seperti investasi langsung oleh pemerintah pusat dan kerjasama yang penting antar daerah perbatasan dengan kesungguhan tekad bahwa hal tersebut untuk kemajuan perekonomian kawasan perbatasan.

#### II.3.1.1 *Core – Peripheral Approach (CPA)*

Pendekatan ini juga dapat dikatakan sebagai “strategi pembangunan dari daerah *Core* (pusat) ke *Peripheral* (pinggiran/sekelilingnya). Daerah *Core* secara umum merupakan daerah paling makmur, stabil, dan daerah yang lebih kuat daripada *Peripheral* (lebih dominan), kepadatan penduduk relatif kurang dan tingkat kesejahteraan manusia yang lebih baik. Secara teori, Pembangunan sebuah daerah berimplikasi secara tak langsung pada pentingnya pengembangan teknologi tinggi dan perilaku orang - orang yang berbeda dari orang –orang yang sebelumnya berada di daerah tersebut.

Menurut Guo agar *Core-Peripheral Approach* dapat berjalan, diperlukan dua persyaratan yaitu: (1). Daerah *core* (pusat pertumbuhan) harus punya *comparative advantage* dalam ekonomi dan teknologi dibanding daerah lainnya (pinggiran), dimana ekonomi daerah pusat (*core economic*) merupakan angka yang besar. (2). Daerah *peripheral* (daerah pinggiran/lainnya) jaraknya harus dekat (tidak boleh terlalu jauh) dengan *core* atau paling tidak aksesnya mudah (dalam pengertian waktu/*accessible*)

Penerapan pendekatan ini akan efisien jika ekonomi daerah *peripheral* berhubungan baik dengan pembangunan daerah *core* yang sedang berkembang dan harus ditunjang oleh jaringan komunikasi dan transportasi yang sudah maju. *Core-Peripheral Approach* telah terbukti berhasil di Amerika Utara dan banyak negara di Eropa Barat (daerah maju).

### II.3.1.2 *Cross Border Approach (CBA)*

Jika salah satu syarat CPA tidak terpenuhi maka dapat dipastikan penggunaan CPA tidak akan efisien. Pendekatan lain yang dapat dipergunakan pemerintah untuk membangun kawasan perbatasannya adalah *Cross Border Approach (CBA)*.

Ketidakmerataan distribusi faktor –faktor produksi sebagai keberagaman pembangunan sosial ekonomi diantara wilayah politik yang berbatasan biasanya menghasilkan keuntungan komparatif yang berbeda untuk masing – masing daerah.

Daerah perbatasan berada di pinggiran daerah politik dan biasanya memiliki aliran barang, modal, dan penduduk (orang) yang rendah daripada daerah pusatnya (*core*). Dalam kondisi demikian hal yang berhubungan dengan pembatasan daerah harus disingkirkan. Dengan mengadakan kerjasama antar daerah perbatasan, merupakan salah satu cara yang dapat dikatakan efisien dalam pembangunan kawasan perbatasan dibanding kerjasama yang dilakukan dengan masing – masing daerah pusat (*core*)nya.

Pendekatan ini juga memiliki persyaratan khusus agar dapat dilaksanakan. Adapun persyaratan dalam pendekatan ini adalah (1). Dunia Internasional atau daerah tetangga harus punya keunggulan komparatif, baik ekonomi maupun teknologi (2) Hambatan dalam *border* itu sendiri yang bersifat fisik dan ideologis harus mudah dihilangkan (lingkungan fisik, struktur politik dan kebijakan ekonomi).

Penggunaan CBA kemungkinan akan berhasil dimana perekonomian daerah pinggiran (*peripheral*) berhubungan dengan baik dengan kawasan tetangga (dunia luar) yang kaya. Sebagai contoh Program Industilisasi Perbatasan di Mexico (BIP = *Mexico's Border Industrialisation Programme*) yang didukung oleh kedekatan dengan ekonomi terbesar dunia, USA dan Zona Ekonomi Spesial China (SEZs =

*Special Economic Zones*) pada kawasan pantai tenggara menjadi industri baru seperti Hong Kong, Taiwan dan negara industri baru lainnya di Asia timur.

### II.3.1.3 *A Mixed CPA – CBA Model*

Di beberapa kasus pembangunan kawasan perbatasan terdapat halangan – halangan pada pelaksanaan CPA dan CBA secara sendiri – sendiri karena kondisi fisik dan politik daerah – daerah perbatasan. Cara yang lebih efisien adalah menggabungkan kedua pendekatan tersebut dikenal dengan model campuran CPA - CBA.

## II.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian tentang kemiskinan di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

### II.4.1 Penelitian Kuspradoto Budi Jati

Jati (2006) meneliti tentang pengaruh indikator ekonomi makro regional terhadap kemiskinan absolut (1976 – 2002) dengan model :

$$\text{Log (Pddk – Mskn)}_i = a + b \cdot \log (\text{PDRB})_i + c \cdot \log (\text{IHK})_i + d \cdot \log (\text{Jlh-Pddk})_i + e \cdot \log (\text{PP})_i + f \cdot (\text{Dummy Krisis})_i + u_i$$

Dimana :

Pddk-MSKN adalah Penduduk Miskin propinsi  $i$ , PDRB merupakan PDRB Harga Konstan non Pertambangan dan Penggalan Per Kapita propinsi  $i$ , IHK adalah Indeks Harga Konsumen propinsi  $i$ ; JML-Pddk merupakan Jumlah Penduduk propinsi  $i$ ; PP atau Pengeluaran Pembangunan Per Kapita propinsi  $i$ , dan DUMMY Krisis mewakili variabel Dummy propinsi  $i$

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi per kapita (non tambang dan penggalan) berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Inflasi dan Jumlah penduduk mempunyai hubungan positif dengan kemiskinan, Pengeluaran pembangunan daerah perkapita menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dan krisis ekonomi memperparah tingkat kemiskinan.



#### II.4.2 Penelitian Norman Hicks

Hicks (dalam Ali 2006) melakukan studi terhadap 83 negara-negara sedang berkembang pada periode tahun 1960-1970. Hicks memprediksi bahwa pertumbuhan domestik produk bruto (PDB) dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu tingkat investasi fisiko tingkat pertumbuhan impor, dan tingkat perkembangan sumber daya manusia pada awal periode. Model dasar yang dipakai adalah

$$GRYPC_t = a_1 INVRT_t + a_2 GRIMP_t + a_3 HR_b + k$$

Dimana :

$GRYPC_t$  mewakili tingkat pertumbuhan PDB riil per kapita atas periode waktu  $t$ ;  $INVRT_t$  adalah rata – rata tingkat investasi atas periode yang sama;  $GRIMP_t$  merupakan tingkat pertumbuhan import atas periode yang sama;  $HR_b$  adalah besarnya perkembangan SDM (angka harapan hidup dan melek huruf pada periode dasar  $b$ ) dan  $k$  merupakan konstanta

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan modal manusia melalui harapan hidup dan melek huruf merupakan faktor penentu pertumbuhan output. Hicks menyarankan suatu pengembangan sumberdaya manusia menawarkan banyak manfaat karena suatu cara yang lebih diarahkan untuk menghapus kemiskinan, hal ini mudah untuk diselesaikan daripada program-program pembagian kekayaan kepada kelompok miskin. Program – program redistribusi kemiskinan dengan berorientasikan pelayanan publik untuk mencapai kelompok miskin lebih dapat diterima secara politik daripada program redistribusi masal atas tanah atau kekayaan melalui transfer langsung. Jadi melakukan investasi sumberdaya manusia mungkin menjadi cara yang efisien dalam menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

#### II.4.3 Penelitian Tuan Guntur Hasibuan

Hasibuan 2006 melakukan penelitian tentang variabel – variabel utama yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Sumatra Utara dengan menggunakan

data keuangan daerah, pendidikan, angkatan kerja, kesehatan, fertilitas perumahan dan lingkungan sebagai indikatornya, dengan model :

$$\text{Log } P_0 = a + b \cdot \log \text{PERIMA} + c \cdot \log \text{HURUF} + d \cdot \log \text{FORMAL} + e \cdot \log \text{KB} + f \cdot \text{DKOTA} + g \cdot \text{DMEKAR} + u_i$$

$P_0$  = persentase penduduk miskin

$\text{PERIMA}$  = penerimaan total anggaran pendapatan belanja daerah

$\text{HURUF}$  = persentase penduduk buta huruf

$\text{FORMAL}$  = persentase pekerja yang bekerja

$\text{KB}$  = persentase wanita umur 15 – 49 tahun status kawin pengguna alat KB

$\text{DKOTA}$  = variabel *dummy* kota

$\text{DMEKAR}$  = variabel *dummy* pemekaran

Dengan menggunakan data tahun 2002 – 2003, penelitian ini berkesimpulan bahwa penerimaan pendapatan anggaran pendapatan belanja daerah, penduduk yang bekerja di sektor formal, persentase wanita berumur 15 – 49 tahun berstatus kawin yang measih menggunakan alat KB berhubungan negatif dengan persentase penduduk miskin. Sedangkan variabel penduduk buta huruf memiliki hubungan positif dengan persentase penduduk miskin.

#### II.4.4. Penelitian Fahma Sari Fatma

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 ini menggunakan data tahun 2001 – 2003 untuk melihat pengaruh inflasi dan pengangguran di Indonesia menggunakan variabel kontrol pendidikan dan pertumbuhan PDRB dengan model

$$P_{0it} = \beta_0 + \beta_1 p_{it} + \beta_2 \mu_{it} + \beta_3 \text{GPDRB}_{it} + \beta_4 \text{AMH}_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

$P_{0it}$  = *Head Count Index* provinsi i pada tahun t;

$p_{it}$  = tingkat inflasi provinsi i pada tahun t;

- $\mu_{it}$  = tingkat pengangguran provinsi  $i$  pada tahun  $t$ ;  
 $GPDRB_{it}$  = pertumbuhan PDRB provinsi  $i$  pada tahun  $t$ ;  
 $AMH_{it}$  = angka melek huruf provinsi  $i$  pada tahun  $t$ ;

Kesimpulan dari penelitian ini adalah inflasi dan pengangguran memiliki pengaruh signifikan dan searah terhadap kejadian kemiskinan di Indonesia. Variabel angka melek huruf juga memperlihatkan hubungan yang signifikan mempengaruhi penurunan kemiskinan. Sedangkan variabel laju PDRB pada periode ini belum mampu memengaruhi persentase kemiskinan.

#### II.4.5. Penelitian Adi Apriyan Kuswara

Penelitian mencoba melihat pengaruh pembangunan ekonomi dan perubahan sosiodemografis terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi yaitu pendapatan per kapita tinggi dengan tingkat kemiskinan tinggi, pendapatan per kapita tinggi dengan tingkat kemiskinan rendah, pendapatan per kapita rendah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan pendapatan per kapita rendah dengan tingkat kemiskinan rendah, dengan spesifikasi model:

$$\ln P_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X1 * X2 + \beta_3 X1 * X3 + \beta_4 X1 * X4 + \beta_5 X1 * X6 + \beta_6 X1 * X2 * X3 + \beta_7 X1 * X4 * X5 + \epsilon_{it}$$

Dimana  $P_{it}$  adalah Indeks *Headcount* ukuran kemiskinan absolut pada tahun  $t$ ,  $X1$  = PDRB per kapita pada tahun  $t$ ,  $X2$  = pangsa non pertanian pada tahun  $t$ ,  $X3$  = laju inflasi pada tahun  $t$ ,  $X4$  = usia harapan hidup pada tahun  $t$ ,  $X5$  = pendidikan SD keatas pada tahun  $t$ ,  $X6$  = angka kelahiran total pada tahun  $t$ .

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapatan (PDRB per kapita) yang rendah bukan berarti tertinggal dalam berbagai hal dimana provinsi dalam klasifikasi 4 (empat) mengalami kemajuan dengan membaiknya kualitas kesehatan dan semakin terbukanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kemiskinan di perbatasan provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 2 (dua) data yaitu data primer dan sekunder dengan 2 (dua) tahapan analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis eksplanatori melalui pendekatan kuantitatif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan yang ada di Kabupaten Sambas sebagai salah satu kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Kemiskinan di Kabupaten Sambas akan dikenali menjadi kemiskinan rumah tangga dan kemiskinan dan kemiskinan komunitas dengan perbandingan tiga wilayah penelitian. Dalam menganalisa kemiskinan di Kabupaten Sambas akan digunakan data primer dan data sekunder.

Melalui analisis eksplanatori peneliti mencoba menjelaskan hubungan antara kemiskinan dengan beberapa variabel yang mewakili ekonomi, sosial demografi dan teknologi. Penggunaan variabel -- variabel ini bertujuan untuk melihat berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat dengan membedakan karakteristik antara daerah perbatasan dan non perbatasan.

### III.1 Analisis Deskriptif

Menurut Newman (1997), penelitian deskriptif mampu menyajikan gambaran detail dari sebuah situasi dan atau *setting social*. Melalui kuesioner yang diajukan peneliti kepada responden, peneliti memperoleh data primer tentang kemiskinan di wilayah penelitian. Data primer bersama data sekunder (PODES, 2006) kemudian diolah dengan bantuan *software* SPSS untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komunitas di Kabupaten Sambas dan Biawak (Malaysia) dan seberapa besar keterikatan penduduk Kabupaten Sambas dengan penduduk perbatasan Malaysia dari berbagai sisi kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, transportasi, komunikasi dan sosial budaya.

### **III.1.1 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki karakteristik atau ciri – cirinya. Populasi dapat dibedakan atas dua, yaitu populasi sampling dan populasi sasaran. Sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari unit – unit yang ada dalam populasi yang ciri – ciri dan karakteristiknya benar – benar diselidik (Palte dalam Farouk, 2005).

Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh rumah tangga miskin di Kecamatan Sajingan Besar (Desa Sebunga', Kaliau', Senatab, Sentaban dan desa Sungai Bening), rumah tangga miskin di desa Kartiasa serta rumah tangga miskin di Kampong Biawak (Malaysia) dengan sampel beberapa rumah tangga diketiga wilayah yang dianggap dapat meneerminkan rumah tangga miskin .

### **III.1.2 Lokasi Penelitian**

Sajingan Besar (wilayah perbatasan) dan desa Kartiasa (wilayah non perbatasan) serta Kampong Biawak (Malaysia) merupakan lokasi penelitian dimana pengambilan data dilakukan pada tahun 2008. Dipilihnya kecamatan Sajingan Besar sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan kecamatan termiskin di Kabupaten Sambas dan berbatasan langsung dengan Biawak (Malaysia) serta sebagai lokasi percontohan pusat kawasan perbatasan nasional. Sedangkan desa Kartiasa merupakan desa termiskin di Kecamatan Sambas (hasil wawancara dengan Lisa, staf BPS Kahupaten Sambas sebagai penanggungjawab pencacahan BLT kecamatan Sambas).

### **III.1.3 Ukuran Sampel serta Tehnik Pengambilan Sampel**

Menurut Kartini (1986, hal. 120 – 121) dan Farouk (2005. hal 37) maupun Nasution (1996. hal 101) menyatakan bahwa tidak ada peraturan – peraturan yang ketat untuk menentukan secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi. Ada peneliti yang mengatakan bahwa sampel tak boleh kurang dari 10 % ada juga yang menyatakan besarnya sampel minimum 5% dari jumlah satuan-satuan elementer dari populasi. Menurut Farouk (2005) ukuran sampel dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keragaman karakteristik

populasi (*homogenitas*), tingkat presisi yang dikehendaki, tujuan penelitian, rencana analisis, tenaga, biaya dan waktu.

Dari data sekunder yang tersedia diperoleh informasi bahwa penduduk di Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2006 sejumlah 7.539 jiwa yang terdiri dari 1.464 Kepala Keluarga dimana 581 diantaranya adalah keluarga miskin. Dan dari 5.684 jiwa penduduk berusia 10 tahun keatas, 3.565 jiwa (62,72%) bermatapencarian sebagai petani. Ketiadaan pasar di semua desa di kecamatan Sajingan Besar, PLN hanya dapat melayani 284 rumah tangga dari 1.464 rumah tangga (19,40%), penggunaan air gunung sebagai sumber air bersih, serta hanya tersedia 2 mesjid berbanding 23 gereja di kecamatan Sajingan Besar dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat relatif homogen dari berbagai aspek sehingga yang dijadikan sampel penelitian akan dapat mewakili populasi sebenarnya. Homogenitas juga terjadi di Kartiasa dengan 190 kepala keluarga miskin dan di Kampong Biawak yang terdiri dari 110 rumah tangga.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan diambil sampel secara *purposive sampling* sebanyak 84 rumah tangga di Sajingan Besar, 20 rumah tangga di Kartiasa dan 11 rumah tangga di kampong Biawak (Malaysia). Dengan demikian keseluruhan sampel berjumlah 115 rumah tangga yang melebihi 5% dari populasi masing – masing – masing wilayah. Dengan fokus dan tujuan yang jelas yaitu rumah tangga yang dianggap miskin.

#### **III.1.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut sehingga data tersebut memiliki arti. Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif sehingga data ini sering disebut sebagai data eksternal (Muhammad 1999 hal 121 - 123). Dengan demikian dari segi sumber data maka pada analisa ini akan digunakan kedua data tersebut baik data primer yang diperoleh dari wawancara

dan kuesioner maupun data sekunder yang diperoleh dari berbagai terbitan dan internet.

Setelah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan kuesioner kepada responden, data primer tersebut akan disusun berdasarkan kriteria yang dianggap mewakili kemiskinan pada sebuah rumah tangga sesuai 14 kriteria yang dikeluarkan oleh BPS yang di modifikasi sesuai kriteria miskin yang diacu oleh masyarakat setempat. Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 15 (lima belas) variabel meliputi variabel pendidikan (diwakili oleh pendidikan terakhir kepala rumah tangga dan anak putus sekolah), variabel pekerjaan (jenis pekerjaan kepala rumah tangga), variabel kesehatan (kemampuan rumah tangga berobat ke puskesmas), variabel perumahan (kepemilikan sarana mandi cuci kakus (MCK), sumber air minum, luas rumah, kondisi lantai, dinding dan atap rumah dan penerangan rumah tangga), variabel pakaian (frekuensi membeli pakaian dalam setahun), serta variabel ekonomi (rata – rata pendapatan kepemilikan barang dan asset).

Untuk melihat karakteristik kemiskinan rumah tangga, variabel – variabel yang sudah terkumpul kemudian dihitung dengan mempersentasekannya di masing – masing wilayah penelitian sehingga didapat angka/karakteristik kemiskinan rumah tangga per wilayah penelitian.

Dan untuk melihat tingkat kemiskinan rumah tangga ke 15 (lima belas) variabel kemiskinan rumah tangga diklasifikasikan dengan menggunakan skala biner dengan skor  $y = 1$  untuk menyatakan kejadian yang masuk dalam kategori “miskin”. Dan  $y = 0$  untuk menyatakan kejadian yang tidak masuk kategori (“tidak miskin”). Penskoran dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh BPS untuk memperoleh data rumah tangga miskin sasaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahun 2005. Dengan demikian semakin banyak skor (nilai) 1 yang dimiliki suatu rumah tangga maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

Setelah dilakukan penjumlahan, setiap rumah tangga diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu tidak miskin, hampir miskin, miskin dan sangat miskin sesuai variasi skor yang diperoleh setiap rumah tangga. Sebuah rumah tangga di kategorikan tidak miskin jika skor total yang didapat oleh rumah tangga tersebut kurang dari 9 (sembilan) dari 15 (lima belas) variabel yang diteliti. Jika sebuah

rumah tangga memperoleh skor antara 9 (sembilan) hingga 11 (sebelas) maka rumah tangga tersebut dikategorikan dalam keadaan hampir miskin. Sedangkan jika rumah tangga dengan skor 12 (dua belas) hingga 13 (tiga belas) maka termasuk dalam rumah tangga dengan kategori miskin, dan yang terakhir jika skor yang diperoleh sebesar 14 (empat belas) hingga 15 (lima belas) maka rumah tangga tersebut masuk dalam kategori sangat miskin. Semua data primer diolah dengan bantuan *software* SPSS. 11. Tabel berikut memperlihatkan variabel beserta kategori skor yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menentukan kriteria kemiskinan dilihat dari kemiskinan rumah tangga.

Tabel. 3.1 Pengklasifikasian Skor Variabel

No	Variabel	Kriteria	Klasifikasi	
			Skor 1	Skor 0
1	Pendidikan	Pendidikan terakhir KRT	Jika Tamat SD ke bawah	Jika SMP ke atas
2	Pekerjaan	Pekerjaan KRT	Jika Petani / Buruh tani	Jika bukan Petani
3	Berobat	Kemampuan berobat ke puskesmas	Jika mampu	Jika tidak mampu
4	MCK	Kepemilikan MCK	Jika bersama / umum	Jika milik sendiri
5	Air Minum	Sumber air minum	Jika mata air tak terlindung/ sungai/air hujan/air gunung	Jika air kemasan/ leding/pompa/ mata air terlindung
6	Putus Sekolah	Kemampuan bersekolah	Jika ada anak yang putus sekolah	Jika tidak ada anak yang putus sekolah
7	Pendapatan	Rata – rata pendapatan per bulan	Jika $\leq$ Rp. 600.000,-	Jika $>$ Rp. 600.000,-
8	Pakaian	Frekuensi membeli pakaian pertahun	Jika $\leq$ 2 kali	Jika $>$ 2 kali
9	Luas Rumah	Luas lantai per kapita	Jika $\leq$ 8 m <sup>2</sup>	Jika $>$ 8 m <sup>2</sup>
10	Lantai	Jenis lantai rumah	Jika tanah / kayu murahan	Jika bukan tanah /semen / tehel
11	Dinding	Jenis dinding rumah	Jika Rumbia / bambu / kayu murahan	Jika semen
12	Atap	Jenis atap rumah	Jika Rumbia / sirap	Jika seng / metal
13	Listrik	Sumber penerangan rumah	Jika pelita/ lilin/ petromak/menumpang	Jika PLN (SSB)/ Genset
14	Barang	Kepemilikan sebuah barang jika di jual	Jika $\leq$ Rp. 500.000,-	Jika $>$ Rp.500.000,-
15	Asset	Kepemilikan asset	Jika $\leq$ Rp. 500.000,-	Jika $>$ Rp.500.000,-

Sumber : Iriana, 2008 (diolah kembali)



Selain dipergunakan untuk menganalisis kemiskinan rumah tangga, data primer juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan komunitas di ketiga wilayah, akan tetapi tetap dikompilasi dengan menggunakan data sekunder terutama data Podes (Potensi Desa) tahun 2006. Adapun data yang digunakan meliputi data sarana dan prasarana dasar (pendidikan, transportasi, kesehatan, air minum dan penerangan), sosial, informasi, komunikasi dan perekonomian dengan masing - masing variabel yang digunakan dan kondisinya adalah sebagai berikut :

Tab.3.2 Karakteristik Kemiskinan Komunitas

Prasarana dan Sarana		Kategori		Sajingan Besar (Perbatasan Indonesia)	Kartiasa (Non Perbatasan Indonesia)	Biawak (Malaysia)
Dasar	Pendidikan	1	TK	Sangat Sulit	Sangat Mudah	Sangat Mudah
		2	SD	Sangat Mudah	Sangat Mudah	Sangat Mudah
		3	SMP	Sulit	Sangat Mudah	Sangat Mudah
		4	SMA	Sulit	Sulit	Sulit
	Transportasi	5	Darat	Tanah / Sulit	Sangat Mudah	Sangat Mudah
		6	Air	Sulit	Mudah	Sulit
		7	Udara	Sangat Sulit	Sangat Sulit	Sangat Sulit
		8	Angkutan Umum	Sulit	Mudah	Sangat Sulit
		9	Terminal	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
	Kesehatan	10	RS	Sangat Sulit	Mudah	Sulit
		11	RS Bersalin	Sangat Sulit	Mudah	Sulit
		12	Poliklinik / Balai Pengobatan	Sangat Sulit	Mudah	Sulit
		13	Puskesmas	Sulit	Mudah	Sangat Mudah
		14	Pustu	Sangat Mudah	Sangat Mudah	Sangat Mudah
		15	Praktek Nakes	Sulit	Mudah	Mudah
		16	Posyandu	Sangat Mudah	Sangat Mudah	Sangat Mudah
		17	Apotik	Sangat Sulit	Mudah	Mudah
		18	Toko Khusus Obat	Sangat Sulit	Mudah	Mudah
	Air Minum	19	Leding / PDAM	Sangat Sulit	Mudah	Mudah
		20	Air Kemasan	Sangat Sulit	Sangat Mudah	Mudah
	Penerangan	21	Pemerintah	Sulit	Mudah	Sangat Mudah
	Sosial	22	Sepak Bola	Sangat Mudah	Sangat Mudah	Sangat Mudah
		23	Bola Voli	Sangat Mudah	Sangat Mudah	Sangat Mudah
		24	Bulu Tangkis	Sangat Sulit	Mudah	Mudah

Lanjutan

Prasarana dan Sarana	Kategori		Sajingan Besar (Perbatasan INA)	Kartiasa (Non Perbatasan INA)	Biawak (Malaysia)
Informasi	25	TVRI	Sangat Sulit	Sangat Mudah	Sangat Sulit
	26	TV Swasta Nas	Sangat Sulit	Sangat Sulit	Sangat Mudah
	27	TV Malaysia	Sangat Mudah	Sangat Mudah	Sangat Mudah
Komunikasi	28	Telepon Kabel	Sangat Sulit	Sangat Mudah	Sangat Mudah
	29	Telpon Umum	Sangat Sulit	Sulit	Mudah
	30	Wartel / Kiospon	Sangat Sulit	Mudah	Mudah
	31	Warnet	Sangat Sulit	Sangat Sulit	Sangat Sulit
	32	Sinyal Telp Seluler	Sangat Sulit	Mudah	Sangat Mudah
Perekonomian	33	Pasar Permanen	Sangat Sulit	Mudah	Sangat Mudah
	34	KUD	Sangat Sulit	Sangat Mudah	Sangat Mudah
	35	Lembaga Keuangan Mikro	Mudah	Sulit	Mudah

Sumber : Data primer dan PODES 2006, data diolah kembali.

Sama seperti halnya untuk melihat karakteristik kemiskinan rumah tangga, karakteristik kemiskinan komunitas juga dilihat dari persentase masing – masing variabel di masing – masing wilayah penelitian. Yang membedakannya adalah untuk melihat kondisi akhir kemiskinan. Pada kemiskinan rumah tangga digunakan skala biner dengan nilai 0 (nol) atau 1 (satu), sedangkan kemiskinan komunitas diukur dengan menggunakan skala Likert yang berkisar antara angka 1 (satu) hingga angka 4 (empat). Jadi semakin tinggi nilai variabel di sebuah wilayah maka semakin baik kondisi komunitas di wilayah tersebut. Secara rinci skor untuk masing – masing variabel kemiskinan komunitas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel.3.3 Pengklasifikasian Skor Kriteria Kemiskinan Komunitas

No.	Kriteria	Keterangan	Skor
1	Sangat Sulit	Hanya ada di Kabupaten	1
2	Sulit	Hanya ada di Kabupaten / Kecamatan diakses oleh pihak tertentu	2
3	Mudah	Ada di Kecamatan / Desa dapat diakses banyak pihak	3
4	Sangat Mudah	Ada di setiap Desa dan dapat diakses oleh semua	4

Dengan demikian semakin tinggi skor yang dimiliki sebuah wilayah maka akan semakin baik fasilitas prasarana dan sarana wilayah tersebut. Skor dari masing – masing kategori akan di jumlahkan dan dibagi sebanyak kategori yang dimiliki untuk menjadikan angka indeks per variabel.

### III.2 Analisis Eksplanatori

Data sekunder yang berasal dari terbitan BPS berbagai tahun terbitan yang digunakan untuk menganalisa pertanyaan keempat dalam penelitian ini yaitu perbandingan kemiskinan di kabupaten / kota yang berbatasan langsung dengan Malaysia terhadap kabupaten / kota yang bukan perbatasan dianalisa berbeda dengan karakteristik kemiskinan komunitas. Data sekunder ini akan dianalisa dengan bantuan *software* Eviews 4.

#### III.2.1 Ruang Lingkup, rancangan Model dan Definisi Variabel

Ruang lingkup penelitian ini meliputi 9 Kabupaten / Kota yang ada di provinsi Kalimantan Barat dengan objek penelitian pendapatan perkapita diwakili oleh Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan tahun 2000 per kapita, variabel pendidikan diwakili oleh angka rata – rata lama sekolah (LMS), variabel kesehatan diwakili oleh angka harapan hidup (AHH), karakteristik pasar yang diwakili oleh tingkat harga (inflasi), infrastruktur diwakili oleh persentase rumahtangga yang menggunakan listrik.

Bentuk umum model yang diperoleh dari literatur dan penelitian sebelumnya, antara lain oleh Ali (2006), Nursahrizal (), Jati (2006), Hasibuan (2006) dan Fatma (2005) serta Kuswara (2005) setelah mengalami penyesuaian terhadap data yang tersedia adalah :

$$PO_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBKP_{it} + \beta_2 LMS_{it} + \beta_3 AHH_{it} + \beta_4 INF_{it} + \beta_5 LSTRIK_{it} + \beta_6 D_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

1. i = 9 (sembilan) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Pontianak, Landak, Ketapang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.
2. t = Tahun 2002 - 2006
3. P0 = Persentase penduduk miskin dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Data bersumber dari BPS dengan satuan persen
4. PDRBKP = Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Harga Konstan tahun 2000 yaitu nilai dari nilai produk domestik regional bruto berdasarkan nilai uang pada tahun 2000 yang dipergunakan sebagai tahun dasar dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Data bersumber dari terbitan BPS dengan satuan rupiah.
5. INF = Inflasi merupakan kenaikan harga barang – barang secara umum dan terus – menerus, yang diperoleh perhitungannya dari pengurangan laju pertumbuhan PDRB berlaku terhadap laju pertumbuhan PDRB konstan dinyatakan dalam persen.
6. LMS = Rata – rata lama sekolah, merupakan rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani menggunakan satuan tahun.
7. AHH = Angka Harapan Hidup, merupakan perkiraan rata – rata lama hidup yang dapat dicapai oleh sekelompok penduduk menggunakan satuan tahun.
8. LSTRIK = Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik /genset dengan satuan persen.
9. D = *Dummy* (variabel bayangan) kabupaten / kota yang berbatasan dengan Malaysia dan yang tidak.

Keempat variabel bebas yaitu variabel PDRB per kapita (PDRBKP), rata – rata lamanya sekolah (LMS), angka harapan hidup (AHH), dan penggunaan listrik (LISTRIK), diharapkan parameternya bertanda negatif (-) karena dengan meningkatnya keempat variabel tersebut akan menurunkan persentase penduduk miskin. Sedangkan variabel inflasi (INF) diharapkan bertanda positif (+), karena tingginya tingkat harga akan menyebabkan meningkatnya persentase penduduk miskin (inflasi mengurangi pendapatan riil masyarakat sehingga cenderung mengurangi konsumsi masyarakat menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan). Untuk variabel *dummy* perbatasan (D) juga diharapkan bertanda positif (+) karena asumsi awal seperti dikemukakan pada bab I, daerah perbatasan cenderung lebih miskin dari pada daerah non perbatasan.

### III.2.2 Metode Pengumpulan Data dan Tehnik Analisis

Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diterbitkan oleh instansi –instansi terkait seperti BPS, Bappeda Kabupaten Sambas, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber – sumber literatur dan jurnal yang terkait dengan penelitian.

Jangka waktu yang digunakan untuk menganalisa kondisi kemiskinan kabupaten / kota selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2002 hingga 2006 dengan alasan ketersediaan data akibat pemekaran kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk menganalisa kemiskinan tersebut digunakan data panel atau gabungan data “*cross section*” dari 9 (sembilan) kabupaten kota selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2002 – 2006 sebagai data “*time series*”nya yang diolah dengan menggunakan bantuan *software* Eviews 4.1

Penggunaan data panel dilakukan karena memberikan hasil yang lebih menyeluruh dibandingkan hasil estimasi *time series* maupun *cross section*. Disamping itu penggunaan data panel berarti menambah jumlah observasi sehingga akan berakibat positif pada hasil estimasi, yaitu dengan memperbesar derajat kebebasan (*degrees of freedom*) dan menurunkan kemungkinan terjadinya kolinearitas (hubungan linier yang signifikan) antar variabel bebas (Fatma, 2005).

Menurut Baltagi dalam Fatma (2005) keuntungan menggunakan data panel adalah:

1. mampu mengontrol heterogenitas individu;
2. banyak memperoleh informasi lebih bervariasi, mengurangi kolineraitas antar variabel, meningkatkan *degree of freedom* dan lebih efisien;
3. lebih baik untuk studi *dynamics of adjustment*;
4. mampu lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat dalam data *cross section* murni atau *time series* murni;
5. dapat menguji dan mengembangkan model perilaku yang lebih kompleks.

Bentuk persamaan data panel menurut Greene (Fatma, 2005) adalah:

$$Y_{it} = X_{it}'\beta + Z_i'\alpha + \varepsilon_{it}$$

untuk  $i = 1, 2, \dots, N$  dan  $t = 1, 2, \dots, T$ , dimana  $N$  adalah jumlah individu,  $T$  adalah jumlah periode tahun.  $\alpha$  adalah skalar;  $\beta$  adalah vektor yang berdimensi  $(k \times 1)$ ;  $X_{it}$  mempunyai sebanyak  $k$  *regressors*, tidak termasuk *constant term*;  $Z_i'\alpha$  adalah heterogenitas atau efek individu yang mengandung *constant term* dan satu set variabel individu atau grup spesifik.

Ada tiga model yang dapat digunakan untuk mengestimasi data panel, yaitu :

- *Pooling regression model*, yaitu dengan mengkombinasikan atau mengumpulkan semua data *cross section* dan *time series*, lalu mengestimasi model tersebut- menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Dalam model pooling ini,  $Z_i$  hanya merupakan *constant term*. Jadi tidak ada efek individu.
- *Fixed effect model*, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa peubah - peubah yang dihilangkan (*omitted variable*) dapat mengakibatkan perubahan dalam intersep *cross section* dan *time series*. *Dummy variable* ditambahkan dalam model tersebut sehingga memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan intersep. Selanjutnya model diduga dengan OLS. Dalam model ini,  $Z_i$  tidak

terobservasi tetapi berkorelasi dengan  $X_{it}$ . *Fixed effect model* diperlihatkan sebagai berikut:

$$Y_{it} = X_{it}'\beta + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

- *Random effect model*, yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses pendugaan kuadrat terkecil, *error term* dalam *cross section* dan *time series* diperhitungkan sehingga teknik yang digunakan adalah *Generalized Least Square* (GLS). Dalam model ini, antar-individu bersifat heterogen dan tidak berkorelasi dengan  $X$ . Efek individu ( $\mu_i$ ) merupakan elemen acak grup spesifik pada setiap grup. *Random effect model* diperlihatkan sebagai berikut:

$$Y_{it} = X_{it}'\beta + \alpha + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Sesuai tema yang diajukan dalam penelitian ini mengenai kemiskinan di wilayah perbatasan maka dalam model ini maka *dummy* yang digunakan disini adalah *dummy* kelompok (kelompok perbatasan) bukan *dummy* individu (kabupaten / kota). Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pooling regression model* dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Karena penelitian ini hanya akan melihat kemiskinan di 2 (dua) wilayah yaitu

### III.2.3 Pendekatan Model

Didalam hal membuat model dibutuhkan beberapa kriteria. Untuk mendapatkan model yang dianggap baik, kriteria tersebut antara lain:

1. Kriteria Ekonomi. Mengingat tulisan ini berakar dari ilmu ekonomi maka hasil regresi harus sesuai dengan teori ekonomi. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat arah dan pengaruh masing koefisien variabel bebas.
2. Kriteria Statistika. Menguji model persamaan regresi untuk mendapatkan model yang baik dan meminimalisir bias yang terjadi. Lazimnya uji tersebut terdiri dari uji-t dan uji-f. Berikut penjelasan masing masing uji :

- **Uji Parsial (uji t)**, dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi benar-benar mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t hitung yang merupakan rasio antara koefisien regresi terhadap *standard error*-nya. Dalam hal ini digunakan *p-value* (probabilitas menerima  $H_0$ ) atau juga disebut signifikansi t (sig.t) yang dibandingkan dengan taraf uji  $\alpha$ . Jika *p-value*  $< \alpha$ , maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.
  - **Uji model secara keseluruhan (uji F)**, dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi perilaku variabel terikat. Statistik uji yang digunakan adalah Statistik F hitung yang dibandingkan dengan F tabelnya. Dalam Eviews bisa juga digunakan *p-value* (probabilitas menerima  $H_0$ ) atau juga disebut signifikansi F (sig.F) yang dibandingkan dengan taraf uji  $\alpha$ . Jika *p-value*  $< \alpha$ , maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa model tersebut dapat menjelaskan variasi perilaku variabel terikat secara signifikan.
  - **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**, adalah untuk mengetahui prosentase dari model dalam menjelaskan variasi perilaku variabel terikat. Makin tinggi persentase  $R^2$  (mendekati 100%), berarti makin tinggi kemampuan model dalam menjelaskan perilaku variabel terikat dengan kata lain kemampuan model secara keseluruhan dalam menerangkan variasi perilaku variabel terikatnya ditunjukkan oleh nilai koefisien determinannya ( $R^2$ ).
3. **Kriteria Ekonometrika.** Serangkaian asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan untuk menjaga agar *ordinary least square* dapat menghasilkan estimator-estimator yang terbaik pada model regresi. Asumsi dasar dari *The Classical Linear Regression Model* dan *Multiple linear regression model* adalah variabel bebas tidak berkorelasi dengan error ( $e$ ), tidak ada kolinearitas yang parah antar variabel penjelas, tidak ada korelasi antar dua error (autocorrelation) atau  $e_j$  dan  $e_i$  ( $cov(e_i, e_j) = 0$  untuk  $i \neq j$ ), error mempunyai distribusi normal dengan



rerata sama dengan nol,  $E(\epsilon_i) = 0$  dan varian setiap error konstan atau homoskedastisitas. Teorema Gauss-Markov menyatakan bahwa dengan asumsi di atas maka estimator OLS merupakan estimator yang BLUE (The Best Linear Unbiased Estimator). Asumsi yang harus dipenuhi dalam penggunaan OLS adalah :

- a.  $E(\epsilon_i) = 0$ ;  $i = 1, 2, 3 \dots, N$ . Asumsi ini menyatakan bahwa nilai harapan (rata-rata) dari  $\epsilon_i$  (selisih antara nilai penduga Y dengan nilai sebenarnya) adalah nol (0). Menurut Gujarati (1978), asumsi ini mungkin tidak sangat kritis dari segi praktis karena hal ini hanya mempengaruhi intersep dari regresi dan dalam praktek nilai intersep biasanya tidak terlalu penting
- b.  $\text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$ ;  $i = 1, 2, 3 \dots, N$ , Asumsi ini menyatakan bahwa keragaman (Varian) dari  $\epsilon_i$  untuk setiap penggunaan adalah sama yaitu sebesar  $\sigma^2$ . Kondisi ini disebut *Homoskedastisitas* atau varians sama. Penggunaan data panel berarti juga menggunakan data kerat lintang (*cross section data*) dan ini bisa diasumsikan bahwa model melakukan pelanggaran homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mengecek homoskedastisitas yaitu dengan melihat *Sum Square Error* (SSE) sebelum dan sesudah diberi perlakuan *cross section weights* dan *White Heteroskedasticity consistent standard error and covariance*. Jika nilai SSE sebelum diberikan perlakuan tersebut lebih besar dari SSE sesudahnya, dapat diasumsikan terjadi heteroskedastisitas, dan setelah diberi perlakuan seperti di atas, model dapat diasumsikan homoskedastisitas.
- c.  $E(\epsilon_i, \epsilon_j) = 0$ ;  $i \neq j$ ; Asumsi ini menyatakan bahwa tidak ada *Autokorelasi* dari  $\epsilon_i$  yang berurutan. Pindyck dalam Alam (2006) mengatakan bahwa autokorelasi dapat mempengaruhi efisiensi dan estimatornya. Asumsi ini dapat diuji dengan membandingkan angka *Durbin Watson* dibandingkan dengan tabemnya, nilai DW yang ideal berada di sekitar angka 2, dan cara mengatasinya adalah dengan memberikan perlakuan *cross section weights*, sehingga diperoleh angka Durbin Watson yang lebih baik. Autokorelasi biasanya sering terjadi pada data *time series*
- d. Tidak ada *Multikoleniaritas* diantara variabel bebas. Kondisi multikoleniaritas terjadi jika ada variabel bebas yang mempunyai korelasi

(hubungan linier) yang kuat dengan variabel bebas lainnya. Pendeteksian multikoleniaritas dapat dilakukan dengan melihat apakah korelasi sederhana antar variabel bebasnya adalah tinggi, yang dideteksi dengan menggunakan Eviews. Dengan melihat *Pearson Correlation Matriks*-nya, apabila tidak ada angka yang melebihi 0.8, berarti tidak ada multikoleniaritas. Salah satu pemecahan yang sering dilakukan untuk mengatasi multikoleniaritas adalah dengan menghilangkan variabel yang sangat berkorelasi, dengan resiko kehilangan informasi dari variabel tersebut.

Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil tertimbang (*Generalized Least Squares/GLS = weighted least square*). Metode *generalized least squares* (GLS) pada persamaan regresi data panel maka model dianggap terbebas dari pelanggaran asumsi klasik karena penggunaan metode GLS (*Generalized Least Square*) atau metode kuadrat terkecil tertimbang (*weighted least square*) akan menghasilkan penduga yang memenuhi sifat *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE) sehingga gangguan asumsi klasik dalam model ini telah terdistribusi secara normal, sehingga tidak diperlukan lagi *treatment* terhadap model bagi pelanggaran asumsi klasik. GLS mampu mengatasi masalah tersebut karena GLS mentransformasi nilai  $\beta$  yang dihasilkan dalam persamaan OLS sehingga asumsi dapat terpenuhi. Metode GLS dapat memperbaiki data sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi persyaratan dalam OLS (Karsana, 2005).

## BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum lokasi penelitian, baik mengenai wilayah Kabupaten Sambas dan Kecamatan Sajingan Besar sebagai daerah perbatasan Indonesia, maupun wilayah Serawak dan Kampong Biawak yang merupakan wilayah perbatasan Malaysia. Gambaran umum ini meliputi, Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sambas, keadaan geografis, kependudukan, kesehatan, pendidikan, agama, sosial, dan perekonomian di daerah penelitian ini.

### VI.1 Kabupaten Sambas

#### IV.1.1 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas, pada masa pemerintahan Belanda merupakan daerah *Afdelling Van Singkawang*. Setelah perang dunia kedua status Kabupaten Sambas berubah menjadi *Afdelling Administratif* yang terbagi menjadi tiga daerah, yaitu :

1. Daerah Kesultanan Sambas yang meliputi *Onderafdeling* Singkawang, Bengkayang, Pemangkat dan Sambas dengan sebutan kewedanan.
2. Daerah Kerajaan/Penembahan Mempawah.
3. Daerah Kerajaan (Kesultanan) Pontianak dan sebagian daerahnya adalah mandor. ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

Setelah perang dunia kedua berakhir, Kabupaten Sambas berubah menjadi daerah otonom dengan ibukota Singkawang yang terdiri dari empat kewedanan yaitu : Singkawang, Kewedanan Pemangkat, Kewedanan Sambas, dan Kewedanan Bengkayang. Namun kemudian sistem kewedanan dihapus dengan penerbitan UU Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Barat (LNRI Nomor 72 tahun 1959 Tambahan LNRI Nomor 1820). Pembentukan Kabupaten Sambas mulai terealisasi dan sejak tahun 1963, sehingga wilayah Pemerintahan Kabupaten Sambas berubah menjadi 15 wilayah kecamatan dan pada tahun 1988 berubah menjadi 19 kecamatan dimana 2 kecamatan diantaranya merupakan daerah Pemerintahan Kota Administratif Singkawang.

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kemudian pindah dari Kota Singkawang ke Kota Sambas setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1999 tentang pembentukan daerah tingkat II Bengkayang. Sehingga wilayah Kabupaten Sambas tinggal sembilan kecamatan. Dan pada tahun 2006, Wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan dengan satu kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tangaran yang berasal dari pemekaran kecamatan Teluk Keramat.

#### 4.1.2 Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Sambas terletak di bagian utara Propinsi Kalimantan Barat atau diantara 2°08' Lintang Utara serta 0°33' Lintang Utara dan 108°39' Bujur Timur serta 110°04' Bujur Timur. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Kabupaten Sambas merupakan satu dari lima kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Batas-batas wilayah Kabupaten Sambas secara administratif adalah :

- Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan laut Natuna
- Selatan : Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang
- Barat : Laut Natuna.
- Timur : Kab. Bengkayang dan Serawak (Malaysia Timur)

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sambas Tahun 2006



Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas

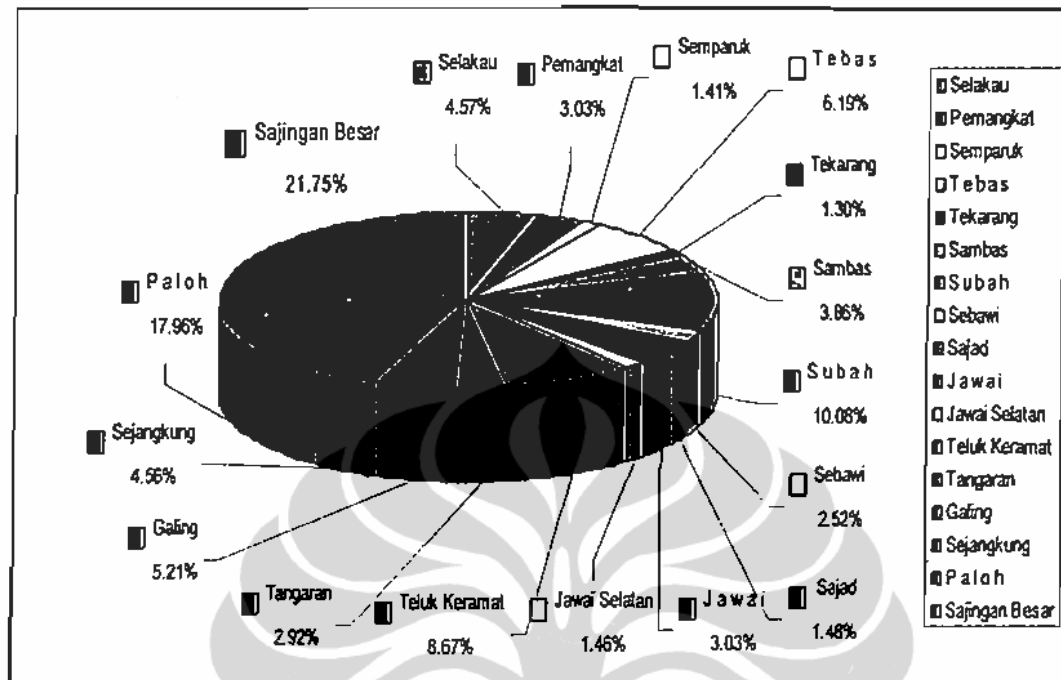
Luas Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 4,36 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sambas pada tahun 2006 terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 183 Desa. Dua Kecamatan yang menjadi daerah perbatasan di Kabupaten Sambas, yakni Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Sambas. Luas Kecamatan Paloh adalah 1.148,84 km<sup>2</sup> atau 17,96 persen dari luas Kabupaten Sambas, dan Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km<sup>2</sup> atau 21,75 persen. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tekarang dengan luas sebesar 83,16 km<sup>2</sup> atau 1,30 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Luas masing-masing 17 kecamatan di Kabupaten Sambas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2006

NO	Kecamatan	Ibu Kota	Luas	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Selakau	Selakau	292,50	4,57
2.	Pemangkat	Pemangkat	193,75	3,03
3.	Semparuk	Semparuk	90,15	1,41
4.	Tebas	Tebas	395,64	6,19
5.	Tekarang	Tekarang	83,16	1,30
6.	Sambas	Sambas	246,66	3,86
7.	Subah	Subah	644,55	10,08
8.	Sebawi	Sebawi	161,45	2,52
9.	Sajad	Tengguli	94,94	1,48
10.	Jawai	Sentebang	193,99	3,03
11.	Jawai Selatan	Matang Terap	93,51	1,46
12.	Teluk Keramat	Teluk Keramat	554,43	8,67
13.	Tangaran	Simpang Empat	186,67	2,92
14.	Galing	Galing	333,00	5,21
15.	Sejangkung	Sejangkung	291,26	4,56
16.	Sajingan Besar	Sajingan Besar	1.391,20	21,75
17.	Paloh	Liku	1.148,84	17,96
Total Luas Kabupaten Sambas			6.395,70	100,00

Sumber : Kabupaten Sambas dalam Angka 2007, BPS 2007

Grafik. 4.1 Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Sambas Tahun 2006



Sumber : Kabupaten Sambas dalam Angka 2007, data diolah kembali

#### IV.1.3 Kependudukan

Dari segi jumlah penduduk, Kabupaten Sambas merupakan Kabupaten/Kota berpenduduk keempat terbanyak di Provinsi Kalimantan barat setelah Kabupaten Pontianak (690,79 ribu jiwa), Kota Pontianak (509,80 ribu jiwa) dan Kabupaten Ketapang (481,44 ribu jiwa). Penduduk Kabupaten Sambas pada pertengahan tahun 2006 diperkirakan sejumlah 483,646 ribu jiwa dengan luas wilayah 6.395,70 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduknya sekitar 75 jiwa/km<sup>2</sup> atau 2.629 jiwa per desa. Penyebaran penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel 4.2.

Dari jumlah penduduk yang dibandingkan dengan luas wilayah maka didapat suatu indikator yang menggambarkan tingkat kepadatan penduduk (*population density*). Secara umum tingkat hunian penduduk/kepadatan penduduk di Kabupaten Sambas masih tergolong jarang, yaitu sekitar 76 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 317 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Sajingan Besar dengan luas sekitar 21,75 persen dari total wilayah Kabupaten Sambas hanya dihuni 5 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Sambas tidak

merata. Rata-rata tingkat hunian penduduk yang jarang di suatu wilayah cenderung kurang mendukung percepatan pembangunan karena rata-rata hitung atau rasio biaya pembangunan per satuan penduduk relatif jauh lebih besar dibanding daerah yang padat penduduknya. Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas tahun 2000 - 2006 rata - rata adalah 0,98%.

Tabel 4.2. Penyebaran Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2006

No.	Kecamatan	Perempuan	Laki - Laki	Total	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> / jiwa)	Pertumbuhan Penduduk 2000 - 2006
1.	Selakau	19.001	18.130	37.131	126,94	0,75
2.	Pemangkat	31.566	29.852	61.418	317,00	1,48
3.	Semparuk	11.118	11.033	22.151	245,71	0,49
4.	T e b a s	31.699	30.456	62.155	157,10	1,11
5.	Tekarang	5.699	5.886	11.585	139,31	0,34
6.	Sambas	21.295	20.951	42.246	171,27	2,66
7.	S u b a h	9.028	7.666	16.694	25,90	-0,83
8.	Sebawi	7.513	7.410	14.923	92,43	1,54
9.	Sajad	4.852	4.898	9.750	102,70	0,38
10.	J a w a i	19.056	18.894	37.950	195,63	1,61
11.	Jawai Selatan	9.964	9.577	19.541	208,97	1,28
12.	Teluk Keramat	32.007	31.001	63.008	113,64	1,38
13.	Tangaran	10.135	9.699	19.834	106,25	0,53
14.	Galing	8.114	7.841	15.955	47,91	0,86
15.	Sejangkung	9.761	9.087	18.848	64,71	0,81
16.	Sajingan Besar	4.086	3.453	7.539	5,42	0,80
17.	P a l o h	11.745	11.173	22.918	19,95	0,84
<b>2 0 0 6</b>		<b>246.639</b>	<b>237.007</b>	<b>483.646</b>	<b>75,62</b>	<b>0,98</b>

Sumber : Kabupaten Sambas dalam Angka. BPS. Kab. Sambas 2007

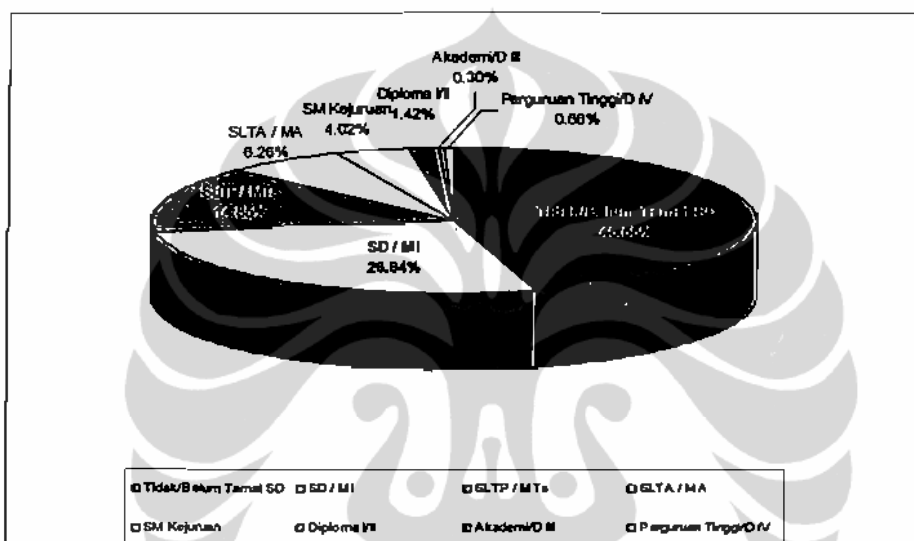
#### IV.1.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 di mana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian

program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa.

Pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan kemampuan seseorang. Semakin baik tingkat pendidikan seseorang maka cenderung akan semakin baik pula kemampuan berkomunikasi secara lebih luas.

Grafik 4.2 . Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kabupaten Sambas Tahun 2006



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Kab. Sambas dalam Angka. BPS. 2007

Upaya perbaikan pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan secara bertahap. Pada akhir Pelita III telah dicanangkan program wajib belajar 6 tahun, yang dilanjutkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada awal Repelita IV. Bersamaan dengan itu pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan juga terus dipacu sehingga akses penduduk usia sekolah dapat semakin mudah ke fasilitas pendidikan.

Pada tahun 2006, jumlah prasarana SD mengalami peningkatan 1,40 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 423 buah sekolah menjadi 429 buah sekolah. Kemudian untuk prasarana SLTP mengalami penambahan dari 109 sekolah pada tahun 2005 menjadi 114 sekolah di tahun 2006 atau mengalami peningkatan sebesar 4,60 persen. Selanjutnya untuk prasarana SLTA mengalami peningkatan sebesar 11,90 persen di tahun 2006.



Tabel 4.3 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sambas Tahun 2006

Kecamatan	SD				SMP				SLTA sederajat			
	Jlh	Guru	Murid	Rasio Murid Thd Guru	Jlh	Guru	Murid	Rasio Murid Thd Guru	Jlh	Guru	Murid	Rasio Murid Thd Guru
Selakau	30	246	5.756	23,40	7	18	1.327	73,72	3	24	438	18,25
Pemangkat	49	542	8.837	16,30	12	48	2.602	54,21	8	81	1746	21,56
Semparuk	19	212	3.19	15,05	6	67	1.209	18,04	1	24	345	14,38
T e b a s	57	568	9.119	16,05	17	254	2.671	10,52	5	30	1315	43,83
Tekarang	11	94	1.9	20,21	2	34	429	12,62	1	10	244	24,40
S a m b a s	31	366	5.776	15,78	10	177	2.251	12,72	9	76	1799	23,67
S u b a h	19	126	2.656	21,08	7	78	706	9,05	2	1	204	204,00
Sebawi	16	167	2.206	13,21	4	55	891	16,20	1	6	47	7,83
Sajad	8	58	1.576	27,17	1	9	139	15,44	0	0	0	0,00
J a w a i	28	268	5.415	20,21	8	75	1.585	21,13	4	40	843	21,08
Jawai Selatan	20	176	2.859	16,24	5	39	689	17,67	2	16	228	14,25
Teluk Keramat	54	611	8.455	13,84	14	206	2.333	11,33	5	51	1179	23,12
Tangaran	18	175	2.845	16,26	4	12	731	60,92	0	0	0	0,00
G a l i n g	19	193	2.7	13,99	4	44	583	13,25	1	13	215	16,54
Sejangkung	25	149	3.16	21,21	5	45	485	10,78	1	16	200	12,50
Sajingan Besar	13	94	1.512	16,09	2	19	283	14,89	1	7	45	6,43
P a l o h	22	287	3.579	12,47	6	59	1.056	17,90	2	29	353	12,17
<b>2 0 0 6</b>	<b>429</b>	<b>4.332</b>	<b>71.595</b>	<b>16,51</b>	<b>114</b>	<b>1.239</b>	<b>19,97</b>	<b>16,12</b>	<b>46</b>	<b>424</b>	<b>6834</b>	<b>16,12</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Kcb. Sambas dalam Angka. BPS. 2007, diolah kembali

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa penyebaran fasilitas pendidikan tidak merata di Kabupaten Sambas. Sajingan besar sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga luput dari perhatian dalam hal pendidikan. Begitu pula halnya yang terjadi dengan kecamatan Sajad dan Tekarang. Diketiga kecamatan tersebut Sekolah-sekolah lanjutan jumlahnya sangat minim meskipun secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Sambas.

Jumlah penduduk yang relatif kecil dan menyebar pada lokasi yang sulit dijangkau (jangkauan yang luas dengan tingkat kesulitan menjangkau yang relatif tinggi) merupakan hambatan bagi akselerasi peningkatan aspek pendidikan di Kabupaten Sambas dengan kepadatan penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah – wilayah tertentu.

Dampak dari penyebaran penduduk tersebut membuat sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa semakin tinggi

jenjang pendidikan, maka semakin sedikit fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu ditemui adanya perbedaan tingkat pendidikan dan perbedaan partisipasi pendidikan pada setiap jenjang pendidikan antar kecamatan.

Dari sisi sasaran pembangunan, pendidikan akan mencakup usia 7-15 tahun sesuai dengan prioritas pada program wajib belajar pendidikan dasar, akan tetapi juga tidak dapat dilupakan bahwa usia pra pendidikan sekolah formal (5 - 6 tahun) maupun usia sekolah menengah (16-18 tahun) serta usia pendidikan tinggi (19 - 24 tahun) pada gilirannya akan membutuhkan perhatian yang lebih serius.

Pertambahan jumlah prasarana sekolah adalah konsekuensi dari pertambahan murid yang setiap tahun cukup besar. Selaras dengan itu jumlah guru juga harus bertambah. Di tingkat SD, jumlah murid mengalami peningkatan sebesar 3,53 persen. Sedangkan jumlah guru mengalami penurunan sebesar 2,77 persen. Pada tahun 2006, jumlah murid SD mencapai 71.595 orang dan jumlah guru yang ada sebanyak 4.215 orang. Hal ini berarti, rasio murid terhadap guru mencapai 16,99, ini berarti beban tiap guru mendidik rata-rata 16 s/d 17 murid. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka beban seorang guru bertambah 1 murid, dimana pada tahun 2005 rasio guru dengan murid sebesar 15,92.

Di tingkat SLTP, jumlah murid mengalami peningkatan dari 19.214 menjadi 19.970 orang di tahun 2005 atau naik sekitar 3,93 persen. Sebaliknya jumlah guru mengalami penurunan sekitar 52,53 persen atau turun menjadi 807 orang dengan rasio guru terhadap murid sebesar 24,75. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, Jumlah prasarana sekolah mengalami peningkatan sebesar 11,90 persen pada tahun 2006. Jumlah murid juga mengalami peningkatan yaitu dari 9.038 murid menjadi 9.257 murid pada tahun 2006 atau mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen. Sebaliknya jumlah guru di kabupaten sambas berkurang dari 754 orang menjadi 265 orang di tahun 2006, sehingga rasio guru terhadap murid mencapai 34,93, ini berarti setiap guru mengajar sekitar 34 s/d 35 murid.

#### **IV.1.5. Kesehatan**

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara terhadap rakyatnya. Sebab status kesehatan masyarakat adalah indikator penting dari

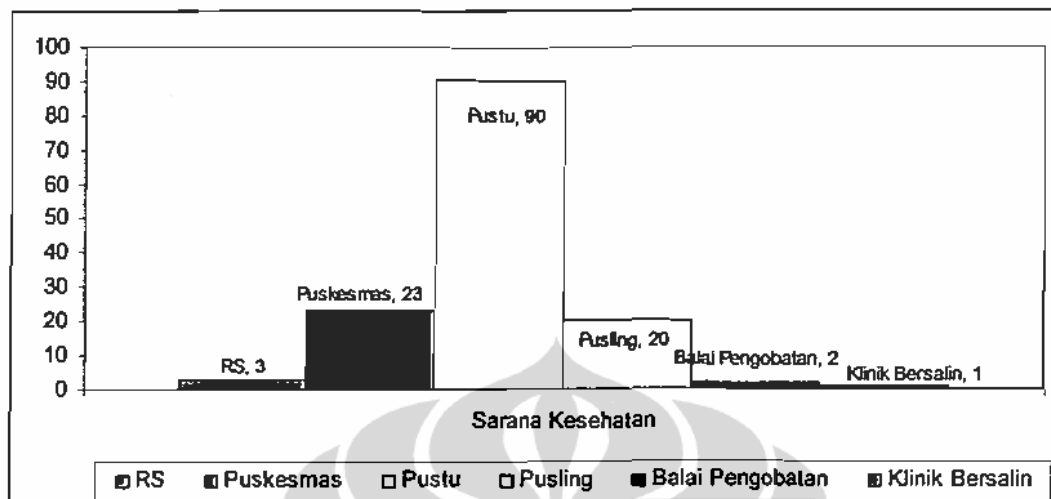
seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktivitas ekonomi. Pembangunan di bidang kesehatan saat ini diarahkan pada penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang meliputi bangunan fisik (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan Poliklinik) serta pengadaan tenaga kesehatan yang terampil. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tahun 2006 tercatat fasilitas kesehatan di Kabupaten Sambas sebagai berikut :

Tabel 4. 4. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sambas Tahun 2006

No	Kecamatan	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Balai Pengobatan	Klinik Bersalin
1.	Selakau	-	1	4	1	-	-
2.	Pemangkat	1	2	7	3	-	1
3.	Semparuk	-	1	5	1	-	-
4.	T e b a s	-	2	9	2	-	-
5.	Tekarang	-	1	4	-	-	-
6.	S a m b a s	2	3	3	1	1	-
7.	S u b a h	-	2	12	1	-	-
8.	Sebawi	-	1	3	1	1	-
9.	Sajad	-	1	3	1	-	-
10.	J a w a i	-	1	5	1	-	-
11.	Jawai Selatan	-	1	5	2	-	-
12.	Teluk Keramat	-	3	11	3	-	-
13.	Tangaran	-	-	-	-	-	-
14.	G a l i n g	-	1	3	1	-	-
15.	Sejangkung	-	1	5	1	-	-
16.	Sajingan Besar	-	1	5	-	-	-
17.	P a l o h	-	1	6	1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Kab. Sambas dalam Angka. BPS. 2007

Grafik 4.3. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sambas Tahun 2006



Fasilitas-fasilitas kesehatan adalah salah satu prasarana vital bagi suatu daerah. Berdasarkan grafik 4.4 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Sambas memiliki 3 unit Rumah Sakit, 23 unit Puskesmas, 90 unit Puskesmas Pembantu, 20 unit Puskesmas Keliling, dua unit Balai Pengobatan dan satu unit klinik bersalin. Jumlah Rumah Sakit yang minim dan hanya terdapat di Kota Sambas dan Pemangkat terbantu dengan adanya puskesmas di setiap kecamatan.

Fasilitas kesehatan harus pula ditunjang dengan jumlah tenaga medis. Menurut data Dinas Kesehatan tahun 2006, Kabupaten Sambas masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan, khususnya dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Jumlah dokter yang ada saat ini di Kabupaten Sambas sebanyak 41 orang dan mengalami penurunan sebesar 7,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Bahkan untuk dokter spesialis waktu kerjanya terbagi untuk 3 hari di RSUD Pemangkat dan 3 hari di RSUD Sambas, sehingga pasien yang memerlukan penanganan dokter spesialis harus menunggu/menyesuaikan jadwal dokter di rumah sakit tersebut yang mengakibatkan penanganan pasien tidak dapat dilakukan dengan segera. Kondisi tenaga medis di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Banyaknya Dokter dan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sambas

No	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat	Bidan	Perawat Gigi	Kesmas	Gizi	Farmasi	Teknis Medis
1.	Selakau	1	1	-	11	6	1	25	1	1	1
2.	Pemangkat	7	-	3	42	14	5	89	6	4	3
3.	Semparuk	1	-	-	10	4	2	23	1	1	1
4.	T e b a s	2	-	-	16	8	3	33	-	1	1
5.	Tekarang	1	-	-	8	2	2	15	-	-	1
6.	S a m b a s	6	2	1	27	14	2	60	4	3	1
7.	S u b a h	2	-	-	19	5	1	31	1	-	
8.	Sebawi	1	-	-	8	4	1	18	2	-	1
9.	Sajad	1	-	-	6	4	1	16	1	-	1
10.	J a w a i	1	-	-	10	5	2	22	1	1	1
11.	Jawai Selatan	1	-	-	12	2	1	19	-	1	1
12.	Teluk Keramat	3	-	-	31	14	3	69	3	1	4
13.	Tangaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	G a l i n g	1	-	-	8	5	1	18	1	-	1
15.	Sejangkung	1	-	-	7	3	1	17	1	-	1
16.	Sajingan Besar	2	-	-	6	2	1	15	1	1	1
17.	P a l o h	2	1	-	7	3	1	17	1	-	1
	Jumlah	33	4	4	228	95	28	487	24	14	30

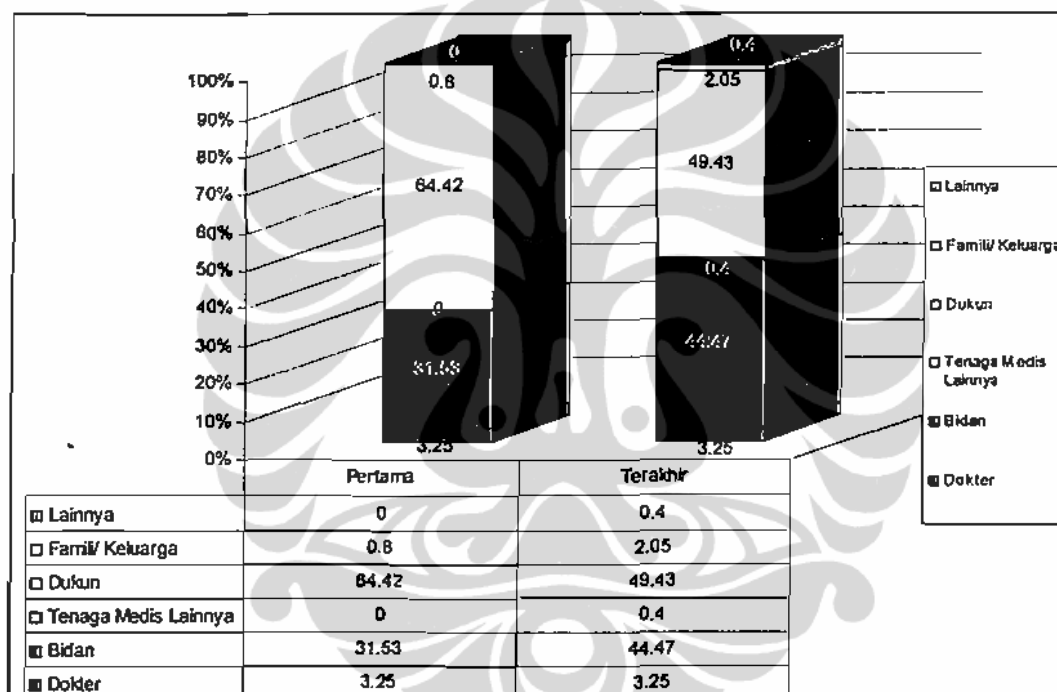
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Kab. Sambas dalam Angka. BPS. 2007

Persalinan oleh dokter, bidan atau tenaga medis lain relatif lebih aman dibandingkan oleh dukun atau tenaga non medis lainnya. Pada 2006, sekitar 34,78 persen persalinan balita pertama ditolong oleh tenaga medis, dengan komposisi 3,25 persen oleh dokter dan 31,53 persen oleh bidan. Sementara itu, 48,12 persen persalinan balita terakhir ditolong oleh tenaga medis, dengan komposisi 3,25 persen oleh dokter, 44,47 persen oleh bidan, dan 0,40 persen oleh tenaga medis lainnya.

Pada grafik 4.5 terlihat bahwa dukun ternyata masih memiliki peranan yang penting dalam proses kelahiran di Kabupaten Sambas dimana pada kelahiran pertama maupun terakhir lebih dari 50% proses kelahiran dibantu oleh dukun. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga medis di Kabupaten Sambas yang terlihat pada tabel 4.5 dimana Kabupaten Sambas hanya memiliki 95 orang bidan sedangkan wilayahnya terdiri dari 183 desa, sehingga ada beberapa desa yang

tidak mendapatkan alokasi bidan desa.. Hal ini membuat masyarakat tidak ada pilihan untuk memilih siapa yang membantu mereka pada saat proses kelahiran. Kewajiban pemerintah daerah untuk menempatkan tenaga medis diseluruh pelosok daerah agar angka kematian bayi maupun ibu melahirkan dapat diturunkan angkanya. Hal minimal yang dapat dilakukan oleh Pemda adalah melatih dukun – dukun tersebut menjadi dukun terlatih secara medis.

Grafik 4.4. Persentase Balita Menurut Penolong Proses Kelahiran Pertama dan Terakhir Selama Sebulan Yang Lalu, Tahun 2006



Sumber : Analisa Kependudukan Kab. Sambas Tahun 2006, BPS 2007, data diolah kembali

#### 4.1.6. Kondisi Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas masih cukup tinggi diukur dengan kriteria yang dikeluarkan oleh BKKBN yaitu keluarga pra sejahtera dan sejahtera satu. Sekitar 28,11 persen dari total penduduk 414.693 jiwa penduduk Kabupaten Sambas tahun 2005 masuk dalam kategori miskin menurut BKKBN (BPMKB). Kecamatan yang memiliki penduduk miskin adalah Kecamatan Sajingan Besar sebanyak 39.94 persen. Sementara kecamatan yang paling sedikit memiliki penduduk miskin adalah Kecamatan Paloh, yakni sebanyak 14.46 persen.

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Dan Penduduk Miskin Per Kecamatan  
Di Kabupaten Sambas Tahun 2001, 2003 dan 2005

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN 2001			PENDUDUK TAHUN 2003			PENDUDUK TAHUN 2005		
		JUMLAH	MISKIN	%	JUMLAH	MISKIN	%	JUMLAH	MISKIN	%
1.	Sambas	41.435	15.005	36,21	65.173	3.670	20,97	41197	8.460	20,54
2.	Teluk Keramat	75.726	9.597	12,67	80.541	9.064	11,25	83387	15.154	18,17
3.	Jawai	53.760	2.507	4,66	55.866	1.963	3,51	37929	12.569	33,14
4.	Tebas *)	70.604	13.554	19,20	60.061	12.515	20,84	61968	18.594	30,01
5.	Pemangkat*)	84.642	6.518	7,70	57.936	6.242	10,77	59758	18.856	31,55
6.	Sejangkung	19.378	5.141	26,53	20.954	3.666	17,50	22032	6.952	31,55
7.	Selakau	38.083	8.524	22,38	36.619	8.495	23,20	37921	13.506	35,62
8.	Paloh	21.251	2.543	11,97	22.653	2.496	11,02	23467	3.394	14,46
9.	Sajingan Besar	7.525	2.488	33,06	7.869	2.391	30,39	8323	3.324	39,94
10.	Subah	27.014	4.208	15,58	16.523	2.645	16,01	17187	5.769	33,57
11.	Galing	18.873	2.269	12,02	17.717	3.692	20,84	18974	4.981	26,25
12.	Tekarang *)	-	1.586	-	12.872	1.051	8,17	13263	3.473	26,19
13.	Semparuk **)	-	3.628	-	22.877	3.909	17,09	23359	9.210	39,43
14.	Jawai Selatan <sup>1</sup>	-	-	-	19.102	-	-	19895	6.573	33,04
15.	Sajad <sup>2</sup>	-	-	-	10.058	-	-	10454	2.446	23,40
16.	Sebawi <sup>3</sup>	-	-	-	16.187	-	-	15499	5.757	37,14
<b>Jumlah</b>		<b>458.291</b>	<b>77.568</b>	<b>16,93</b>	<b>477.661</b>	<b>71.799</b>	<b>15,03</b>	<b>494.613</b>	<b>39.018</b>	<b>28,11</b>

Sumber : Kab. Sambas Dalam Angka (BPS) dan Pendataan Keluarga dan Penduduk Miskin (BPMKB) beberapa tahun terbitan, data diolah kembali

Ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas meningkat. Salah satu faktornya adalah ketimpangan jumlah tenaga kerja yang besar sementara lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit. Hal ini kemudian menyebabkan cukup banyak penduduk Kabupaten Sambas yang bekerja sebagai TKI. Seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sambas memilih Negara bagian Serawak (Malaysia Timur) sebagai negara tujuan mereka.

Tabel. 4.7. Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pekerjaan Dan Jenis Kelamin

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembantu Rumah Tangga	-	13	13
2.	Industri Plywood	883	2.140	3.023
<b>Jumlah</b>		<b>883</b>	<b>21.53</b>	<b>3.036</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Sambas. Kab. Sambas dalam Angka BPS. 2007

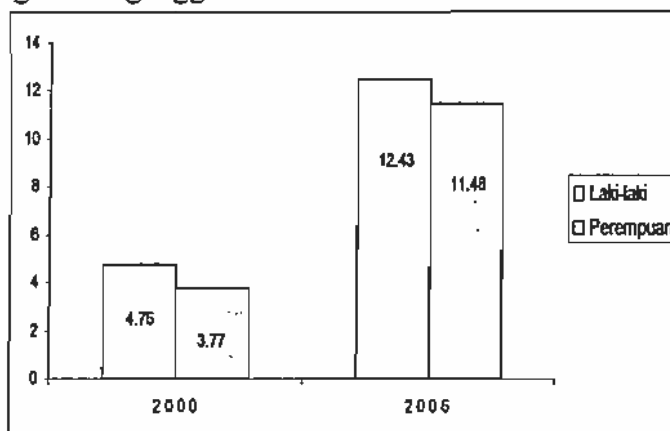
Dari total 3.036 TKI Kabupaten Sambas tahun 2006, 883 adalah laki-laki, dan 2.153 adalah perempuan dengan rincian pekerjaan sebagai buruh di industri plywood disamping sebagai pembantu rumah tangga.

Tabel.4.7 diatas menunjukkan bahwa TKI asal Kabupaten Sambas bukanlah tenaga kerja terdidik, sehingga dapat dipastikan pula bahwa TKI-TKI tersebut berasal dari keluarga miskin. Pengiriman tenaga kerja tidak terdidik justru merupakan suatu kerentanan terhadap tindakan penipuan dan kejahatan yang selama ini sering dialami oleh TKI - TKI Indonesia.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah tenaga kerja dengan penduduk usia kerja. Adapun yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak berkerja, atau yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja umumnya rendah untuk usia muda karena pendidikan. Fasilitas pendidikan yang meningkat membuat tingkat partisipasi angkatan kerja menurun karena mereka yang berusia muda lebih banyak berpartisipasi di dalam pendidikan. Sedangkan untuk usia tua (lanjut), menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja disebabkan karena relatif membaiknya perekonomian suatu daerah sehingga mereka tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah dirinya.

Grafik 4.5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Sambas Tahun 2000 - 2006



Sumber : Analisa Kependudukan Kabupaten Sambas Tahun 2006, BPS 2007



#### 4.1.7. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Besar kecilnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Pada tahun anggaran 2006, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sambas mengalami peningkatan sekitar 58,56 persen menjadi 475,87 milyar rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan asli daerah sebesar 13,98 milyar rupiah, bagian dana perimbangan sebesar 427,28 milyar rupiah, bagian lain-lain penerimaan yang sah sebesar 7,47 milyar rupiah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar 27,14 milyar rupiah.

Dari tabel 4.9 diperoleh informasi bahwa keuangan Pemkab. Sambas masih bertumpu pada dana transfer pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Ini mencerminkan ketidakmandirian daerah untuk mengelola daerahnya dari segi finansial yang dapat dilihat dari kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal lain yang perlu dicermati pemerintah daerah adalah sisa lebih anggaran daerah pada tahun 2006 yang meningkat cukup tajam dari tahun sebelumnya (tahun 2005) yaitu sekitar 49,45%. Hal ini dimungkinkan oleh banyak faktor diantaranya terlambatnya transfer dana dari pusat ke kas daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut sudah selayaknya pemerintah pusat membuat mekanisme yang dapat meminimalisir hal tersebut, sehingga pembangunan di daerah tidak terhambat karena dana pembangunan tersebut masib seutuhnya bertumpu pada transfer keuangan pusat.

Kemajuan perekonomian Kabupaten Sambas selama ini secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 12,51 persen dari 3.246,69 miliar rupiah pada tahun 2005 menjadi 3.673,26 miliar rupiah pada tahun 2006. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai tambah pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa masing-masing sebesar 13,61 persen, 13,66 persen dan 12,74 persen. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2005 mencapai 2.274,17 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 2.362,08 miliar rupiah pada tahun 2006 atau naik sekitar 3,87 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh sektor pertanian karena memang sektor pertanian yang lebih berpotensi untuk dikembangkan di kabupaten ini. Potensi dominan di Kabupaten Sambas adalah di sektor pertanian terutama tanaman bahan makanan. Hal ini tercermin dari luas panen padi seluas 75.109 hektar dengan produksi sebesar 239,81 ribu ton pada tahun 2006. Angka ini terbesar dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau.

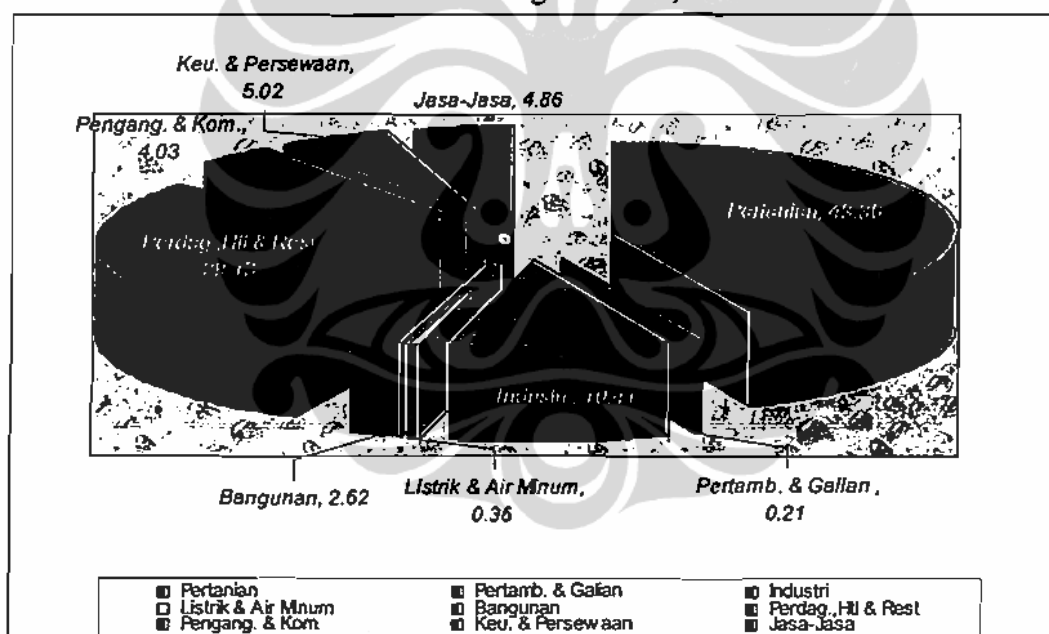
Tabel. 4. 8 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 – 2006

No.	U R A I A N	2003	2004	2005	2006
I.	Sisa Lebih Anggaran	19.310.821	13.562.216	18.160.117	27.139.474
II.	Pendapatan Asli Daerah	8.907.994	10.267.953	9.453.166	13.976.412
	1 Pajak Daerah	2.005.858	2.272.062	2.510.888	2.535.867
	2 Retribusi Daerah	2.205.360	2.473.619	4.474.988	6.948.839
	Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	399.947	335.318	335.017
	3 Daerah (BUMD)	-	399.947	335.318	335.017
	4 Lain-lain PAD	4.696.776	5.122.325	2.131.972	4.156.689
III.	Dana Perimbangan	234.474.745	241.205.470	261.657.114	427.280.516
	1 Bagi Hasil Pajak	12.802.851	18.695.642	19.885.103	19.827.483
	2 Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum	754.179	994.084	389.954	1.234.531
	3 (DAU)	201.810.000	207.729.000	213.446.000	362.536.000
	Dana Alokasi Khusus				
	4 (DAK)	12.354.447	8.950.000	21.189.576	37.814.613
	5 Bagi Hasil Pajak Propinsi Bantuan Keuangan	3.553.268	3.836.744	5.746.481	4.067.888
	6 Propinsi	3.200.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000
IV.	Penerimaan Lain-lain	13.349.602	12.517.834	10.840.794	7.472.174
	1 Penerimaan dari Pusat	13.349.602	12.517.834	8.160.000	7.472.174
	2 Dana Darurat	-	-	-	-
	3 Dana Rutin Daerah	-	-	-	-
	4 Dana Pembangunan	-	-	-	-
	5 Dana Lainnya	-	-	2.680.794	-
	<b>Jumlah</b>	<b>276.043.162</b>	<b>277.553.473</b>	<b>300.111.191</b>	<b>475.868.576</b>

Sumber : Sambas dalam Angka. BPS. 2007

Pada tahun 2005, kontribusi dari sektor pertanian sebesar 43,86 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,78 persen, sektor industri sebesar 10,64 persen dan sektor lainnya 16,72 persen. Dan tahun 2006, sektor memberikan kontribusi sebesar 43,36 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,13 persen, sektor industri sebesar 10,41 persen dan sektor lainnya 17,10 persen. Pola Struktur ini masih tetap sama dibanding tahun sebelumnya meskipun peranan setiap sektor menunjukkan angka yang semakin berimbang.

Grafik. 4.6. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2006



Sumber : Sambas dalam Angka. BPS. 2007

Secara umum pendapatan setiap penduduk Kabupaten Sambas dicerminkan oleh pendapatan regional per kapita. Besarnya pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 6.858,08 ribu rupiah menjadi 6.638,82 ribu rupiah pada tahun 2006. Tetapi laju pertumbuhan PDRB per capita pada tahun 2006 bila dilihat berdasarkan harga

konstan 2000 meningkat sekitar 2,82 persen, yaitu dari 4.777,30 ribu rupiah menjadi 4.912,12 ribu rupiah.

Tabel. 4. 9 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kab. Sambas Tahun 2006

No.	Keterangan	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993
1	PDRB AD Harga Pasar ( Jutaan Rp.)	3.673.264,28	2.362.079,32
2	Penyusutan ( Jutaan Rp.)	347.123,47	223.216,50
3	PDRN AD Harga Pasar ( Jutaan Rp.)	3.326.140,81	2.138.862,83
4	Pajak Tak Langsung ( Jutaan Rp.)	62.548,34	40.221,49
5	PDRN ADB Faktor Produksi ( Jutaan Rp.)	3.263.592,46	2.098.641,34
6	Penduduk Pertengahan Tahun ( Jiwa )	480.868	480.868
7	PDRB Perkapita ( Rupiah )	7.638.820,39	4.912.115,84
8	Pendapatan Regional Perkapita ( Rupiah )	6.786.878,03	4.364.277,39

Sumber : Sambas dalam Angka. BPS. 2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 1.946 tenaga kerja, hal ini memperkuat pernyataan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Sambas di dominasi oleh sektor pertanian.

Tabel 4.10. Jumlah Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan Pada Perusahaan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Sambas

No	Lapangan Usaha	Jumlah Perusahaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian/ Perkebunan	15	1.160	786	1.946
2.	Pertambangan	-	-	-	-
3.	Industri	57	308	51	359
4.	Listrik	2	51	6	57
5.	Bangunan	18	172	6	178
6.	Perdagangan	43	168	13	181
7.	Angkutan	3	18	-	18
8.	Jasa Perusahaan	6	43	18	61
9.	Jasa Sosial Perorangan	14	103	22	125
	Jumlah	158	2.023	902	2.925

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Sambas. Kab. Sambas dalam Angka. BPS. 2007

## 4.2 Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas

### 4.2.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Sajingan Besar terletak di bagian Utara Kabupaten Sambas atau diantara 1°25' Lintang Utara serta 1°49' Lintang Utara dan 109°25' Bujur Barat serta 109°45' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Sambas adalah:

- Utara : Serawak ( Malaysia)
- Selatan :Kec.Galing
- Barat : Serawak ( Malaysia)
- Timur : Kec. Paloh

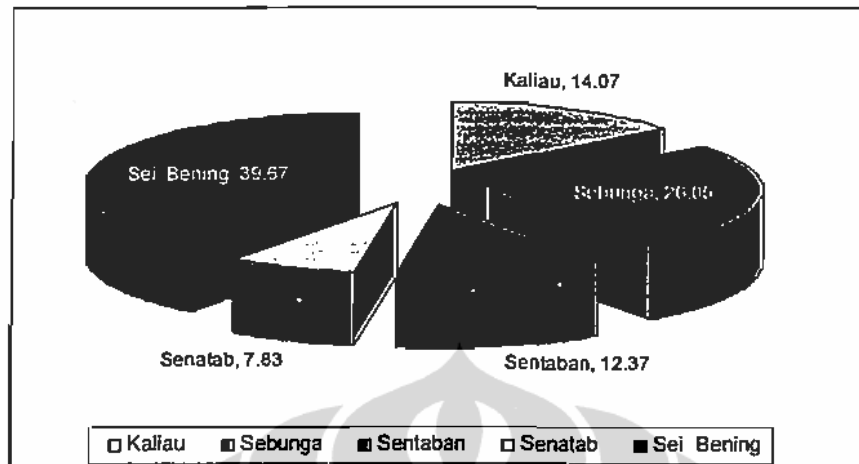
Luas Kecamatan Sajingan Besar adalah 1.404,94 km<sup>2</sup> atau sekitar 21,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas, merupakan yang terluas di Kabupaten Sambas. Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2006 terbagi menjadi lima Desa. Desa terluas adalah Desa Sei Bening dengan luas 557,30 km<sup>2</sup> atau 39,67 persen sedangkan yang terkecil adalah Desa Senatab dengan luas sebesar 110,04 km<sup>2</sup> atau 7,83 persen dari luas wilayah Kecamatan Sajingan Besar. Luas masing-masing desa di Kecamatan Sajingan Besar dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel. 4.11. Luas Wilayah Kecamatan Sajingan Besar

No	Desa	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kecamatan (%)
1.	Kaliau	3	6	197,74	14,07
2.	Sebunga	4	8	366,00	26,05
3.	Sentaban	3	6	173,86	12,37
4.	Senatab	3	8	110,04	7,83
5.	Sei Bening	2	5	557,30	39,67
Jumlah		15	33	1.404,94	100

Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

Grafik. 4.7. Persentase Luas Desa terhadap Luas Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2006



Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 200, data diolah kembali

#### 4.2.2 Kependudukan

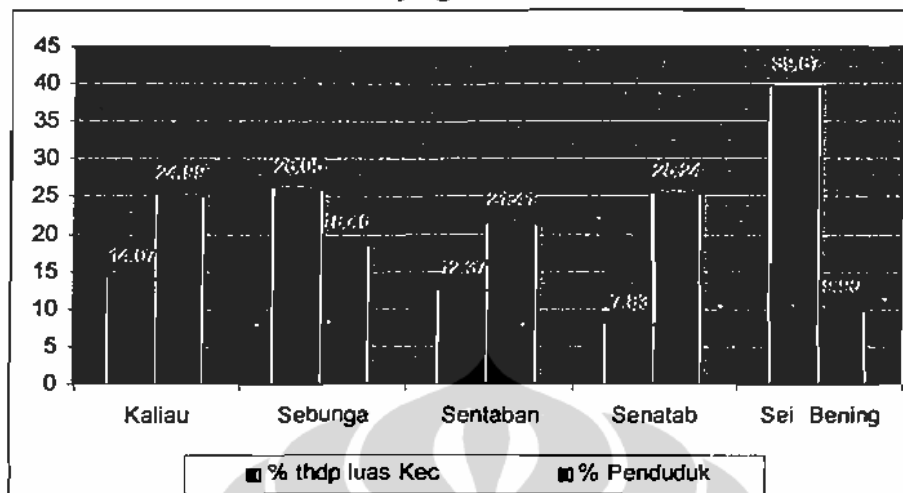
Berdasarkan angka hasil proyeksi, penduduk Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2006 berjumlah sekitar 7.539 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 5 jiwa per kilometer persegi. Desa berpenduduk terbanyak adalah Desa Senatab, yakni sebanyak 1.904 jiwa. Sementara desa berpenduduk terkecil adalah Desa Sei Bening, yakni sebanyak 746 jiwa penduduk. Padahal, Desa Sei Bening adalah desa terluas di Kecamatan Sajingan Besar (kepadatan penduduk 1 jiwa per km<sup>2</sup>). Sementara, Desa senatab yang memiliki luas 110,04 Km<sup>2</sup> berpenduduk 1.902 jiwa atau dengan kepadatan 17jiwa/Km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kecamatan Sajingan Besar juga tidak merata seperti halnya Kabupaten Sambas. Jumlah penduduk dan penyebaran penduduk di Kecamatan Sajingan Besar dapat dilihat pada tabel 4.11 dan grafik 4.8 berikut ini :

Tabel. 4.12. Penduduk & Kepadatan Penduduk Kecamatan Sajingan Besar 2006

No	Desa	Penduduk			Kepadatan Penduduk / Km <sup>2</sup>
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kaliau	1039	845	1884	10
2	Sebunga	743	649	1392	4
3	Sentaban	881	733	1614	9
4	Senatab	1028	875	1903	17
5	Sei Bening	395	351	746	1
Jumlah		4086	3453	7539	5

Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

Grafik. 4.8 . Persentase Luas Wilayah Terhadap Penduduk  
Kec. Sajingan Besar 2006

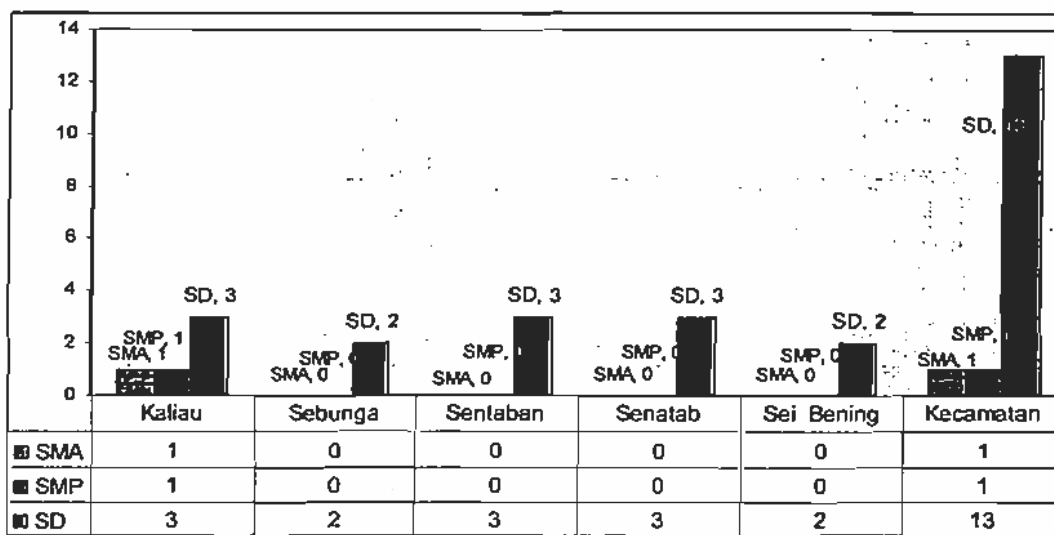


Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

#### 4.2.3. Pendidikan

Keberhasilan proses pendidikan sangat tergantung oleh tersedianya sarana, dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai. Pada tahun 2006, jumlah prasarana SD meningkat sebesar 8,33 persen menjadi 13 dari 12 persen pada tahun 2005, sedangkan SLTP dan SLTA tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu terdapat dua SLTP dan satu SLTA di Kecamatan Sajingan Besar. Jumlah sarana pendidikan di Sajingan Besar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik. 4.9. Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 200, data diolah kembali

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya sarana Sekolah dasar yang dimiliki masing-masing desa. Untuk tingkat SLTP dan SLTA hanya Desa Kaliau yang memiliki sarana sekolah lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa seperti halnya penyebaran penduduk yang tidak merata, penyebaran sarana pendidikanpun tidak merata di setiap desa. Dan penduduk juga terbatas untuk melanjutkan pendidikan pada Sekolah lanjutan, karena sarana SD yang hanya terdapat di sebagian besar desa di Kecamatan Sajingan Besar.

Peningkatan sarana SD tidak memicu kenaikan jumlah murid SD di Sajingan Besar. Jumlah murid SD mengalami penurunan sebesar 0,85 persen. Sedangkan jumlah guru mengalami kenaikan sebesar 50,85 persen. Pada tahun 2006, jumlah murid SD mencapai 1.518 orang dan jumlah guru yang ada sebanyak 89 orang. Hal ini berarti, rasio murid terhadap guru mencapai 17,06 ini berarti beban tiap guru mendidik rata-rata 17 s/d 18 murid. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka beban seorang guru berkurang 9 murid, dimana pada tahun 2005 rasio guru dengan murid sebesar 25,95.

Di tingkat SLTP, jumlah murid mengalami peningkatan dari 174 menjadi 232 orang di tahun 2006 atau naik sekitar 33,33 persen. Sedangkan jumlah guru mengalami peningkatan sekitar 91,67 persen atau naik menjadi 23 orang dengan rasio guru terhadap murid sebesar 10,08. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, Jumlah murid SLTA di Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2006 sebanyak 232 murid dengan jumlah guru sebanyak 23 orang, sehingga rasio guru terhadap murid mencapai 7,90, ini berarti setiap guru mengajar sekitar tujuh sampai delapan murid.

Secara keseluruhan, sebagian besar penduduk Sajingan Besar hanya berpendidikan SD, yakni sebanyak 3065 jiwa. Jumlah ini berbanding dengan jumlah penduduk yang tidak sekolah sebesar 1525 jiwa dan tidak tamat SD sebanyak 2474 jiwa. Sementara itu yang menamatkan pendidikan Akademi/Perguruan tinggi hanya 36 orang dari seluruh penduduk Sajingan Besar, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel. 4.13. Jumlah Penduduk Kec. Sajingan Besar Menurut Tingkat Pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	1525
2.	Tidak Tamat SD	2474
3.	SD	3065
4.	SLTP/Sederajat	1183
5.	SLTA/Sederajat	340
6.	Akademi/Ke atas	36
<b>Jumlah</b>		<b>8621</b>

Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

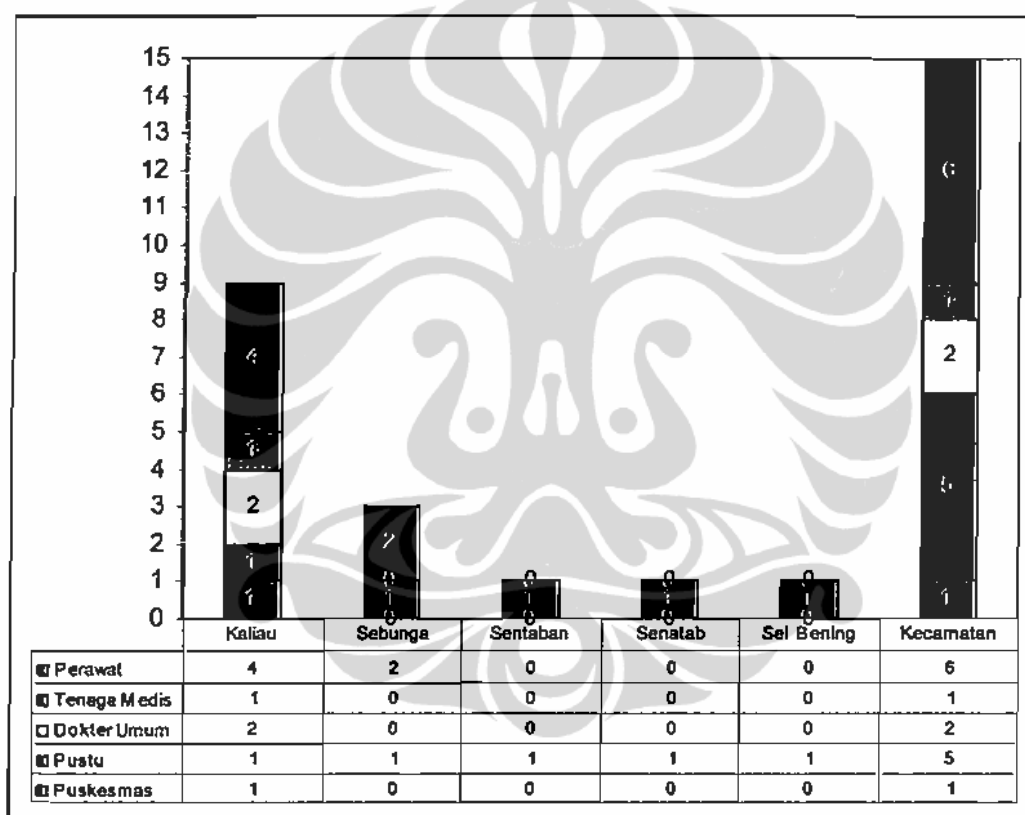
#### 4.2.4. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara terhadap rakyatnya. Sebab status kesehatan masyarakat adalah indikator penting dari seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktivitas ekonomi. Di Kecamatan Sajingan Besar, sarana kesehatan yang tersedia hanya puskesmas, satu puskesmas utama di Desa Kaliau dan satu puskesmas pembantu disetiap desa. Sementara itu, tidak terdapat Rumah Sakit di Sajingan Besar. Pada grafik 4.9 dapat dilihat jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan sajingan Besar.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa akses kesehatan penduduk Sajingan besar masih sangat terbatas. Dan dengan demikian, pemerintah belum memberikan hak penuh pada masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan di bidang kesehatan harus diarahkan pada penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang meliputi bangunan fisik (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan poliklinik) serta pengadaan tenaga kesehatan yang terampil. Akses masyarakat pada sarana merupakan hal yang cukup penting mengingat kondisi geografis dan persebaran penduduk di kecamatan Sajingan Besar tidak merata. Diharapkan ketersediaan sarana kesehatan seperti pukesmas dan pukesmas pembantu yang tersebar di wilayah kecamatan dapat menggantikan peran rumah sakit yang jaraknya rata-rata mencapai 50km dari wilayah kecamatan Sajingan Besar.

Sementara itu selain tersedianya infrastruktur kesehatan di kecamatan Sajingan Besar mutlak pula harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia berupa Dokter, tenaga medis dan sebagainya untuk dapat melakukakn pelayanan kesehatan secara maksimal pada masyarakat. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki oleh kecamatan Sajingan Besar.

Grafik. 4.10. Banyaknya Tenaga dan Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2006



Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

Berdasarkan grafik diatas maka dapat diketahui bahwa di kecamatan Sajingan Besar hanya mempunyai dua dokter umum, satu tenaga medis dan enam perawat. Jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Sajingan Besar masih sangat terbatas dan tidak ideal untuk untuk dapat mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada warga di kecamatan Sajingan Besar yang meneapai lebih dari 7.500 jiwa.

#### 4.2.5. Sosial dan Ketenagakerjaan

Kecamatan Sajingan Besar sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas selain Paloh yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia memiliki peranan yang strategis bagi Pembangunan Kabupaten Sambas maupun bagi Propinsi Kalimantan Barat. Penataan ekonomi, Pemeliharaan kamtibmas, Penjagaan Keamanan dan juga pelayanan publik tentunya merupakan hal-hal yang sangat penting bagi manajemen pemerintahan Kecamatan Sajingan Besar.

Namun sangat disayangkan bahwa Kecamatan Sajingan Besar merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Sambas. Kecamatan ini bisa dikatakan sebagai daerah terbelakang, karena sarana dan prasarana yang tersedia baik untuk pendidikan dan kesehatan sangatlah minim, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Secara lebih rinci kemiskinan di Sajingan Besar pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.14. Penduduk Miskin Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2005

NO	NAMA DESA	DESA MISKIN		JLH KK	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK MISKIN	PENDUDUK MISKIN	PERSEN TASE %
		YA	TBK		LK	PR	JUMLAH			
1	Desa Sebunga	✓		272	786	726	1.512	129	754	49,87
2	Desa Senatab	✓		351	1.123	1.023	2.146	104	677	31,55
3	Desa Kaliau'	✓		305	1.075	943	2.018	104	557	27,60
4	Desa Sei Bening	✓		154	437	404	840	117	655	77,98
5	Desa Santaban	✓		321	956	850	1.806	127	681	37,71
JUMLAH				1.403	4.377	3.946	8.322	581	3.324	39,94

Sumber Data BPS Kabupaten Sambas Kerjasama dengan Pemkab Sambas Tahun 2005.  
www.sambas.go.id

Perhitungan tabel diatas berdasarkan menggunakan variabel-variabel yang berbeda dari Susenas (terdapat tambahan kriteria) sehingga angka yang diterapkan lebih besar dari angka Susenas yang diterbitkan oleh BPS pusat. Apapun variabel dan pengukurannya dari tabel dan grafik di atas diketahui bahwa kecamatan Sajingan Besar sebagai wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Serawak (Malaysia) merupakan kecamatan termiskin di Kabupaten Sambas sejak 2001 hingga tahun 2005. Dari total jumlah penduduk 8.322 jiwa, 3.324 jiwa-nya termasuk dalam kategori penduduk miskin atau berarti 39.94 persen.

Ketimpangan nyata yang dapat dilihat dari penduduk Sajingan Besar salah satunya adalah dari segi penggunaan bahan bakar. Jika selama ini masyarakat Indonesia mengkonversi bahan bakar dari penggunaan minyak tanah dan gas ke penggunaan kayu bakar disebabkan karena kelangkaan dan mahalnya harga minyak tanah dan gas, masyarakat Sajingan Besar justru sudah sejak lama menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama mereka untuk memasak. Hal ini disebabkan karena memang daya beli masyarakatnya yang rendah, disamping bahan bakar fosil sulit untuk menjangkau daerah tersebut.

Tabel. 4. 15 Banyaknya Pelanggan Listrik Pln Menurut Golongan Pelanggan Di PLN Ranting Sajingan Tahun 2006

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah
1	Rumah Tangga	284
2	Industri	1
3	Badan Sosial	1
4	Pemerintahan	6
Jumlah		292

Sumber : PT PLN Wilayah Kalimantan Barat Cabang Singkawang

Hal lainnya adalah dari segi penggunaan jamban yang cukup memprihatinkan. Dari satu Kecamatan Sajingan Besar, dua desanya yaitu Sebunga dan Kaliau masyarakatnya tidak memiliki jamban. Sehingga untuk keperluan MCK (mandi, cuci, dan kakus) masyarakat di dua desa tersebut tergantung pada sungai. Dengan demikian, sungai memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Sajingan Besar pada umumnya, disamping juga digunakan untuk menunjang transportasi, irigasi, dan konsumsi.

Dengan letak geografis yang berupa lereng atau punggung bukit dan dataran, sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Tabel dibawah ini menggambarkan jumlah penduduk Kecamatan Sajingan Besar menurut mata pencaharian :

Tabel. 4.16 Mata Pencaharian Penduduk Sajingan Besar Tahun 2006

No.	Jenis Mata Pencaharian Menurut Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian/Perkebunan	3563
2.	Perdagangan/Swasta	90
3.	Perikanan	-
4.	Pertambangan	-
5.	PNS/TNI/Polri/Pegawai lainnya	89
6.	Usaha lainnya	1601
<b>Jumlah</b>		<b>5345</b>

Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

Hasil pembangunan di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan manfaatnya sudah dirasakan oleh sebagian besar penduduk di Sajingan Besar. Dari tabel 17.IV diatas dapat dilihat bahwa 3563 penduduk Sajingan Besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Dan sisanya sebanyak 1601 orang bekerja dari sektor usaha, 90 orang sebagai pedagang, dan 89 orang sebagai PNS/TNI/Polri/Pegawai lainnya.

Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Secara umum peningkatan produksi tanaman pangan di Kecamatan Sajingan Besar masih sangat dipengaruhi bertambahnya luas panen. Selain itu, produktivitas juga sangat mempengaruhi produksi. Kondisi demikian terutama akibat pengaruh faktor alam dan kemampuan petani mengelola usaha pertaniannya. Pada tabel dibawah dapat dilihat data tentang luas penen serta produksi pertanian dan perkebunan kecamatan Sajingan Besar:

Tabel. 4.17. Luas Panen Serta Produksi Pertanian dan Perkebunan

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi Sawah	207	574
2.	Padi Ladang	635	982
3.	Jagung	42	59,19
4.	Ubi Kayu	31	314,04
5.	K a r e t	3.939,00	2.036,00
6.	Kelapa Dalam	922	360
7.	Kelapa Sawit	5	-
8.	K o p i	41,00	4,30
9.	Kakao	102,00	16,20
10.	Lada	172,00	48,30

Sumber : *Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007*

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2006 luas panen padi di Kecamatan Sajingan Besar sebesar 842 hektar dengan produksi sebesar 1.556 ton yang mana hasilnya hanya untuk di konsumsi sendiri oleh masyarakat. Sedangkan produksi Jagung 42 hektar sebesar 59,19 ton dan ubi kayu 31 hektar dengan produksi 13,04 ton. Sedangkan pada sub sektor perkebunan umumnya mengalami peningkatan pada luas tanaman yaitu dari 3.846 hektar pada tahun 2005 menjadi 5.181 hektar pada tahun 2006, luas tanaman karet di kecamatan Sajingan Besar sebesar 3.939 hektar dengan produksi 2.036 ton, sedangkan kakao dan lada masing-masing memiliki luas 102 hektar dan 172 hektar. Dengan demikian sektor perkebunan karet adalah sektor andalan dari kecamatan ini.

Letak Kecamatan Sajingan Besar berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia yang secara ekonomi lebih maju dibandingkan Indonesia menyebabkan adanya arus tenaga kerja yang hijrah ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan di negara tetangga tersebut. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah tenaga kerja dari Kecamatan Sanjingan Besar yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri khususnya Malaysia :

Tabel 4.18 Tenaga Kerja Kecamatan Sajingan Besar yang Tercatat Bekerja di Malaysia

No.	Desa	TKI		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kaliau	2	3	5
2	Sebunga	12	8	20
3	Sentaban	-	10	10
4	Senatab	10	25	35
5	Sei Bening	-	-	-
Jumlah		24	46	70

Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah warga kecamatan Sajingan Besar yang menjadi TKI mencapai 70 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 46 perempuan. Pada umumnya tenaga kerja indonesia yang bekerja di Malaysia bekerja sebagai pembantu, buruh bangunan, buruh pengolahan kelapa sawit dan sebagainya.

#### 4.2.6. Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Sajingan Besar atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 14,74 persen dari 19,73 miliar rupiah pada tahun 2005 menjadi 22,64 miliar rupiah pada tahun 2006. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai tambah pada sektor pertanian, sektor keuangan, serta sektor listrik & air minum masing-masing sebesar 15,94 persen, 14,96 persen dan 7,85 persen. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2005 mencapai 14,29 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 15,16 miliar rupiah pada tahun 2006 atau naik sekitar 6,11 persen. Hal ini terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku & Harga Konstan 2000  
Kec. Sajingan Besar

No.	Sektor / Subsektor	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2005	2006 *)	2005	2006 *)
1	<b>PERTANIAN</b>	10.970,73	12.720,38	8.274,74	8.833,00
	a. Tanaman Bahan Makanan	2.020,68	2.301,04	1.497,35	1.569,22
	b. Tanaman Perkebunan	8.376,14	9.748,17	6.405,29	6.877,77
	c. Peternakan & Hasil-hasilnya	439,61	532,81	274,02	292,53
	d. Kehutanan	133,28	137,05	97,40	92,66
	e. Perikanan	1,01	1,31	0,69	0,82
2	<b>PERTAMBANGAN &amp; PENGGALIAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	628,73	739,55	444,69	493,62
4	<b>LISTRIK &amp; AIR MINUM</b>	15,65	16,88	8,41	8,07
	a. Listrik	15,65	16,88	8,41	8,07
	b. Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>BANGUNAN</b>	280,46	317,75	166,88	173,42
6	<b>PERDAGANGAN, HOTEL &amp; RESTORAN</b>	3.030,85	3.430,56	2.122,88	2.245,11
	a. Perdagangan Besar & Eceran	2.992,43	3.387,34	2.095,10	2.215,98
	b. Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Restoran	38,43	43,23	27,78	29,13
7	<b>PENGANGKUTAN &amp; KOMUNIKASI</b>	1.224,26	1.341,33	861,37	891,36
	a. Pengangkutan	1.224,26	1.341,33	861,37	891,36
	1. Angkutan Jalan Raya	712,64	765,52	502,19	512,97
	2. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Ang. Sungai, Danau & Penyeb.	435,78	490,64	307,15	323,50
	4. Jasa Penunjang Angkutan	75,85	85,16	52,03	54,89
	b. Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Pos dan Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>KEUANGAN, PERSEW. &amp; JASA PERUS.</b>	1.353,30	1.555,80	890,34	904,60
	a. Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Sewa Bangunan	1.353,30	1.555,80	890,34	904,60
	d. Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>J A S A - J A S A</b>	2.228,60	2.518,35	1.519,39	1.613,09
	a. Pemerintahan Umum	2.111,82	2.383,82	1.423,94	1.509,95
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	2.111,82	2.383,82	1.423,94	1.509,95
	b. Swasta	116,78	134,53	95,45	103,13
	1. Sosial Kemasyarakatan	67,76	77,72	55,78	59,86
	2. Hiburan & Rekreasi	4,33	4,69	3,97	4,19
	3. Perorangan & Rumah tangga	44,69	52,12	35,70	39,08
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>19.732,57</b>	<b>22.640,59</b>	<b>14.288,71</b>	<b>15.162,27</b>

Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah melalui program pembangunan dan pengembangan Paloh Sajingan ternyata membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sajingan Besar. Akan tetapi



peningkatan pertumbuhan ekonomi jika tidak selaras dengan pemerataan pendapatan juga tidak akan membawa dampak yang berarti bagi masyarakat secara luas. Perlu adanya keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Tabel. 4.20. Perkembangan Pendapatan Regional Dan Angka Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2000 Kecamatan Sajingan Besar

No.	Sektor / Subsektor	2004	2005	2006 *)
<b>I</b>	<b>ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>			
1.	PDRB AD Harga Pasar [Jutaan Rp.]	13.186,78	15.176,55	17.293,39
2.	Penyusutan (Jutaan Rp.)	1.246,15	1.434,18	1.634,23
3.	PDRN AD Harga Pasar [Jutaan Rp.]	11.940,63	13.742,37	15.659,16
4.	Pajak Tak Langsung [Jutaan Rp.]	224,54	258,43	294,47
5.	PDRN ADB Faktor Produksi (Jutaan Rp.)	11.716,09	13.483,94	15.364,69
6.	Penduduk Pertengahan Tahun [Jiwa]	7.313	7.354	7.411
7.	PDRB Perkapita (Ribuan Rp.)	1.803.197,35	2.063.714,25	2.333.475,64
8.	Pendapatan Regional Perkapita (RibuanJutaan Rp.)	1.602.090,36	1.833.552,33	2.073.227,77
<b>II.</b>	<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000</b>			
1.	PDRB AD Harga Pasar [Jutaan Rp.]	11.601,14	12.719,65	13.456,74
2.	Penyusutan (Jutaan Rp.)	1.096,31	1.202,01	1.271,66
3.	PDRN AD Harga Pasar [Jutaan Rp.]	10.504,84	11.517,65	12.185,08
4.	Pajak Tak Langsung [Jutaan Rp.]	197,54	216,59	229,14
5.	PDRN ADB Faktor Produksi (Jutaan Rp.)	10.307,29	11.301,06	11.955,94
6.	Penduduk Pertengahan Tahun [Jiwa]	7.313	7.354	7.411
7.	PDRB Perkapita (Ribuan Rp.)	1.586.372,70	1.729.623,78	1.815.779,06
8.	Pendapatan Regional Perkapita (Ribuan Rp.)	1.409.447,73	1.536.722,30	1.613.268,86

Sumber : Sajingan Besar dalam angka. BPS Kab. Sambas. 2007

#### 4.3. Lundu, Serawak Malaysia

Lundu merupakan salah satu kota di Serawak Malaysia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Sambas, Indonesia. Daerah ini Terletak di bagian barat daya Bagian Kuching (Sarawak). Dengan wilayah seluas 1812.3 km<sup>2</sup> persegi atau 1,5% dari keseluruhan wilayah Sarawak. Ibukota Daerah Lundu

terletak di Kota Lundu dengan kota Sematan sebagai Pusat Daerah Kecil (wilayah administrasi kecil dibawahnya). Jika di Indonesia kewcnangan Lundu sama artinya dengan Kecamatan sedangkan Biawak dapat di artikan sebagai Desa di Indonesia.

Penduduk wilayah ini sesuai sensus pada tahun 2000 berjumlah 28.070 jiwa yang terdiri dari 23.950 jiwa Bumiputera, 9.328 jiwa Melayu dan 3.750 jiwa Iban, dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 1991 – 2000 sebesar 1,22% pertahun. Mayoritas kaum bumiputra di daerah ini adalah kaum Bidayuh (Jagoi, Selako, dan Lara).

Anggaran kependudukan yang diberikan untuk wilayah ini oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2007 sebesar RM. 31.600. Hampir 80% daripada penduduk di daerah Lundu bekerja pada sektor pertanian, dengan mayoritas melakukan penanaman koko, lada hitam, padi, buah-buahan dan kelapa sawit. Dan di kawasan persisir pantai mayoritas bekerja sebagai nelayan.

Sektor pekerjaan lain yang dilakukan oleh penduduk wilayah ini meliputi sektor kehutanan, pemeliharaan ulat sutera, pemeliharaan ketam, udang harimau, ikan air tawar dan penambangan pasir Silika sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

Jarak Pusat Kota Lundu dari Bandaraya Kuching sejauh 100 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan umum yaitu Bis Sarawak transport Berhad dengan biaya sekitar 10 RM. Bisa juga menggunakan taksi dengan biaya sekali jalan 120 RM dan apabila disewa pulang pergi biayanya 180 RM - 240 RM. Sedangkan dari Kampung Biawak sejauh 26 km hanya bisa ditempuh dengan menggunakan taksi.

Pada tahun 2006 daerah Lundu memiliki 536 orang guru yang terdiri dari 366 orang guru Sekolah Rendah Kerajaan (SD Negeri) dan 167 orang guru Sekolah Menengah (SMP dan SMA).

Pada tingkat Sekolah Rendah rasio murid terhadap guru sebesar 13, rasio murid terhadap sekolah 160 dan rasio guru terhadap sekolah sebesar 12. Sedangkan untuk tingkatan sekolah Menengah, rasio murid terhadap guru adalah 21, rasio murid terhadap sekolah 1.723 dan rasio guru terhadap sekolah adalah 84.

Untuk fasilitas kesehatan wilayah ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sarana kesehatan di Indonesia setingkat kecamatan. Daerah ini memiliki 1 buah rumah sakit, 5 buah klinik kesehatan, 1 buah klinik desa (dengan fasilitas klinik bersalin), 2 buah klinik bergerak (puskesmas keliling), dan 4 buah klinik gigi.

Untuk tenaga kesehatan pada tahun 2006, daerah ini memiliki 5 orang dokter, 1 dokter gigi, 20 orang mantri, 28 orang perawat, 5 orang perawat gigi, dan 51 orang jururawat masyarakat (klinik desa membina masyarakat yang dianggap mampu sebagai wakil masyarakat untuk memiliki obat tertentu dan membantu masyarakat yang memerlukan obat tersebut sesuai sakit yang diderita (penyakit ringan).

Untuk wilayah Kampong Biawak terletak di 1 33' 00" garis lintang dan 110 23' 00" garis bujur dengan jumlah RT sebanyak 120 KK, penduduk sekitar 300 – 400 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani. Penduduk asli Biawak dan Sajingan Besar merupakan satu suku yang sama yaitu berasal dari suku dayak Rara sehingga tak jarang setiap adanya pertemuan maupun festival adat selalu mengikut sertakan penduduk dari Sajingan Besar. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan di Biawak yang pusatkan pada rumah adat yang telah berdiri disana. (Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sarawak Tahun 2007).

#### **4.4. Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat**

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung terbanyak dengan negara tetangga (Malaysia) di darat maupun di lautan. Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak (Malaysia) adalah 966 kilometer. Seperti terlihat pada tabel 1.1, wilayah perbatasan Kalimantan Barat melintasi 113 desa dalam 15 kecamatan dan di 5 kabupaten. Dengan anggapan bahwa lebar wilayah perbatasan adalah 20 kilometer, maka luas wilayah perbatasan Kalimantan Barat adalah 25.197 kilometer persegi, sedangkan luas seluruh kecamatan yang dilintasi garis perbatasan adalah 2.519.744 hektar. Jumlah penduduk seluruh kecamatan tersebut adalah 177.067 jiwa, sehingga kepadatan penduduk per kilometer persegi wilayah kecamatan di perbatasan adalah 8 orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21. Wilayah Administratif, Luas Dan Jumlah Penduduk Di Kawasan Perbatasan Kalbar Tahun 2005

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LUAS (Ha)	PENDUDUK
1	Sambas	Paloh	6	114.884	23.225
2	Sambas	Sajingan Besar	5	139.12	7.56
3	Bengkayang	Jagoi Babang	6	65.5	13.956
4	Bengkayang	Siding	8	56.33	6.7
5	Sanggau	Entikong	5	50.689	10.188
6	Sanggau	Sekayam	10	84.101	21.498
7	Sintang	Ketungau Hulu	9	213.82	18.657
8	Sintang	Ketungau Tengah	13	218.24	24.62
9	Kapuas Hulu	Putusibau	8	412.2	14.885
10	Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	8	345.76	5.269
11	Kapuas Hulu	Batang Lupar	7	133.29	4.691
12	Kapuas Hulu	Empanang	5	35.725	2.591
13	Kapuas Hulu	Badau	6	70	3.991
14	Kapuas Hulu	Puring Kencana	4	44.855	3.008
15	Kapuas Hulu	Kedamin	13	535.23	16.228
<b>TOTAL</b>			<b>113</b>	<b>2.519.744</b>	<b>177.067</b>

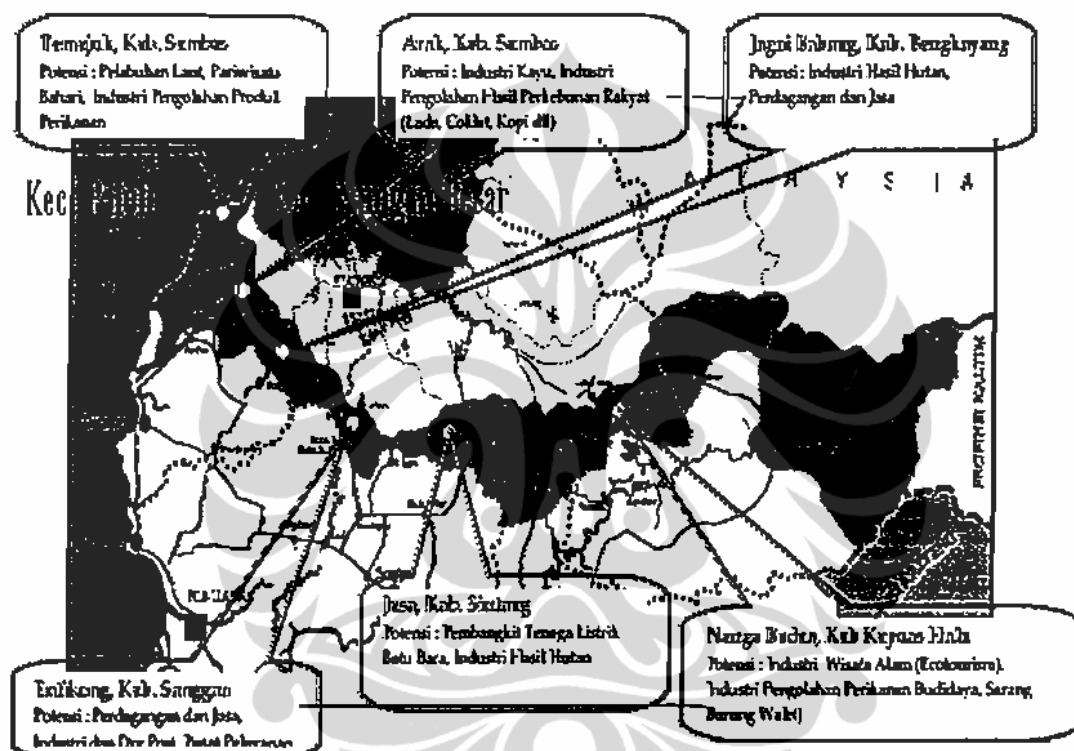
Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005

Dalam bukunya Guo mengatakan bahwa perbatasan di Kalimantan (Indonesia) dengan Serawak (Malaysia) masuk dalam tipe *natural border*, yaitu perbatasan yang ditandai oleh kondisi alam yaitu pegunungan Kapuas Hulu. Pada masa lalu daerah tersebut dipergunakan sebagai perbatasan karena alasan pertahanan militer, sehingga aktifitas perlintasan batas tradisional melalui jalur darat lebih banyak terjadi di 5 (lima) kabupaten perbatasan tersebut (Guo, 1996 : 15)

Pada 5 (lima) kabupaten yang berbatasan ini tercatat sebanyak 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dan 32 kampung di Sarawak. Dari 50 jalan setapak tersebut, telah disepakati 16 desa di Kalimantan Barat dan 10 kampung di Sarawak sebagai Pos Lintas Batas (PLB), dan hanya (1) satu yang telah diresmikan sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) atau istilah dalam keimigrasian disebut dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Entikong Kabupaten Sanggau sejak 25 Februari 2001 ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id))

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa masing – masing daerah perbatasan di Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang beragam sehingga upaya pengembangan masing – masing kawasan ini berbeda satu sama lainnya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki.

Gambar.1.1 Skenario Pengembangan Pusat Agribisnis dan Agroindustri di Beberapa Titik Kuat Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat



Skenario Pengembangan Pusat Agribisnis dan Agroindustri di Beberapa Titik Kuat Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat

Sumber : [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Lahirnya Undang – Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, kedudukan Pemerintah Kabupaten Sambas pindah dari Singkawang ke Sambas membuat Kabupaten Sambas harus membangun kembali fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum lainnya dari titik nadir.

Kabupaten Sambas dengan visinya “Terwujudnya Sambas Yang Mandiri, Berprestasi, Madani dan Sejahtera melalui TERPIKAT TERIGAS 2011” dan mewujudkan Sambas Sejahtera yang merupakan salah satu agenda pokok

pembangunan Kabupaten Sambas 2006 – 2011 merupakan bentuk tekad Pemerintah Kabupaten Sambas agar esensi dan tujuan otonomi dan desentralisasi daerah tercapai. Berbagai program telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui kebijakan pembangunan pengembangan kawasan perbatasan di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) sejak tahun 2003 sesuai SK DPRD Kabupaten Sambas No.27/Pimp/2003 tanggal 11 September 2003 yang menyetujui Rancangan Keputusan Bupati Sambas tentang Pengembangan Pembangunan Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) menjadi Keputusan Bupati Sambas.

Hal tersebut juga ternyata mendapat respon positif dari Pemerintah Pusat dengan komitmennya menjadikan Aruk (dusun di desa Sebunga' kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan langsung dengan Kampong Biawak (Lundu Serawak Malaysia) sebagai **Percontohan Pusat Kawasan Perbatasan Nasional** dengan pembukaan PPLB / QICS (*Customs-Immigration-Quarantine and Security*) yang sebenarnya direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia pada awal tahun 2008 ([www.sambas.go.id](http://www.sambas.go.id)).

Komitmen pemerintah pusat dalam rangka membangun kawasan perbatasan di Kalimantan dengan memetakan pusat – pusat pertumbuhan yang potensial terlihat seperti pada tabel 1.2. Akan tetapi implementasinya belum membawa pembangunan yang berarti di kawasan perbatasan ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas dari tahun ke tahun sejak tahun 2002 hingga tahun 2006. Walaupun persentase penduduk miskin kabupaten Sambas masih berada di bawah rata – rata penduduk miskin Nasional dan relatif sama dengan penduduk miskin Provinsi Kalimantan Barat akan tetapi perkembangannya menunjukkan tren peningkatan yang harus selalu di waspadai dalam rangka pembangunan manusia Indonesia umumnya. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel 1.2. dan grafik 1.1.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sebagaimana tren penduduk miskin nasional, tren penduduk miskin di kawasan perbatasan juga mengalami tren yang meningkat dari tahun ke 2002 ke tahun 2006. Walaupun kawasan perbatasan Kalimantan Barat rata – rata berada di bawah persentase kemiskinan Nasional dan

terlihat sekali bahwa kemiskinan di kawasan perbatasan Indonesia khususnya di Bagian Timur Indonesia kemiskinan tersebut jauh diatas angka rata - rata nasional, kemiskinan dimana dan kapanpun menunjukkan bahwa rendahnya kualitas hidup penduduk berdasarkan preferensi masyarakat setempat.

Tabel. 4.22. Sistem Pusat Pertumbuhan pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak – Sabah (KASABA)

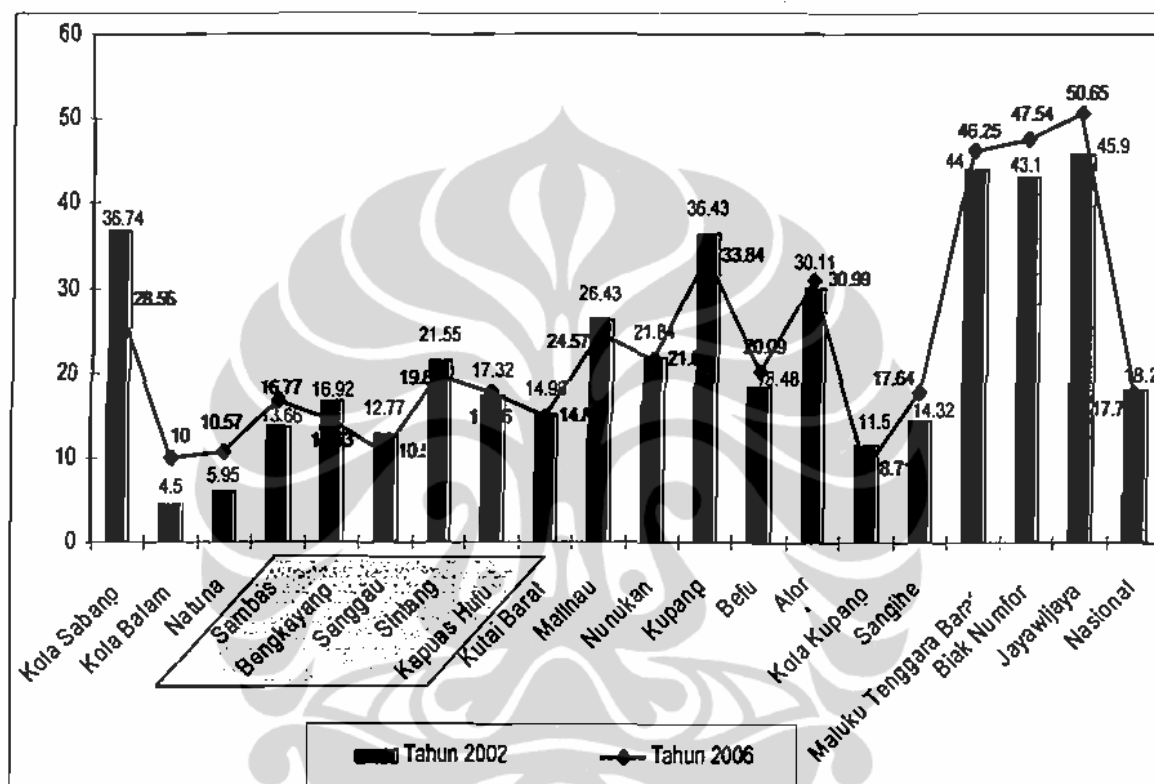
KABUPATEN	FUNGSI KOTA			KOTA DI SARAWAK DAN SABAH
	PKN	PKW	PKL	
SAMBAS	Aruk	Singkawang, Sambas, Temajok	Sajingan, Sapanan, Liku, Sekura, Galing, Pemangkat, Sentebang, Kaliau', Sejangkung	Sematan, Biawak, Teluk Melano
BENGKAYANG	Jagoi Babang	Bengkayang	Jagoi, Sentabeng, Seluas, Siding, Sanggau Ledo, Ledo	Sirikin, Padauan, Sitas, Gobang
SANGGAU	Entikong	Sanggau, Ngabang	Bantan, Serimbu, Balai Karangan, Beduai, Kembayan, Noyan, Bonti, Sekadau	Tebedu, Bunan Gega
SINTANG	Jasa	Sintang	Nanga Bayan, Merakai Panjang, Semareh, Sei. Buaya, Sei Kelik, Nanga Merakai, Senaning, Nanga Ketungau	Kranggas, Gayau, Balai Ringin
KAPUAS HULU	Nanga Badau	Putussibau	Langau, Lanjak, Semitau, Nanga Kantuk, Nanga Silat, Puring Kencana, Banua Martinus	Lubuk Antu, Batu Lintang
KUTAI BARAT	Long Pahangai	Sendawar, Lasan Tuyun	Tiongohang, Long Boh, Ujoh Bilang, Long Hubung, Long Iram	Kapit
MALINAU	Malinau	Long Nawang	Long Busang, Sei Peningang, Apau Ping, Loreh, Long Ayu, Long Alango, Long Pujungan, Pulau Sapi, Data Dian	Tapak Mega, Long Pasia, Long Bangah
NUNUKAN	Nunukan Sebatik, Long Midang	Simanggaris, Long Bawan	Sei. Pancang, Labang, Tau Lumbis, Lembubud, Pa' Betung, Atap, Mensalong	Ba'Kelafan, Salilir, Sibua

Sumber : Ditjen Penataan Ruang Dept. Kimpraswil, 2004

Keterangan:

- PKN** : Pusat Kawasan Nasional  
**PKW** : Pusat Kegiatan Wilayah  
**PKL** : Pusat Kegiatan Lokal

Grafik 4.11. Persentase Kemiskinan di Beberapa Kawasan Perbatasan Indonesia Tahun 2002 – 2006



Sumber : BPS beberapa tahun terbitan data telah diolah kembali

Lambatnya pembangunan kawasan perbatasan Aruk Sambas – Biawak Serawak Malaysia dan kawasan lain di Kalimantan juga terkendala oleh belum terbitnya peraturan tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang telah lama dijanji oleh pemerintah pusat. Hal ini membawa kegamangan bagi pemerintah kabupaten kawasan perbatasan untuk bertindak melebihi wewenangnya.

Sebagaimana karakteristik kawasan perbatasan Indonesia pada umumnya, Kabupaten Sambas yang juga mempunyai kawasan perbatasan darat (Aruk – Biawak) dan laut (Temajok – Teluk Melano) dengan negara Malaysia (Serawak) juga mengalami kondisi yang sama, dimana ketimpangan/kesenjangan pembangunan sangat tajam dengan kawasan perbatasan negara tetangga.



Tabel. 4.23. Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Kawasan Perbatasan Indonesia Tahun 2002 – 2006

No	Kabupaten / Kota	Provinsi	Negara Tetangga	Persentase Penduduk Miskin					Ket Perbatasan
				2002	2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kota Sabang	NAD	India	36.74	32.39	31.46	29.78	28.56	Laut
2	Kab. Serdang Bedagai	Sumut	Malaysia	No data	no data	no data	10.53	12.05	Laut
3	Kota Batam	Kep. Riau	Singapura	4.5	5.34	5.1	7.7	10	Laut
4	Kab. Natuna	Kep. Riau	Vietnam	5.95	5.59	5.19	9.35	10.57	Laut
5	Kab. Sambas	Kalbar	Malaysia	13.66	14.39	14.46	15.1	16.77	Darat & Laut
6	Kab. Bengkayang	Kalbar	Malaysia	16.92	17.63	15.18	13.63	14.63	Darat
7	Kab. Sanggau	Kalbar	Malaysia	12.77	12.05	10.93	9.84	10.55	Darat
8	Kab. Sintang	Kalbar	Malaysia	21.55	18.74	16.61	19.09	19.8	Darat
9	Kab. Kapuas Hulu	Kalbar	Malaysia	17.32	16.93	16.09	16.9	17.76	Darat
10	Kab. Kutai Barat	Kaltim	Malaysia	14.98	13.81	13.63	13.25	14.81	Darat
11	Kab. Malinau	Kaltim	Malaysia	26.43	23.99	23.88	22.54	24.57	Darat
12	Kab. Nunukan	Kaltim	Malaysia	21.84	21.55	21.18	19.13	21.66	Darat & Laut
13	Kab. Kupang	NTT	Timor Leste	36.43	35.42	32.68	33.54	33.84	Darat
14	Kab. Belu	NTT	Timor Leste	18.48	20.66	20.51	20.74	20.09	Darat
15	Kab. Alor	NTT	Timor Leste	30.11	28.22	29.06	29.87	30.99	Darat
16	Kab. Rote Ndao	NTT	Timor Leste	No data	29.18	27.45	27.43	27.83	Darat
17	Kota Kupang	NTT	Timor Leste	11.5	11.25	10.65	8.36	8.71	Laut
18	Kab. Sangihe	Sulut	Philipina		13.28	13.25	15.07	17.64	Laut
19	Kab. Kepulauan Talaud	Sulut	Philipina	14.32	14.42	14.03	12.94	15.55	Laut
20	Kab. Maluku Tenggara Barat	Maluku	Timor Leste	44	44.17	43.3	45.29	46.25	Laut
21	Kab. Raja Ampat	Irja Barat	Rep. Palau	No data	30.68	31.73	no data	31.25	Laut
22	Kab. Merauke	Papua	Papua Nugini	No data	28.07	28.15	no data	32.15	Darat
23	Kab. Biak Numfor	Papua	Rep. Palau	43.1	42.27	44.87	47.36	47.54	Laut
24	Kab. Boven Digoel	Papua	Papua Nugini	No data	29.4	28.76	no data	29.64	Darat
25	Kab. Pegunungan Bintang	Papua	Papua Nugini	No data	49.2	47.85	50.33	51.26	Darat
26	Kab. Keerom	Papua	Papua Nugini	No data	27.34	26.16	29.71	29.52	Darat
27	Kota Jayawijaya	Papua	Papua Nugini	45.9	45.55	46.21	49.82	50.65	Darat
Provinsi Kalimantan Barat			Malaysia	16.46	16.49	16.91	16.94	15.94	Darat & Laut
Nasional				18.2	17.42	16.66	16.69	17.75	Darat & Laut

Sumber : BPS Beberapa Tahun Terbitan, data telah diolah kembali

Melalui forum kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (SOSEK MALINDO) pada tanggal 12 Mei 2005 di Miri (Malaysia) disepakati untuk mempercepat pembukaan Perbatasan Resmi Aruk – Biawak dan Temajok – Teluk Melano (kawasan perbatasan Kabupaten Sambas) sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas / TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang diharapkan bisa dioperasikan pada tahun 2007 (Badan PALSA, 2005).

Menurut Gafur (2006), Hamid (2001) serta Noer (2005), permasalahan di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas khususnya dan perbatasan Kalimantan Barat umumnya memiliki ciri diantaranya :

- Kawasan yang tertinggal dan keterisolasian wilayah karena infrastruktur dasar yang sangat buruk dan terbatas (transportasi darat terputus dengan ibukota kabupaten pada musim-musim tertentu, fasilitas listrik dan air bersih baru 50% penduduk kawasan perbatasan yang merasakannya, telekomunikasi hanya bisa dilakukan dengan radio/HT milik pemerintah maupun swasta, hanya mendapatkan siaran televisi dari negara tetangga, minimnya tenaga medis, paramedis dan pengajar).
- Keteringgalan yang dialami penduduk kawasan perbatasan juga tercermin dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rata-rata hanya tamat SD).
- Penyebaran penduduk yang sangat tidak merata dan merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak.
- Ketimpang ekonomi yang sangat besar antara masyarakat perbatasan dengan masyarakat negara tetangga. Hal ini tercermin dari rendahnya pendapatan perkapita masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat yaitu sekitar \$ 300 US/tahun dan masyarakat di Serawak \$ 4.000 US/tahun.

## BAB V

### ANALISA DAN PEMBAHASAN

Seperti telah dikemukakan pada bab I bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komunitas di di kawasan perbatasan dan bukan perbatasan Kabupaten Sambas, interaksi antar kawasan, strategi yang telah dilakukan pemda Kabupaten Sambas serta perbandingan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu analisis yang dilakukan adalah berdasarkan pada hasil observasi data primer, yaitu melalui wawancara dan pengisian kuesioner responden, serta data sekunder yang diperoleh dari kajian beberapa buku literatur, makalah, jurnal, laporan-laporan dan *browsing* internet.

#### V.1 Karakteristik Kemiskinan

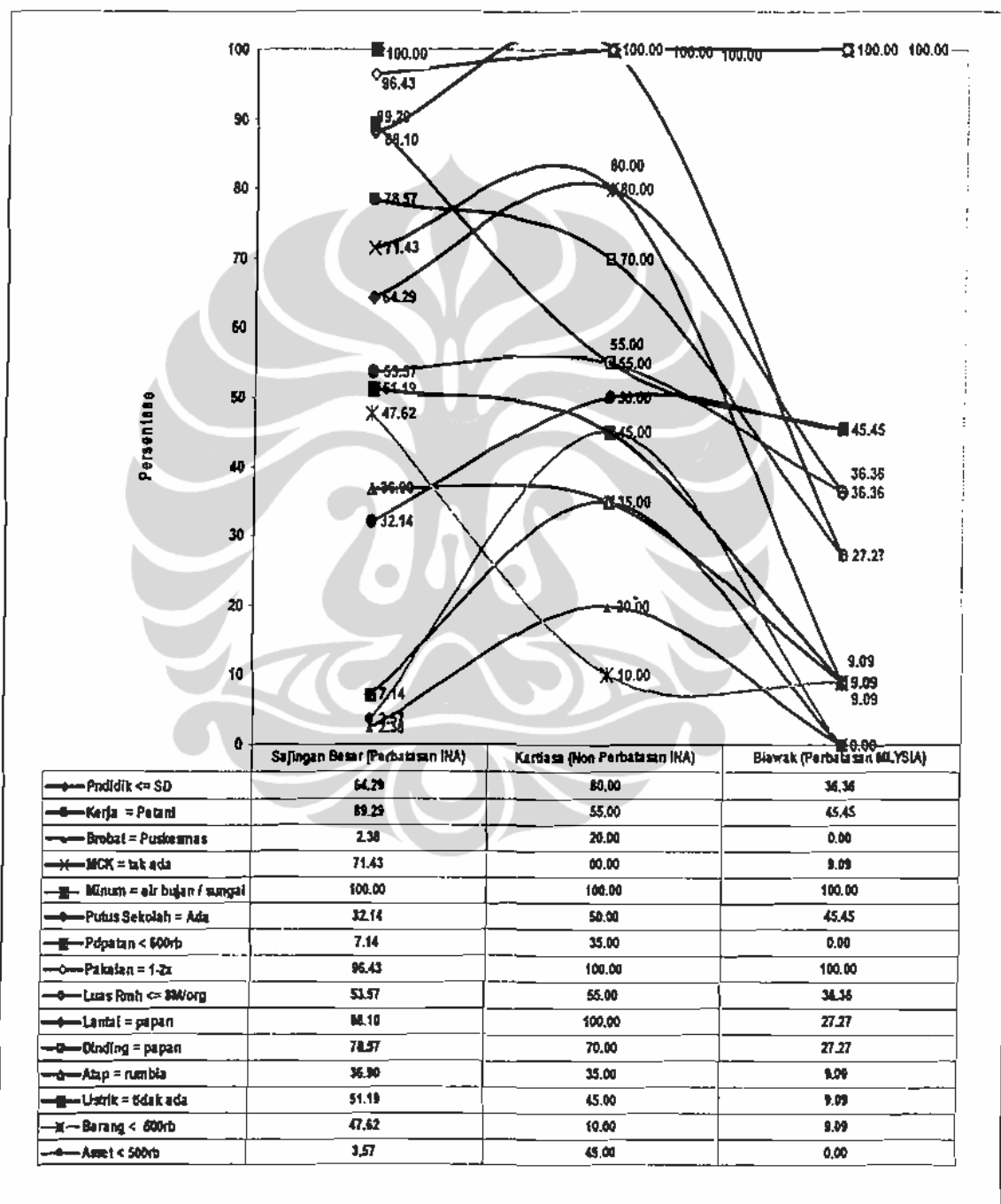
Karakteristik kemiskinan di ketiga wilayah dalam penelitian ini akan bedakan menjadi dua (2), yaitu karakteristik kemiskinan rumah tangga dan karakteristik kemiskinan komunitas. Karakteristik kemiskinan rumah tangga diolah menggunakan data primer hasil kuesioner dari responden. Dan mengolah karakteristik kemiskinan komunitas menggunakan data sekunder yang berasal dari pendataan Potensi Desa (PODES) tahun 2006 disesuaikan dengan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan tahun 2008.

##### V.1.1 Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga

Variabel – variabel didalam penelitian ini meliputi variabel dalam PSE05 diantaranya pendidikan terakhir kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, kemampuan berobat di puskesmas, kepemilikan sarana mandi, cuci, kakus (MCK), sumber air minum, keberadaan anak putus sekolah karena bekerja, pendapatan rata-rata perbulan, frekuensi pembelian pakaian dalam setahun, rasio luas rumah, kondisi lantai rumah, kondisi dinding rumah, kondisi atap rumah, penggunaan listrik, kepemilikan barang dan kepemilikan asset.

Berdasarkan data primer yang telah dikumpulkan diidentifikasi kemiskinan rumah tangga secara umum per variabel di ketiga wilayah penelitian seperti tergambar pada grafik dibawah ini :

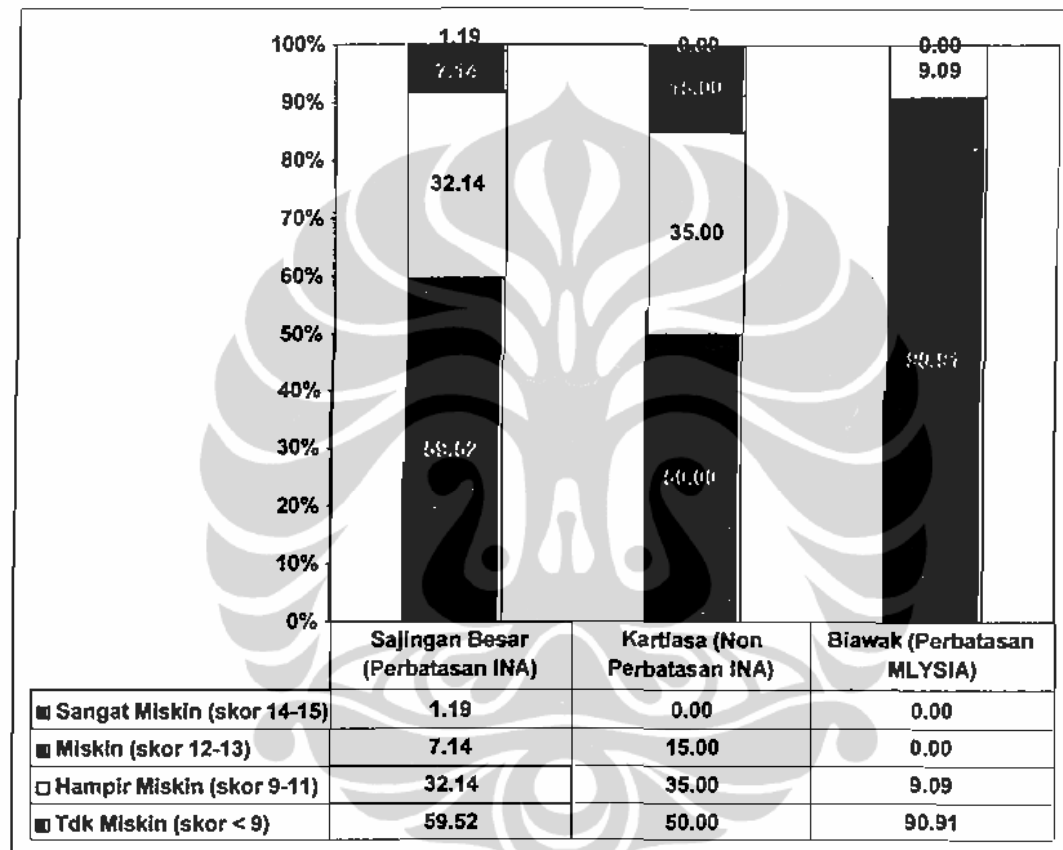
Grafik. 5.1 Persentase Kemiskinan Rumah Tangga Per Variabel



Sumber : Data primer, hasil olahan

Setelah diidentifikasi rumah tangga yang terindikasi masuk dalam kategori miskin berdasarkan variabel dengan memberikan angka 1 (satu) untuk yang terindikasi miskin dan 0 (nol) bagi yang tidak, maka didapat angka kemiskinan di ketiga wilayah penelitian dengan klasifikasi keparahannya sebagai berikut:

Grafik. 5.2 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Rumah Tangga



Sumber : Data primer, hasil olahan

Memperhatikan data hasil olahan diatas maka terjadi kesenjangan kemiskinan di Indonesia terhadap Malaysia dimana di kedua wilayah Indonesia (Sajingan Besar dan Kartiasa) masing-masing memiliki angka kemiskinan (sangat miskin dan miskin) sebesar 8,33% dan 15%. Sedangkan di Malaysia tidak terdapat rumah tangga dalam kategori miskin dan sangat miskin (walaupun pengukuran kemiskinan di Malaysia berbeda dengan Indonesia, berdasarkan wawancara dengan Bapak Idris (kepala Kampong Biawak, salah satu indikator kemiskinan di Malaysia jika rumah tangga tersebut memiliki penghasilan kurang dari 500.00 ringgit Malaysia (RM 500) / bulan).

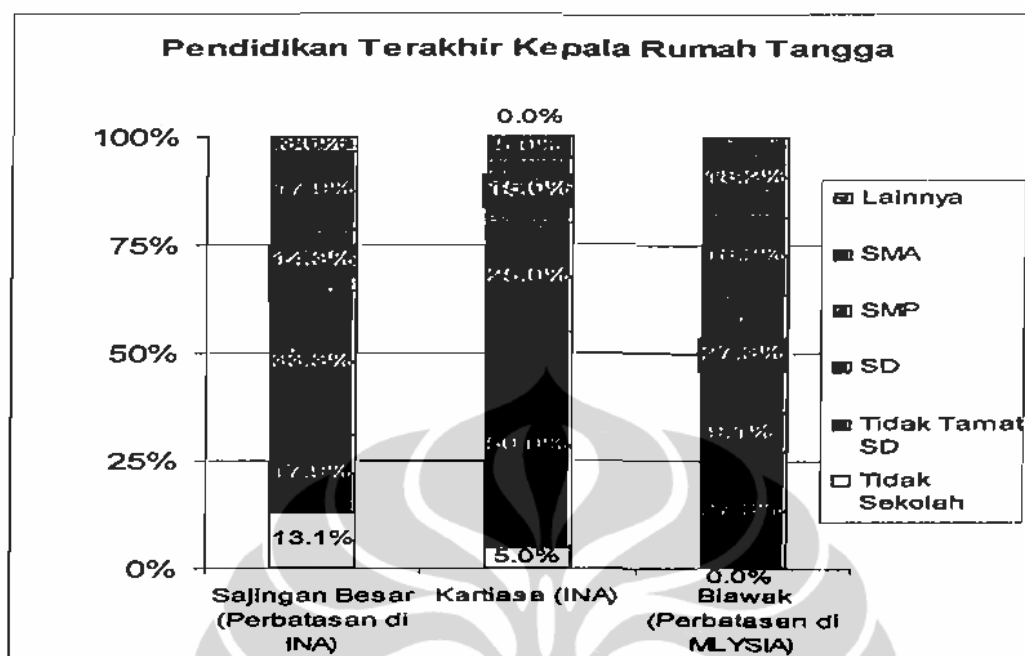
Hal yang perlu dicermati oleh pemerintah Sambas khususnya adalah kemiskinan rumah tangga di Kartiasa. Berdasarkan data olahan diatas terlihat bahwa kemiskinan rumah tangga di Kartiasa hampir 2 kali lipat jumlahnya daripada kemiskinan rumah tangga di Sajingan Besar, padahal Kartiasa berada di dalam ibu kota Kabupaten Sambas dan merupakan terminal transit antara Sajingan Besar dan Sambas.

Upaya pembangunan di Sajingan Besar melalui program Pengembangan dan Pembangunan Paloh – Sajingan yang digulirkan sejak tahun 2003 guna membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan penduduk Kabupaten Sambas umumnya, hendaknya juga dapat dirasakan oleh penduduk Kartiasa dengan berbagai program pemberdayaan yang langsung menyentuh ke masyarakat dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

Kemiskinan rumah tangga berdasarkan grafik 5.1 dan 5.2 diperoleh setelah memberikan skor 0 (nol) atau 1 (satu) pada setiap rumah tangga per masing – masing per masing -- masing variabel. Secara lengkap komponen penentu skor masing – masing variabel setelah diolah dari data primer adalah sebagai berikut :

**Pendidikan.** Pendidikan berkorelasi sangat erat dengan kemiskinan. Semakin rendah pendidikan seseorang akan semakin rentan dia untuk masuk dalam kategori miskin. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 64% rumah tangga di Sajingan Besar, 80% rumah tangga di Kartiasa dan 36,4% di Malaysia termasuk dalam kategori rumah tangga miskin karena pendidikan terakhir kepala keluarganya banya setara maksimal tamatan SD.

Grafik. 5.3 Pendidikan Terakhir Kepala Rumah Tangga (KRT)



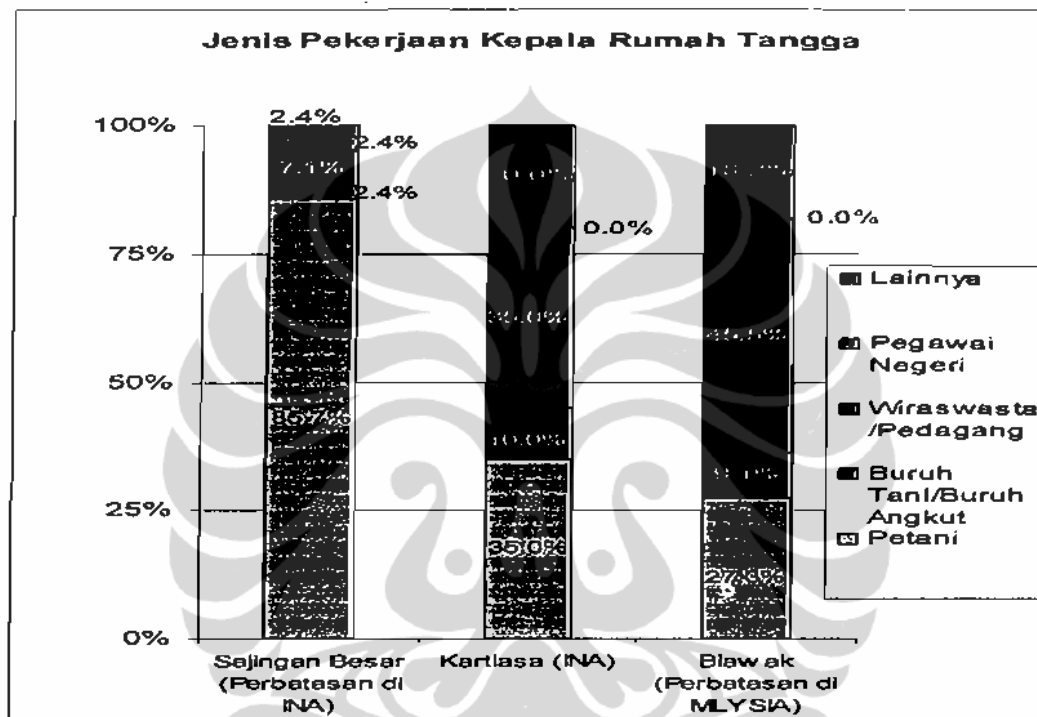
Sumber : Data Primer, data diolah

**Pekerjaan.** Pendidikan yang rendah biasanya juga berkorelasi dengan jenis pekerjaan. Hal ini seperti terlihat pada Sajingan Besar 85% kepala keluarganya bekerja sebagai petani (64% tamat SD kebawah) sedangkan di Kartiasa didominasi oleh petani dan pedagang dengan porsi sebanyak masing-masing 35%. Walaupun tingkat pendidikan kepala keluarga di Kartiasa jauh lebih rendah daripada di Sajingan Besar akan tetapi pekerjaan di Kartiasa lebih beragam dibandingkan di Sajingan Besar hal ini dikarenakan posisi geografis Kartiasa yang mengapit sungai Sambas menjadikannya sebagai salah satu pusat perdagangan di Kabupaten Sambas (sebelum tahun 1993 / sebelum berdirinya jembatan penghubungan Kecamatan Sambas dengan kecamatan – kecamatan di utara Kabupaten Sambas).

Sedangkan di Malaysia mayoritas pekerjaan didominasi oleh pedagang yaitu sebesar 45.5% dan petani 27,3%. Jika menurut PSE05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebanyak 88% rumah tangga di Sajingan Besar, 45% di Kartiasa dan 36% di Malaysia dikategorikan miskin dilihat dari jenis pekerjaannya. Kemiskinan di wilayah Indonesia (Sajingan Besar dan Kartiasa) akan semakin meningkat karena rumah tangga – rumah tangga tersebut hanya mengandalkan satu bidang pertanian saja yaitu pertanian dari perkebunan karet

rakyat yang harga jualnya merosot sangat jauh dari harga Rp. 12.000,- - Rp. 13.000,- / kg karet beku di bulan Juli 2008 menjadi Rp. 2.500,- - Rp. 3.500,- / kg karet beku pada bulan September 2008. Secara rinci kemiskinan dari sisi pekerjaan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel.5.4 Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga



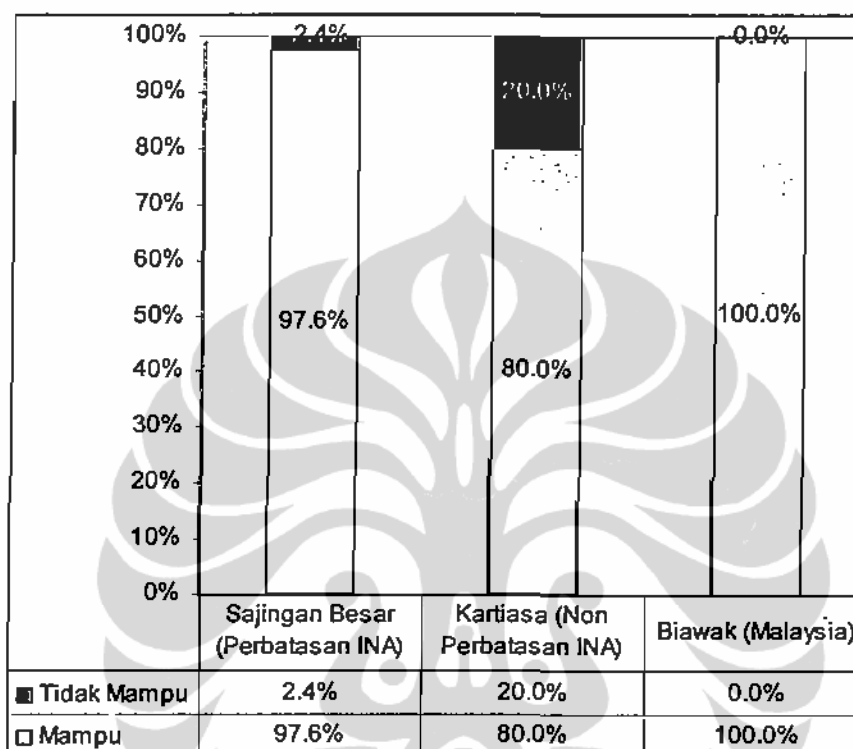
Sumber : Data Primer, data diolah

**Kesehatan.** Tersedianya sarana puskesmas pembantu di semua desa menyebabkan kemiskinan jika dilihat dari sisi ini akan sangat kecil persentasenya dibandingkan dengan variabel - variabel lain. Pada umumnya puskesmas pembantu di Kabupaten Sambas hanya diisi oleh mantri kesehatan atau bidan desa sebagai tenaga kesehatannya. Di Sajingan Besar yang termasuk kategori tidak mampu hanya sebesar 2,4%, akan tetapi di Kartiasa angkanya cenderung lebih tinggi (20%) akibat pola masyarakat yang lebih mendahulukan untuk berobat ke dukun kampung daripada ke sarana kesehatan pemerintah. Hal ini berdasarkan pengakuan dari bapak Hamdani dipertegas oleh bapak Pawadi dan Bapak Toni selaku dukun kampung yang dipereaya di desa Kartiasa yang menyatakan bahwa mayoritas penduduk desa ini mendahulukan berobat kepada mereka ketimbang ke petugas kesehatan. Jika dalam beberapa hari setelah berobat kepada mereka tidak



mengalami perubahan yang berarti barulah berobat ke petugas kesehatan / bidan Farida (wawancara tanggal 21 Oktober 2008).

Grafik.5.5 Kemampuan Berobat ke Puskesmas



Sumber : Data primer, hasil olahan

Sedangkan di Malaysia terlihat bahwa seluruh responden mampu melakukan pengobatan di puskesmas terkait dengan mudah dan murah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas (Poliklinik Desa). Di Biawak (Malaysia) untuk jenis – jenis obat tertentu bahkan diserahkan kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah jururawat masyarakat. Juru rawat masyarakat ini merupakan perwakilan masyarakat yang ditunjuk dan diberi pelatihan tentang kesehatan dan penanganan penyakit ringan serta juga berfungsi sebagai juru obat, sehingga masyarakat yang mengalami sakit ringan yang dapat meminta obat kepada juru rawat masyarakat dengan membayar pengantian obat sesuai dengan ketentuan bersama tanpa harus mendatangi sarana kesehatan (Hasil wawancara dengan kepala Klinik Desa Biawak, Bapak John pada tanggal 17 Juli 2008).

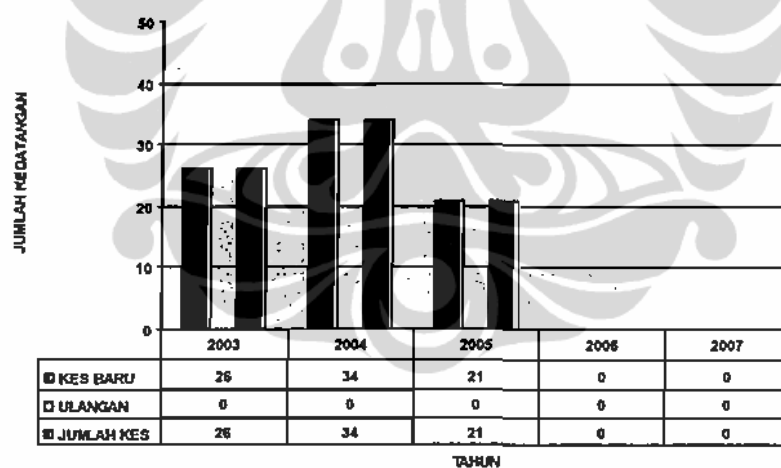
Dengan membayar 1 RM untuk pendaftaran, warganegara Malaysia yang berkunjung akan mendapatkan pengobatan dan obat gratis. Hal ini tidak berlaku

untuk penduduk Indonesia. Warga negara Indonesia yang berobat ke klinik ini dikenakan tarif 15 RM/sekali kunjungan termasuk obat (jam kerja) dan 50 RM diluar jam kerja.

Grafik 5.5 memberi informasi kepada kita bahwa sejak tahun 2006 tidak ada warganegara Indonesia yang melakukan pengobatan di Poliklinik Biawak. Hal ini dapat dipahami bahwa beroperasinya Puskesmas di Desa Kalianu' Kecamatan Sajingan Besar membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar, dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang hampir sama dengan poliklinik desa di Biawak tetapi dengan jarak dan biaya yang jauh lebih murah. Dengan demikian masyarakat Sajingan mempunyai pilihan – pilihan yang lebih banyak terhadap pelayanan kesehatan setelah tahun 2006.

Grafik 5.6

#### KEDATANGAN TAHUNAN PENDATANG ASING 2003-2007



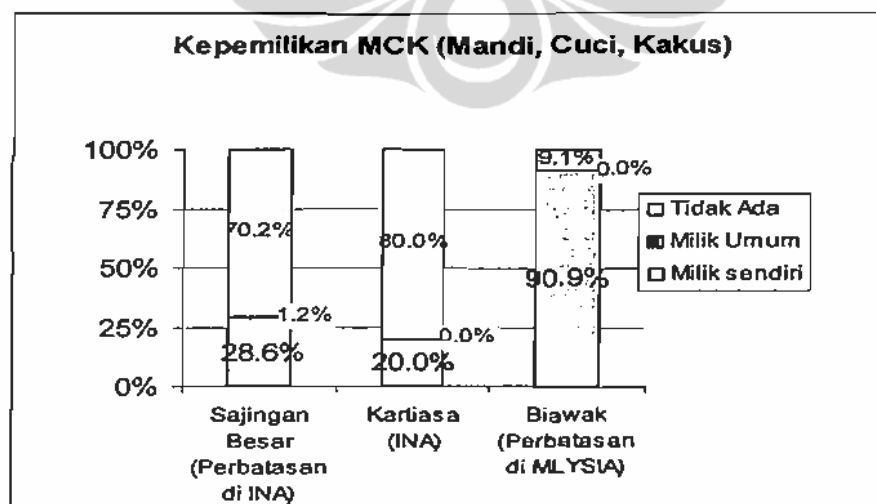
Sumber : Klinik Desa Biawak, 2008

**Kepemilikan MCK.** Karakteristik lain kemiskinan rumah tangga di wilayah penelitian dapat dilihat dari kepemilikan dan penggunaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), apakah milik sendiri, umum atau tidak menggunakan MCK. Rumah tangga dikategorikan miskin jika tidak memiliki/tidak menggunakan sarana MCK dalam kehidupannya. Adapun karakteristik rumah tangga terindikasi miskin di ketiga daerah penelitian dapat dilihat pada grafik 5.7

Grafik ini memberikan informasi yang sangat memprihatinkan dimana 70 hingga 80% rumah tangga di Indonesia adalah miskin karena tidak mempunyai / tidak menggunakan MCK (di Malaysia hanya 9,1%). Berdasarkan hasil wawancara kepada responden di ketiga wilayah penelitian, rumah tangga yang tidak memiliki MCK dirumahnya melakukan kegiatan tersebut di semak belukar dan sungai di sekitar tempat tinggal mereka. Sekecamatan Sajingan Besar hanya terdapat 1 (satu) sarana MCK dan kurang dipergunakan masyarakat setempat dimana terlihat hanya 1,2% responden yang hanya menggunakannya. Demikian pula halnya di Desa Kartiasa hanya ada 1 WC umum yang dibangun oleh program Jaring Pengaman Sosial Infrastruktur Perdesaan (JPS-IP) tahun 2003.

Minimnya sarana MCK di kedua wilayah tersebut mengakibatkan masyarakat setempat rentan terhadap penyakit diare. Berdasarkan wawancara dengan bapak Sudarli dari desa Kartiasa menyatakan masyarakat di desa tersebut memiliki keinginan untuk menggunakan sarana MCK yang telah dibangun, akan tetapi karena keberadaan sarana MCK tadi jauh dari tempat tinggal mereka dan harus antri dalam penggunaannya mengakibatkan mereka enggan menggunakan sarana MCK tersebut dan tetap pada kebiasaannya untuk melakukan mandi, mencuci dan buang air besar di sungai yang memang melintasi daerah mereka.

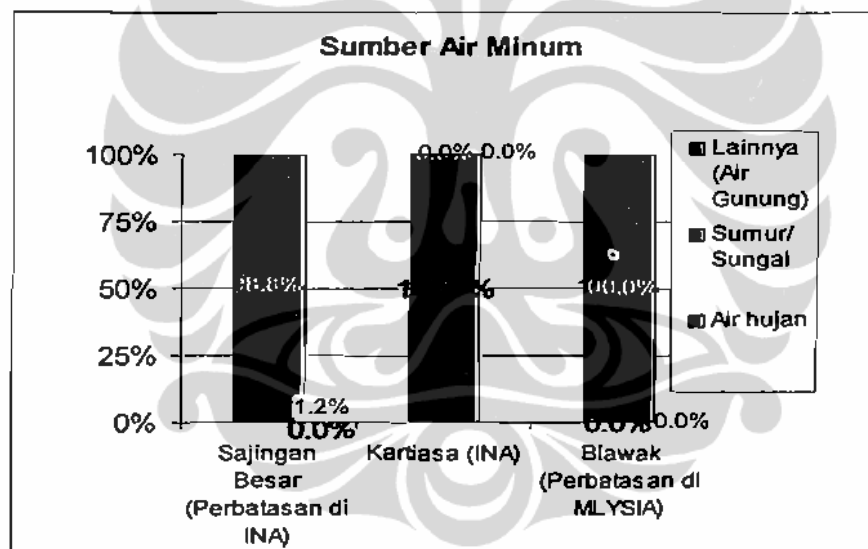
Grafik.5.7 Kepemilikan MCK



Sumber : Data primer, hasil olahan

**Air Minum.** Dalam penggunaan sumber air minum, seluruh responden di semua wilayah penelitian termasuk dalam kategori miskin karena menggunakan air sungai, air hujan dan air gunung yang bukan dari mata air terlindungi sebagai sumber air minum keluarga mereka. Dalam penelitian ini tidak ditanyakan lebih lanjut apakah sumber air minum tadi diolah lebih lanjut melalui proses penyaringan partikel – partikel berbahaya dalam skala pengolahan air minum rumah tangga. Bahkan pada desa Kartiasa berdasarkan wawancara dengan bapak Hamdani diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga di desa ini menggunakan air sungai tanpa proses lebih lanjut sebagai air minum mereka pada saat musim kemarau (2 -3 tiga minggu tidak hujan).

Grafik.5.8 Sumber Air Minum



Sumber : Data primer, hasil olahan

**Putus Sekolah.** Banyak penelitian menyebutkan bahwa pendidikan berkorelasi erat dengan pekerjaan, pendapatan, produktivitas maupun kesehatan. Dalam jangka panjang tingginya angka putus sekolah akan mengindikasikan tingginya tingkat kemiskinan.

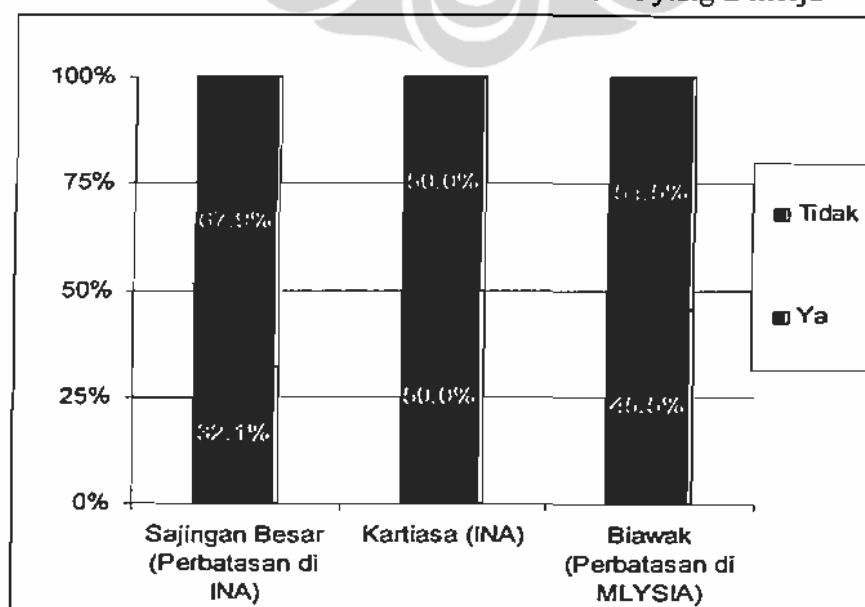
Angka putus sekolah yang tinggi dialami oleh ketiga wilayah penelitian. Hal ini terlihat dari grafik. 5.9. Responden di Indonesia mengeluarkan biaya pendidikan untuk anak terdiri dari biaya buku, penginapan, uang saku dan lainnya karena sistem pendidikan di Indonesia tidak memberikan bantuan seperti layaknya pemerintah Malaysia. Di Malaysia setiap anak usia yang bersekolah akan

diberikan pendidikan gratis dari jenjang sekolah rendah (setara SD) hingga ke ke politeknik.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sintik dan ibu Yuliana yang memiliki anak usia sekolah diperoleh informasi bahwa selain pendidikan gratis bagi anak yang bersekolah, setiap anak yang duduk di sekolah rendah mendapat bantuan sebesar 450 RM (Rp. 1.300.000,-) persiswa pertahun, 700 RM (Rp. 2.030.000,-) bagi anak yang bersekolah ditingkatan sekolah menengah dan 200 RM (Rp. 580.000,-) persiswa perbulan bagi siswa di politeknik. Untuk rumah tangga yang memiliki anak lebih dari 5 juga akan memperoleh bantuan lain dari kerajaan Malaysia.

Setiap hari pelajaran dimulai dari pukul 7.20 dan mendapatkan *snack* (bubur kacang hijau / susu / bubur ayam / teh) pada pukul 9.30 setiap hari sekolah. Pada hari senin dan selasa persekolahan diakhiri pukul 12.40, hari rabu dan kamis pukul 13.30 dan hari jumat pukul 11 siang. Selain pendidikan gratis, sistem pendidikan di Malaysia juga memberikan makanan siang gratis bagi para siswanya setiap hari sekolah. Walaupun telah diberikan pendidikan gratis serta bantuan pendidikan per anak yang bersekolah, fenomena putus sekolah juga terjadi di Malaysia walaupun angkanya relatif lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Hal ini tergambar dari grafik berikut :

Grafik.5.9 Persentase Anak Putus Sekolah yang Bekerja

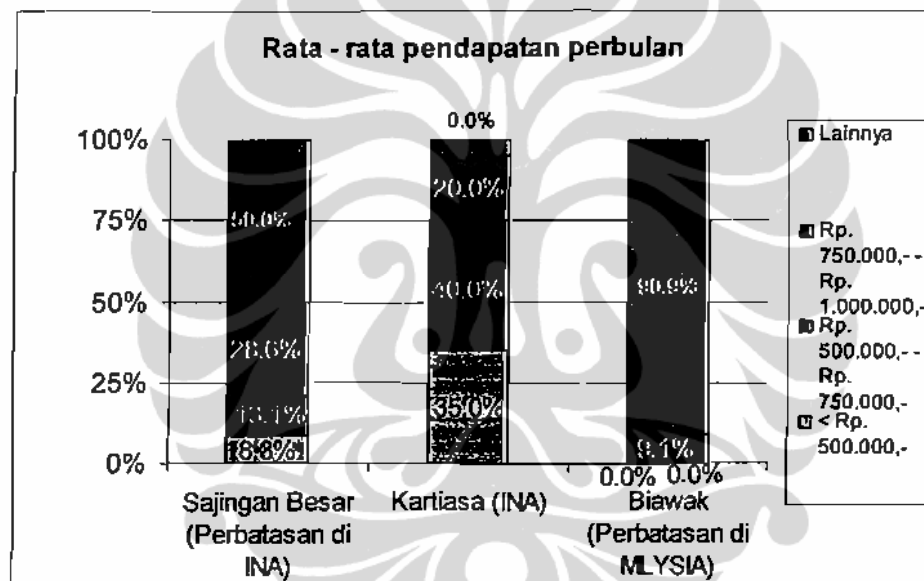


Sumber : Data primer, hasil olahan

Angka putus sekolah terbesar dialami oleh Kartiasa dimana 50% rumah tangga di daerah tersebut memiliki anak yang putus sekolah. Di Sajingan Besar dan Biawak (Malaysia) juga memiliki angka yang cukup tinggi untuk rumah tangga yang memiliki anak putus sekolah masing masing 32% di Sajingan Besar dan 45% di Biawak.

Angka putus sekolah yang tinggi mengindikasikan kemiskinan yang cukup besar di ketiga wilayah kedepannya jika tidak ada langkah – langkah inovatif masing – masing pemerintah maupun *stakeholder* untuk menanganinya.

Grafik.5. 10 Pendapatan Rata – Rata Perbulan



Sumber : Data primer, hasil olahan

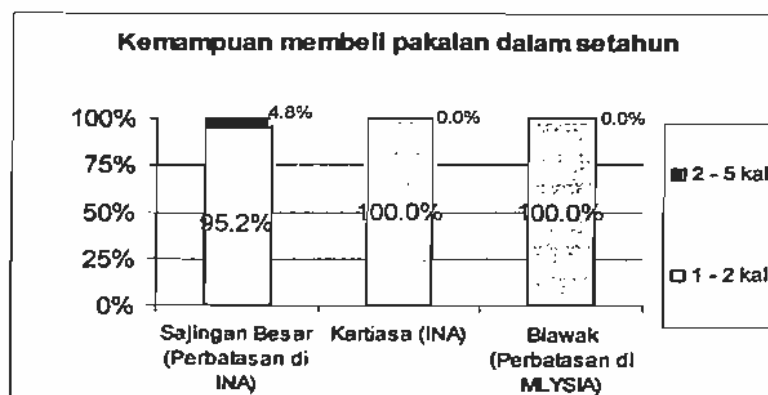
**Pendapatan.** Jenis pekerjaan berkorelasi positif dengan pendapatan. Baik di Sajingan Besar maupun di Kartiasa sebagian besar responden berprofesi sebagai petani dan buruh. Berbeda dengan responden dari Biawak Malaysia yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang/wiraswasta.

Berdasarkan grafik 5.10 diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan responden dari perbatasan Indonesia (Sajingan Besar dan Kartiasa) jauh tertinggal dari responden perbatasan Malaysia (Biawak). Di Sajingan Besar 21,4 % responden dikategorikan miskin, karena 8,3 % berpendapatan < Rp.500.000,00 dan 13.1 % berpendapatan antara Rp. 500.000,00 hingga Rp. 750.000,00. Sementara di Kartiasa, pendapatan responden tidak lebih baik dari responden

Sajingan Besar. Sebanyak 35 % responden Kartiasa dikategorikan miskin karena berpendapatan dibawah Rp. 500.000,00, 40 % berpendapatan antara Rp. 500.000,00 hingga Rp. 750.000,00. Keadaan di Sajingan Bcsar dan Kartiasa ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh responden dari Biawak Malaysia. Sebanyak 90,9 % responden Biawak berpendapatan diatas Rp. 1.000.000,00, dan 9,1 % berpendapatan antara Rp. 500.000,00 hingga Rp. 750.000,00. Dengan demikian responden dari Biawak tidak dapat dikategorikan miskin.

**Pakaian.** Variabel lain sebagai penentu rumah tangga miskin dalam penelitian ini dilihat dari kemampuan membeli pakaian dalam setahun. Jika rumah tangga tersebut frekuensi membeli pakaian 1-2 kali dalam setahun termasuk dalam kategori terindikasi miskin. Dan dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa dari seluruh reponden hanya 4,8% rumah tangga di Sajingan Besar yang dikategorikan tidak miskin karena membeli pakaian lebih dari 2 kali dalam setahun. Keseluruhan responden di Kartiasa dan Biawak masuk dalam kategori miskin menggunakan variabel ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden di ketiga wilayah penelitian bukan merupakan konsumen yang konsumtif dalam berpakaian, ini terkait dari jauhnya jarak pasar terdekat diwilayah tempat tinggal mereka. Bahkan di daerah Sajingan Besar dan Kartiasa umumnya membeli pakaian dengan sistem kredit dari penjual keliling yang berasal dari desa mereka masing - masing. Secara rinci persentase variabel ini dapat dilihat pada grafik berikut :

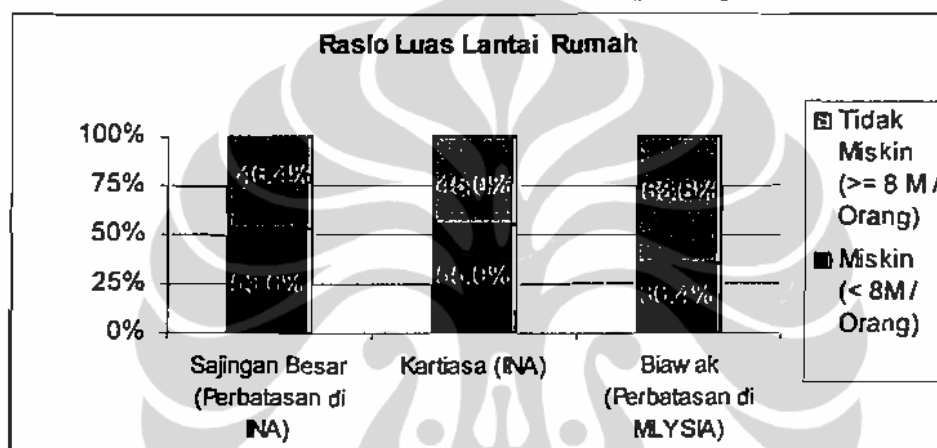
Grafik.5.11 Frekuensi Membeli Pakaian dalam Setahun



Sumber : Data primer, hasil olahan

**Rasio Luas Rumah.** Karakteristik kemiskinan rumah tangga yang lain terlihat pada grafik dibawah ini, rumah tangga miskin di Indonesia baik di Sajingan Besar maupun di Kartiasa mempunyai porsi yang lebih besar daripada rumah tangga miskin di Malaysia jika dilihat dari rasio luas lantai rumah per orang. Jumlah rumah tangga miskin Indonesia mencapai lebih dari 50% (53.6% di Sajingan Besar dan 55% di Kartiasa) sedangkan rumah tangga miskin di Malaysia hanya sekitar 36,4%.

Grafik.5.12 Luas Lantai Rumah per Kapita

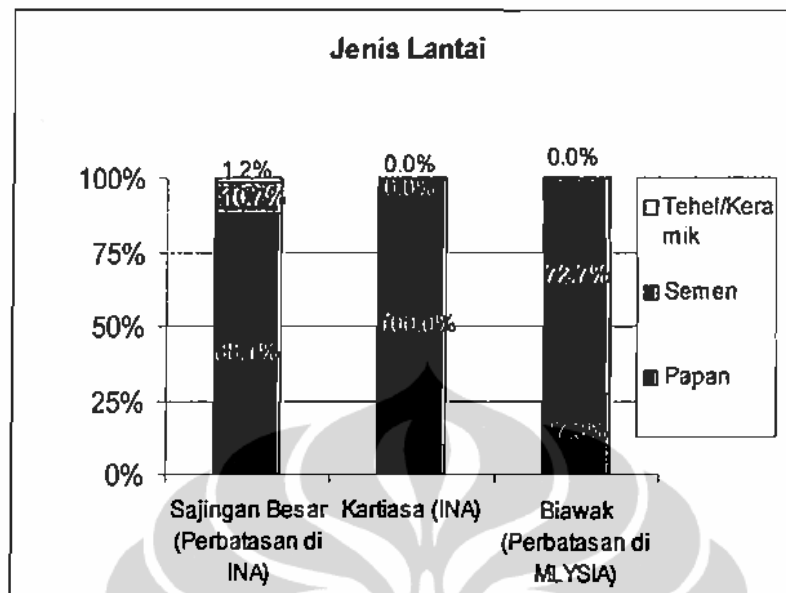


Sumber : Data primer, hasil olahan

**Jenis Lantai.** Pada grafik 5.13 memperlihatkan bahwa dari segi jenis lantai, rumah tangga miskin di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan rumah tangga miskin di Malaysia. Bahkan di Kartiasa 100% rumah tangga disana yang diteliti adalah miskin dan di Sajingan Besar mencapai angka 88,1% pengguna papan/kayu murahan, 10,7% yang menggunakan semen dan hanya 1,2% yang menggunakan tehel/keramik, sehingga hanya sekitar 11,9% yang dikategorikan tidak miskin. Berbanding terbalik dengan keadaan di Malaysia, dimana hanya 27,3% rumah tangga yang menggunakan papan (kategori miskin) dan 27,7% yang menggunakan semen (kategori tidak miskin).



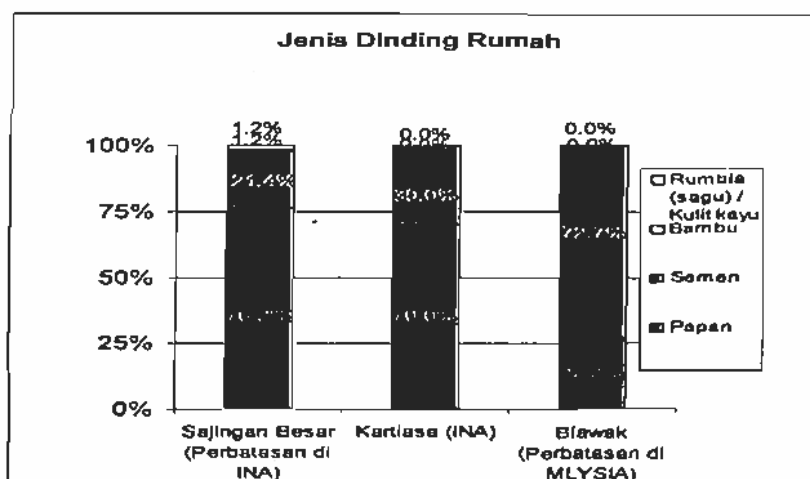
Grafik.5.13 Jenis Lantai



Sumber : Data primer, hasil olahan

**Jenis Dinding.** Dari sisi jenis dinding rumah, sebanyak 76,2% rumah tangga di Sajingan Besar, 70% di Kartiasa dan 27,5% di Malaysia dikategorikan miskin karena menggunakan papan dari kayu jenis murah sebagai dinding rumah mereka. Sedangkan rumah tangga tidak miskin (menggunakan semen sejumlah) 21.4% di Sajingan Besar, 30% di Kartiasa dan 72,7% di Malaysia. Dan masing-masing sebanyak 1,2% rumah tangga miskin di Sajingan besar juga menggunakan bambu (1 rumah tangga) dan rumbia (1 rumah tangga) sebagai dinding rumah mereka. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

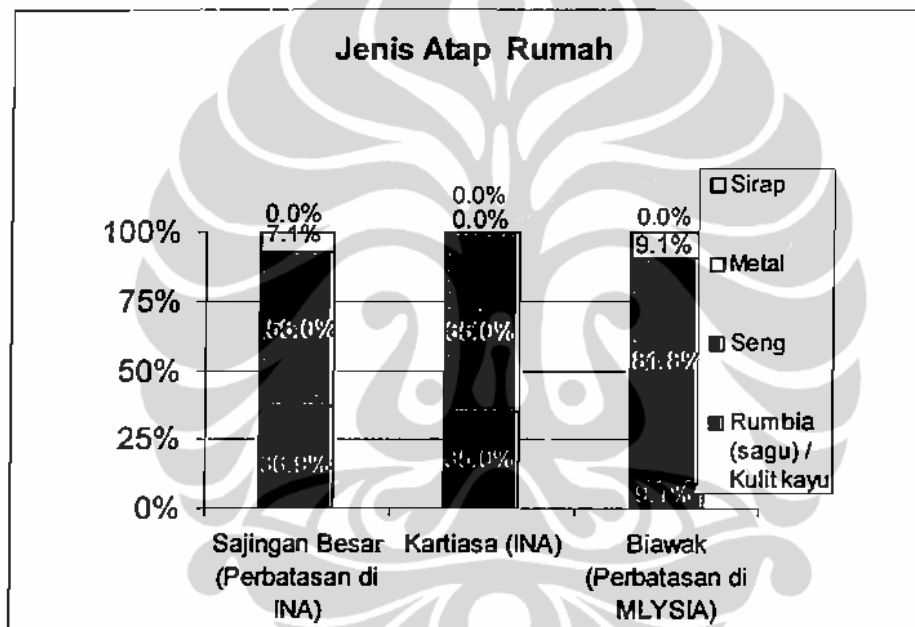
Grafik.5.14 Jenis Dinding Rumah



Sumber : Data primer, hasil olahan

**Jenis Atap.** Tak berbeda jauh dengan karakteristik jenis lantai dan jenis dinding rumah, berdasarkan jenis atap rumah, rumah tangga terindikasi miskin di Sajingan Besar juga berada diatas persentase rumah tangga terindikasi miskin Biawak. Antara Sajingan Besar dan Kartiasa persentase rumah tangga terindikasi miskin tidak terlalu besar yaitu 36,9% di Sajingan Besar dan 35% di Biawak serta 9,09% di Biawak (Malaysi). Adapun jenis atap yang digunakan di ketiga wilayah dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik.5.15 Jenis Atap Rumah



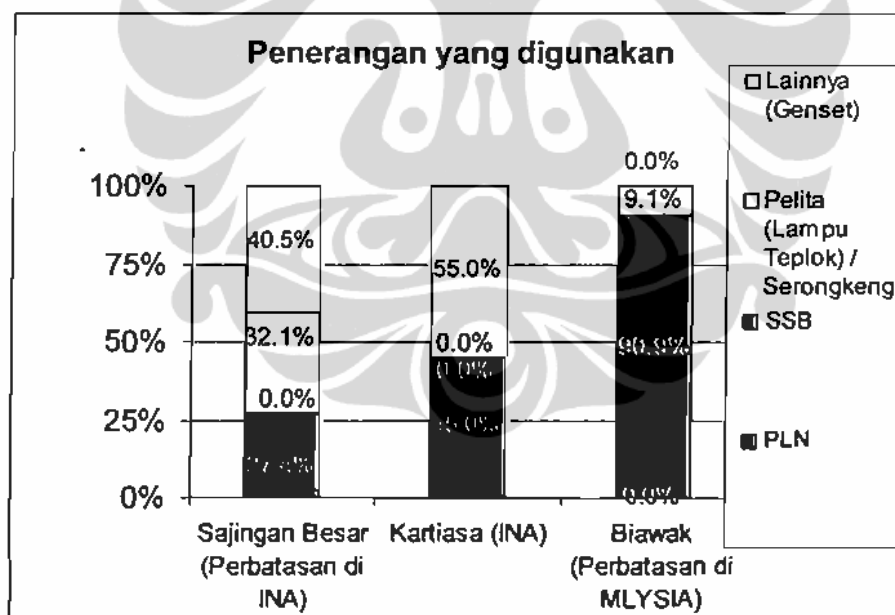
Sumber : Data primer, hasil olahan

Tingginya rumah tangga miskin di Sajingan Besar dari sisi perumahan walaupun memiliki lahan pekarangan dan pertanian yang luas dapat dipahami dari kebiasaan masyarakat setempat yang melakukan aktifitas secara bersama – sama (tanpa ada sekat – sekat ruangan sehingga tidak dikhususkan adanya kamar untuk setiap penghuni rumah). Selain itu umumnya rumah – rumah di Sajingan besar dan Kartiasa adalah rumah-rumah lama (rumah yang dibangun sebelum ada akses jalan darat dan kendaraan bermotor) sehingga rumah yang dibangun pada saat itu hanya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia disekitar mereka yang jauh lebih murah dibandingkan material yang harus didatangkan dari tempat lain.

**Listrik.** Penerangan rumah tangga juga sebagai variabel penentu rumah tangga tersebut miskin atau tidak. Pada grafik 5.16 dibawah ini dapat dilihat bahwa hanya 27,4% di Sajingan Besar dan 45% rumah tangga di Kartiasa termasuk dalam kategori non miskin karena menggunakan listrik dari PLN.

Sedangkan di Malaysia lebih dari 90% rumah tangga disana telah menggunakan listrik yang disediakan oleh negara dengan nama perusahaan SSB (Syarikat SESCO Berhad). Tingginya kemiskinan dari variabel ini dapat dipahami dari lima desa yang ada di sana hanya ada dua desa yang dilayani oleh PLN Cabang Sambas. Dan itupun hanya sanggup dilayani pada pukul 18.00 hingga pukul 06.00 termasuk *suplay* kepada kantor pemerintah yang ada di desa Kaliau' kccamatan Sajingan Besar. Untuk ketiga desa lainnya memperoleh penerangan rumah tangga secara swadaya masyarakat melalui genset, mesin TS, dan pelita.

Tabel.5.16 Jenis Penerangan Yang Digunakan



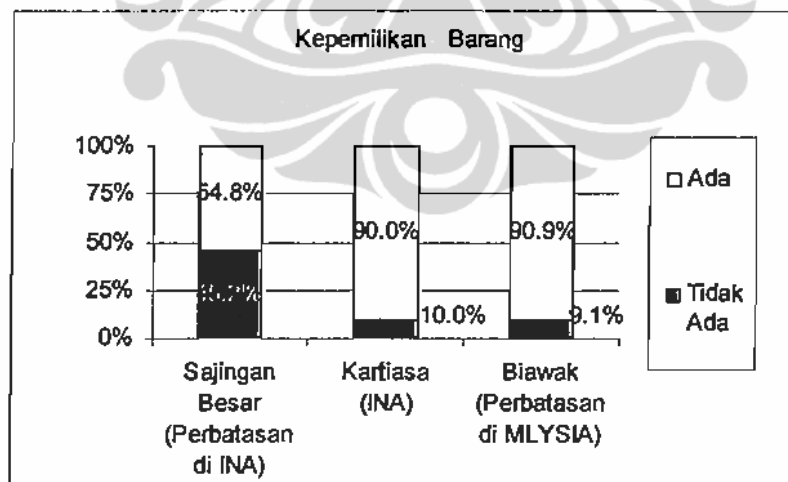
Sumber : Data primer, hasil olahan

Dari grafik 5.17 juga dapat dilihat bahwa sebanyak 32,1% rumah tangga di Sajingan Besar dan 9,1% di Malaysia menggunakan pelita sebagai sumber penerangan rumah tangga. Sedangkan 40,5% rumah tangga di Sajingan Besar dan 55% rumah tangga di Kartiasa menggunakan listrik dengan cara menumpang (menyambung) kepada tetangganya melalui mesin TS atau genset dikenakan biaya Rp. 25.000/bulan untuk 1 buah bola lampu TL 20 watt (hasil wawancara dengan

hapak Endo di dusun Tapang Desa Sajingan yang termasuk sebagai rumah tangga yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai tahun 2005 maupun 2008). Dengan demikian maka penduduk miskin mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin untuk penerangan rumah mereka. Sedangkan yang menyambung menggunakan listrik PLN biayanya lebih murah antara Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,- per rumah tangga dengan penggunaan 3 – 4 buah lampu per rumah.

Berdasarkan hasil wawancara kepala desa Sungai Bening diperoleh informasi bahwa sekitar 20% rumah tangga di desa ini memiliki parabola. dan berdasarkan keterangan ibu Rita genset yang dimiliki di rumah tangga ini dinyalakan 8 kali dalam sebulan (setiap hari sabtu dan minggu) dengan frekuensi pemakaian bensin 2 liter tiap kali di nyalakan (untuk 4 jam). Jadi rumah tangga yang menggunakan genset selama 16 jam sebulan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 192.000,- / bulan hanya untuk penerangan saja. Dengan demikian penghasilan yang diperoleh harus disisihkan dengan porsi yang cukup besar hanya untuk penerangan rumah tangga.

Grafik. 5.17 Kepemilikan Barang



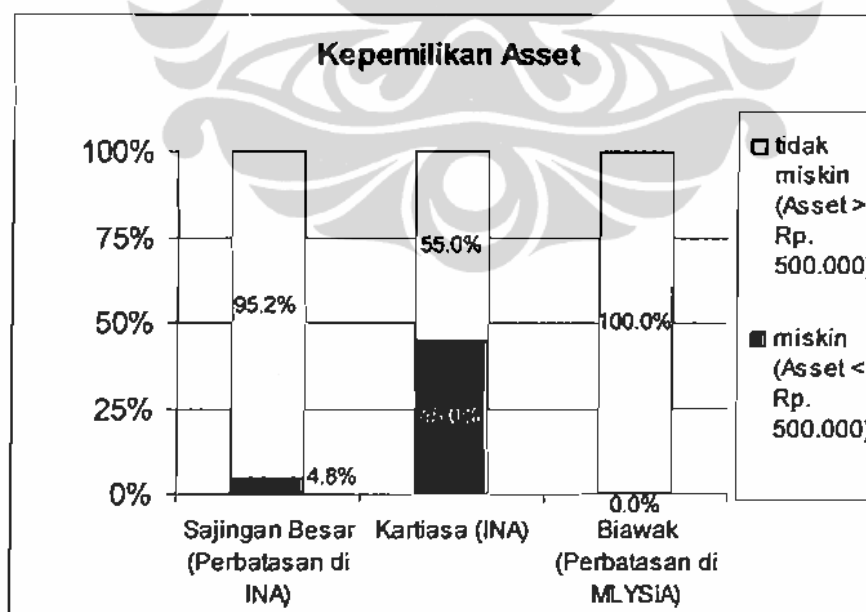
Sumber : Data primer, hasil olahan

**Barang.** Kepemilikan barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dapat berupa peralatan rumah tangga seperti TV, kulkas, emas maupun sepeda motor. Jika nilai dijual barang tersebut kurang dari Rp. 500.000,- maka rumahtangga tadi terindikasi miskin. Terlihat bahwa di Sajingan Besar cenderung

tinggi rumahtangga yang tidak memiliki asset hal ini dapat dipahami karena keterisolasian wilayah (akses masuk, informasi dan komunikasi) menyebabkan pola konsumsi yang berbeda antara Sajingan Besar dengan Kartiasa dan Biawak.

**Asset.** Dari sisi kepemilikan asset, sebuah rumah tangga dikategorikan miskin jika hanya memiliki asset yang disetarakan dengan kurang atau sama dengan Rp. 500.000,- (PSE05). Dengan demikian di Kecamatan Sajingan sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Sambas memiliki angka kemiskinan yang jauh lebih rendah daripada di wilayah Kartiasa karena di Sajingan Besar umumnya mereka bekerja sebagai petani dan pemilik lahan sehingga angka kemiskinannya hanya 4,8% sedangkan di Kartiasa dengan yang berada dipinggiran sungai persentase kemiskinannya sangat tinggi sekitar 45% karena tidak mempunyai lahan pertanian hanya bertindak sebagai buruh tani atau buruh bongkar muat. Sedangkan di Malaysia tidak ada rumah tangga yang dikategorikan miskin karena walaupun mereka tidak memiliki lahan pertanian tetapi mereka memiliki asset diatas Rp. 500.000,- seperti motor, mobil ataupun perhiasan emas. Hal ini terlihat pada tabel berikut :

Grafik.5.18 Kepemilikan Asset



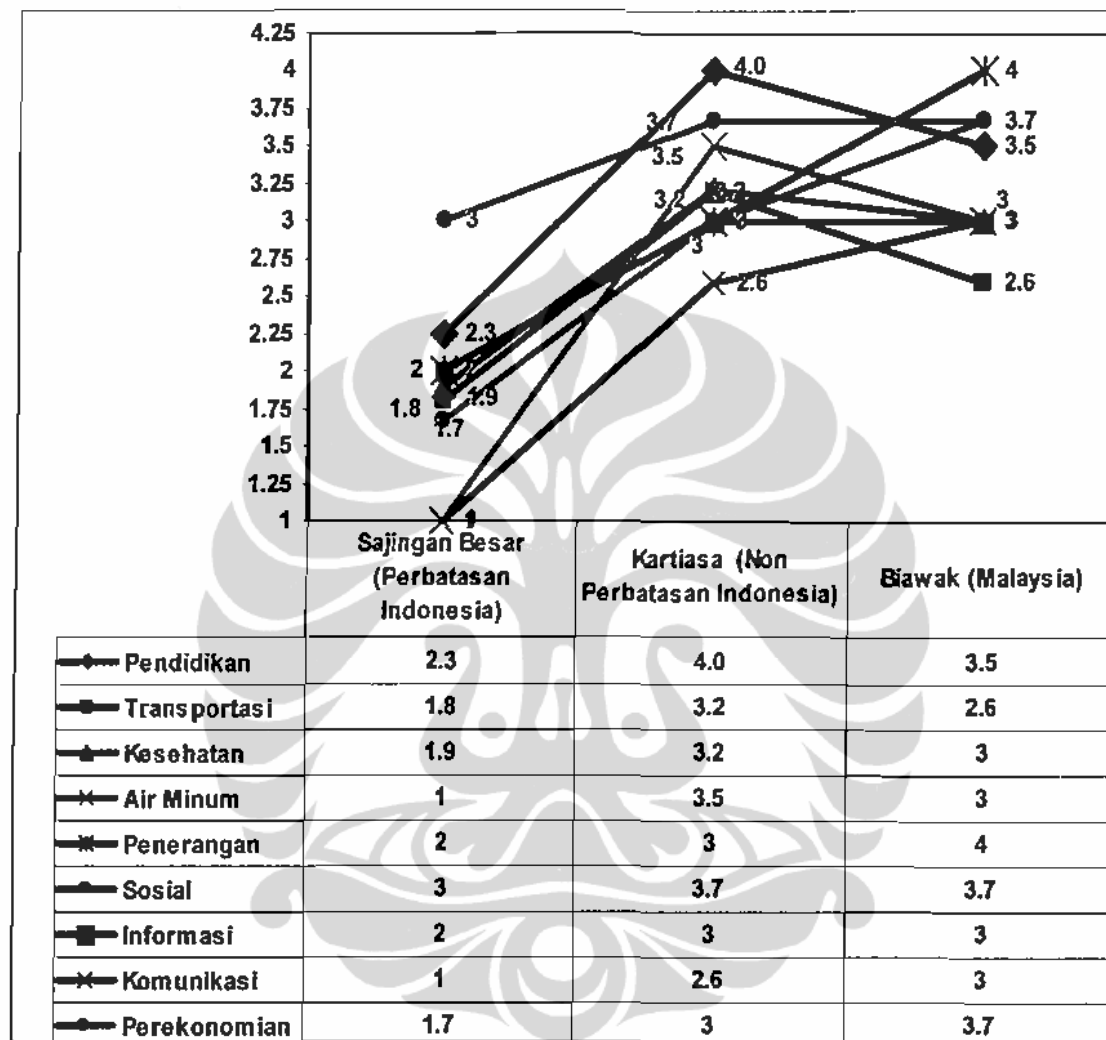
Sumber : Data primer, hasil olahan

### V.1.2 Karakteristik Kemiskinan Komunitas

Kemiskinan Komunitas dapat dilihat dari kuarang atau tidak tersedianya prasarana dan sarana umum pada suatu wilayah. Berdasarkan data primer dan data

sekunder yang diolah, kemiskinan komunitas di ketiga wilayah dapat dilihat dari grafik 5.19.

Grafik.5.19 Karakteristik Kemiskinan Komunitas



Sumber : Potensi Desa (PODES) 2006 dan data primer, data diolah kembali

Dari tabel karakteristik kemiskinan komunitas diatas dapat dilihat bahwa terjadi kesenjangan semua sarana dan prasarana yang dimiliki di daerah Sajingan Besar (perbatasan Indonesia) terhadap Kartiasa (daerah non perbatasan) maupun terhadap daerah Biawak (Malaysia) dari sisi pendidikan, akses transportasi, akses kesehatan dan penerangan sebagai prasarana dan sarana dasar, maupun pada sarana sosial (olahraga), komunikasi, informasi dan sarana perekonomian.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa daerah Sajingan Besar sangat memerlukan infrastuktur dasar yang lebih dibandingkan Kartiasa yang secara

administratif masih termasuk dalam wilayah ibukota kabupaten Sambas dan Biawak sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Pendidikan yang tidak memadai adalah faktor penentu yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Salah satu faktor penentu pendidikan yang cenderung rendah di Sajingan Besar adalah kurangnya sarana dan akses (skor 2,3). Sarana pendidikan yang paling mudah ditemui di Sajingan Besar hanyalah sekolah dasar (SD) yang berada di setiap desa. Untuk tingkat pendidikan TK, SLTP, maupun SLTA sangat sulit ditemui di Sajingan Besar. Sebagai kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Sambas, Sajingan Besar tidak memiliki TK di seluruh wilayahnya, dan hanya memiliki masing – masing 1 buah SMP dan 1 buah SMK didesa Kaliau' ibu kota kecamatan yang dibangun pada tahun 2006. Sedangkan di Kartiasa (bukan daerah perbatasan di Indonesia) memiliki sarana yang sangat baik karena semua jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SLTA sederajat. Di Biawak sendiri (Malaysia) hanya SLTA (mereka menamakannya sekolah tinggi) yang sulit ditemukan karena hanya ada di Lundu yang berjarak sekitar 29 km.

Akses masuk dari dan ke Sajingan Besar melalui jalan darat dapat ditempuh dari kota Sambas dengan menggunakan kendaraan pribadi (motor roda 2 dan mobil) maupun menggunakan kendaraan umum sejauh kurang lebih 90 km. Jika menggunakan kendaraan roda dua jarak tempuhnya akan semakin dekat (kurang lebih 63 km) melalui kecamatan Sejangkung. Sedangkan jika menggunakan kendaraan roda empat hanya bisa melalui jembatan Kartiasa, menuju simpang tiga Tanjung (Teluk Keramat) dilanjutkan ke Galing hingga langsung ke Sajingan Besar (tujuan akhir Dusun Aruk). Dari kota Sambas hingga jembatan Kartiasa ditempuh melalui jalan aspal yang mulus. Memasuki Desa Kubung hingga ke simpang tiga Tanjung pengendara harus mulai berhati – hati karena akan melalui jalan aspal yang sebagian besar berlubang. Dari simpang Tanjung hingga ke Galing perjalanan kembali dilanjutkan dengan kondisi aspal yang mulus akan tetapi setelah kantor camat Galing hingga ke Sajingan harus menempuh jalan kerikil dan jalan tanah dengan beberapa kondisi jembatan yang rusak. Jika pada waktu hujan perjalanan akan semakin lama karena kondisi jalan

tanah yang sangat licin (hingga bulan juli 2008 masih dalam tahap pelebaran jalan).

Jika menggunakan kendaraan umum (*truck* yang dimodifikasi menjadi mobil penumpang dengan menambahkan atap dan bangku kayu pada bak belakang) penumpang dikenakan biaya Rp. 50.000,- per penumpang dari terminal kota Sambas hingga Aruk. Jarak 90 km dengan kendaraan umum dalam keadaan normal (bukan musim penghujan) ditempuh dalam waktu kurang lebih 6 – 7 jam. Hal ini dialami peneliti ketika mencoba menggunakan kendaraan umum ketika akan pulang ke kota Sambas. Kendaraan umum berangkat dari Aruk pada pukul 07.00 WIB tiba di terminal Sambas pada pukul 13.30. Sedangkan yang berangkat dari terminal Sambas dimulai pada pukul 09.00 WIB. Hanya ada 1 kendaraan dari dan menuju Sajingan Besar setiap harinya.

Selain melalui akses darat, Sajingan Besar juga dapat ditempuh menggunakan jalur air akan tetapi tidak ada angkutan umum jika menggunakan jalur air dari dan menuju Sajingan Besar. Setelah dibukanya akses dari dan ke Sajingan Besar melalui jalur darat melalui Program Pengembangan Paloh Sajingan pada tahun 2003, jalur air hanya digunakan oleh pegawai pemerintah maupun swasta yang memiliki *speedboat* menuju lokasi yang tidak ada akses kendaraan roda empat.

Hal ini berbanding terbalik jika akan menuju ke desa Kartiasa. Desa ini dapat diakses dari segala arah dengan sangat mudah. Jika melalui jalan darat bahkan ada terminal bis dari dan ke Pontianak (Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat) maupun dari dan ke Entikong (Perbatasan Indonesia di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat). Untuk mencapai desa ini menggunakan jalur air (sungai) juga sangat mudah karena desa ini dibelah oleh sungai Sambas.

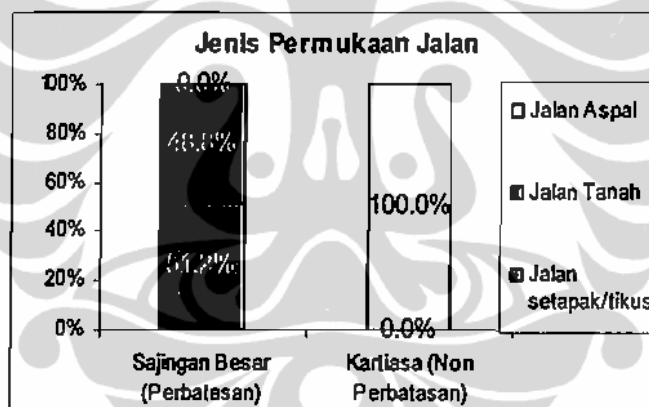
Berdasarkan wawancara dengan bapak Aspandi (salah seorang pedagang yang masih menggantungkan hidupnya dari aktivitas perdagangan sungai), sebelum 1993 kehidupan desa ini mayoritas bergantung dari aktivitas perdagangan yang melalui sungai sehingga terdapat pasar permanen yang menjual semua kebutuhan hidup masyarakat hingga barang elektronik di pinggiran sungai. Akan tetapi sejak dibangunnya jembatan Kartiasa yang menghubungkan keamatan Sambas dengan Teluk Keramat, Paloh, Galing dan Sajingan Besar, aktivitas



perdagangan di pinggir sungai perlahan – lahan mulai ditinggalkan. Pembeli dari keempat kecamatan diatas lebih senang langsung bertransaksi di pasar Sambas karena akses yang sangat lancar dan barang dagangan yang lebih bervariasi. Matinya perekonomian di pinggir sungai menyebabkan masyarakat Kartiasa kehilangan sumber mata pencahariannya sehingga sekarang mayoritas masyarakat lebih menggantungkan hidupnya sebagai petani karet dan buruh tani (PODES 2006).

Akses melalui udara untuk kedua daerah ini masih sangat sulit karena tidak adanya lapangan terbang di Kabupaten Sambas. Pada tahun 2005 baru dibangun 2 helipad oleh TNI di Sajingan dan Paloh sebagai salah satu upaya penjagaan keamanan wilayah perbatasan NKRI.

Grafik. 5.20. Jenis Permukaan Jalan



Sumber : PODES 2006, data diolah

Jenis permukaan jalan seperti tertera pada grafik diatas menunjukkan bahwa Sajingan Besar tertinggal jauh dari segi akses masuk. Terlihat bahwa tidak ada satu wilayahpun di Sajingan Besar yang beraspal dan hal ini berbanding terbalik dengan Kartiasa dan Biawak (Malaysia), dimana dikedua daerah tersebut mendapatkan akses jalan aspal hingga ke pelosok desa (walaupun di Biawak - Malaysia menggunakan aspal mulus sedangkan di Kartiasa baru sebatas aspal eurah). Hal ini menyebabkan jarak tempuh dari Lundu ke Biawak dapat ditempuh dalam waktu yang singkat (29 km) meskipun jaraknya lebih jauh daripada Sambas – Kartiasa (7 km).

Terciptanya masyarakat Indonesia sehat pada tahun 2010 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, sepertinya akan menjadi utopia terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan seperti masyarakat di Sajingan Besar. Disamping kurangnya tenaga medis dan kepercayaan masyarakat akan ilmu kesehatan modern, minimnya prasarana dan sarana kesehatan yang tersedia merupakan salah satu kendala besar untuk mewujudkan masyarakat sehat. Berdasarkan grafik 5.18 di atas, penyediaan prasarana dan sarana kesehatan di Sajingan Besar memperoleh skor 1,9. Hal ini menunjukkan bahwa prasarana dan sarana kesehatan cukup sulit dijangkau oleh masyarakat Sajingan Besar. Masyarakat di Sajingan Besar hanya dapat mengandalkan Puskesmas Pembantu dan Posyandu sebagai sarana kesehatan utama, sementara sarana kesehatan yang lainnya sangat sulit untuk dijangkau. Hal ini pulalah yang menjadi penyebab mengapa kepercayaan masyarakat akan kemampuan tenaga kesehatan tradisional, seperti dukun kampung.

Meskipun dari skor penilaian skala Likert, prasarana dan sarana kesehatan di Biawak memperoleh skor 3 (mudah dijangkau), namun apa yang dialami masyarakat Biawak pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat Sajingan Besar. Hal ini disebabkan karena di Biawak, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, dan Poliklinik juga sulit dijangkau oleh masyarakatnya. Padahal prasarana dan sarana tersebut merupakan prasarana dan sarana vital bagi masyarakat. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Kartiasa, prasarana dan sarana kesehatan seperti, rumah sakit, puskesmas, maupun apotik, cukup mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat perbatasan baik di Indonesia maupun Malaysia kurang mendapat perhatian pemerintah dalam penyediaan prasarana dan sarana dalam pelayanan kesehatan.

Kerentanan terhadap penyediaan air bersih adalah salah satu hal yang dialami oleh masyarakat Sajingan Besar. Berdasarkan grafik 5.18, masyarakat Sajingan Besar sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, masyarakat Sajingan Besar memenuhi kebutuhan air bersih berdasarkan curah hujan dan air sungai yang melintasi daerah mereka, karena leding (PDAM) dan air kemasan tidak tersedia di daerah tersebut.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami masyarakat Kartiasa dan Biawak (Malaysia), dimana air leding (PDAM) dan air kemasan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain ketersediaan sarana air bersih tersebut, daya beli masyarakat untuk pemenuhan air bersih tersebut menjadi salah satu faktor berkeembangnya sarana prasarana dasar untuk air bersih.

Dari segi prasarana dan sarana penerangan yang disediakan oleh pemerintah, Sajingan Besar mengalami hal yang sama seperti dalam penyediaan prasarana dan sarana yang telah dibahas diatas. Sarana penerangan di Sajingan Besar masih tertinggal dibanding masyarakat di Kartiasa dan Biawak yang mudah untuk memperoleh penerangan dengan sarana yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat di Sajingan Besar masih tergantung pada penerangan dengan menggunakan lampu serongkeng, dan genset. Sarana penerangan yang terbatas ini menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan masyarakat, baik dalam hal pekerjaan, informasi maupun pengetahuan yang secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di Sajingan Besar.

Dalam hal penyediaan sarana sosial, khususnya dalam bidang olah raga seperti sepak bola, bola voli dan bulu tangkis, masyarakat di ketiga daerah penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak) tidak mengalami kesulitan yang berarti, karena sarana olah raga tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari grafik 5.18 dimana masing-masing daerah memperoleh skor 3 untuk Sajingan Besar, 3,7 untuk Kartiasa, dan 3,7 untuk Biawak (Malaysia) dalam hal penyediaan sarana olah raga. Penyediaan sarana olah raga adalah salah satu variabel pembeda antara daerah kota dan desa. Penyediaan lahan untuk fasilitas olah raga di daerah kota sulit terpenuhi, sementara di daerah desa, lahan kosong untuk fasilitas olah raga relatif lebih mudah untuk terpenuhi. Olah raga kemudian memiliki peranan penting bagi masyarakat desa (seperti di ketiga daerah penelitian), terutama untuk masyarakat di Sajingan Besar, karena olah raga tidak saja menjadi sarana pemersatu / keakraban masyarakat, tetapi olah raga juga menjadi salah satu faktor untuk membantu terjaganya kesehatan masyarakat dan menjadi hiburan (*leisure*) bagi masyarakat ditengah prasarana dan sarana kesehatan dan hiburan modern (seperti tv) yang tidak tersedia dengan baik di daerah tersebut.

Informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Dan informasi pada umumnya paling mudah diakses masyarakat dari siaran televisi. Siaran televisi yang tidak dapat diterima dengan baik menyebabkan tidak tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat. Sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Sajingan Besar yang sulit untuk menerima siaran stasiun televisi nasional baik TVRI maupun stasiun swasta nasional. Namun berkebalikan, masyarakat Sajingan Besar lebih mudah untuk memperoleh siaran dari stasiun TV Malaysia. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat Sajingan Besar lebih banyak memperoleh informasi mengenai negara Malaysia daripada negaranya sendiri, Indonesia. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang perkembangan dan peristiwa yang terjadi di Indonesia sangat minim. Satu hal yang menjadi kekhawatiran adalah emosional dan nasionalisme masyarakat terhadap negara tetangga (Malaysia) dapat saja lebih besar dari Indonesia jika terus menerus terpupuk.

Dibanding Sajingan Besar, Kartiasa sangat mudah menerima siaran TVRI dan TV Malaysia. Selain memperoleh informasi yang lebih banyak, masyarakat Kartiasa juga memperoleh informasi dua arah (dari Indonesia dan Malaysia). Berbeda dari kedua daerah di Indonesia diatas, masyarakat di Biawak Malaysia sangat sulit menerima siaran TVRI, namun arus informasi bagi masyarakatnya terpenuhi dari siaran TV nasional dan TV swasta Malaysia yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Biawak.

Selain dari siaran televisi, informasi dapat menyebar luas ke masyarakat melalui komunikasi yang baik. Komunikasi pula yang membantu kelancaran aktifitas masyarakat. Namun penyediaan sarana komunikasi masih terkendala di Sajingan Besar. Telepon kabel, telepon, umum, warung telepon, warung internet, dan sinyal telepon seluler sangat sulit untuk dijangkau masyarakat Sajingan Besar. Hal ini kemudian menyebabkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat Sajingan Besar statis ditengah perkembangan informasi dan teknologi dunia yang cukup pesat. Penyediaan sarana komunikasi di Kartiasa bisa dikatakan lebih baik dari Sajingan Besar karena telepon kabel dan warung telepon mudah untuk dijangkau masyarakat. Namun satu hal yang menjadi catatan penting bagi pemerintah bahwa pemerintah gagal dalam menyediakan sarana komunikasi yang

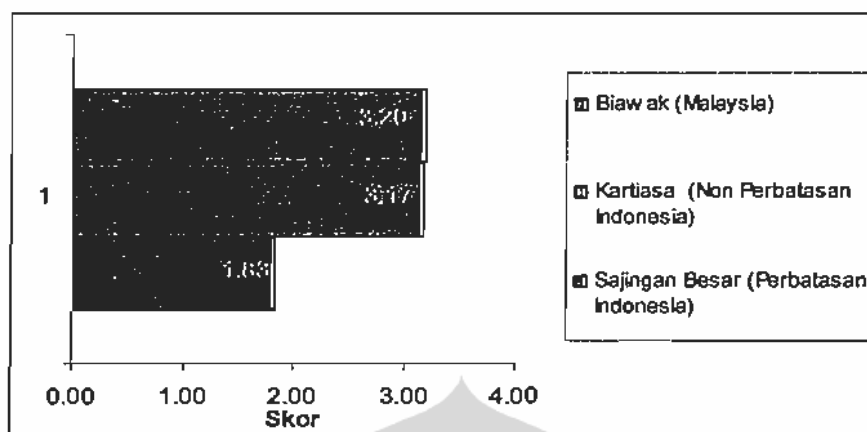
murah bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin seperti di Sajingan Besar dan Kartiasa. Contoh riilnya, telepon koin Rp. 100, 00 merupakan sarana komunikasi yang relatif mudah untuk ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Biaya yang murah tersebut cukup membantu masyarakat miskin kota dalam hal berkomunikasi. Namun sayangnya, fasilitas komunikasi murah seperti telepon koin belum mampu disediakan pemerintah bagi masyarakat miskin desa.

Masyarakat di Biawak cukup mudah dalam memperoleh sarana komunikasi. Telepon kabel dan sinyal telepon seluler sangat mudah diperoleh oleh masyarakat Biawak. Namun seperti halnya di Sajingan Besar dan Kartiasa, warung internet juga merupakan suatu sarana komunikasi yang sangat sulit diakses di Biawak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dari kedua negara belum begitu memperhatikan warnet sebagai sarana komunikasi yang penting bagi masyarakat di Sajingan, Kartiasa, dan Biawak (Malaysia). Ketersediaan ini juga tidak dapat dilepaskan dari tingkat kebutuhan dan pendidikan masyarakat dari ketiga daerah tersebut.

Berdasarkan tabel 5.2 dan grafik 5. 18 tentang karakteristik kemiskinan komunitas, prasarana dan sarana perekonomian seperti pasar permanen dan koperasi unit desa (KUD) sangat sulit dijangkau oleh masyarakat Sajingan Besar. Dengan demikian arus distribusi barang dan jasa di Sajingan Besar cukup sulit terjadi. Namun masyarakat di Sajingan Besar terbantu dengan adanya lembaga keuangan mikro yang membantu pengendalian perekonomian masyarakat. Berbanding terbalik dengan Sajingan Besar, di Kartiasa lembaga keuangan mikro sulit dijumpai.

Distribusi barang dan jasa cukup lancar dengan mudah dijangkaunya pasar permanen dan koperasi unit desa. Kondisi di Biawak Malaysia lebih baik lagi dibanding kedua daerah di Indonesia tersebut karena sarana perekonomian seperti pasar permanen, koperasi unit desa dan lembaga keuangan mikro mudah dijangkau.

Grafik.5.21 Nilai Total Kemiskinan Komunitas



Sumber : Data primer, hasil olahan

Dengan mengkompilasi data yang ada maka terlihat bahwa nilai total kemiskinan komunitas di Sajingan Besar berada dibawah angka 2 atau masih berada pada kategori sulit (1,73). Sedangkan Kartiasa dan Biawak termasuk dalam kategori mudah dengan skor diatas 3 (3,17 untuk Kartiasa dan 3,2 untuk Sajingan Besar). Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat kemiskinan antara komunitas masyarakat di daerah perbatasan (Sajingan Besar) dan non perbatasan (Kartiasa) dalam negara Indonesia, serta perbedaan tingkat kemiskinan komunitas antara daerah perbatasan Indonesia (Sajingan Besar) dan Malaysia (Biawak). Rendahnya nilai total kemiskinan di Sajingan Besar tidak saja mengukuhkan pendapat bahwa kawasan perbatasan hanya dianggap sebagai kawasan belakang yang rawan akan penyimpangan terhadap negara, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memaksimalkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) bagi masyarakat perbatasan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan..

## V.2 Interaksi Antar Wilayah (Indonesia – Malaysia)

### V.2.1 Interaksi dan Ketergantungan terhadap negara Malaysia

Dalam penelitian ini juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan interaksi dua wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Sajingan Besar) dan yang tidak berbatasan dengan Malaysia (Kartiasa). Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa kecamatan Sajingan Besar merupakan kecamatan termiskin di Kabupaten Sambas sedangkan Kartiasa

merupakan desa termiskin di Kecamatan Sambas (Wawancara dengan Lisa, Staf BPS Kab. Sambas).

Data primer yang diolah dengan bantuan *software* SPSS menunjukkan bahwa tidak ada interaksi perdagangan oleh rumah tangga di Kartiasa terhadap pasar di Malaysia sedangkan di Sajingan Besar hanya sekitar 19% rumahtangga yang melakukan transaksi perdagangan (menjual hasil bumi) dengan negara tetangga.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga, sebanyak 95% rumah tangga di Kartiasa juga memperolehnya dari pasar Sambas (0% dari Malaysia) sedangkan di Sajingan Besar 63,1% pemenuhan kebutuhan rumah tangga dipasok dari pasar Galing. Dan hanya 36,9% rumah tangga di Sajingan Besar yang kebutuhan pokoknya dipenuhi oleh pasar Malaysia. Untuk daerah Sajingan Besar sendiri hanya dua desa yang memiliki interaksi kuat dengan Malaysia yaitu Desa Sebunga (yang berbatasan langsung) dan desa Kaliau' (ibukota kecamatan) dan tiga desa lainnya kebutuhan pokok rumah tangga dipasok dari pasar kecamatan Galing.

Tidak adanya interaksi dengan Malaysia di Kartiasa juga tergambar dari jawaban seluruh responden yang tidak pernah melakukan perjalanan ke Malaysia (100%). Sedangkan Sajingan Besar antara yang tidak pernah ke Malaysia dengan kurang dari tiga kali ke Malaysia dalam seminggu jawaban responden berimbang, masing – masing 35% dan 38%. Pada umumnya penduduk Sajingan Besar di desa Santaban, Senatab dan Sungai Bening melakukan perjalanan ke Malaysia pada saat panen atau musim buah saja. Hal tersebut juga tergambar pada pertanyaan dalam rangka apa melakukan perjalanan ke Malaysia, dimana 58% rumahtangga di Sajingan Besar menjawab transaksi – jual beli sedangkan di Kartiasa tidak ada interaksi jual beli dengan Malaysia karena semua responden menyatakan tidak pernah ke Malaysia.

Sebanyak 39% responden Sajingan Besar yang melakukan perjalanan ke Malaysia menggunakan sepeda motor. Hal ini dapat dipahami karena tidak adanya kendaraan umum dari dan ke Biawak (Malaysia). Dan sebanyak 20% yang berjalan kaki jika melakukan perjalanan ke Malaysia. Responden yang menggunakan kendaraan bermotor (pribadi maupun ojek) mengeluarkan biaya

kurang dari Rp. 20.000,- dijawab oleh sekitar 25% responden sedangkan jawaban Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000,- sebesar 27,4%. Selebihnya menjawab lainnya karena tidak pernah ke Malaysia ataupun tidak mengeluarkan biaya karena berjalan kaki. Tabel 5.22 di bawah ini memperlihatkan interaksi antara Sajian Besar dan Kartiasa terhadap negara tetangga Malaysia.

Tabel. 5.1 Interaksi dengan Negara Tetangga

Keterangan			Wilayah		Total
			Sajian Besar (Perbatasan)	Kartiasa (Non Perbatasan)	
Pemasaran Hasil Bumi	pasar desa (lokal)	N	68	20	88
		%	81.0%	100.0%	84.6%
	luar negeri (Malaysia)	N	16	0	16
		%	19.0%	0.0%	15.4%
Pasar Sumber Pemenuhan Kebutuhan Pokok	Sambas	N	0	19	19
		%	0.0%	95.0%	18.3%
	Biawak (Malaysia)	N	31	0	31
		%	36.9%	0.0%	29.8%
	Lainnya	N	53	1	53
		%	63.1%	5.0%	51.0%
Frekuensi Malaysia dalam Sebulan	<3 kali	N	32	0	32
		%	38.1%	0.0%	30.8%
	3-5 kali	N	13	0	13
		%	15.5%	0.0%	12.5%
	>5 kali	N	9	0	9
		%	10.7%	0.0%	8.7%
	Tidak Pernah	N	30	20	50
		%	35.7%	100.0%	48.1%
Dalam rangka apa melakukan perjalanan ke Malaysia	Mencari pekerjaan	N	1	0	1
		%	1.2%	0.0%	1.0%
	Transaksi perdagangan (jual – beli)	N	49	0	49
		%	58.3%	0.0%	47.1%
	Mengunjungi keluarga	N	7	0	7
		%	8.3%	0.0%	6.7%
	Lainnya	N	27	20	47
		%	32.1%	100.0%	45.2%



Sambungan

Keterangan			Wilayah		Total	
			Sajingan Besar (Perbatasan)	Kartiasa (Non Perbatasan)		
Cara Berpergian ke Malaysia	Berjalan kaki	N	17	0	17	
		%	20.2%	0.0%	16.3%	
	Bersepeda	N	2	0	2	
		%	2.4%	0.0%	1.9%	
	Motor roda 2	N	33	0	33	
		%	39.3%	0.0%	31.7%	
	Ojek motor	N	4	0	4	
		%	4.8%	0.0%	3.8%	
	Lainnya	N	28	20	48	
		%	33.3%	100.0%	46.2%	
	Berapa biaya transportasi yang dikeluarkan ketika berpergian ke Malaysia	<Rp.20.000,-	N	21	0	21
			%	25.0%	0.0%	20.2%
Rp. 20.000,- - Rp. 50.000,-		N	23	0	23	
		%	27.4%	0.0%	22.1%	
Rp. 50.000,- - Rp. 100.000,-		N	1	0	1	
		%	1.2%	0.0%	1.0%	
Lainnya		N	39	20	59	
		%	46.4%	100.0%	56.7%	

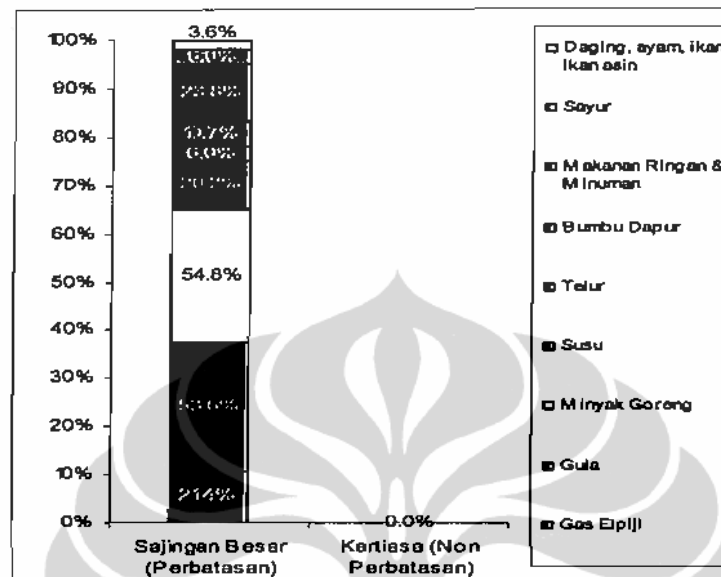
Sumber : data primer, data diolah

Tabel diatas melihtakan bahwa interaksi dengan negara tetangga hanya dilakukan oleh mereka yang berdomisili di Sajingan Besar dan kegiatannyapun terbatas pada jual – beli kebutuhan pokok di desa Sebunga dan Kaliau’ serta pada saat panen tanaman musiman.

Sedangkan grafik 5.23 memberi gambaran bahwa interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Sajingan terhadap pasar di Malaysia yang mendominasi adalah pembelian minyak goreng (54,8%), gula (53,6%), makanan ringan & minuman (23,8%), gas elpiji (21,4%) serta susu (20,2%). Bahkan untuk gula jika cuaca memungkinkan lebih dari lima rombongan pedagang dari Galing (tiga hingga enam motor per rombongan) perhari melakukan pembelian gula di Biawak Malaysia dengan daya tampung kurang lebih 200kg per motor. Hal ini menandakan bahwa terdapat selisih harga yang cukup menguntungkan bagi pedagang dengan melakukan pembelian gula di Malaysia dibandingkan jika membeli di daerah lainnya di kabupaten Sambas. Untuk kasus minyak goreng

biasanya dipasok dari masing – masing rumah tangga yang melakukan perjalanan ke Malaysia.

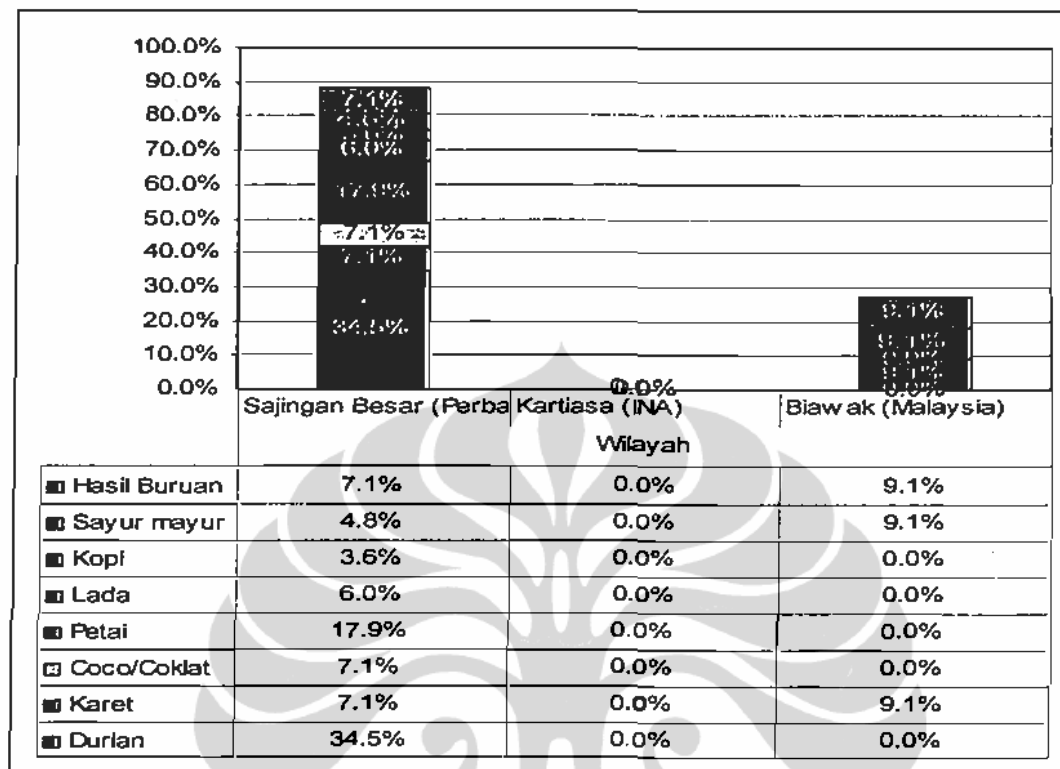
Grafik.5.22. Produk Malaysia yang sering di Konsumsi



Sumber : data primer, data diolah

Sedangkan produk yang biasa dijual penduduk Sajingan ke Malaysia didominasi oleh buah - buahan musiman seperti durian dan petai masing – masing sebesar 34,5% dan 17,9%. Sedangkan produk pertanian lainnya seperti coklat, karet, dan buruan, lada, sayur mayur dan kopi berada di bawah 10%. Terbukanya akses dari dan ke Sajingan Besar ke Kota Sambas membuat penduduk disana mempunyai pilihan untuk memasarkan produk pertanian mereka. Menurut hasil wawancara petani Sajingan kini lebih banyak melakukan penjual dirumah mereka sendiri karena pengumpul dari Biawak maupun Sambas (Kota Sambas/Galing) yang akan mendatangi mereka. Selisih harga jual sebuah produk karena perbedaan mata uang juga memungkinkan petani memilih kemana hasil pertanian mereka akan dijual. Grafik 5.22 dibaca terbalik untuk responden di Biawak Malaysia. Untuk wilayah ini maka angka 9,1% hasil buruan, sayur mayur dan karet merupakan produk yang biasa mereka beli dari penduduk di Sajingan. Kecilnya angka pembelian produk Sajingan oleh Biawak karena setiap produk pertanian akan berbeda pembeli / pengumpulnya. Di wilayah Kartiasa tidak ada interaksi penjualan sama sekali dengan Biawak Malaysia dikarenakan jarak antar kedua wilayah jauh serta tidak ada selisih harga yang mencolok antara produk dalam negeri dengan produk Malaysia .

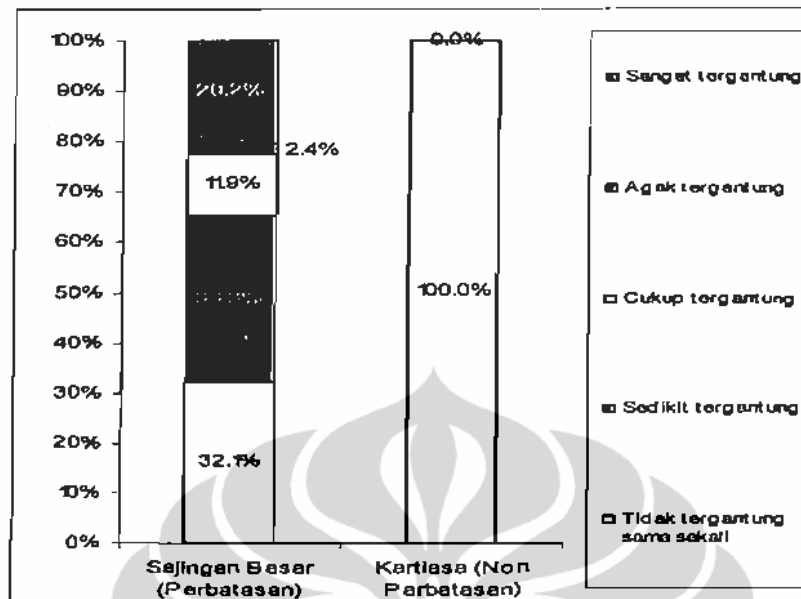
Grafik.5.23. Produk yang biasa di Jual di Malaysia



Sumber : data primer, data diolah

Berdasarkan grafik 5.24 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara daerah perbatasan (Sajingan Besar) dan daerah non perbatasan (Kartiasa) terhadap ketergantungan dengan negara tetangga (Malaysia). 100 % responden dari Kartiasa merasa tidak tergantung sama sekali terhadap daerah Biawak (Malaysia). Sementara 20 % responden di Sajingan Besar merasa sangat tergantung pada Biawak, 2,4 % merasa agak tergantung, 11,9 % merasa cukup tergantung, dan 33,3 % merasa sedikit tergantung. Sementara itu, hanya 32,1 % responden dari sajingan Besar yang merasa tidak tergantung sama sekali terhadap Biawak (Malaysia). Ketergantungan ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan pemasaran hasil bumi masyarakat Sajingan Besar.

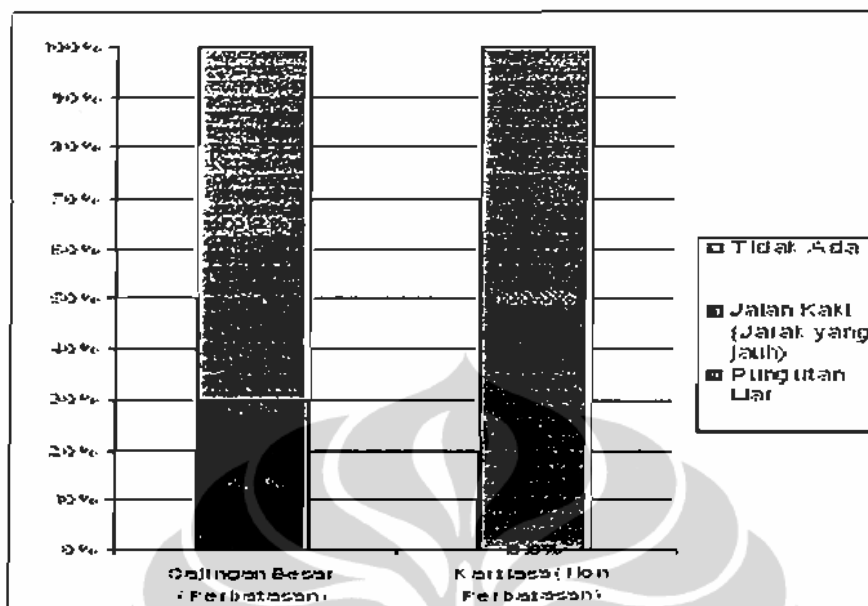
Grafik.5.24. Ketergantungan terhadap Negara Malaysia



Sumber : data primer, data diolah

Kedekatan seeara geografis tidak lantas mengabaikan sekat antar kedua negara, karena kedua negara memberlakukan hukum positif dalam pembagian batas negara, sehingga warga negara asing yang masuk ke wilayah perbatasan negara lain wajib menaati hukum yang ditetapkan di negara yang bersangkutan. Begitu pula hal yang dialami masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia. 70,2 % responden dari Sajingan Besar mengungkapkan bahwa mereka tidak mengalami kendala apa-apa untuk memasuki wilayah perbatasan. Namun sebanyak 29,8 % mengalami beberapa kendala untuk memasuki wilayah perbatasan Biawak (Malaysia). Kendala tersebut bukan karena pemberlakuan hukum yang berbeda antar kedua negara, namun lebih disebabkan oleh kendala informal seperti jarak perjalanan yang terlalu jauh dialami 3,6 % responden dan pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum tertentu terhadap 26,2 % responden. Sementara responden Kartiasa merasa tidak ada kendala untuk memasuki wilayah perbatasan karena memang tidak ada responden di Kartiasa yang pernah melakukan perjalanan ke wilayah perbatasan Malaysia melalui jalur Aruk - Biawak .

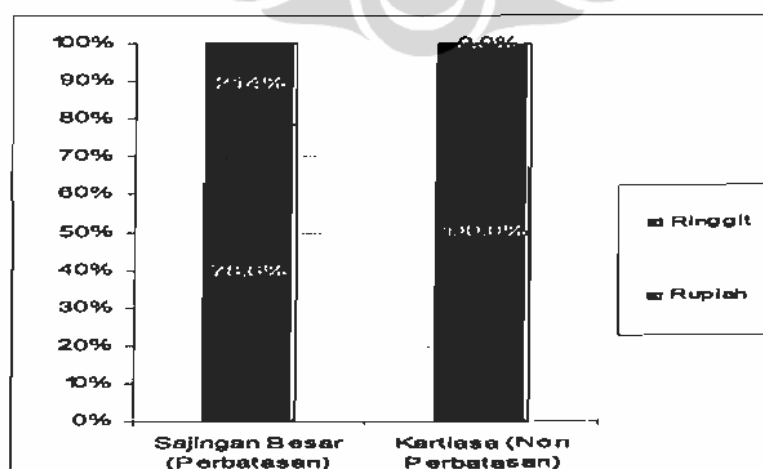
Grafik.5.25. Kendala Memasuki Perbatasan



Sumber : data primer, data diolah

Penggunaan mata uang merupakan salah satu indikator ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap Malaysia. Dari grafik 5.25 dapat dilihat bahwa 100 % responden daerah non perbatasan (Kartiasa) menggunakan Rupiah sebagai mata uang. Sementara di daerah perbatasan (Sajingan Besar), 21,4 % responden masih menggunakan Ringgit sebagai mata uang mereka.

Grafik.5.26. Penggunaan Mata Uang



Sumber : data primer, data diolah

### V.2.2 Program Pengembangan dan Pembangunan Paloh – Sajingan (PALSA)

Keberhasilan program pemerintah tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat sebagai *stakeholder* yang terkait. Karena pada dasarnya setiap program yang direncanakan pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakatnya. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap Program Pengembangan dan Pembangunan Paloh-Sajingan (PALSA) di Kabupaten Sambas.

Tabel.5.2. Pengetahuan Responden terhadap Program Pembangunan Paloh Sajingan (PALSA)

Keterangan			Wilayah		Total
			Sajingan Besar (Perbatasan di INA)	Kartiasa (INA)	
Apakah Pem Kab Sambas pernah mensosialisasikan Program Pembangunan PALSA	Ya	N	23	0	23
		%	27.4%	0.0%	22.1%
	Tidak	N	61	20	81
		%	72.6%	100.0%	77.9%
Di Aruk (Sajingan) akan segera di buka Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)	Tahu	N	38	0	38
		%	45.2%	0.0%	36.5%
	Tidak	N	29	0	29
		%	34.5%	0.0%	27.9%
	Tidak Mengerti	N	17	20	37
		%	20.2%	100.0%	35.6%
Jika tahu, dari mana informasi ini diperoleh	Pemerintah	N	9	0	9
		%	10.7%	0.0%	8.7%
	Saudara/Teman/Tetangga	N	26	0	26
		%	31.0%	0.0%	25.0%
	Media Massa/Elektronik	N	3	0	3
		%	3.6%	0.0%	2.9%
Tidak Ada Informasi	N	46	20	66	
	%	54.8%	100.0%	63.5%	
Apakah ada lahan/Asset RT yang digunakan dalam Program Pembangunan PALSA	Ada	N	17	0	17
		%	20.2%	0.0%	16.3%
	Tidak	N	67	20	87
		%	79.8%	100.0%	83.7%
Total	N	84	20	104	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

Sambungan

Keterangan			Wilayah		Total
			Sajingan Besar (Perbatasan di INA)	Kartiasa (INA)	
Jika ada, apa saja ?	Rumah	N	5		5
		%	29.4%		29.4%
	Lahan pekarangan/ Pertanian	N	11		11
		%	64.7%		64.7%
	Keduanya	N	1		1
		%	5.9%		5.9%
Apakah ada ganti rugi dari pemerintah ?	Ada	N	8		8
		%	47.1%		47.1%
	Tidak	N	9		9
		%	52.9%		52.9%
Jika ada, apakah ganti rugi tersebut sesuai ?	Tidak	N	8		8
		%	100.0%		100.0 %
Jika tidak, usaha apa yang dilakukan ?	Mengadu ke Pemerintah/DPR D	N	1		1
		%	12.5%		12.5%
	Diam saja	N	7		7
		%	87.5%		87.5%
Apakah responden merasa dilibatkan dalam Program Pengembangan dan Pembangunan PALSA	Tidak	N	48	20	68
		%	57.1%	100.0%	65.4%
	Ya	N	36	0	36
		%	42.9%	0.0%	34.6%
Bentuk keterlibatan responden dalam PALSA	Terlibat/ikut merumuskan kegiatan dalam program PALSA	N	5	0	5
		%	6.0%	0.0%	4.8%
	Menghibahkan asset	N	5	0	5
		%	6.0%	0.0%	4.8%
	Lain-lain	N	74	20	94
		%	88.1%	100.0%	90.4%

Sumber : Sumber : data primer, data diolah

Program Pengembangan Pembangunan Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) yang ditetapkan sebagai Keputusan Bupati Sambas pada tanggal 11 September 2003 menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sambas untuk membangun kawasan perbatasan, yang diharapkan juga akan membangun perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Namun dalam kenyataannya masyarakat di Sajingan Besar merasa program PALSA tersebut belum familiar bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 72,6 % responden

di Sajingan Besar merasa belum pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Sambas mengenai program PALSA tersebut. Bahkan 100% responden dari Kartiasa juga merasakan hal yang sama.

Sebanyak 45,2 % responden di Sajingan Besar mengaku tahu bahwa di Aruk (Sajingan Besar) akan segera dibuka Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Sementara 34,5% mengaku tidak tahu rencana tersebut, dan 20,2 % mengaku tidak mengerti sama sekali. Rendahnya tingkat sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terhadap program pemerintah juga dapat dilihat dari rendahnya informasi yang diterima masyarakat tentang rencana pembangunan. Sebanyak 10,7 % responden mengaku memperoleh informasi tentang pembangunan PALSA dari pemerintah, sementara sisanya 31 % memperoleh informasi tersebut dari Saudara/ Teman/ Tetangga, 3,6 % memperoleh informasi dari media cetak/elektronik. Bahkan 54,8 % responden mengaku tidak ada informasi sama sekali mengenai program PALSA yang akan direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Sambas.

Rencana program PALSA yang belum populer bagi masyarakat Sajingan Besar (apalagi bagi masyarakat Kartiasa) tidak saja menjadi *surprise* bagi masyarakat sebagai sebuah program pembangunan, tetapi juga menjadi *surprise* bagi masyarakat yang merasa bahwa program pembangunan ini mencaplok lahan/aset yang mereka miliki. Sebanyak 20,2 % responden di Sajingan Besar yang merasa memiliki lahan/aset yang digunakan dalam program PALSA mengungkapkan lahan yang digunakan dalam program tersebut adalah lahan rumah (29,4 %), lahan perkarangan/ pertanian (64,7 %), maupun keduanya lahan rumah dan perkarangan/pertanian (5,9 %).

Program ini dapat dikatakan belum populis bagi masyarakat di Sajingan Besar karena beberapa kerugian ditanggung oleh masyarakat dengan bergulirnya program PALSA. Masyarakat yang merasa lahannya digunakan untuk program PALSA tersebut, sebanyak 47,1 % merasa bahwa pemerintah tidak memberikan ganti rugi atas lahan yang telah digunakan. Dan sebanyak 52,9 % responden diberikan ganti rugi untuk lahan pribadi yang digunakan. Namun 100 % dari responden yang diberikan ganti rugi tersebut merasa bahwa ganti rugi yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan nilai lahan/aset yang mereka miliki.



Menyikapi hal tersebut, sebanyak 12,5 % responden mencoba mengadukan kasus mereka baik kepada pemerintah daerah sendiri maupun kepada DPRD setempat. Namun sebanyak 87,5 % lebih memilih berdiam diri atas apa yang mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat atas suatu rencana pembangunan yang akan diwujudkan. Bahkan 57,1 % responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam program pengembangan dan pembangunan PALSAs. Dan dari 42,9 % responden yang merasa ikut dilibatkan, keterlibatan mereka sebatas pada hal penghibahan aset yang mereka miliki (sebanyak 6 %), dan lain-lainnya (88,1 %). Sementara yang merasa dilibatkan dalam perumusan program PALSAs hanya 6 % dari responden di Sajingan Besar.

### V.3 Strategi Pembangunan di Perbatasan Kabupaten Sambas

Strategi yang dibahas disini adalah strategi yang diperkirakan merujuk pada teori pembangunan perbatasan yang dikemukakan oleh Qu. Seperti telah disebutkan pada bab 2 bahwa untuk membangun wilayah perbatasan menurut Qu dapat menggunakan 3 pendekatan yaitu *Core-Peripheral Approach* (CPA), *Cross Border Approach* (CBA) dan *Mixed a CPA – CBA Model*. Penelitian ini COBA mendeskripsikan kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sambas dengan mengklasifikasikannya kedalam pendekatan CPA dan CBA.

#### V.3.1 *Cross Peripheral Approach* (CPA)

Pendekatan *Core-Peripheral Approach* akan berjalan baik jika memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu :

1. Daerah *core* (pusat pertumbuhan) harus punya *comparative advantage* dalam ekonomi dan teknologi dibanding daerah lainnya (pinggiran), dimana ekonomi daerah pusat (*core economic*) merupakan angka yang besar. Dalam hal ini daerah *core* berada dalam satu wilayah negara.
2. Daerah *peripheral* (daerah pinggiran/lainnya) jaraknya harus dekat (tidak bolch terlalu jauh) dengan *core* atau paling tidak aksesnya mudah (dalam pengertian waktu/*accessible*).

Dalam model ini di asumsikan bahwa kota Sambas sebagai daerah *core* (pusat pertumbuhan) dan Sajingan Besar sebagai daerah *peripheral*. Dengan asumsi diatas maka syarat pertama model ini telah dipenuhi oleh kedua wilayah, dimana kota Sambas mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan Sajingan Besar (kota Sambas sebagai daerah pemasaran semua produksi pertanian dan sebagai daerah tujuan pendidikan tinggi diwilayah kabupaten Sambas, juga merupakan pusat pemerintahan).

Akan tetapi untuk memenuhi syarat kedua agak sulit dilakukan oleh kedua wilayah, karena jarak antara kota Sambas -- Sajingan Besar walaupun tidak begitu jauh (90 km) akan tetapi harus ditempuh dengan waktu yang agak panjang (6 -7 jam kendaraan umum pada saat kondisi normal). Akses keluar masuk transportasi yang sulit juga telah tergambar pada pembahasan kemiskinan komunitas. Dengan demikian untuk menerapkan model ini akan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal di kedua wilayah.

### V.3.2 *Cross Border Approach* (CBA)

Untuk menggunakan pendekatan *Cross Border Approach* (CBA) dalam pembangunan kawasan perbatasan juga memiliki persyaratan khusus agar dapat dilaksanakan. Adapun persyaratan dalam pendekatan ini yaitu :

1. Dunia Internasional atau daerah tetangga harus punya keunggulan komparatif, baik ekonomi maupun teknologi
2. Hambatan dalam *border* itu sendiri yang bersifat fisik dan ideologis harus mudah dihilangkan (lingkungan fisik, struktur politik dan kebijakan ekonomi).

Berdasarkan persyaratan diatas maka di asumsikan bahwa Malaysia diwakili oleh Biawak (Lundu - Serawak - Malaysia) merupakan daerah tetangga yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan wilayah di Indonesia (Sajingan Besar – Sambas – Kalbar - Indonesia). Hal ini terlihat dari pembahasan tentang interaksi dan ketergantungan dengan daerah tetangga hal 116 - 123.

Daerah Biawak merupakan pasar utama bagi penduduk di desa Sebunga dan Kaliau' (Sajingan Besar) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari sebagaimana dikemukakan pada tabel. 5.1. Bahkan dibidang kesehatan sebelum

tahun 2006 penduduk Sajingan Besar juga melakukan kunjungan pengobatan ke sarana fasilitas kesehatan di Biawak hal ini tergambar dari grafik 5.6 hal. 97.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak John (Kepala Poliklinik Desa Kampong Biawak Malaysia), warga negara asing (Indonesia) yang berobat ke klinik ini dikenakan tarif 15 RM/sekali kunjungan termasuk obat pada saat jam kerja (pukul 08 pagi – 15.00) dan 50 RM diluar jam kerja sedangkan warganegara Malaysia hanya berkewajiban membayar 1 RM untuk pendaftaran yang berkunjung akan mendapatkan pengobatan dan obat gratis. Pada Tahun 2006 – 2007 ternyata tidak ada warganegara Indonesia yang berobat ke klinik ini dikarenakan telah operasionalkannya Puskesmas di kecamatan Sajingan Besar tepatnya di desa Kaliiau' dengan jarak lebih dekat dan biaya lebih murah.

Dari sisi akses masuk dan keluar ke Biawak – Lundu (Bandar/Kota) juga lebih mudah dibandingkan akses masuk Sajingan Besar – Kota Sambas. Hal ini dikarenakan jalan aspal laterit diwilayah Malaysia telah mencapai semua pelosok desa (kampong) sehingga tidak ada daerah yang dikategorikan sulit walaupun masih belum ada angkutan umum yang beroperasi dari dan ke Biawak – Lundu. Namun kendaraan carteran (mobil / motor) mudah untuk ditemui di pasar Biawak dengan tarif RM 6 / penumpang menempuh jarak sekitar 29 Km.

Keunggulan komparatif lain yang dimiliki Malaysia adalah sebagai pasar tenaga kerja, dimana mayoritas anak putus sekolah di dalam Sajingan Besar dan Kartiasa pernah / sedang bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga / penjaga toko / maupun di industri bagi wanita dan sebagai buruh perkebunan / pabrik bagi pria (Tabel. 4.8).

Dan dari sisi tehnologi dan informasi Malaysia juga memiliki keunggulan kompartif di bandingkan Indonesia. Hal ini tercermin dalam pembahasan kemiskinan komunitas dimana untuk siaran TV yang diterima Sajingan Besar dan Kartiasa tanpa antena parabola hanya siaran TV Malaysia (TV1, TV2, TV3 dan TV9. TVRI dan TV Swasta Nasional Indonesia hanya bisa diterima jika menggunakan parabola). Demikian pula dengan komunikasi signal telepon selular yang dapat diterima di Sajingan Besar hanya signal telpon dari operator Malaysia (Digis dan Maxis).

Berdasarkan fakta – fakta diatas maka syarat pembangunan perbatasan menggunakan pendekatan *cross border approachi* telah memenuhi syarat pertama. Dan syarat kedua dimana hambatan fisik dan ideologis mudah dihilangkan juga dapat dilakukan oleh kedua wilayah melalui berbagai *event* budaya dilakukan bersama – sama antara suku daya di Indonesia dan di Malaysia karena pada intinya mereka adalah satu kesatuan, hanya adanya perbatasan yang membedakan mereka (kesamaan suku antara penduduk di kecamatan Sajingan Besar dan Biawak maupun Lundu Malaysia yaitu suku dayak baik dayak Selako (Rara) di Indonesia maupun dayak Bidayuh (Malaysia).

Untuk Pemerintah Kabupaten Sambas dengan pemerintah Malaysia, juga saling melakukan kunjungan kerja dan kerjasama. Untuk pembuatan *Master Plan* pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan Paloh Sajingan juga dibuat oleh pihak Malaysia

Dan persyaratan kedua dimana hambatan fisik dan ideologis mudah dihilangkan juga diperkirakan akan demikian adanya, karena pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Indonesia mulai membangun kawasan perbatasan Kabupaten Sambas seperti rencana pembukaan PPLB secepatnya dengan segala infrastruktur yang mendukung seperti jalan, pasar, sarana keimigrasian dan lainnya, serta dari sisi ideologi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sebagai negara serumpun dimana hubungan kekeluargaan antara penduduk kawasan perbatasan sangat dekat, telah lama melakukan kerjasama seperti seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*), IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapura – Growth Triangle*), IMT-GT (*Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle*), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area), dan forum kerjasama SOSEK MALINDO.

Dalam tatanan yang lebih tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia juga telah melakukan kerjasama seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*), IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapura – Growth Triangle*), IMT-GT (*Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle*), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area), dan forum kerjasama SOSEK MALINDO.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan perbatasan Indonesia dan Malaysia (Sajingan Besar – Biawak) menggunakan pendekatan *A Mixed Core Peripheral Approach - Cross Border Approach* akan lebih optimal dibandingkan dengan pendekatan *Core Peripheral Approach* dan *Cross Border Approach* jika dijalankan secara sendiri-sendiri.

### V.3.2 Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Isu strategis dialami oleh Kabupaten Sambas sebagai salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia diantaranya adalah letak geografis yang strategis, ketimpangan ekonomi masyarakat dengan negara tetangga, kawasan perbatasan merupakan daerah tertinggal, kurangnya ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, dan lainnya), globalisasi/perdagangan bebas dan penyelundupan (termasuk TKI). Keadaan tersebut semakin memburuk akibat kerusuhan sosial pada tahun 1999. Sebagai wilayah hasil pemekaran, Kabupaten Sambas harus mencari alternatif kebijakan yang dapat membawa misinya menjadi kenyataan, salah satunya adalah kesejahteraan rakyat.

Gambar 5. 1 Posisi Kabupaten Sambas di Internasional



Sumber : Bappeda Kab. Sambas

Berbagai upaya pembangunan wilayah dan masyarakat telah dilakukan pemerintah kabupaten Sambas. Dan pada tanggal 24 April 2008, Bupati Sambas mewakili rakyat Kabupaten Sambas telah menerima penghargaan Award Meretas Ketertinggalan 2008 dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun jika dilihat sekilas, pembangunan di Kabupaten Sambas memang tidak terlalu banyak yang berubah. (seperti dikemukakan bupati Sambas dalam [www.sambas.go.id](http://www.sambas.go.id))

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah Sambas sebagai upaya peningkatan perekonomian dan mensejajarkan diri dengan kawasan lain di Kalimantan Barat adalah pengembangan dan pembangunan kawasan cepat tumbuh di keempat titik wilayahnya yaitu : Program Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Subah, Pembangunan Kawasan Industri Semparuk, Program Pengembangan dan Pembangunan Daerah Perbatasan Paloh dan Sajingan serta Mega Proyek Pengelolaan Gas Blok D Natuna di Paloh.

Kegiatan di keempat kawasan tersebut diharapkan nantinya dapat membawa peningkatan produktivitas masyarakat dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Gambar.5.2 Lokasi Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh di Kab. Sambas

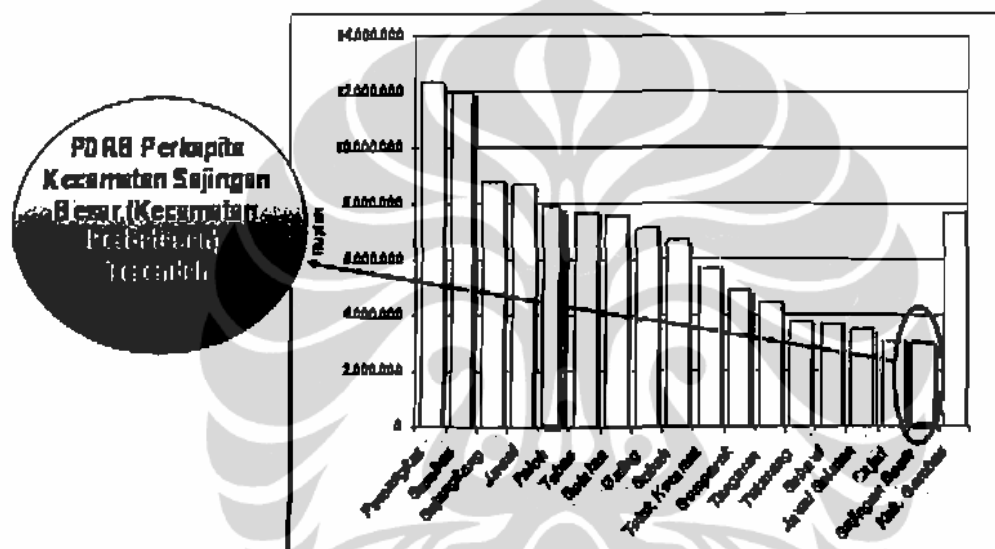


Sumber : Bappeda Kab. Sambas

Dari survey yang dilakukan dan data yang telah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah menunjukkan bahwa kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas (Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar) merupakan daerah yang tertinggal dari daerah daerah lainnya yang membawa dampak terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Sambas pada umumnya. Salah satunya terlihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 5.27**

**PDRB Perkapita Kecamatan di Kabupaten Sambas, Tahun 2006 (Rp)**



Sumber : Paparan Bupati Sambas pada Seminar PIS. Pontianak, 21 Juli 2008

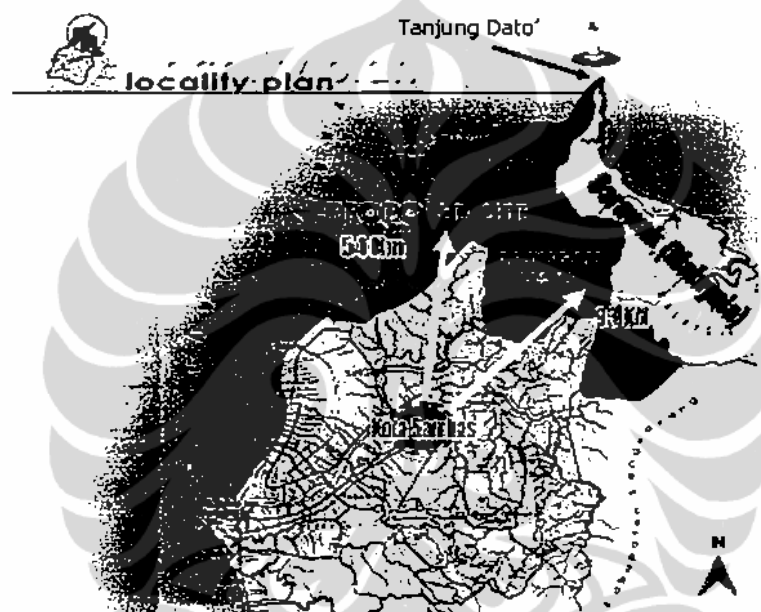
Pada grafik diatas terlihat bahwa PDRB per kapita kecamatan Sajingan pada tahun 2006 adalah yang terendah se Kabupaten Sambas. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk mengatasi isolasi wilayah perbatasan yaitu dengan membangun jalan, jembatan dan sarana angkutan, dan pembangunan sarana informasi dan komunikasi.

Secara umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang merata bagi semua, pemerintah Kabupaten Sambas melakukan pada beberapa kegiatan yang dianggap dapat mendorong pembangunan di Kabupaten Sambas umumnya dan daerah perbatasan khususnya. Kegiatan yang menitik beratkan pada pembangunan wilayah perbatasan sejak tahun 2003 hingga saat ini diantaranya:

1. Pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Aruk (Indonesia) – Biawak (Malaysia) / *Border Development Center* (BDC). Dibangunnya PPLB

di Aruk akan membuka dan mempermudah akses keluar masuk tidak saja untuk Sajingan Besar tetapi juga untuk Kabupaten Sambas secara keseluruhan, dimana jarak tempuh dari Pontianak ke Serawak (Malaysia) akan lebih dekat jaraknya menggunakan PPLB Aruk daripada rute Pontianak - PPLB di Entikong (Kabupaten Sanggau) maupun Pontianak – PPLB Badau (Kabupaten Kapuas Hulu).

Gambar. 5.3 Jarak dan Lokasi Perbatasan Kabupaten Sambas



Sumber : Masterplan Pembangunan Kawasan Paloh – Sajingan 2003

Prasarana dan sarana pendukung PPLB Aruk (yang rencananya akan diresmikan pada awal tahun 2009) hingga saat ini sedang dipersiapkan oleh semua level pemerintahan baik pemerintah Sambas, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Republik Indonesia. Secara keseluruhan pembangunan kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas namakan dengan program *Border Development Center (BDC)*.



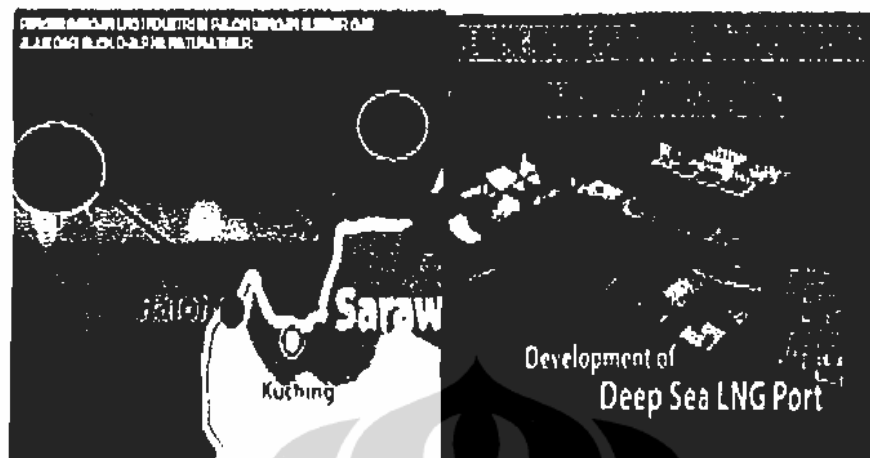
Gambar. 5.4. Perspektif Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia di Aruk



Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas

2. Pembangunan Pengelolaan LNG Terpadu di Paloh. Lokasi kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan kepulauan Natuna membawa keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Sambas secara keseluruhan. Blok D-Alpha di Natuna diperkirakan memiliki cadangan gas yang cukup besar hingga 46 (empat puluh enam) triliun kaki kubik atau 4 (empat) kali lebih besar dari gas yang dihasilkan oleh Bintulu (Malaysia). Pengembangan industri gas di Natuna yang memerlukan lahan sekitar 9 ribu hektar tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di Natuna. Maka dipilihlah Paloh sebagai lokasi terdekat dan memungkinkan untuk membuat industri pengelolaan *liquid natural gas* (LNG) terpadu. Pihak Petronas Malaysia telah mengajukan proposalnya kepada pemerintah Indonesia untuk dapat menjadi *partner* Pertamina dalam membangun industri pengolahan LNG laut dalam dengan Sumber Gas Alam dari blok D – Alpha Natuna Timur di Paloh dengan dana \$ 5 Milyar yang diperkirakan akan melibatkan 10.000 orang tenaga asing dan 100.000 tenaga kerja lokal. Kerjasama ini di dukung oleh pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan dengan izin membuka Politeknik Terpikat Sambas dengan jurusan pertambangan guna mengantisipasi terealisasinya pembangunan pelabuhan LNG ini.

Gambar. 5.5. Lokasi dan Persektif Pembangunan Industri LNG di Paloh



Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas

3. Pembangunan Kawasan Industri Semparuk (KIS). Besarnya potensi pertanian Kabupaten Sambas Padi (79.719 ha), Jeruk (12.208 Ha), Karet (24.934 Ha) Kelapa Sawit (8.632 Ha), Kelapa (23.923 ha) perikanan dan peternakan sebagai dasar kerjasama pemerintah Kabupaten Sambas, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kapet Khatulistiwa membangun kawasan industri terpadu dengan nama Kawasan Industri Semparuk (KIS). Langkah pertama yang dilakukan pemda Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat adalah membangun pusat data dan laboratorium jeruk nasional dengan nama *citrus center* dan penataan serta pengembangan Pelabuhan Sintete (Semparuk) guna mendukung lancarnya distribusi dari jalur transportasi laut.

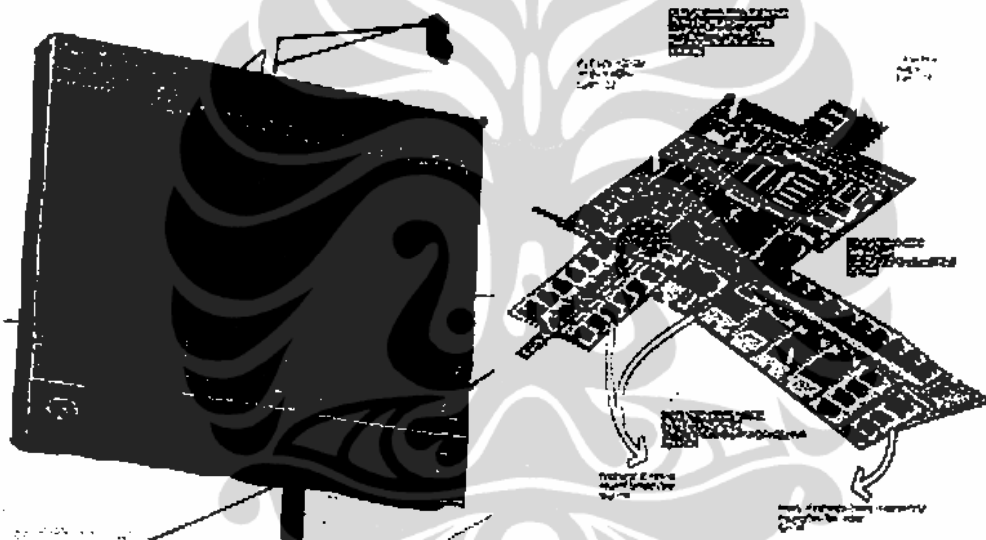
Kawasan Industri Semparuk merupakan lokasi yang strategis dekat dengan pasar lokal, regional dan internasional melalui pelabuhan Sintete dan Jalur Sutra Pontianak – Singkawang. Lokasi ini juga dapat dijangkau melalui transportasi udara dengan memanfaatkan bandara TNI di Paloh dan dan Sanggau Ledo serta bandara misionaris di Serukam. Pembangunan kawasan ini juga bersinergi dengan program pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten Sambas sendiri. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Bupati Sambas No. 97 Tahun 2005 tentang rencana tehnik Ruang KIS Kec. Semparuk Kab. Sambas.

Pembangunan KIS bertujuan untuk mengatasi penggunaan lahan, memberikan kepastian hukum, mempermudah pembangunan dengan berbagai peralatan

pendukung, meminimalisir dampak lingkungan dan penetapan industri yang lebih sederhana.

Kawasan ini rencananya akan menggunakan areal seluas 35,63 hektar yang terdiri dari industri pengeloaan kelapa sawit dan produk turunannya, industri pengelolaan kelapa dan produk turunannya, industri pengelolaan karet dan produk turunannya, industri pengelolaan pakan ternak dan ikan, industri pengelolaan ikan, industri pengelolaan jeruk, jagung, durian, pisang dan lainnya, pabrik es, *ice cuber* dan *ice pour industry* serta *dockyard industry*.

Gambar. 5.6. Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Semparuk



Sumber: Bappeda Kabupaten Sambas

4. Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM merupakan kawasan transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi Pusat Pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis; Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul; Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir serta pergudangan komoditas sejenis.

Kawasan KTM Subah ini terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni kecamatan Subah 11 Desa, Kecamatan Sajad 4 desa dan Kecamatan Sejangkung 1 Desa, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 16 (enam belas) Desa. Selain sebagai

lokasi eks pemukiman transmigrasi, kawasan ini juga direncanakan sebagai Penempatan Transmigrasi Baru (PTB) sejumlah 1.400 KK.

Di kawasan dan sekitarnya telah berdiri 10 perusahaan perkebunan karet milik swasta, luasnya perkebunan kelapa sawit tersebut mencapai 106.850ha. Selain itu untuk pengembangan perkebunan karet dan kelapa sawit di kawasan ini disediakan lahan seluas 39.203 ha untuk kelapa sawit dan 13.198 ha dan perkebunan karet. Lahan tersebut telah diusulkan oleh masyarakat pada tahun 2007 yaitu di desa Sabung dan desa Madak. Penempatan di desa ini menampung transmigrasi baru ± 600 KK, sedangkan desa Balai Gemuruh dan Tebuah Elok ± 800 KK. Saat ini telah dipersiapkan fasilitas pemukiman untuk 500 KK.

Transmigrasi di Kabupaten Sambas sudah dikembangkan sejak tahun 1982 dan terus berkembang sampai sekarang. Warga transmigrasi umum yang ada saat ini di Kecamatan Subah berjumlah 9.500 jiwa yang terdiri dari 1.916 KK dan PIR – Transmigrasi sebanyak 14.315 jiwa atau 2.863 KK. Salah satu Kawasan Transmigrasi mempunyai yang berada di Kec. Subah ini mempunyai aksesibilitas yang cukup baik dengan kota Sambas sebagai ibukota Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang melalui kecamatan Ledo. Wilayah Transmigrasi yang berada di Kec. Subah pada umumnya dapat dicapai melalui transportasi darat. Kawasan Transmigrasi merupakan daerah *hinterland* yang dapat mendukung Kota Sambas sebagai ibu kota kabupaten dan Pontianak sebagai Ibu kota Propinsi Kalimantan Barat.

Komoditas unggulannya meliputi tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung dan ubi kayu), perkebunan (kelapa sawit dan karet rakyat), perikanan darat dan peternakan (sapi), serta industri rakyat (Bidai = Tikar dari kulit kayu). Pembangunan KTM sebagai upaya membuka keterisolasian daerah sehingga mendorong perekonomian Kabupaten Sambas, karena selama ini interaksi masyarakat Subah (transmigran khususnya) lebih mengarah pada pasar Bengkayang karena akses yang lebih mudah.

Proyek ini akan menggunakan lahan seluas 210 hektar meliputi kecamatan yaitu Kecamatan Subah, Sajad dan Sejangkung. Proyek ini rencananya akan membangun kawasan khusus perekonomian diantaranya industri pengelolaan

jagung, kelapa sawit, beras, industri pengelolaan sampah, kawasan pergudangan, terminal umum dan kargo diselaraskan dengan pembangunan lahan terbuka hijau, mal, hotel dan penginapan, sarana perumahan dan sarana olah raga terbuka serta sarana peribadatan dan pasar tradisional. Sebagai langkah awal bukti keseriusan pemerintah, sebuah prasasti telah diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Dr. Ir. Erman Suparno, M.Si, MBA pada tanggal 17 Mei 2008 di Desa Madak sebagai Pusat Kegiatan Kota Terpadu Mandiri.

Gambar. 5.7. Prasasti dan Posisi Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah



Sumber : Bappeda Kab. Sambas

Aruk, Paloh dan Semparuk dengan kekayaan sumber daya alamnya diharapkan akan menjadi pusat – pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Sambas sedangkan Subah sebagai daerah transmigrasi sukses juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan lainnya. Dengan adanya investasi lokal dan asing akan mendorong keterlibatan masyarakat lokal lebih banyak pada aktifitas – aktifitas ekonomi yang ada sebagai akibat *multiflier effects* dari investasi tidak saja di wilayah investasi tersebut berada tetapi juga akan menyebar ke daerah disekelilingnya.

Akan tetapi yang perlu garisbawahi oleh pemerintah daerah Kalbar dan Kabupaten Sambas khususnya adalah keberlangsungan lingkungan hidup

sebagai konsekuensi dari peluang investasi yang diciptakan serta konflik antara masyarakat lokal dan pendatang. Seperti yang dialami oleh masyarakat Sajingan Besar pada tahun 2007 yang melakukan demonstrasi kepada Bupati Sambas dan penyegelan terhadap alat – alat berat kegiatan Program Pengembangan dan Pembangunan Paloh – Sajingan Besar sebagai bentuk penolakan mereka terhadap lahan yang diambil alih secara sepihak oleh pihak investor akibat kesalahan administrasi pemerintah daerah Sambas (hasil wawancara dengan camat Sajingan Besar). Selain itu juga ditemukan degradasi lingkungan akibat penjarahan hasil hutan di perbatasan Kabupaten Sambas (Paloh – Sajingan Besar) dengan ditemukannya satu unit penggergajian kayu berskala besar di Sajingan Besar dan Biawak yang diperkuat oleh penduduk desa Sebunga yang kediamannya berada di lokasi industri. Sebagaimana diutarakan oleh Rinda (penduduk desa Kaliau) sekarang sangat sulit untuk mendengar kicauan burung di Sajingan Besar hal ini diakibatkan maraknya aktivitas penangkapan burung yang dijual ke Biawak Malaysia.

#### **V.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat**

Berbagai aktivitas perekonomian di sepanjang 800 kilometer kawasan perbatasan Kalimantan Barat umumnya dikuasai oleh pengusaha Malaysia. Dan hampir semua kekayaan hutan di kawasan ini diperdagangkan secara ilegal ([www.pontianakpost.com](http://www.pontianakpost.com)). Hal ini terjadi karena kemiskinan, kesenjangan dan ketertinggalan kawasan perbatasan Kalimantan Barat terhadap negara tetangganya.

Karena keterbatasan data dan waktu maka penelitian ini hanya mencoba mencari faktor –faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kalimantan Barat dengan melihat dua kawasan yaitu perbatasan dan non perbatasan dengan mempergunakan data tahun 2002 sampai 2006. Jumlah total data pengamatan yang akan diregresi adalah berjumlah 5 tahun x 9 kabupaten/kota atau sama dengan 45 data. Melalui bermacam - macam variabel yang dianggap berpengaruh pada kemiskinan maka dipilihlah beberapa variabel yaitu PDRB per kapita, rata –

rata lamanya sekolah, angka harapan hidup, inflasi dan rumah tangga pengguna listrik yang dianggap bisa mempengaruhi kemiskinan di Kalimantan Barat. Model yang ada pada penelitian ini juga dilengkapi dengan keterangan tentang bahwa model ini dispesifikasi dengan benar melalui indikator ekonomi, statistika dan ekonometrika.

Variabel bebas yang digunakan yaitu PDRB per kapita yang mencerminkan besarnya pendapatan penduduk perkapita. Peningkatan PDRB perkapita akan meningkatkan daya beli dan produktivitas masyarakat dengan demikian konsumsi bertambah sehingga akan menjauh dari garis kemiskinan. Dengan demikian diharapkan PDRB perkapita dapat berhubungan terbalik dengan jumlah penduduk miskin.

Variabel lamanya sekolah merupakan cerminan dari sumberdaya manusia setiap daerah yang menjadi objek penelitian. Semakin lama seseorang bersekolah akan semakin bertambah kemampuan dan keterampilannya sehingga akan lebih produktif dan pada gilirannya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Variabel ini juga diharapkan berhubungan negatif dengan penurunan kemiskinan.

Sama halnya dengan rata – rata lama sekolah, angka harapan hidup yang merupakan variabel dari sisi kesehatan dihipotesakan jika semakin tinggi usia seseorang akan semakin terampil dan produktif sehingga dapat mengurangi kemiskinan diwilayahnya.

Inflasi akan mengurangi pendapatan riil menyebabkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang dan jasa akan menurun (konsumsi menurun), yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas dan kualitas hidup sehingga diasumsikan akan berhubungan positif dengan penambahan penduduk miskin.

sedangkan peningkatan rumah tangga pengguna listrik akan menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi sebuah daerah sehingga produktivitas meningkat yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan dan pada akhirnya menurunnya tingkat kemiskinan. Inflasi

Untuk penggunaan listrik merupakan variabel bebas dari segi infratraktur yang menunjang penurunan angka kemiskinan. Faktor ketersediaan sarana dan sarana (infrastruktur) dikonsepsikan sebagai fasilitas kemudahan yang diperlukan masyarakat untuk melakukan aktifitas ekonomi. Semakin banyak

fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas ekonomi akan menyebabkan menurunnya angka kemiskinan. Untuk itu diharapkan parameter variabel- variabel ini bertanda positif.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu perbandingan kemiskinan wilayah perbatasan dan non perbatasan di Kalimantan Barat maka model ini dilengkapi dengan variabel *dummy* perbatasan. Bernilai 1 (satu) untuk kabupaten perbatasan (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu) dan bernilai 0 (nol) untuk kabupaten / kota non perbatasan (Kabupaten Pontianak dan Ketapang serta Kota Pontianak dan Kota Singkawang). Interpretasi dari variabel ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan persentase penduduk miskin di daerah perbatasan bila dibandingkan dengan daerah non perbatasan. Hal ini dikarenakan umumnya daerah non perbatasan memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang jauh lebih baik dari daerah perbatasan.

Untuk mengetahui apakah nilai estimasi masing-masing parameter untuk setiap variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, maka diperlukan suatu pengujian dengan menggunakan uji-t. Dalam pengujian koefisien secara individual ini akan dibandingkan antara nilai t-hitung masing-masing parameter di masing-masing variabel terhadap t-tabel. Uji-t untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak ditetapkan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 1\%$  (satu persen),  $\alpha = 5\%$  (lima persen), dan  $\alpha = 10\%$  (sepuluh persen).

Bila t-hitung lebih besar dari t-tabel maka dinyatakan bahwa nilai estimasi tersebut signifikan berbeda dengan nol. Sebaliknya bila nilai t-hitungnya lebih kecil dari t-tabel maka dinyatakan nilai estimasi parameter tersebut tidak signifikan berbeda dengan nol.

Untuk mengetahui apakah nilai sebagian atau keseluruhan parameter untuk setiap variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, maka diperlukan suatu pengujian dengan uji-F. Bila F-hitung lebih besar dari F-tabel maka seluruh parameter signifikan berbeda dengan nol. Sebaliknya bila nilai F-hitungnya lebih kecil dari t-tabel maka dinyatakan nilai seluruh parameter tidak signifikan berbeda dengan nol. Sedangkan uji-F untuk signifikansi keseluruhan parameter ditetapkan pada  $\alpha = 1\%$  (satu persen).



Uji kebaikan model (*goodness of fit*) dilihat dari nilai Adj  $R^2$ . Bila nilai Adj  $R^2$  yang diperoleh tinggi dapat disimpulkan bahwa persamaan model yang terbentuk telah dispesifikasikan dengan baik. Variasi tingkat kemiskinan dapat diterangkan oleh variabel-variabel PDRB perkapita, lamanya sekolah, angka harapan hidup, inflasi, kepemilikan listrik dan akses *dummy* perbatasan.

Kriteria ekonomi adalah uji hipotesis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat:

1. Hipotesa diterima bila perkembangan PDRB per kapita berpengaruh negatif (-) terhadap persentase penduduk miskin, sebaliknya, hipotesa ditolak bila PDRB per kapita positif (+) terhadap persentase penduduk miskin.
2. Hipotesa diterima bila lamanya sekolah berpengaruh negatif (-) terhadap persentase penduduk miskin, sebaliknya, hipotesa ditolak bila lamanya sekolah berpengaruh positif (+) terhadap persentase jumlah penduduk miskin.
3. Hipotesa diterima bila angka harapan hidup berpengaruh negatif (-) terhadap persentase penduduk miskin, sebaliknya hipotesa ditolak bila angka harapan hidup berpengaruh positif (+) terhadap persentase penduduk miskin.
4. Hipotesa diterima bila inflasi berpengaruh positif (+) terhadap perkembangan jumlah penduduk miskin, sebaliknya hipotesa ditolak bila inflasi berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin.
5. Hipotesa diterima bila rumah tangga pengguna listrik berpengaruh negatif (-) terhadap persentase penduduk miskin, sebaliknya hipotesa ditolak bila rumah tangga pengguna listrik berpengaruh positif (+) terhadap persentase penduduk miskin.
6. Hipotesa diterima bila wilayah perbatasan berpengaruh positif (+) terhadap persentase penduduk miskin, sebaliknya hipotesa ditolak bila wilayah perbatasan berpengaruh negatif (-) terhadap persentase penduduk miskin.

### V.4.1. Hasil Regresi Model

Setelah melakukan beberapa kali regresi ternyata variabel – variabel yang dianggap cocok mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat tampak seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 5.3. Output Hasil Regresi

Dependent Variable: P0?  
 Method: GLS (Cross Section Weights)  
 Sample: 2002 2006  
 Included observations: 5  
 Number of cross-sections used: 9  
 Total panel (balanced) observations: 45  
 One-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.34469	8.362484	2.074107	0.0449
PDRBKP?	-1.70E-06	2.20E-07	-7.710039	0.0000
LMS?	1.856863	0.478745	3.878605	0.0004
AHH?	-0.023891	0.113329	-0.210813	0.8342
INF?	0.149904	0.083179	1.802199	0.0795
LSTRIK?	-0.095591	0.020275	-4.714780	0.0000
D?	2.963717	0.708022	4.185909	0.0002

Weighted Statistics			
R-squared	0.875012	Mean dependent var	15.65558
Adjusted R-squared	0.855276	S.D. dependent var	5.221744
S.E. of regression	1.986484	Sum squared resid	149.9525
F-statistic	44.33800	Durbin-Watson stat	0.847389
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.771939	Mean dependent var	13.92733
Adjusted R-squared	0.735929	S.D. dependent var	4.276358
S.E. of regression	2.197526	Sum squared resid	183.5066
Durbin-Watson stat	0.501344		

Sumber : data sekunder, hasil diolah

Dari tabel 5.3. disederhanakan dengan tabel 5.4. untuk memperlihatkan pengaruh dan signifikansi variabel terhadap model.

Tabel 5.4. Pengaruh Perkembangan Variabel dan Signifikansi Statistik terhadap Perkembangan Persentase Penduduk Miskin.

No.	Variabel	Hipotesa			Signifikansi	
		Hipotesa	Hasil Regresi	Ket	Prob	Hasil
1.	Konstanta (C)				0.0449	Signifikan $\alpha$ 5%
2.	PDRBKP	Negatif	-1.70	Diterima	0.0000	Signifikan $\alpha$ 1%
3.	LMS	Negatif	1.86	Ditolak	0.0004	Signifikan $\alpha$ 1%
4.	AHH	Negatif	-0.02	Diterima	0.8342	Tidak Signifikan
5.	INF	Positif	0.15	Diterima	0.0795	Signifikan $\alpha$ 10%
5.	LSTRIK	Negatif	-1.00	Diterima	0.0000	Signifikan $\alpha$ 1%
6.	D	Positif	2.96	Diterima	0.0002	Signifikan $\alpha$ 1%

Secara ekonomi, persamaan diatas tidak menemukan masalah karena arah dan pengaruhnya sesuai dengan teori. Hal ini terlihat dari koefisien masing – masing variabel yang bertanda negatif dan positif kecuali variabel LMS dimana variabel tersebut memiliki koefisien bertanda positif, padahal diharapkan untuk negatif.

Hasil regresi ini, tidak ada masalah bila dikaitkan dengan kriteria statistika melalui uji-t dan uji-F. PDRB per kapita; rata – rata lama sekolah; listrik dan variabel *dummy* memiliki nilai t-hitung signifikan untuk taraf nyata pengujian ( $\alpha$ ) 1 %. Kemudian, inflasi memiliki nilai t-hitung signifikan dengan taraf nyata pengujian ( $\alpha$ ) 10 %. Sedangkan variabel angka harapan hidup walaupun hipotesisnya diterima tetapi ternyata tidak signifikan diterapkan dalam model. Dan Uji-F memperlihatkan angka sebesar 0.0000 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas pada model jumlah penduduk miskin secara bersama-sama signifikan mempengaruhi persentase penduduk miskin untuk taraf nyata ( $\alpha$ ) 1%.

Model ini memiliki Adjusted  $R^2$  sebesar 0.8553 yang berarti model mampu menjelaskan persentase penduduk miskin sebesar 85.53 % dimana secara bersamaan sisa persentase yang ada berarti diterangkan oleh faktor-faktor lain.

Dari segi ekonometrika, penggunaan metode GLS (*Generalized Least Square*) atau metode kuadrat terkecil tertimbang (*weighted least square*) akan menghasilkan penduga yang memenuhi sifat *Best Linier Unbiased Estimation*

(BLUE) sehingga gangguan asumsi klasik dalam model ini telah terdistribusi secara normal, sehingga tidak diperlukan lagi *treatment* terhadap model bagi pelanggaran asumsi klasik, yaitu asumsi adanya autokorelasi, multikoleniaritas dan heteroskedastik. (Nuryadin, dkk 2007).

Dengan demikian model diatas juga dianggap terbebas dari semua pelanggaran asumsi klasik sehingga tidak diadakan lagi uji – uji dan upaya memperbaiki/mengobatinya.

#### V.4.2. Analisa

Berdasarkan hasil regresi sebagaimana diperlihatkan pada tabel 5.3. maka persamaan dari model persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat adalah:

$$PO_{it} = 17.34 - 1.70 \cdot PDRBKP_{it} + 1.86 \cdot LMS_{it} - 0.02 \cdot AHH_{it} + 0.15 \cdot INF_{it} - 1.00 \cdot LSTRK_{it} + 2.96 \cdot D_{it} + \varepsilon_{it}$$

Persentase penduduk miskin akan sebesar 17.34% jika variabel – variabel bebas dalam penelitian ini yang mempengaruhinya sama dengan 0 (nol). Dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa PDRB per kapita signifikan mempengaruhi persentase penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat, dengan asumsi jika PDRB per kapita meningkat Rp. 1.000.000,- maka akan berkontribusi menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1.7%.

Rata – rata lamanya sekolah juga signifikan mempengaruhi persentase penduduk miskin namun berhubungan positif sehingga jika rata – rata lamanya sekolah meningkat 1 tahun akan berkontribusi meningkatkan persentase penduduk miskin sebesar 1.86%. Hal ini dapat dipahami karena rata – rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat hanya 7 tahun, masih berada jauh dibawah program pemerintah yaitu pendidikan dasar 9 tahun, sehingga mereka umumnya berkerja disektor informal yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan.

Angka harapan hidup ternyata mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat tetapi tidak signifikan dimana setiap kenaikan 1 tahun usia penduduk maka persentase penduduk miskin akan turun sebesar 0.02%.

Hubungan antara inflasi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat juga signifikan dimana setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0.15%. Dan penggunaan listrik oleh rumah tangga juga memperlihatkan arah yang sama yaitu signifikan mempengaruhi kemiskinan dimana setiap kenaikan 1% rumah tangga menggunakan listrik maka akan menurunkan kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat sebesar 1%.

Dari model diatas juga dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin miskin di daerah perbatasan (Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu) 2.96% lebih tinggi daripada kabupaten / kota non perbatasan (Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang).

Dengan demikian variabel yang paling berpengaruh paling besar terhadap penurunan persentase kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat secara berturut – turut adalah peningkatan PDRB per kapita, peningkatan rumah tangga pengguna listrik dan peningkatan usia harapan hidup serta penurunan inflasi. Hal ini memperkuat anggapan bahwa kawasan perbatasan lebih miskin dibandingkan kawasan non perbatasan dimana penduduk miskin kawasan perbatasan 3% (tiga persen) lebih banyak daripada kawasan non perbatasan di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini juga mempertegas teori bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, sumberdaya manusia yang rendah dilihat dari pendidikan dan kesehatan, rendahnya daya beli serta kurangnya akses terhadap teknologi.

Pendapatan perkapita yang diwakili oleh PDRB per kapita yang rendah di kawasan perbatasan dikarenakan penduduk kawasan ini mayoritas menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dengan daya jual yang rendah karena keterbatasan pemasaran dan tidak ditopang oleh industri hulu dan hilir dari masing – masing komoditas. Sehingga jika terjadi sedikit *shock* perekonomian akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Keterjangkauan rumah tangga pengguna listrik juga lebih rendah di kawasan perbatasan dibandingkan kawasan non perbatasan, karena penerangan rumah tangga di Kalimantan Barat hanya mengandalkan pasokan listrik dari PT.

PLN sehingga dengan kondisi geografis dan demografis kawasan perbatasan menyebabkan pelayanan listrik dari PLN belum dapat menyentuh seluruh kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sambas dimana pada pertengahan tahun 2008, pihak swasta Malaysia menyatakan siap bekerjasama guna mensupply kebutuhan listrik di Kabupaten Sambas.

Derajat kesehatan yang rendah juga tercermin pada kurangnya prasarana dan sarana kesehatan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang berdampak secara tak langsung pada rendahnya usia harapan hidup masyarakatnya. Meningkat / tingginya inflasi tentu saja berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat tak hanya di kawasan perbatasan tetapi juga di kawasan non perbatasan. Berdasarkan lokasinya, kawasan perbatasan juga memiliki dua sisi berlawanan dimana keuntungan untuk lebih bebas memilih produk barang atau jasa yang akan dijual/dibeli juga kerugian karena keterbatasan pilihan untuk membeli produk tertentu. Akan tetapi jika ditinjau kembali dari sisi pendapatan yang rendah, maka daya beli produk dari manapun juga akan menurun akibat inflasi.

## BAB VI PENUTUP

### VI.1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kemiskinan di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Karakteristik kemiskinan rumah tangga di Kartiasa (non perbatasan) dari sisi pendidikan, kemampuan berobat, kepemilikan MCK, angka putus sekolah, pendapatan, pakaian, luas rumah dan kondisi lantai lebih lebih besar dibandingkan kemiskinan rumah tangga di Sajingan Besar (perbatasan) dan Biawak (Malaysia).
2. Di Sajingan Besar karakteristik kemiskinan rumah tangga dari sisi kondisi dinding rumah, jenis atap dan penggunaan listrik lebih besar dibandingkan di Kartiasa dan Biawak. Sedangkan dari sisi sumber air minum di ketiga wilayah penelitian masuk dalam kategori miskin 100% karena mengkonsumsi sumber air yang tidak terlindungi.
3. Secara keseluruhan kemiskinan di Indonesia baik di kawasan perbatasan maupun tidak jauh lebih besar dibandingkan wilayah di Malaysia jauh lebih besar. Rumah tangga miskin dan sangat miskin di Kartiasa mencapai 15% sedangkan di Sajingan Besar sebesar 8,33% dan 0% di Biawak Malaysia.
4. Kemiskinan secara komunitas diukur berdasarkan sarana dan prasarana yang tersedia di ketiga wilayah dengan hasil bahwa di Biawak – Malaysia (skor 3.20) juga lebih baik prasarana dan sarana yang tersedia bahkan sedikit diatas Kartiasa (skor 3.17) walaupun Biawak hanya merupakan sebuah Kampung di ujung Malaysia. Sedangkan di Sajingan Besar hanya mendapatkan skor 1.83 termasuk dalam kategori antara sangat sulit hingga sulit.
5. Rumah tangga di Kartiasa dianggap tidak melakukan interaksi apapun dengan wilayah Biawak – Malaysia dengan jawaban seluruh rumahtangga yang menyatakan tidak pernah ke Biawak dan tidak tergantung sama sekali terhadap Biawak. Sedangkan rumah tangga di Sajingan Besar mayoritas melakukan interaksi dengan Biawak-Malaysia dibidang perdagangan

(58,3%) meliputi transaksi terbesar menjual produk pertanian dan membeli gula dan minyak goreng.

6. Dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan strategi yang diperkirakan tepat untuk dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas adalah Gabungan antara *Core Peripheral Approach* dan *Cross Border Approach*. Dan hal nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas dengan membangun 4 (empat) titik kawasan pertumbuhan di Aruk (*Border Development Center*), di Paloh (Industri LNG terpadu), di Subah (Kota Terpadu Mandiri), dan di Semparuk (Kawasan Industri Semparuk) yang akan menjadi magnet perekonomian Sambas dan memberikan *multiflier effect* dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sambas.
7. Perlu dipertanyakan lagi keseriusan pemerintah Malaysia seperti tertuang dalam kesepakatan Sidang Ke-25 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Perbatasan Indonesia - Malaysia (KK/JKK SOSEK MALINDO) di Jakarta-Indonesia pada tanggal 7-9 November 2007 tentang Pembangunan CIQS Aruk – Biawak yang akan dioperasikan pada tahun 2009, melihat hingga bulan Juli 2008 penelitian ini dilakukan belum ada satupun bangunan pendukung kegiatan tersebut.
8. Kemiskinan di Kalimantan Barat di pengaruhi oleh beberapa variabel yaitu PDRB per kapita, rata – rata lamanya sekolah, angka harapan hidup, inflasi dan persentase rumah tangga pengguna listrik, dimana kawasan perbatasan memiliki 3% (tiga persen) penduduk miskin lebih banyak dibandingkan kawasan non perbatasan.

## VI.2. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi kemiskinan di Sajingan Besar dan Kartiasa agar dapat disejajarkan dengan penduduk di Biawak – Malaysia berdasarkan hasil penelitian ini, maka pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dengan perbaikan keahlian/keterampilan dan

Universitas Indonesia



penciptaan lapangan kerja yang beragam, perbaikan lingkungan dan pemukiman, serta peningkatan akses listrik rumah tangga.

2. Sedangkan pengurangan kemiskinan secara khusus di wilayah Sajingan Besar (perbatasan) dapat diupayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar, transportasi, air bersih, penerangan, sosial, informasi dan komunikasi, serta perekonomian tanpa mengabaikan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan sumberdaya manusia.
3. Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang tepat sesuai potensi daerah melalui pendekatan CPA, CBA maupun *a mixed CPA – CBA* dengan melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi serta para profesional dibidangnya
4. Peningkatan pendapatan perkapita, rata – rata lama sekolah, angka harapan hidup dan penggunaan listrik rumah tangga serta penurunan inflasi merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana hasil yang didapat dari penelitian ini.
5. Pemerintah Kabupaten Sambas perlu meninjau ulang rencana kerjasama dengan Malaysia dalam hal pengadaan listrik di Kabupaten Sambas. *Supply* listrik untuk kebutuhan rumahtangga di Kabupaten Sambas sebagai salah satu indikator kemiskinan dapat di pasok dengan menggunakan potensi energi alternatif yang ada dengan menindak lanjuti kajian yang pernah dilakukan pada tahun 2006 seperti *Micro Hydro*, Tenaga Surya, Tenaga Angin maupun Biodiesel. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri sinergi dari Program Pengembangan Kecamatan=PPK) hendaknya dapat dilibatkan dalam hal ini sebagaimana suksesnya distribusi air bersih yang dikelola dengan mekanisme PPK yang tidak memberatkan masyarakat.

### **VL3. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya serta data merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan sebuah penelitian yang baik. Penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 6 (enam)

Universitas Indonesia

bulan ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dengan keterbatasannya. Kabupaten Landak sebagai daerah hasil pemekaran Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sekadau sebagai daerah hasil pemekaran Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Melawi sebagai daerah hasil pemekaran kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara sebagai daerah hasil pemekaran Kabupaten Ketapang pada penelitian ini masih dianggap menyatu dengan Kabupaten induknya karena keterbatasan data.

Model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model sederhana dengan spesifikasi OLS menggunakan data panel dari 9 (sembilan) kabupaten / kota dalam periode waktu 5 (lima) tahun (2002 -2006) sehingga hasilnya kurang mencerminkan kondisi saat ini (2008). Model pada penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah variabel – variabel yang mencerminkan kesejahteraan.

Untuk itu, diharapkan dimasa yang akan datang perlu adanya studi lanjutan yang dapat memperbaiki kelemahan – kelemahan yang ada pada penelitian ini seperti memperoleh sebuah fungsi kemiskinan dari data primer.

Masukan berupa saran dan kritik guna pengembangan yang lebih baik sangat diharapkan dan dapat dikirim melalui [rissanisfurianti@gmail.com](mailto:rissanisfurianti@gmail.com)

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Nur Berlian. *Analisis Hubungan Pembangunan Manusia dan Kinerja Perekonomian di Indonesia : Suatu Pendekatan Simultan Pado Model Data Panel Provinsi. Tesis PSIE FE – UI, 2006.* Tidak dipublikasikan.
- Alkadri dan Hamid. *Model & Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan.* Jakarta : BPPT-Press. 2003.
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta :STIE-YKPN. 2004.
- Badan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Paloh dan Sajingan. *Laporan Tahunan 2006,* Sambas : 2006.
- \_\_\_\_\_. *Profil Investasi di Kawasan PALSAs,* Sambas. Badan PALSAs. 2006.
- Bappenas – Komite Penanggulangan Kemiskinan. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan,* Jakarta : Sekretariat Pokja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan. 2005.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan.* Jakarta : Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Buku Rinci di Provinsi Kalimantan Barat.*
- BPS. *Data dan Informasi Kemiskinan.* Beberapa tahun terbitan. 2002 - 2006.
- \_\_\_\_\_. *Dato dan Informasi Kemiskinan Buku Provinsi.* Beberapa tahun terbitan. 2002 - 2006.
- \_\_\_\_\_. *Data dan Informasi Kemiskinan Buku Kabupaten dan Kota.* Beberapa tahun terbitan. 2002 - 2006.
- \_\_\_\_\_. *Indeks Pembangunan Manusia.* Beberapa tahun terbitan. 2003 - 2006.
- BPS Kabupaten Sambas. *Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2007.* Sambas. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Analisa Kependudukan Kabupaten Sambas 2006.* Sambas. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas 2000 - 2006.* Sambas. 2007.
- BPS Kalimantan Barat. *Kalimantan Barat Dalam Angka.* Beberapa tahun terbitan 2002 - 2007.

- Baskoro, Josef Tjahjo. *Studi tentang Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi di Indonesia*. Tesis PSIE FE – UI, 2004. Tidak dipublikasikan.
- Departemen Komunikasi dan Informatika. *Menelusuri Batas Nusantara Tinjauan Empat Kawasan Perbatasan*. Jakarta : Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik. 2006
- Farouk ,Muhammad & Prof. DR. H. Djaali. *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta PTK Press&RESTU AGUNG, 2005
- Fatma, Fahma Sari. *Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia*, Tesis PSIE FE – UI, 2005. Tidak dipublikasikan.
- Gafur, Sutarman, dkk. *Membangun Transparansi melalui Partisipasi Publik di Kawasan Perbatasan (Kasus Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas), Kemitraan Untan*, 2006.
- Guo, Rongxing. *Border – Regional Economics*, Physica- Verlag, 1996
- Hamid, Sri Handoyo Mukti dan Tien Widiyanto. *Kawasan Perbatasan Kalimantan Permasalahan dan Konsep Pengembangan*. Jakarta : BPPT-Press, 2001.
- Harmadi, Sonny H. B., 2007, “Karakteristik Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia”, makalah disampaikan pada Diskusi Panel Terbatas Indonesia Economic Outlook Bank Indonesia, Bandung, 9 Juni.
- Hasibuan, Tuan Guntur. *Pengaruh Penerimaan APBD dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat Terhadap Kemiskinan, Studi Kasus: Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara 2002 - 2003*, Tesis MPKP – UI, 2005. Tidak dipublikasikan.
- Iriana, Nona. *Pendataan untuk Identifikasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai*. BPS. 2008
- Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sarawak. *Buku Tahunan Perangkaan Sarawak 2007*. Sarawak, 2007
- Jati, Kuspradoto Budi. *Pengaruh Indikator Ekonomi Makro Regional Terhadap Kemiskinan Absolut ( 1976 – 2002) Studi Kasus 26 Provinsi*, Tesis MPKP FE – UI, 2006. Tidak dipublikasikan.
- Kuswara, Adi Apriyan. *Pengaruh Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Sosiodemografis terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Tesis Kajian Kependudukan dan SDM – UI, 2005. Tidak dipublikasikan.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta : Penerbit Alumni 1986.

- Moeis, Jossy P., "Diktat Matakuliah Kemiskinan, Pemerataan dan Kebijakan Publik", MPKP FE – UI, 2008.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Hardius Usman, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002 .
- Nasution, M.A. *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Noer, Abidin. *Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan di Era Otonomi (Studi Kasus Pembangunan Kawasan PALSA)* dalam Seminar Sehari Otonomi Daerah Alumni APDN&STPDN Kabupaten Sambas, Sambas 14 Juli 2004.
- Nursahrizal. *Pembentukan Indeks Komposit Kemiskinan Pada Tingkat Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Susenas 2001*. Tesis Pascasarjana – UI, 2003. Tidak dipublikasikan.
- Pemerintah Kabupaten Sambas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas 2006 – 2011*. 2006
- Pemerintah Republik Indonesia. *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007*. Jakarta. 2007
- \_\_\_\_\_ . *Konsep Border Development (BDC) Aruk Kabupaten Sambas*. 2005
- Remi, Sutystie Soemitro. *Korelasi Pembangunan Ekonomi, Manusia, dan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, Vol.7 (1), Januari 2006.
- Suratman, Eddy. *Analisis Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Terhadap Kinerja Perekonomian Kalimantan Barat : Suatu Studi Dengan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi, Disertasi Doktor FE-UI, 2004*. Tidak dipublikasikan.
- Sumanta, Jaka. *Fenomena Lingkaran Kemiskinan: Indonesia: Analisis Ekonometri Regional Data Panel Provinsi Tahun 1999-2002*, MPKP UI. 2005. Tidak dipublikasikan.
- Suud, Mohammad. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Prestasi Pustaka, Jakarta. 2006.
- Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Teguh, Muhammad., *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 1999.
- Todaro, P. Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan Munandar, Erlangga, Jakarta, 2004.

World Bank, 1994: *Poverty Reduction in Indonesia: Public Expenditures, Prices, and the Poor*.

\_\_\_\_\_. *Poverty Reduction in Indonesia: Construction a New Strategy*.

\_\_\_\_\_. *Understanding Poverty, Measuring Poverty, Analyzing Poverty and Poverty Assessments*. 2001

\_\_\_\_\_. *World Development Report 2006: Equity and Development*. 2006

\_\_\_\_\_. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. INDOPOV, 2007.

Usman, Abdhul Aziiz. *Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatra Barat*, Tesis MPKP FE – UI, 2006. Tidak dipublikasikan.

Yulaswati, Vivi., *Diktat Matakuliah Kemiskinan, Pemerataan dan Kebijakan Publik*, MPKP FE – UI, 2008.

[www.antara.go.id](http://www.antara.go.id)

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

[www.kalbar.go.id](http://www.kalbar.go.id)

[www.pontianakpost.com](http://www.pontianakpost.com)

[www.sambas.go.id](http://www.sambas.go.id)

[www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Sutan Syahrir Nomor 17 Telpon (0561) 736351 Fax : (0561) 767242

**PONTIANAK**

Pontianak, 9 Juli 2008.

Kepada

Yth. Bupati Sambas  
di -

**SAMBAS**

Nomor : 070.21539/BKBL-C  
Tat : Biasa  
Tempiran : -  
Hal : Pemberitahuan Penelitian.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Nomor : 055/M/MPKP FEUI-PV/II-001/2008 tanggal 1 Juli 2008 Perihal Ijin Penelitian, Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

Nama : **RISSA NISFURIANTI.**  
Nomor Mahasiswa : 0706299302.  
Alamat : Gedung MPKP-FEUI Kampus Baru UI Depok.  
Pekerjaan : Mahasiswi MPKP FEUI Jakarta.  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia.  
Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian.  
Judul Penelitian : Analisa kemiskinan dan strategi penanggulangannya di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas.  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sambas.  
Lama Penelitian : 9 Juli s/d 31 Agustus 2008.  
Pengikut/Peserta : -  
Penanggung Jawab : Hera Susanti, SE.,M.Sc

Akan melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/atau tidak ada kaitannya dengan judul Penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat-istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Barat up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.



Tembusan :  
Gubernur Kalbar (sebagai laporan)

Analisis kemiskinan..., Rissa Nisfurianti, FE UI, 2008.



**KONSULAT MALAYSIA, PONTIANAK  
(CONSULATE OF MALAYSIA, PONTIANAK)**

JALAN SUTAN SYAHRIR NO. 21  
PONTIANAK 78116  
KALIMANTAN BARAT  
INDONESIA

Telp. : (0561) 732986 / 736061  
Fax. : (0561) 736060  
E-Mail : mwptk@telkom.net

(033C)380/6/2(88)/08 Jld 2  
08 Julai 2008

Ketua Pejabat Imigresen,  
Pos Imigresen Biawak  
D/a Pejabat Daerah Lundu  
94500 Lundu

Tuan/Puan,

**PERMOHONAN KEMUDAHAN PERJALANAN BAGI  
IBU RISSA NISFURIANTI BESERTA SUAMI ( M. AMRIL JIHADI)**

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Pihak Konsulat Malaysia di Pontianak telah dimaklumkan bahawa Ibu Rissa Nisfurianti akan mengadakan penelitian mengenai Analisa Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Biawak, Lundu Sarawak selama dua (02) Minggu.

3. Sehubungan itu, Konsulat Malaysia di Pontianak ingin memohon kerjasama tuan/puan untuk memberikan bantuan yang sewajarnya bagi melancarkan penelitian subjek tersebut diatas. Kerjasama tuan/puan dalam perkara ini adalah sangat dihargai dan saya dahului dengan ucapan berbanyak terima kasih.

Sekian, salam hormat

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menurut perintah,

  
( AB. GHANIBIN AB. KARIM PMC )  
Konsul Muda ( Konsular & Imigresen )  
b.p Konsul Malaysia di Pontianak



Sk Konsul  
Konsulat Malaysia Pontianak  
Kalimantan Barat, Indonesia

Sesiapa Yang Berkenaan



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II SAMBAS  
POS LINTAS BATAS IMIGRASI ARUK

Aruk, 16 JUL 2008

nomor : W11.F5.IZ.03.03-10/8008  
jumlah : 1(satu) lembar  
: *Permohonan Izin Masuk*  
*ke-Wilayah Lundu*

Kepada Yth.  
Ketua Pos Kawalan Sempadan  
Imigrasi Biawak  
Di -  
Biawak

Bersama ini dengan hormat, kami memberitahukan bahwa daftar nama-nama terlampir adalah Warga Negara Indonesia (Aparat Pemerintah Kabupaten Sambas) yang akan berkunjung/berbelanja ke wilayah Lundu, dengan ini kami mohon bantuan Bapak Ketua Pos Kawalan Biawak dapat memberikan Izin Masuk melewati Biawak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



17 JUL 2008



Ketua  
Pos Lintas Batas Imigrasi Aruk

DARWIN  
NIP. 040034342

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS II SAMBAS  
POS LINTAS BATAS IMIGRASI ARUK

Aruk, 16 JUL 2008

Nomor : W11.F5.IZ.03.03-00/2008  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Izin Masuk  
Ke-Wilayah Lundu

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pos Kawalan Imigresen  
Biawak  
Di -  
Baiwak

Bersama ini dengan hormat, kami beritahukan bahwa nama di bawah ini adalah Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung / ~~berbelanja~~ ke wilayah Lundu, dengan ini kami mohon bantuan Bapak Ketua Pos Imigresen Biawak dapat memberikan Izin Masuk ke Lundu, atas nama sebagai berikut :

- I. Nama : RISSA NISFURIANTI, S, Ip.  
Tempat/Tgl. Lahir : Ptk, 29-06-1980  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Peg, Negeri Sipil  
Alamat : Dusun Tumuk, Rt. III/I. Kab. Sambas
- II. Nama : MUHAMMAD AMRIL JIBADI  
Tempat/Tgl. Lahir : Sambas, 29-10-1977  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Peg, Negeri Sipil  
Alamat : Dusun Kam, Desa, Dalam Kam. Rt. II/I.  
Kab : Sambas.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ketua

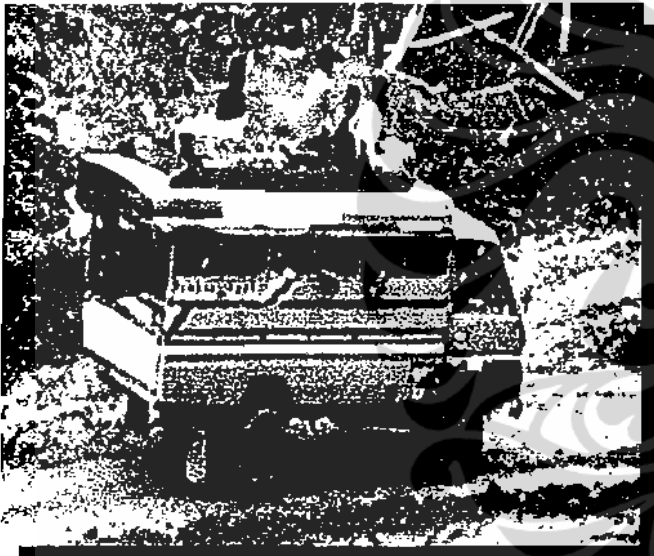
Pos Lintas Batas Imigrasi Aruk

DARWIN

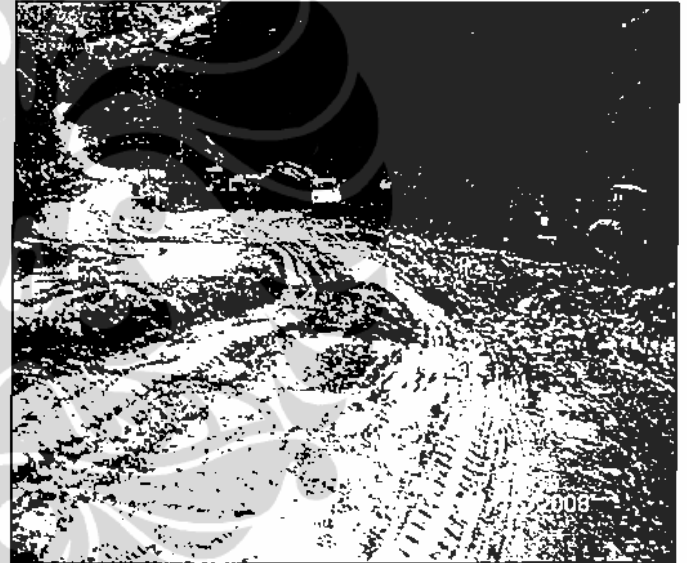
## Lampiran Foto - Foto Selama Penelitian



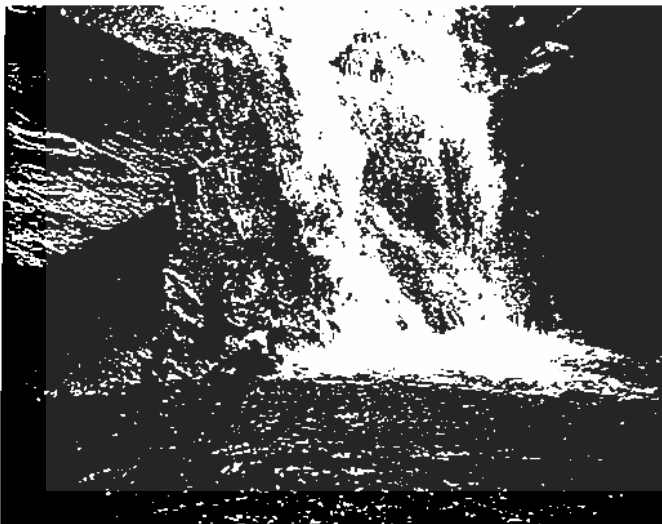
Kondisi Jalan Raya di Kecamatan Sajingan Besar Menuju Perbatasan Aruk (Indonesia) - Biawak (Malaysia)



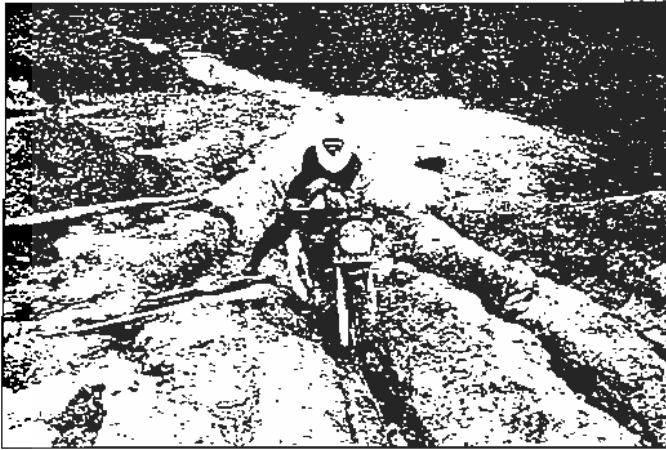
Satu satunya angkutan umum dari Aruk ke Ibukota Kabupaten Sambas dengan biaya Rp. 50.000,- per penumpang menempuh jarak sekitar 93 km (5,5 jam) melewati Kec. Galing dan Teluk Keramat



Pekerjaan pembangunan badan jalan menuju perbatasan (Aruk) oleh kontraktor Indoensia menggunakan alat berat, operator dan material dari Malaysia



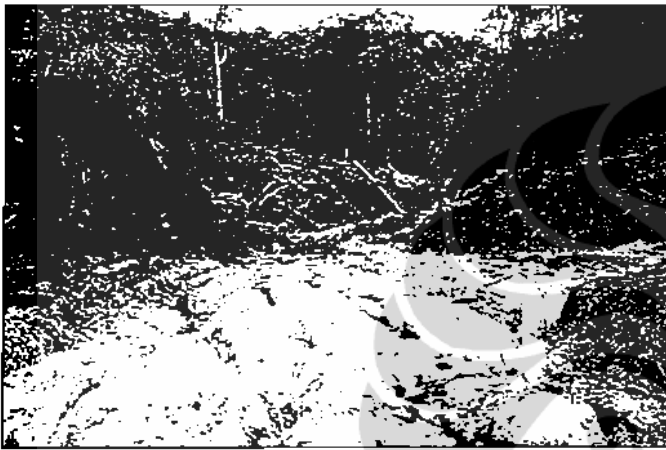
Pembangunan PLTMH (Mikro Hydro) sebagai upaya pengadaan listrik daerah perbatasan dengan biaya ratusan juta yang belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat Analisis kemiskinan..., Rissa Nisfurianti, FE UI, 2008.



Perjalanan tak terlupakan menuju Sungai Bening



Sungai Bening : Bagai Katak dalam Tempurung



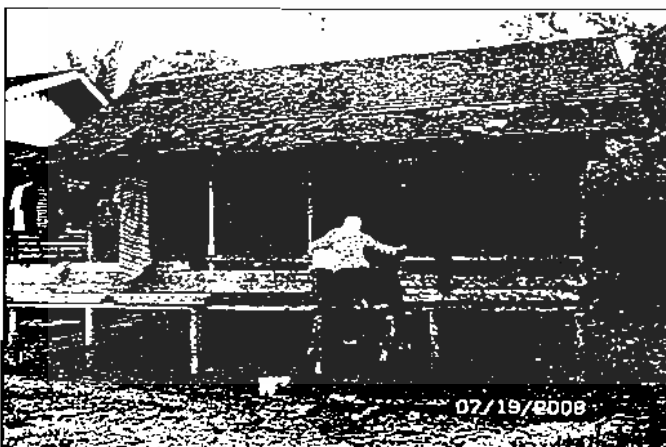
Tak ada jalan alternatif lain untuk kendaraan bermotor menuju Sei. Bening yang MENANTI DIBALIK GUNUNG



"Welcome to Sungai Bening Village"  
Akhimya Sampai Juga



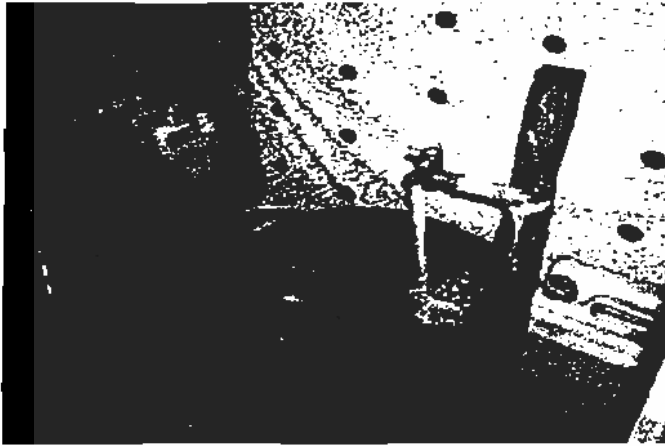
Didatangi warga setempat dikira Ibu Dokter



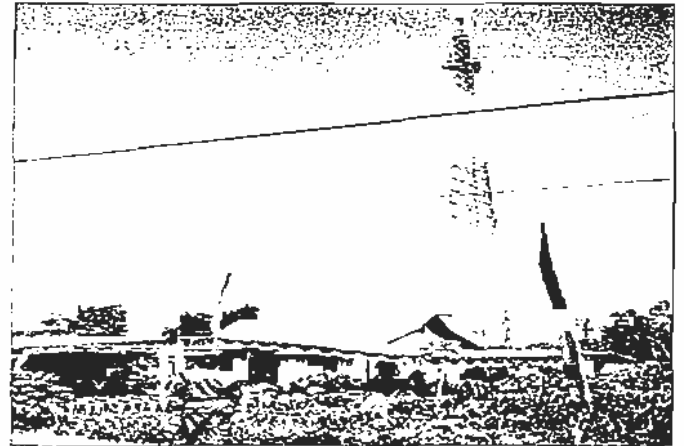
Berkunjung guna mewawancarai responden penerima



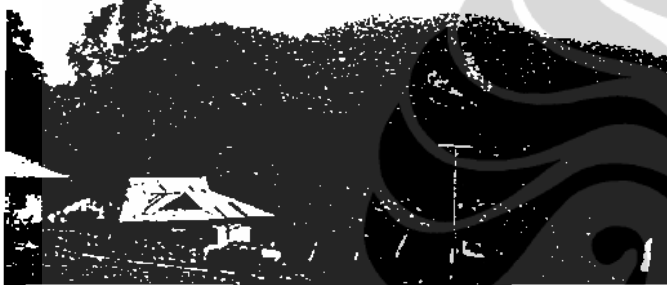
Rumah panggung mengantisipasi banjir yang terjadi



Air bersih yang dialirkan ke rumah warga dari keg. PPK, menjangkau seluruh desa di Kec. Sajingan Besar



Stasiun TV perbatasan yang merelay siaran TV RI, hanya mampu menjangkau kota Sambas sekitarnya



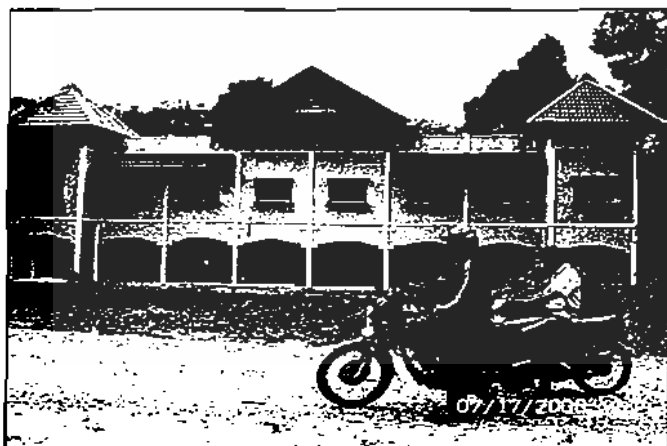
Kawasan hutan lindung sebagai latar kantor camat Sajingan Besar (kiri) dan suasana dipagi hari kompleks perkantoran kecamatan Sajingan Besar



Puskesmas Kec. Sajingan Besar Indonesia



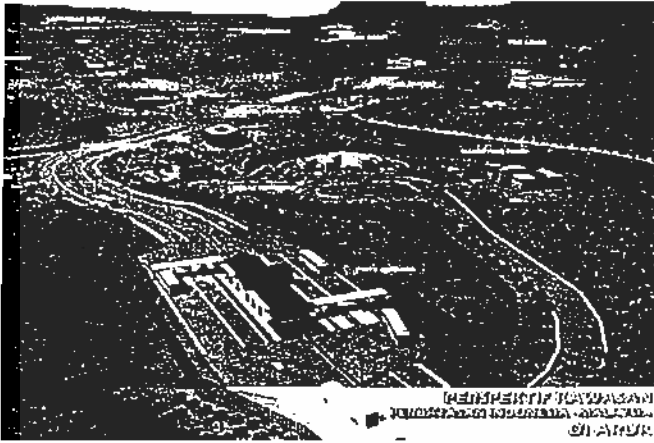
Klinik kesehatan Kampong Biawak Lundu Malaysia



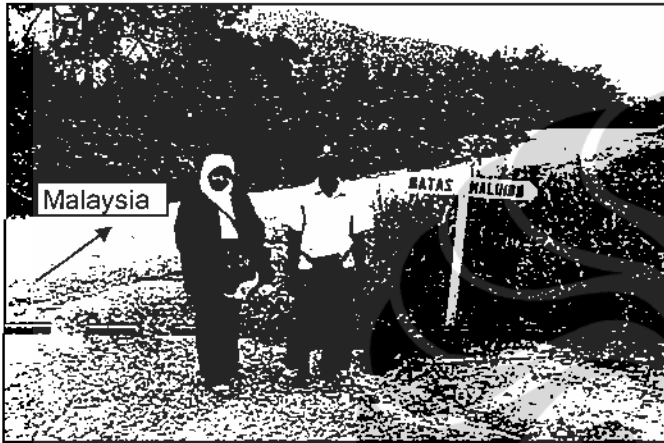
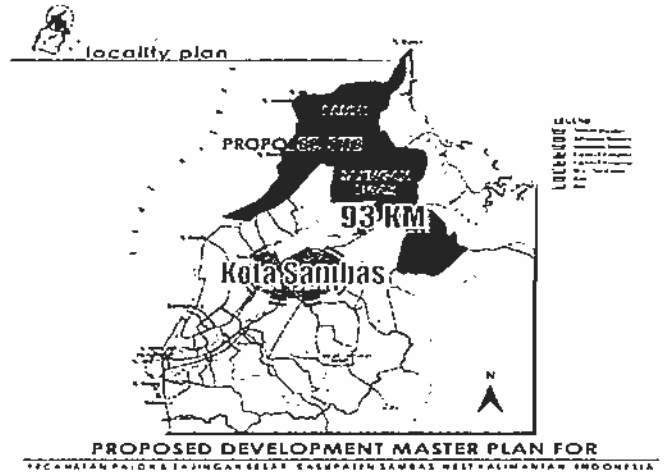
Pasar Sajingan, tahun 2009 baru akan dioperasikan



Pasar Biawak (Malaysia) dengan jalan mulus beraspal



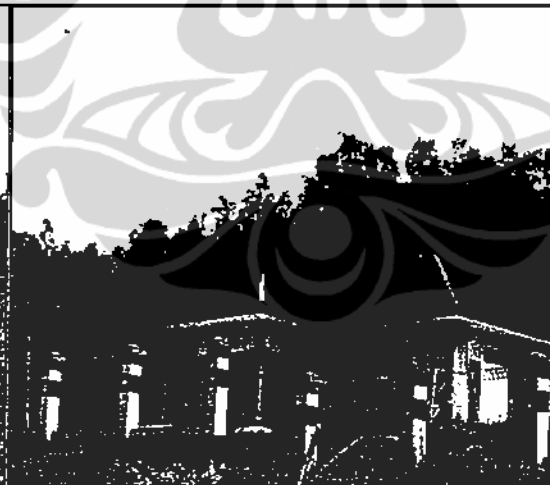
Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Aruk



Titik 0 Batas Malaysia - Indonesia, Menuju Malaysia



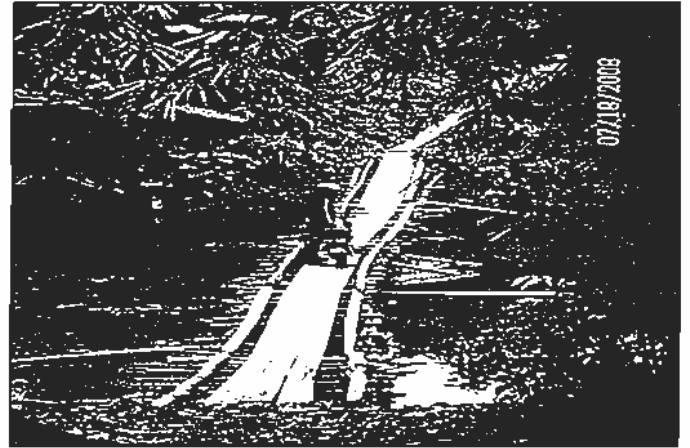
Titik 0 Batas Malaysia - Indonesia, Menuju Indonesia



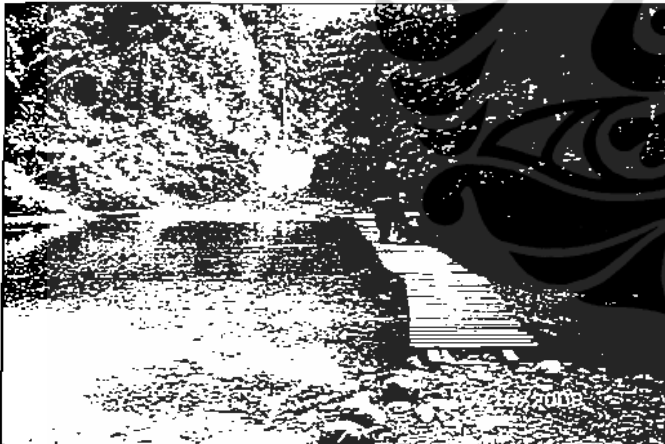
Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Aruk (Indonesia) yang telah terealisasi : Jalan Dua Arah + Pagar, Tugu, Prasasti, PPLB/CIQS, Imigrasi, Kantor & Rumah Badan Pengelola Perbatasan, Pasar Regional, Imigrasi Analisis kemiskinan..., Rissa Nisfurianti, FE UI, 2008.



Dusun Batang Air (Santaban) yang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor pada musim - musim tertentu



Wawancara dengan masy Batang Air (Santaban) yang mengira peneliti adalah Dokter karena proses wawancara dilakukan pada kegiatan posyandu



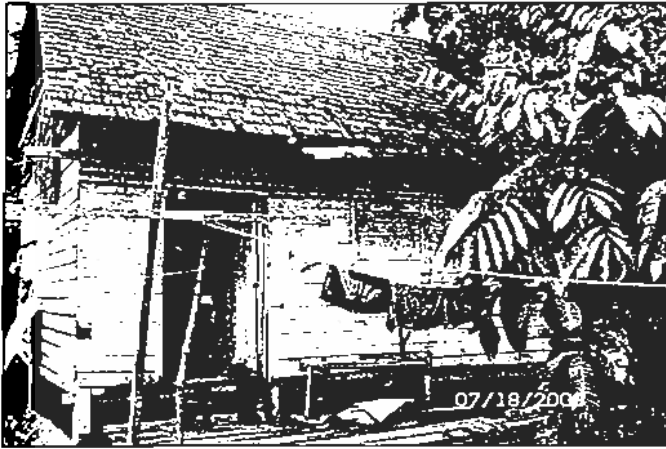
Menuju Dusun Sawah (Senatab) melalui jembatan swadaya warga - rawan banjir pada musim tertentu



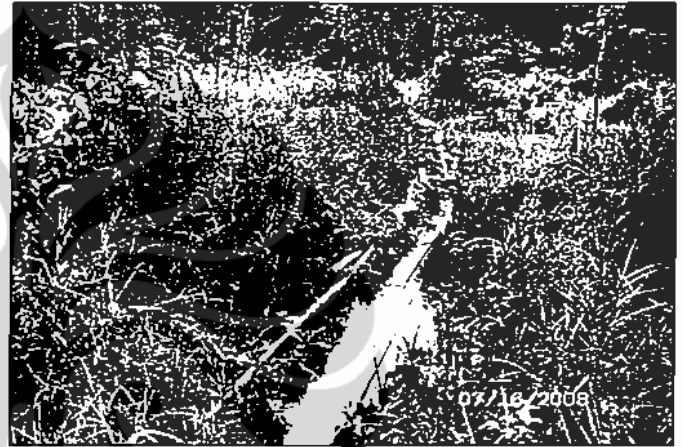
Permukiman di Desa Senatab Dusun Sawah, walaupun tidak dialiri listrik PLN beberapa Rumah memiliki parabola dan peralatan elektronik lainnya



Posyandu yang dibangun melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dinilai sangat sukses oleh masyarakat, wawancara juga dilakukan di tempat ini



Rumah Keluarga Bapak Endo Desa Kaliau' Dusun Tapang , Dana BLT tahun 2006 dibelikan kompor dan tabung gas elpiji dari Malaysia. Biaya penerangan Rp. 25.000,-/bulan/lampu TDL 20 watt dari pukul 18.00 - 21.00 WIB dengan cara menumpang ketetangga yang menggunakan mesin TS



Rumah Kel. Juliana Leni (Putri Sulung Bpk. ENDO) yang terpisah dari pemukiman lain, penerangan rumah tangga Pelita, tidak mendapat BLT, memiliki motor dengan cara pinjaman melalui *credit union Bonaventura*



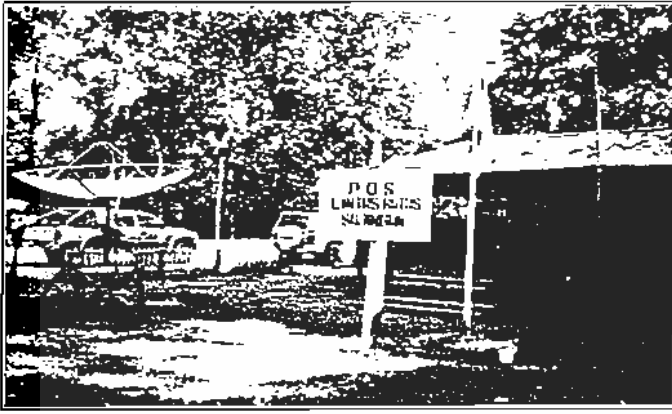
Keluarga Miskin di Sajingan (Desa Kaliau')



Rumah Ibu Cendok (KRT) Desa Kaliau', dibangun dari bantuan anak yang bekerja di Malaysia... Rissa Nisfurianti, FEB UI, 2008

Responden di Desa Sajingan (Kaliau') yang langsung ketahuan adanya orang asing





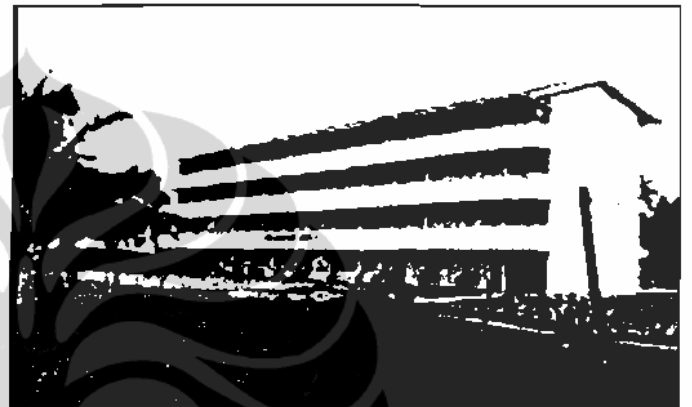
Pos Tentara Lintas Batas . Pungutan Liar sering di rasakan warga "Tak ada uang, durian pun boleh"



Satu-satunya SMP di Kec. Sajingan Besar setelah SLTP PGRI di Desa Sebunga tidak beroperasi



Rumah kontrakan siswa SLTP & SMK Sajingan Rp.1,4 juta/tahun dihuni oleh 2 kel sejumlah 6 siswa



Sekolah&Asrama di Malaysia, pendidikan, sarapan, dan makan siang gratis+uang tunai. Enak nya. RI?



Kondisi Klinik Desa Kampong Biawak. Lundu Malaysia, terdiri dari ruang kerja kepala, ruang periksa, ruang tunggu, ruang bersalin, kamar rawat inap dengan 7 tempat tidur, laboratorium, ruang konsultasi anak, ruang tunggu dan perumahan Apatis, klinis, dan bersalin. Nigur, lant, HAU di 2008

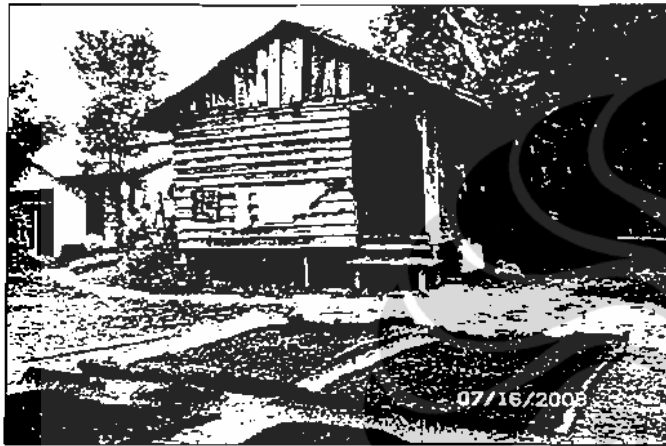


07/16/2008

Jalan Masuk (Lingkungan) Desa Sebunga (perbatasan) menuju dusun Aruk, Aping dan Beruang (Indonesia) yang belum pernah merasakan nikmatnya jalan beraspal



07/16/2008



07/16/2008

Wawancara ke Rumah Responden di Desa Sebunga Dusun Aruk yang mayoritas menggunakan Ringgit daripada Rupiah dalam kesehariannya



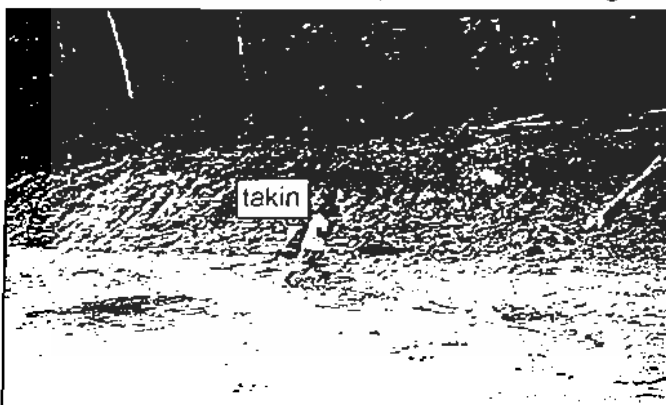
07/16/2008

Rumah Bapak Silvanus (Desa Sebunga Dusun Aruk) sebagai pendamping saat melakukan penelitian ke Kampong Biawak



07/16/2008

Responden yang sukses menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi dari dusun Aping (kiri) dan Dusun Beruang (kanan) Desa Sebunga. "Semua bisa asal giat berusaha"

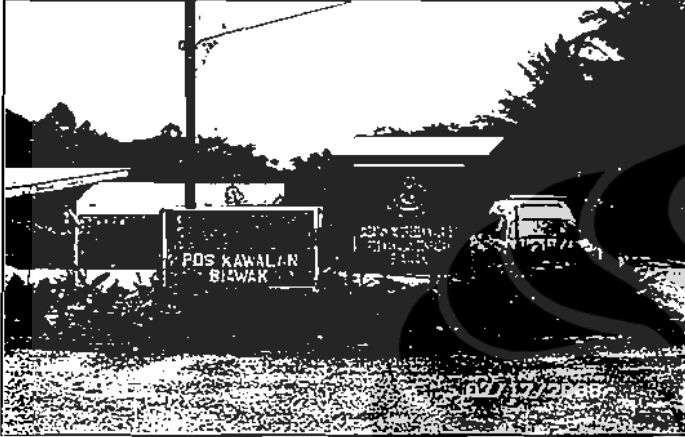


takin



Rena menggunakan takin, kelas 2 SD . menjajakan sayur yang dibawa tantenya dari Biawak Malaysia

Rumah Keluarga Miskin di Dusun Beruang, Desa



Jalan Lingkungan Kampong Biawak (Malaysia) yang terhubung dengan aspal mulus ke seluruh penjuru pemukiman lama dengan suplay listrik 24 jam



Wawancara dengan Bpk. Viktorius asal Bengkayang (INA) menikah&menetap di Biawak sejak tahun 1990

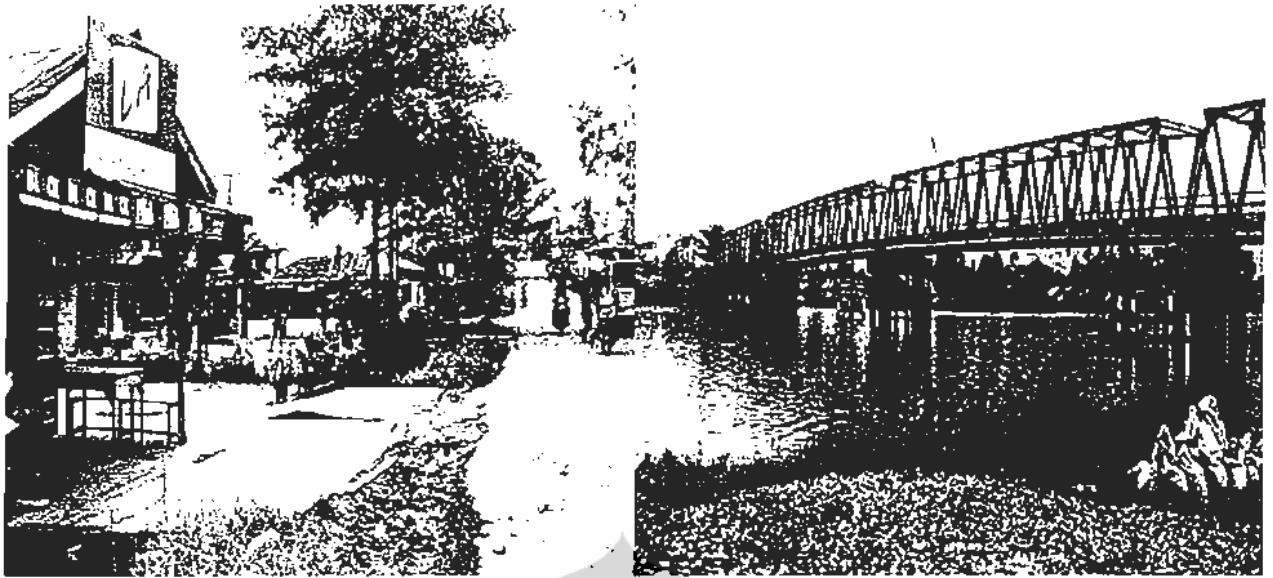


Ny. Sarmina asal Kartiase (INA) menikah&menetap di Biawak sejak tahun 1998, masih berstatus warganegara INA dengan perkawinan belum berizin



Rumah kediaman Bpk. Poang dan Bpk. Mincin yang beristrikan WN INA, "Indonesia adalah saudara kami semua, perbatasan yang membatasi kami" Analisis kemiskinan..., Rissa Nisfurianti, FE UI, 2008.

Kwitansi tagihan listrik Malaysia



Terminal Bis, sungai, jalan dan jembatan menunjukkan aksesibilitas yang baik di Kartiasa



Sarana kesehatan dan pendidikan yang mudah dijangkau di Kartiasa



Sarana pendidikan SMP dan SMK walaupun mudah dijangkau belum mampu menurunkan angka putus sekolah di Kartiasa

**KUESIONER PENELITIAN ANALISIS KEMISKINAN DI KAWASAN PERBATASAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin : 1. Laki - Laki  2. Perempuan   
 Umur : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_

**II. PENGENALAN TEMPAT**

Desa : \_\_\_\_\_  
 Dusun : \_\_\_\_\_  
 RT / RW : \_\_\_\_\_

**III. KETERANGAN RUMAH TANGGA**

Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
 Umur : \_\_\_\_\_  
 Asal Daerah : \_\_\_\_\_  
 Nama Istri : \_\_\_\_\_  
 Jumlah Anak : \_\_\_\_\_  
 Jumlah ART : \_\_\_\_\_

**IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA**

N O	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA	HUBUNGAN DENGAN KRT	JENIS KELAMIN	UMUR	STATUS	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN
		1 KRT 2 Istri / Suami 3 Anak 4 Orang Tua 5 Saudara 6 Lainnya	1 Laki - Laki 2 Perempuan		1. menikah 2. belum / tidak	1 Tidak Sekolah 2 Tidak Tamat SD 3 SD 4 SMP 5 SMA 6 Lainnya, sebutkan	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**V. KETERANGAN KESEHATAN**

1 Apakah dalam 1 bulan terakhir keluarga ini mempunyai keluhan kesehatan seperti di bawah ini :

- |  |  |
|--|--|
| a. Panas <input type="checkbox"/>              | e. Diare/ buang-buang air <input type="checkbox"/> |
| b. Batuk <input type="checkbox"/>              | f. Sakit kepala berulang <input type="checkbox"/>  |
| c. Pilek <input type="checkbox"/>              | g. Sakit gigi <input type="checkbox"/>             |
| d. Asma / napas sesak <input type="checkbox"/> | h. lainnya <input type="checkbox"/>                |

2 Kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari.

1. Ya  2. Tidak

3 Lamanya terganggu (sakit) : .....hari

4 Jenis obat / cara pengobatan yang digunakan

1. Tradisional  2. Modern  3. Lainnya, sebutkan .....

5 Apakah pernah berobat jalan dalam 1 bulan terakhir

1. Ya

2. Tidak

6 Apakah jenis pelayanan kesehatan yang ada di desa ini?

a. RS Pemerintah

b. RS Swasta

c. Praktek dokter / Poliklinik

d. Puskesmas / Pustu

e. Praktek nakes

f. Praktek batra

g. Dukun bersalin

h. lainnya, sebutkan .....

7 Dimana Bapak/ Ibu / (keluarga) berobat jika sakit?

a. RS Pemerintah

b. RS Swasta

c. Praktek dokter / Poliklinik

d. Puskesmas / Pustu

e. Praktek nakes

f. Praktek batra

g. Dukun bersalin

h. lainnya

8 Bagaimana Kepemilikan MCK?

a. milik sendiri

b. Milik Umum

c. Tidak Ada

9 Bagaimana kepemilikan air bersih?

a. Air Hujan

b. Sumur / Sungai

d. PDAM

e. Galon/kemasan

f. Lain-lain

## VI. KETERANGAN PENDIDIKAN

1 Penyelenggara pendidikan :

1. Pemerintah

2. Swasta

3. Luar Negeri

2 Berapa pengeluaran untuk biaya sekolah per bulan?

a. < Rp. 100.000

b. Rp. 100.000 - Rp. 200.000

c. > Rp. 200.000,-

d. lainnya,sebutkan

3 Jika tidak bersekolah, apa alasannya ?

a. Tidak ada biaya

b. Bekerja

c. Menikah

d. Lain-lain

4 Bagaimana kalau ada bantuan pendidikan/beasiswa?

a. Melanjutkan sekolah

b. Tetap tidak sekolah

## VII. KETENAGAKERJAAN

1 Apa jenis pekerjaan anda?

a. Petani

b. Buruh

c. Wiraswasta /

Pedagang

d. Pegawai

Negeri

e. Lain-lain, sebutkan .....

2 Apakah anak anda ikut membantu bekerja?

1. Ya

2. Tidak

3 Berapa pendapatan yang diperoleh perbulan?

a. < Rp 500.000

b. Rp 500.000 - Rp 750.000

c. Rp 750.000 - Rp 1.000.000

d. lainnya, sebutkan .....

## VIII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

1 Berapa pengeluaran rata – rata rumah tangga sehari?

a. > Rp 10.000

b. Rp 10.000 - Rp 30.000

c. Rp 30.000 - Rp 50.000

d. lainnya, sebutkan .....

2 Bagaimana bila pendapatan yang diper oleh tidak mencukupi pengeluaran sehari – hari?

a. Mencari tambahan  
pendapatan

b. Hutang

c. Minta ke  
tetangga/saudara

d. lainnya, sebutkan.....

3 Jenis pakaian apa yang biasa dibeli?

a. Baru

b. Bekas (Roma/Lelong)

4 Berapa frekuensi membeli pakaian dalam setahun? (per orang)

a. 1 - 2 kali

b. 2 - 5 kali

c. > 5 kali

5 Berapa rata-rata pengeluaran per orang dalam membeli pakaian dalam setahun ?

a. < Rp 50.000

b. Rp 50.000 -75.000

c. Rp 75.000 - Rp 100.000

d. lainnya, sebutkan.....

6 Dimana biasanya tempat berbelanja pakaian

a. Dalam negeri

b. Luar Negeri

**IX. KEPEMILIKAN ASSET / RUMAH DAN LAHAN**

1 Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati :

- a. Milik Sendiri  c. Bebas sewa  e. Milik Orang tua / keluarga   
 b. Sewa / Kontrak  d. Dinas  f. lainnya, sebutkan .....

2 Luas lantai : .....m2 P ..... L .....

3 Kondisi Rumah

	Papan	Semen	Bambu	Rumbia (sagu) / Kulit Kayu	Seng	Metal
Lantai						
Dinding						
Atap						

4 Penyedia Jasa Penerangan Rumah Tangga dan Desa

- a. Pemerintah RI b. Pemerintah Malaysia c. Swasta d. Swadaya masyarakat

5 Penerangan Rumah

- a. PLN b. Pelita (Lampu Teplik)/Serongkeng c. Panel Tenaga Matahari d. Tenaga Air

6 Jika menggunakan listrik dari PLN, berapa watt yang terpasang dalam RT ini

- a. 450 watt b. 900 watt c. 1300 watt d. > 1300 watt

7 Peralatan rumah tangga apa saja yang dimiliki?

- a. Radio  b. TV  c. Parabola  d. Kulkas  e. Tidak ada

8 Asset apa saja yang dimiliki?

- a. Lahan pertanian  b. Kendaraan Roda empat  c. Tabungan / Deposito di Bank  d. lainnya, sebutkan .....

9 Apakah memiliki pinjaman di bank / lembaga keuangan lainnya?

1. Ya  2. Tidak

**X. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI LAINNYA**

1 Apakah pernah mendapat bantuan pemerintah seperti Subsidi Tunai, Raskin, DII?

1. Ya  2. Tidak

2 Jika pernah menerima Subsidi Tunai di gunakan untuk apa?

- a. keperluan sehari - hari  b. modal usaha  c. pendidikan anak

3 Program pemberdayaan apa yang paling baik yang pernah/ sedang berjalan di desa ini?

- a. IDT  b. P3DT  c. PPK  d. JPS - IP  e. P2WP  f. P2DTK

4 Prasarana dan sarana desa

- Kondisi Jalan dari desa ke perbatasan :

- a. Jalan setapak/tikus  b. Jalan Kerikil  c. Jalan Aspal

- Kondisi Pasar desa

- a. baik  b. rusak

- kemana hasil bumi dipasarkan?

- a. pasar desa (lokal)  b. Luar negeri (Malaysia)

5 Program TV yang dapat diterima di desa/kelurahan ini (tanpa antena parabola/TV kabel):

- a. TVRI b. TV Swasta Nasional (RCTI, SCTV, Metro TV, dll) c. TV Malaysia (TV 1, TV2, TV3, TV7)

6 Kebutuhan Pokok RT ini berasal dari :

- a. Sambas b. Singkawang c. Biawak (Malaysia) d. lainnya, sebutkan .....

7 Berpergian ke negara tetangga

- Seberapa sering melakukan perjalanan ke Malaysia dalam sebulan?

- a. < 3 kali b. 3-5 kali c. > 5 kali

- Dalam rangka apa melakukan perjalanan ke Malaysia?

- a. Mencari pekerjaan c. Mengunjungi keluarga e. Sekolah  
 b. Transaksi perdagangan (jual - beli) d. Berobat

- Bagaimana cara anda untuk berpergian ke Malaysia?

- a. Jalan kaki b. Sepeda c. Motor d. Mobil e. Angkutan Umum

- Jika berbelanja ke Malaysia produk/barang apa yang paling sering dibeli?
  - a. sembako, .....
  - b. barang elektronik, .....
  - c. pakaian, .....
  - d. bahan bangunan, .....
  - e. lainnya, sebutkan .....
- Jika berjualan ke Malaysia, barang / produk apa yang dijual?
  - a. Hasil pertanian/kehutanan, ..... d. Pakaian, .....
  - b. Hasil tambang, ..... e. Lainnya, Sebutkan.....
  - c. Bidai / Rotan (perabotan RT),.....
- Jika berjualan di Malaysia, berapa pendapatan bersih perhari?
  - a. > Rp. 20.000      b. Rp 20.000 - Rp 50.000      c. Rp 50.000 - Rp 100.000      d. lainnya .....
- Mata uang yang sering digunakan ?
  - a. Rupiah      b. Ringgit
- Apa alasan anda menggunakan mata uang tersebut ?  
.....
- Seberapa besar anda merasa tergantung pada daerah tetangga (Malaysia) ?
  - a. tidak tergantung sama sekali      c. cukup tergantung      e. sangat tergantung
  - b. sedikit tergantung      d. agak tergantung
- Apakah anda merasa adanya perbatasan menyulitkan kehidupan anda sehari - hari ?
  - a. ya, sebutkan contoh kendala .....
  - b. tidak

#### XI. PENGENALAN TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PALOH - SAJINGAN

- 1 Apakah Pem Kab. Sambas pernah mensosialisasikan Program Pembangunan PALSA
  - a. Pernah      b. Tidak
- 2 Apakah tahu di Aruk (Sajingan) akan segera di buka Pos Pemeriksaan Lintas Balas (PPLB)
  - a. Tahu      b. Tidak      c. Tidak mengerti
- 3 Jika tahu, darimana informasi ini di peroleh
  - a. Pemerintah      b. Saudara / Teman / Tetangga      c. Media Massa / Elektronik
- 4 Apakah ada lahan / asset RT ini yang digunakan dalam Program Pembangunan PALSA
  - a. Ada      b. Tidak
  - Jika Ada, apa saja
    - a. Rumah      b. Lahan Pekarangan / Pertanian      c. Keduanya
  - Apakah mendapat ganti rugi dari pemerintah
    - a. Ada      b. Tidak
  - Jika ada, Apakah ganti rugi tersebut mencukupi (sesuai dengan harga yang berlaku di masyarakat)
    - a. Iya      b. Tidak
  - Jika Tidak, usaha apa yang dilakukan
    - a. Mengadu ke Pemerintah/DPRD      b. Diam saja      c. Hibah kepada pemerintah
- 5 Apakah responden merasa dilibatkan dalam Program Pengembangan dan Pembangunan PALSA
  - a. Iya      b. Tidak
- 6 Bentuk keterlibatan responden dalam Program Pengembangan dan Pembangunan PALSA
  - a. terlibat / ikut merumuskan kegiatan yang tepat dalam program PALSA
  - b. Menghibahkan asset
  - c. ikut sebagai pekerja
  - d. lain - lain





**Yang Digunakan**

**Data Primer**







No	d_7_a	d_7_b	d_7_b2	d_7_c	d_7_d	d_7_e	d_7_fa	d_7_fb	d_7_g	d_8_a	d_8_b	d_8_b2	d_8_c	d_8_d	d_8_e	d_8_fa	d_8_fb	d_8_g	e_1_a	e_1_b	e_1_c	e_1_d	e_1_e
1	Faiz	Anak		Laki-laki	9	Belum Menik	Tidak Tamat		Pelajar	Nur Aisyah	Anak		Perempuan	5	Belum Me	Lainnya	Pra Sekolah	Pelajar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	Aisah Jijah	Lainnya		Perempuan	18	Belum Menik	SD			Leni	Lainnya		Perempuan	20	Belum Me	SMP		Pekerja	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
6																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
8																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
9	Utup	Orang Tua		Perempuan	55	Menikah	Tidak Sekolah												Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
10	Fredy	Anak		Laki-laki	18	Belum Menik	Tidak Tamat		Petani	Frezen	Lainnya		Laki-laki	4	Belum Me	Tidak Se			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
11	Sofia	Anak		Perempuan	2	Belum Menik	Tidak Sekolah												Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
12																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
13																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
14	Zainiah	Anak		Perempuan	6	Belum Menik	SD		Pelajar	Hainiah	Anak		Perempuan	6	Belum Me	SD		Pelajar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
15																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
16																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
17																			Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
18																			Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
19																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
20																			Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
21																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
22																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
23	Forensi	Anak		Perempuan	1	Belum Menik	Lainnya	Belum Sek											Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
24																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
25																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
26																			Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
27																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
28																			Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
29																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
30	Varonica	Anak		Perempuan	3	Belum Menik	Lainnya	Belum sek											Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
31																			Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
32																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
33																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
34																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
35	Kristina	Lainnya	Cucu	Perempuan	1	Menikah													Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
36																			Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
37																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
38	Ain	Saudara		Laki-laki	18	Belum Menik	SD		Petani	Kristla Lojer	Anak		Laki-laki	2	Belum Me				Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
39																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
40																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
41																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
42																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
43																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
44																			Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
45																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
46																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
47																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
48	Alponus Lia	Anak		Laki-laki	11	Belum Menik	SD		Pelajar	Carolina Les	Anak		Perempuan	8	Belum Me	SD		Pelajar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
49	Anggela Rox	Anak		Perempuan	3	Belum Menik	Lainnya	Belum Sek											Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
50																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
51	Anastasia	Anak		Perempuan	12	Belum Menik	SD		Pelajar	Robena	Anak		Perempuan	9	Belum Me	SD		Pelajar	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
52	Firminus	Anak		Laki-laki	15	Belum Menik	SMA		Pelajar	Andi	Anak		Laki-laki	12	Belum Me	SMP		Pelajar	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
53	Anggela Afr	Saudara		Perempuan	20	Belum Menik	SMA		Mahasiswa	Fransiskus S	Saudara		Laki-laki	23	Belum Me	SMP		Pelajar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
54																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
55																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
56	Carlos	Anak		Laki-laki	8	Belum Menik	SD		Pelajar										Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
57																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak











No	L7e_4	bangunan	L7e_5	lainnya	L7f_1	L7f_1a	L7f_1b	L7f_1c	L7f_1d	L7f_1e	L7f_1f	L7f_1g	L7g_1	L7g_2	L7h	L7j	L7j	L7k_1	L7k_2	k_1	k_2
1					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit		Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada		
2					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-	Ya	Ringgit		Sangat tergantung	Tidak	Tidak Ada		
3					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit		Tidak tergantung sama s	Ya	Pungli		
4					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit		Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada		
5					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit	mudah	Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada		
6					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit	mudah	Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada		
7					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit	mudah	Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada		
8					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit	mudah	Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada		
9					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit	mudah	Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada		
10					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit	mudah	Cukup tergantung	Ya	Pungli		
11					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit	mudah	Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada		
12					Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Rupiah		Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
13	Semen, Seng	1			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit	Tergantung	Tidak tergantung sama s	Ya	Pungli	Ya	Tidak
14	Semon	1			Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Lainnya	150000	Ringgit	Mudah	Sangat tergantung	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak
15					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tahu
16					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tahu
17					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tahu
18					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 20.000,-		Rupiah		Cukup tergantung	Ya	Pungli	Tidak	Tidak
19					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Tidak tergantung sama s	Ya	Pungli	Tidak	Tidak
20					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tahu
21					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tahu
22					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Sangat tergantung	Ya	Pungli	Ya	Tahu
23					Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Rupiah		Sedikit tergantung	Ya	Pungli	Tidak	Tidak
24	Semen, Seng	1	Pupuk	1	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Lainnya	300000	Ringgit		Sangat tergantung	Ya	Pungli	Ya	Tahu
25					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Rp. 20.000,-		Rupiah		Sedikit tergantung	Ya	Pungli	Tidak	Tidak
26					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Rp. 50.000,-		Rupiah		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
27					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Sedikit tergantung	Ya	Pungli	Ya	Tahu
28					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
29					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Sedikit tergantung	Ya	Pungli	Ya	Tahu
30					Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Rupiah		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
31					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
32					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Ringgit		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak Mengerti
33					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	150000	Ringgit		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak Mengerti
34					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 20.000,-		Rupiah		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tahu
35					Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Rupiah	Mudah Bertransaksi	Sedikit tergantung	Ya	Pungli	Tidak	Tidak
36					Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 20.000,-		Rupiah	Mudah	Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tahu
37					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah	Mudah	Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tahu
38					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah	Mudah	Sedikit tergantung	Ya	Pungli	Tidak	Tidak Mengerti
39					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah	Mudah	Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak Mengerti
40					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah	Mudah	Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak Mengerti
41					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah	Mudah	Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
42					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah	Mudah	Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
43					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah	Mudah	Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
44					Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Rupiah		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
45					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah	Mudah	Tidak tergantung sama s	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
46					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Ringgit		Agak tergantung	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tidak Mengerti
47					Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 20.000,-		Ringgit		Sangat tergantung	Ya	Pungli	Tidak	Tahu
48	Semon	1			Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Ringgit		Sangat tergantung	Ya	Pungli	Ya	Tahu
49					Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	150000	Rupiah		Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
50					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Ringgit		Sedikit tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tahu
51					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	Tidak Ada	Rupiah		Sedikit tergantung	Ya	Pungli	Tidak	Tahu
52					Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 20.000,-		Ringgit		Sangat tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tahu
53					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lainnya	200000	Ringgit		Sangat tergantung	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tahu
54	song, semen	1			Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 20.000,-		Rupiah		Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak
55					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 20.000,-		Rupiah		Sangat tergantung	Tidak	Tidak Ada	Ya	Tahu
56					Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 50.000,-		Ringgit	diakui	Cukup tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak Mengerti
57	song, semen	1			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Rp. 20.000,-		Rupiah		Sangat tergantung	Tidak	Tidak Ada	Tidak	Tidak

No	K_3	K_4a	K_4b	K_4c	K_4d	K_4e	K_5	K_6
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Tidak Ada informasi	Ada	Lahan pekarangan/ Tidak	Tidak	Diam saja	Tidak	Lain-lain	
13.	Tidak Ada informasi	Ada	Lahan pekarangan/ Ada	Tidak	Diam saja	Tidak	Menghentikan asset	
14.	Pemerintah	Ada	Rumahan	Ada	Mengsaku ke Pemerintah/ Ya	Ya	Terbatal/ikut memutuskan kegiatan dalam program PALSAA	
15.	Media Massa/Elektronik	Ada	Lahan pekarangan/ Tidak	Tidak		Ya	Lain-lain	
16.	Pemerintah	Ada	Lahan pekarangan/ Tidak	Tidak		Ya	Menghentikan asset	
17.	Pemerintah	Tidak				Ya	Lain-lain	
18.	Tidak Ada informasi	Tidak				Ya	Lain-lain	
19.	Tidak Ada informasi	Tidak				Ya	Lain-lain	
20.	Saudara/Teman/Tetangga	Ada	Lahan pekarangan/ Ada	Tidak	Diam saja	Ya	Lain-lain	
21.	Tidak Ada informasi	Ada	Lahan pekarangan/ Ada	Tidak	Diam saja	Tidak	Lain-lain	
22.	Saudara/Teman/Tetangga	Ada	Rumahan	Tidak		Ya	Lain-lain	
23.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
24.	Pemerintah	Ada	Rumahan	Tidak		Ya	Menghentikan asset	
25.	Tidak Ada informasi	Ada	Rumahan	Tidak		Tidak	Menghentikan asset	
26.	Tidak Ada informasi	Ada	Rumahan	Tidak		Tidak	Menghentikan asset	
27.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Ya	Lain-lain	
28.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
29.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Ya	Lain-lain	
30.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
31.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
32.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
33.	Tidak Ada informasi	Tidak				Ya	Lain-lain	
34.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Tidak	Lain-lain	
35.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
36.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Tidak	Lain-lain	
37.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Tidak	Lain-lain	
38.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
39.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
40.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
41.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
42.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
43.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
44.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
45.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
46.	Saudara/Teman/Tetangga	Ada	Lahan pekarangan/ Ada	Tidak	Diam saja	Tidak	Lain-lain	
47.	Tidak Ada informasi	Tidak				Ya	Lain-lain	
48.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Ya	Terbatal/ikut memutuskan kegiatan dalam program PALSAA	
49.	Tidak Ada informasi	Ada	Lahan pekarangan/ Tidak			Tidak	Lain-lain	
50.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Ya	Lain-lain	
51.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Ya	Lain-lain	
52.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Ya	Lain-lain	
53.	Pemerintah	Tidak				Ya	Lain-lain	
54.	Tidak Ada informasi	Tidak				Ya	Terbatal/ikut memutuskan kegiatan dalam program PALSAA	
55.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	
56.	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak				Ya	Lain-lain	
57.	Tidak Ada informasi	Tidak				Tidak	Lain-lain	





No	d 4 d	d 4 e	d 4 fa	d 4 fb	d 4 g	d 5 a	d 5 b	d 5 c	d 5 d	d 5 e	d 5 fa	d 5 fb	d 5 g	d 6 a	d 6 b	d 6 b2	d 6 c	d 6 d	d 6 e	d 6 fa	d 6 fb	d 6 g
58	18	Menikah	SD		Pelajar	Oktya	Anak	Perempuan	15	Belum Menikah	SD		Pelajar	Apolonius	Anak		Laki-laki	13	Belum Menikah	SD		Pelajar
59	8	Belum Menikah	SD		Pelajar	Anita	Anak	Perempuan	20	Belum Menikah	Lainnya	St	Mahasiswa									
60	5	Belum Menikah	Tidak Seko			Doda	Anak	Perempuan	3	Belum Menikah	Tidak Seko											
61	12	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar	Lehe	Anak	Laki-laki	4	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Rafal	Anak		Laki-laki	3	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko	
62	8	Belum Menikah	SO		Pelajar	Jeni	Anak	Laki-laki	4	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Srinur	Orang T		Perempuan	60	Menikah	Lainnya		
63	20	Belum Menikah	SMA		Petani	Elano	Anak	Perempuan	13	Belum Menikah	SMP		Pelajar	ira	Anak		Perempuan	23	Belum Menikah	SD		Petani
64	28	Belum Menikah	SMP			Makati	Jaluf / Sus	Perempuan	45	Menikah	Tidak Seko			Sertius	Lainnya	Cucu	Laki-laki	9	Belum Menikah	SD		
65	3	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Naemah	Anak	Perempuan	2	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Rina	Saudara		Perempuan	24	Menikah	Tidak Tam		Petani
66	31	Belum Menikah	Tidak Tam		Petani/PRT	Kabul	Anak	Laki-laki	27	Belum Menikah	SD			Elin	Anak		Perempuan	17	Belum Menikah	SD		Petani
67	11	Belum Menikah	Tidak Tam			Marfanl	Anak	Perempuan	7	Belum Menikah	SD		Pelajar	Tarlan	Anak		Laki-laki	4	Belum Menikah	SD		Petani
68																						
69	10	Belum Menikah	Tidak Tam			Fearl	Anak	Perempuan	8	Belum Menikah	SD											
70	32	Menikah	SD		Petani	Tarl	Anak	Perempuan	11	Belum Menikah	Tidak Tam			Arl	Anak		Laki-laki	6	Belum Menikah	SD		Pelajar
71	31	Menikah	SD		Petani																	
72	5	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko																		
73	17	Belum Menikah	SD		Petani	Renehanisa	Anak	Laki-laki	5	Belum Menikah	SD			Adeng	Orang T		Perempuan	65	Menikah	Lainnya		Ladang
74	23	Belum Menikah	SMP		Petani	Supriani	Anak	Perempuan	8	Belum Menikah	SD		Pelajar	Micael	Lainnya	Cucu	Laki-laki	1	Belum Menikah	SD		
75	2	Belum Menikah																				
76	20	Belum Menikah	SD		Tani	Anif	Anak	Perempuan	17	Belum Menikah	SD			Santi	Anak		Perempuan	16	Belum Menikah	Lainnya	SPG	
77	7	Belum Menikah	SD		Pelajar	Nelalis	Anak	Laki-laki	3	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko										
78	1	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Aster	Saudara	Perempuan	24	Belum Menikah	SD		Tani	Yatap	Saudara		Laki-laki	18	Belum Menikah	SMP		Tani
79	3	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko																		
80	2	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Mima	Anak	Perempuan	1	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Baitok	Orang T		Perempuan	80	Menikah	Tidak Seko		Tidak be
81	3	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Rosa	Saudara	Perempuan	10	Belum Menikah	SD		Pelajar									
82																						
83	8	Belum Menikah	SD		Pelajar	Candra	Anak	Laki-laki	4	Belum Menikah	SD											
84	1	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Hera	Anak	Perempuan	16	Belum Menikah	SMP		Pelajar	Rika	Anak		Perempuan	20	Belum Menikah	SMP		Tani
85	15	Belum Menikah	SMP		Pelajar	Osis Saputra	Anak	Laki-laki	14	Belum Menikah	SD			Dedi Darma	Anak		Laki-laki	7	Belum Menikah	SD		Pelajar
86	25	Belum Menikah	SD		Tani	Rosita	Anak	Perempuan	38	Belum Menikah	SMP											
87																						
88	65	Menikah	Tidak Seko		Tani	Nita	Saudara	Perempuan														
89																						
90	5	Belum Menikah	SD		Pelajar	Tia Gusta	Anak	Perempuan	2	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko										
91	25	Menikah	SD		Tani	Ruslam	Anak	Laki-laki	22	Belum Menikah	SD		Tani	Lidia	Anak		Perempuan	20	Belum Menikah	SMA		Pelajar
92	8	Belum Menikah	SD		Pelajar	Desi Titare	Anak	Perempuan	4	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Juarani	Anak		Perempuan	2	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko	
93	3	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Rlyan	Anak	Laki-laki	1	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko										
94	21	Belum Menikah																				
95	2	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko																		
96	4	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko																		
97	2	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko																		
98	18	Belum Menikah	SMP		Pelajar	Indra Kumala	Anak	Laki-laki	11	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar	Adrian	Anak		Laki-laki	8	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar
99	16	Belum Menikah	SD		Pelajar	Puspa	Anak	Perempuan	13	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar	Krisno	Anak		Laki-laki	11	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar
100																						
101																						
102	16	Belum Menikah	SD		Pelajar	Gali	Anak	Laki-laki	11	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar									
103	2	Belum Menikah	Lainnya	Belum Seko		Kasmir	Saudara	Perempuan	20	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar	Karmila	Saudara		Perempuan	13	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar
104	80	Menikah	Tidak Seko		Petani																	
105	19	Belum Menikah	SMP		Pelajar	Rusnah	Anak	Perempuan	17	Belum Menikah	SD		Pelajar	Tulik	Anak		Perempuan	15	Belum Menikah	SD		Pelajar
106	80	Menikah	Tidak Seko		Pengangg	Azzah	Orang T	Perempuan	76	Menikah	Tidak Seko		Pengangg									
107	17	Belum Menikah	SD		Pelajar	Artika	Anak	Perempuan	13	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar									
108																						
109	7	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar																	
110	21	Belum Menikah	Tidak Tam		Pengangg	Pila	Anak	Perempuan	15	Belum Menikah	SD		Pengangg	Artla	Lainnya	menantu	Perempuan	20	Menikah	SD		Pengangg
111																						
112	17	Belum Menikah	Tidak Tam		Buruh	Mijan	Anak	Laki-laki	15	Belum Menikah	SD		Buruh	Arbi	Anak		Laki-laki	11	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar
113	18	Belum Menikah	SD		Pengangg	Pami	Anak	Perempuan	14	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar	Azmadri	Anak		Laki-laki	11	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar
114	18	Belum Menikah	SMP		Buruh	Bekina	Anak	Perempuan	13	Belum Menikah	SD		Pelajar	Sulma	Anak		Perempuan	15	Belum Menikah	Tidak Tam		Pelajar
115	4	Belum Menikah	Tidak Tam	Belum Seko																		

No	d 7 a	d 7 b	d 7 b2	d 7 c	d 7 d	d 7 e	d 7 fa	d 7 fb	d 7 g	d 8 a	d 8 b	d 8 b2	d 8 c	d 8 d	d 8 e	d 8 fa	d 8 fb	d 8 g	a 1 a	a 1 b	a 1 c	a 1 d	a 1 e
58																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
59																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
60																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
61																			Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
62																			Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
63																			Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
64	Carlas	Lainnya	Cucu	Laki-laki	8	Belum Menik	SD		Santa	Lainnya	Cucu	Laki-laki	8	Belum Me	Tidak Se				Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
65	Kono	Saudara		Laki-laki	25	Menikah	Tidak Tamat	Petani											Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
66	Nokon	Anak		Laki-laki	6	Belum Menik													Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
67																			Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
68																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
69																			Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
70	Nizar	Saudara		Laki-laki	20	Belum Menik	Tidak Tamat	Petani	Bernard	Saudara		Laki-laki	24	Belum Me	Tidak Ta			Petani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
71																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
72																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
73	Sudinman	Saudara		Laki-laki	30	Belum Menik	SD	Petani	Parman	Saudara		Laki-laki	27	Belum Me	SMA			Petani/G	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
74	Amir	Saudara		Laki-laki	25	Menikah	SD	Petani											Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
75																			Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
76	Lisa	Anak		Perempuan	14	Belum Menik	Tidak Tamat		Kani	Anak		Laki-laki	7	Belum Me	Lainnya	Belum Sek			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
77																			Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
78																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
79																			Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
80	Pier	Saudara		Laki-laki	40	Belum Menik	SD	Tani											Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
81																			Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
82																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
83																			Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
84	Ahwan	Anak		Laki-laki	10	Belum Menik	SD	Pelajar	Lubis	Anak		Laki-laki	12	Belum Me	SD			Pelajar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
85	Semong	Orang Tua		Perempuan	70	Menikah	Tidak Sekolah	Tidak bel											Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
86																			Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
87																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
88																			Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
89																			Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
90																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
91	Berta	Anak		Perempuan	17	Belum Menik	SD	Tani	markus	Anak		Laki-laki	15	Belum Me	SMP			Pelajar	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
92																			Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
93																			Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
94																			Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
95																			Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
96																			Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
97																			Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
98																			Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
99	Putri	Anek		Perempuan	4	Belum Menik	Tidak Sekolah												Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
100																			Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
101																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
102																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
103																			Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
104																			Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
105	Darto	Anak		Laki-laki	11	Belum Menik	Tidak Tamat	Pelajar	Yuisa	Anak		Perempuan	9	Belum Me	Tidak Ta			Pelajar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
106																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
107																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
108																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
109																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
110	Ridho	Lainnya	Keponak	Laki-laki	13	Belum Menik	Tidak Tamat	Pelajar	Putri anti	Lainnya	Cucu	Perempuan	1	Belum Me	Lainnya	Belum Sek			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
111																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
112	Rahmawati	Anak		Perempuan	10	Belum Menik	Tidak Tamat	Pelajar	Eko M	Lainnya	Cucu	Laki-laki	11	Belum Me	Tidak Te			Pelajar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
113																			Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
114	Arkat	Orang Tua		Perempuan	75	Menikah	Tidak Sekolah	pENGAN											Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
115																			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak













No	K <sub>3</sub>	K <sub>4A</sub>	K <sub>4B</sub>	K <sub>4C</sub>	K <sub>4D</sub>	K <sub>4E</sub>	K <sub>5</sub>	K <sub>6</sub>
68	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
59	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Ya	Lain-lain
60	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Tidak	Lain-lain
81	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
82	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Ya	Lain-lain
63	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
64	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
65	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
66	Media Massa/ Elektronik	Tidak					Ya	Lain-lain
67	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Ya	Terdaftar/kuil musamuskan kegiatan dalam program PALSA
68	Pemerintah	Tidak					Ya	Lain-lain
69	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
70	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
71	Media Massa/ Elektronik	Tidak					Ya	Lain-lain
72	Tidak Ada Informasi	Ada	Kedungra	Ada	Tidak	Diam saja	Ya	Lain-lain
73	Tidak Ada Informasi	Tidak					Ya	Lain-lain
74	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
75	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
76	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
77	Pemerintah	Tidak					Ya	Lain-lain
78	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Ya	Terdaftar/kuil musamuskan kegiatan dalam program PALSA
79	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Tidak	Lain-lain
80	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
81	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Ya	Lain-lain
82	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
83	Saudara/Teman/Tetangga	Ada	Lain-lain	Tidak			Tidak	Lain-lain
84	Tidak Ada Informasi	Tidak					Ya	Lain-lain
85	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Ya	Lain-lain
86	Pemerintah	Tidak					Ya	Lain-lain
87	Pemerintah	Ada	Lain-lain	Ada	Tidak	Diam saja	Ya	Lain-lain
88	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Tidak	Lain-lain
89	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
90	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Ya	Lain-lain
91	Tidak Ada Informasi	Tidak					Ya	Lain-lain
92	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
93	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
94	Saudara/Teman/Tetangga	Tidak					Ya	Lain-lain
95	Saudara/Teman/Tetangga	Ada	Lain-lain	Ada	Tidak	Diam saja	Ya	Lain-lain
96	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
97	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
98	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
99	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
100	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
101	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
102	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
103	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
104	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
105	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
106	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
107	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
108	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
109	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
110	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
111	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
112	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
113	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
114	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain
115	Tidak Ada Informasi	Tidak					Tidak	Lain-lain

## KETERANGAN DATA PRIMER

No.	=	d_6_d	=	Umur 6
a_1	=	d_6_e	=	Status 6
a_2	=	d_6_fa	=	Pendidikan Terakhir 6
a_3	=	d_6_fb	=	Jawaban Lainnya 6b
a_4	=	d_6_g	=	Pekerjaan 6
kat_kerj	=	d_7_a	=	Nama ART 7
b_1	=	d_7_b	=	Hubungan Dgn KRT 7
desa	=	d_7_b2	=	Jawaban Lainnya 7a
b_2	=	d_7_c	=	Jenis Kelamin 7
c_1	=	d_7_d	=	Umur 7
c_2	=	d_7_e	=	Status 7
c_3	=	d_7_fa	=	Pendidikan Terakhir 7
c_5	=	d_7_fb	=	Jawaban Lainnya 7b
c_6	=	d_7_g	=	Pekerjaan 7
var_anak	=	d_8_a	=	Nama ART 8
c_7	=	d_8_b	=	Hubungan Dgn KRT 8
d_1_a	=	d_8_b2	=	Jawaban Lainnya 8a
d_1_b	=	d_8_c	=	Jenis Kelamin 8
d_1_b2	=	d_8_d	=	Umur 8
d_1_c	=	d_8_e	=	Status 8
d_1_d	=	d_8_fa	=	Pendidikan Terakhir 8
d_1_e	=	d_8_fb	=	Jawaban Lainnya 6b
d_1_fa	=	d_8_g	=	Pekerjaan 8
var00005	=	e_1_a	=	Panas/demam
d_1_fb	=	e_1_b	=	Batuk
d_1_g	=	e_1_c	=	Pilek
d_2_a	=	e_1_d	=	Asma/Nafas Sesak
d_2_b	=	e_1_e	=	Diare/buang-buang air
d_2_c	=	e_1_f	=	Sakit Kepala Berulang
d_2_d	=	e_1_g	=	Sakit gigi
d_3_a	=	e_1_ha	=	Sakit Lainnya
d_3_b	=	e_1_hb	=	Jawaban Sakit Lainnya
d_3_b2	=	e_2	=	Apakah ada peyebab keluhan ?
d_3_c	=	e_3	=	Lamanya terganggu (sakit)
d_3_d	=	e_4	=	Jenis Obat yang digunakan
d_3_e	=	e_5	=	Apakah pernah berobat jalan dalam 1 bulan terakhir ?
d_3_fa	=	e_61	=	tempat pengobatan yang tersedia adl RS. Pemerintah
d_3_fb	=	e_62	=	tempat pengobatan yang tersedia adl RS. Swasta
d_3_g	=	e_63	=	tempat pengobatan yang tersedia adl Praktek Dokter/Polik
d_4_a	=	e_64	=	tempat pengobatan yang tersedia adl Puskesmas/Pustu
d_4_b	=	e_65	=	tempat pengobatan yang tersedia adl Praktek nakes
d_4_b2	=	e_66	=	tempat pengobatan yang tersedia adl Praktek batra
d_4_c	=	e_67	=	tempat pengobatan yang tersedia adl Dukun bersalin
d_4_d	=	e_68	=	Tempat Pegobatan Lainnya
d_4_e	=	e_7a1	=	tempat berobat jika sakit ke RS. Pemerintah
d_4_fa	=	e_7a2	=	tempat berobat jika sakit ke RS. Swasta
d_4_fb	=	e_7a3	=	tempat berobat jika sakit ke Praktek Dokter/Poliklinik
d_4_g	=	e_7a4	=	tempat berobat jika sakit ke Puskesmas/Pustu
d_5_a	=	e_7a5	=	tempat berobat jika sakit ke Praktek nakes
d_5_b	=	e_7a6	=	tempat berobat jika sakit ke Praktek batra
d_5_c	=	e_7a7	=	tempat berobat jika sakit ke Dukun bersalin
d_5_d	=	e_7a8	=	Tempat Berobat Lainnya
d_5_e	=	e_6	=	Kepemilikan MCK (Mandi Cuci Kakus)
d_5_fa	=	e_9a	=	Kepemilikan air bersih
d_5_fb	=	e_9b	=	Jawaban Kepemilikan Air Bersih Lainnya
d_5_g	=	f_1a	=	Penyelenggara pendidikan
d_6_a	=	f_1b	=	Jawaban Penyelenggara Pendidikan Lainnya
d_6_b	=	f_2a	=	Pengeluaran untuk biaya sekolah per bulan
d_6_b2	=	f_2b	=	Jawaban Pengeluaran Pendidikan Lainnya
d_6_c	=	f_3a	=	Alasan tidak sekolah

## KETERANGAN DATA PRIMER

g_1a	= Jenis pekerjaan KRT
g_1b	= Jawaban Pekerjaan KRT Lainnya
g_2	= anak diikutkan dalam membantu bekerja
g_3a	= Pendapatan yang diperoleh per bulan
g_3b	= Jawaban Pendapatan Lainnya
h_1a	= Rata-rata pengeluaran rumah tangga sehari
h_1b	= Jawaban Rata2 Pengeluaran Lainnya
h_2a1	= Mencari Tambahan Pendapatan
h_2a2	= Hutang
h_2a3	= Minta ke Tetangga/Saudara
h_2b	= Jawaban Lainnya
h_3a	= Jenis pakaian Baru
h_3b	= Jenis pakaian Bekas
h_4	= Frekuensi membeli pakaian dalam setahun
h_5	= Rata-rata pengeluaran per orang dalam membeli pakaian dalam setahun
h_6	= Tempat biasa membeli pakaian
i_1	= Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati
i_2a	= Luas lantai (m <sup>2</sup> )
i_2b	= Panjang lantai (m)
i_2c	= Lebar lantai (m)
ket_x1	= Rasio Rumah per Anggota Rumah Tangga
i_3a	= Kondisi rumah (Lantai)
i_3b	= Kondisi rumah (Dinding)
i_3c	= Kondisi rumah (Atap)
i_4	= Penyedia jasa penerangan rumah tangga dan desa
i_5a	= Penerangan rumah
i_5b	= Jawaban Penerangan Lainnya
i_6a	= Jika menggunakan PLN, watt yang terpasang dalam RT
i_6b	= Jawaban Lainnya
i_7a	= Peralatan rumah tangga yang dimiliki (Radio)
i_7b	= Peralatan rumah tangga yang dimiliki (TV)
i_7c	= Peralatan rumah tangga yang dimiliki (Parabola)
i_7d	= Peralatan rumah tangga yang dimiliki (Kulkas)
i_7e	= Peralatan rumah tangga yang dimiliki (Tidak ada)
i_8a	= Lahan pertanian
i_8b	= Kendaraan roda empat
i_8c	= Tabungan/Deposito
i_8d	= Asset Lainnya
i_8e	= Jawaban Asset Lainnya
i_9	= Kepemilikan pinjaman di Bank / Lembaga Keuangan lainnya
i_1	= Pernah mendapatkan bantuan pemerintah seperti Subsidi Tunai, Raskin, dll
i_2	= Jika pernah menerima subsidi, dipergunakan untuk apa
i_3	= Program pemberdayaan yang paling baik yang pernah/ sedang berjalan di desa
i_4a	= Kondisi jalan dari desa ke perbatasan
i_4b	= Kondisi pasar desa
i_4c	= Ke mana hasil bumi dipasarkan
i_5	= Program TV yang dapat diterima di desa/kelurahan ini (tanpa antena parabola/TV kabel)
i_6a	= Kebutuhan pokok RT berasal dari
i_6b	= Jawaban Kebutuhan Pokok Lainnya
i_7a_1	= Seberapa sering melakukan perjalanan ke MLYSIA/INA dalam sebulan
i_7a_2	= Jawaban Frekuensi Perjalanan Lainnya
i_7b_1	= Dalam rangka apa melakukan perjalanan ke MLYSIA/INA
i_7c_1	= Cara anda untuk berpergian ke MLYSIA/INA
i_7c_2	= Jawaban Cara Lainnya
i_7d_1	= Berapa biaya transportasi yang dikeluarkan ketika berpergian ke MLYSIA/INA
i_7e_1a	= Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Gas))
i_7e_1b	= Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Gula))
i_7e_1c	= Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Minyak Goreng))
i_7e_1d	= Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Susu))
i_7e_1e	= Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Telur))
i_7e_1f	= Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Bumbu(garam,belasan,asam)))

#### KETERANGAN DATA PRIMER

- l\_7e\_1g = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Makanan Ringan(Snack+Roti)))
- l\_7e\_1h = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Sayur))
- l\_7e\_1i = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Daging(ayam,ikan,asing))
- l\_7e\_1j = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (sembako(Mentega))
- l\_7e\_2 = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (barang elektronik)
- elektro = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (barang elektronik)
- l\_7e\_3 = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (pakaian)
- pakaian = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (pakaian)
- l\_7e\_4 = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (bahan bangunan)
- bangunan = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (bahan bangunan)
- l\_7e\_5 = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (lainnya)
- lainnya = Jika berbelanja ke Luar Negeri, produk yang paling sering dibeli (lainnya)
- l\_7f\_1 = Barang atau produk yang sering di jual (Durian)
- l\_7f\_1a = Barang atau produk yang sering di jual (Karet)
- l\_7f\_1b = Barang atau produk yang sering di jual (Coco/Coklat)
- l\_7f\_1c = Barang atau produk yang sering di jual (Petai)
- l\_7f\_1d = Barang atau produk yang sering di jual (Lada)
- l\_7f\_1e = Barang atau produk yang sering di jual (Kopi)
- l\_7f\_1f = Barang atau produk yang sering di jual (Sayur mayur)
- l\_7f\_1g = Barang atau produk yang sering di jual (Hasil Buruan)
- l\_7g\_1 = Pendapatan bersih perhari
- l\_7g\_2 = Jawaban Pendapatan ke Mlysia/ INA Lainnya
- l\_7h = Mata uang yang sering digunakan
- l\_7i = Alasan menggunakan mata uang tersebut
- l\_7j = Ketergantungan pada daerah tetangga (MLYSIA/INA)
- l\_7k\_1 = Apakah perbatasan menyulitkan kehidupan anda sehari-hari
- l\_7k\_2 = Contoh kendala
- k\_1 = Apakah Pem Kab Sambas pernah mensosialisasikan Program Pembangunan PALSA
- k\_2 = Di Aruk (Sajingan) akan segera di buka Pos Pemerksaan Lintas Batas (PPLB)
- k\_3 = Jika tahu, dari mana informasi ini diperoleh
- k\_4a = Apakah ada lahan/Asset RT yang digunakan dalam Program Pembangunan PALSA
- k\_4b = Jika ada, apa saja ?
- k\_4c = Apakah ada ganti rugi dari pemerintah ?
- k\_4d = Jika ada, apakah ganti rugi tersebut sesuai ?
- k\_4e = Jika tidak, usaha apa yang dilakukan ?
- k\_5 = Apakah responden merasa dilibatkan dalam Program Pengembangan dan Pembangunan PALSA
- k\_6 = Bentuk keterlibatan responden dalam PALSA



Data yang digunakan dalam pembentukan model

Kabupaten / Kota	Tahun	Variabel Terikat	Variabel Bebas					D
		Persentase Penduduk Miskin	PDRB per kapita	Rata - rata Lama Sekolah	Angka Harapan Hidup	Inflasi	% RT Pengguna Listrik	
		%	Rp.	Tahun	Tahun	%	%	
Sambas	2002	13.66	4,112,611.12	5.7	58.0	6.29	85.52	1
Sambas	2003	14.39	4,391,160.76	5.7	58.6	6.22	86.23	1
Sambas	2004	14.46	4,570,110.47	5.7	59.1	7.70	84.43	1
Sambas	2005	15.10	4,777,299.05	5.9	60.1	7.75	88.88	1
Sambas	2006	16.77	4,912,115.85	5.9	60.3	8.65	90.47	1
Bengkayang	2002	16.92	4,075,502.41	5.9	67.1	3.84	74.36	1
Bengkayang	2003	17.63	4,233,735.48	5.6	67.2	6.02	60.03	1
Bengkayang	2004	15.18	4,473,879.74	5.2	67.2	6.19	54.98	1
Bengkayang	2005	13.63	4,834,068.43	5.2	68.0	11.23	75.76	1
Bengkayang	2006	14.63	5,090,620.48	6.0	68.3	8.54	78.75	1
Sanggau	2002	12.77	7,882,711.56	5.7	66.3	10.30	48.02	1
Sanggau	2003	12.05	8,032,031.12	5.9	66.6	4.64	52.22	1
Sanggau	2004	10.93	8,215,823.05	6.1	66.9	2.88	45.36	1
Sanggau	2005	10.80	8,446,208.31	6.4	67.0	12.89	49.20	1
Sanggau	2006	11.56	8,963,107.76	6.4	67.5	6.83	53.04	1
Sintang	2002	21.55	5,343,769.72	5.4	66.6	10.61	32.89	1
Sintang	2003	18.74	5,397,747.19	5.5	66.8	5.65	44.57	1
Sintang	2004	16.61	5,468,094.88	5.5	67.0	6.25	48.46	1
Sintang	2005	19.86	5,559,009.16	5.7	67.4	7.44	45.69	1
Sintang	2006	20.93	5,704,168.39	6.2	67.5	6.66	42.91	1
Kapuas Hulu	2002	17.32	5,169,417.99	6.1	65.3	2.54	48.79	1
Kapuas Hulu	2003	16.93	5,346,514.66	6.6	65.6	0.49	68.55	1
Kapuas Hulu	2004	16.06	5,173,610.56	7.1	65.8	4.19	62.06	1
Kapuas Hulu	2005	16.90	5,125,657.23	7.1	65.9	4.56	60.83	1
Kapuas Hulu	2006	17.76	5,223,881.40	7.1	66.2	9.88	59.60	1
Landak	2002	27.02	4,014,944.31	6.5	63.3	1.07	33.57	0
Landak	2003	27.19	4,062,755.67	6.4	63.6	5.60	27.49	0
Landak	2004	24.68	4,197,396.09	6.2	63.8	5.56	27.24	0
Landak	2005	25.87	4,313,032.61	6.3	64.0	7.30	33.42	0
Landak	2006	27.82	4,479,867.28	6.9	64.5	5.67	39.59	0
Pontianak	2002	12.41	6,054,509.42	6.2	66.1	5.88	75.72	0
Pontianak	2003	11.25	6,699,209.90	6.2	66.3	8.50	78.97	0
Pontianak	2004	11.45	6,679,225.04	6.2	66.5	5.60	82.28	0
Pontianak	2005	9.84	6,798,507.53	6.4	66.6	5.75	88.32	0
Pontianak	2006	10.95	6,937,394.66	6.4	67.0	4.18	94.36	0
Ketapang	2002	18.15	3,453,272.66	5.7	65.2	12.10	55.36	0
Ketapang	2003	18.49	3,572,505.76	5.7	65.5	6.26	55.48	0
Ketapang	2004	18.35	3,729,593.25	5.6	65.8	7.13	58.19	0
Ketapang	2005	19.23	4,281,445.70	5.7	66.5	9.67	56.82	0
Ketapang	2006	20.76	4,695,756.12	5.7	66.6	8.75	55.45	0
Kota Pontianak	2002	6.71	9,252,684.08	9.2	65.2	-3.64	99.01	0
Kota Pontianak	2003	7.17	9,737,204.83	8.9	65.5	7.41	97.20	0
Kota Pontianak	2004	6.47	10,056,818.56	8.5	65.8	4.67	97.86	0
Kota Pontianak	2005	6.84	10,386,144.90	8.6	66.1	10.89	98.19	0
Kota Pontianak	2006	7.15	10,745,038.76	9.1	66.5	4.38	98.52	0
Kota Singkawang	2002	8.82	5,308,301.71	6.0	65.8	4.21	83.80	0
Kota Singkawang	2003	11.12	5,308,301.71	6.1	66.1	4.13	86.10	0
Kota Singkawang	2004	9.78	5,542,648.60	6.1	66.4	6.00	91.43	0
Kota Singkawang	2005	10.33	5,831,294.67	6.2	66.4	10.01	91.48	0
Kota Singkawang	2006	8.32	6,140,672.18	6.7	66.7	6.94	91.54	0